



Rencana Pengembangan
Infrastruktur Wilayah 2025-2034

D.I. Yogyakarta



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.
- KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. RPIW Provinsi Aceh;
 2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. RPIW Provinsi Bengkulu;
6. RPIW Provinsi Riau;
7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. RPIW Provinsi Jambi;
9. RPIW Provinsi Lampung;
10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. RPIW Provinsi Banten;
17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. RPIW Provinsi Bali;
23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. RPIW Provinsi Gorontalo;
26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. RPIW Provinsi Maluku;
33. RPIW Provinsi Papua;
34. RPIW Provinsi Papua Barat;
35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,

disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. pendahuluan;
2. arah kebijakan;
3. profil wilayah dan potensi daerah;
4. profil dan kinerja infrastruktur;
5. permasalahan dan isu strategis;
6. skenario pengembangan wilayah;
7. analisis kebutuhan infrastruktur;
8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

- KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.
- KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



M. BASUKI HADIMULJONO

Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PUPR. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PUPR terbangun.

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PUPR dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 17 April 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



YUDHA MEDIAWAN

Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PUPR yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PUPR periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PUPR terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Yudha Mediawan



Tim Pengarah:

Yudha Mediawan
Rachman Arief Dienaputra
Melva Eryani Marpaung
Kuswardono

Tim Penyusun:

Entatarina Simanjuntak
Dina Rachmayati
Vemi Asa Hardini
Charlie Lady Beauty Afriesta
Safira Az-Zahra Pramaishma
Norma Aji Cemara
Jayanti Kusuma Wardhani
Indra Jaya Kusuma

Tim Peninjau:

Anggar Lugastama



Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung G BPIW – Penyediaan Perumahan Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12110
www.bpiw.pu.go.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR PETA	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan dalam Kebijakan.....	2
1.3 Urgensi Penyusunan	3
1.4 Muatan RPIW.....	4
1.5 Manfaat RPIW	5
1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	5
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN.....	7
2.1 Kebijakan Penataan Ruang	7
2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	7
2.1.2 Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa-Bali.....	8
2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) D.I. Yogyakarta	10
2.1.4 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Prambanan.....	11
2.2 Kebijakan Sektor	13
2.2.1 Visi Indonesia 2045	13
2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ..	14
2.2.3 Proyek Strategis Nasional (PSN)	15
2.2.4 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010 – 2025	16
2.2.5 Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.....	16
2.2.6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta	17
2.2.7 Visium PUPR 2030.....	18
2.2.8 Rencana Strategis Kementerian PUPR	19
2.2.9 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta	19
2.2.10 ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	20
2.2.11 Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992	21
2.3 Agenda Global.....	21
2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	23
2.4.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	24
2.4.2 Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas.....	28
BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH	31
3.1 Profil Fisik dan Kebencanaan	31
3.1.1 Profil Administrasi.....	31
3.1.2 Profil Topografi	33
3.1.3 Profil Geologi	33
3.1.4 Profil Klimatologi	35
3.1.5 Profil Hidrologi	35
3.1.6 Jasa Ekosistem.....	35
3.1.7 Tutupan Lahan.....	36
3.1.8 Kerawanan Bencana.....	42
3.2 Profil Demografi.....	46
3.2.1 Profil Kependudukan.....	46
3.2.2 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	48
3.2.3 Pengangguran	49
3.2.4 Kemiskinan.....	49
3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	50
3.3 Profil Ekonomi	51
3.3.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	51
3.3.2 Pendapatan Per Kapita.....	52
3.3.3 Sektor Ekonomi Unggulan	52

3.3.4	Perkembangan Investasi.....	58
3.3.5	Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).....	60
3.4	Profil Sosial Budaya	61
3.5	Profil Interaksi Antarkawasan	64
BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR		66
4.1	Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	66
4.1.1	Infrastruktur Penyediaan Air Baku	66
4.1.2	Infrastruktur Penyediaan Irigasi	68
4.1.3	Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	69
4.2	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan	72
4.2.1	Infrastruktur Jaringan Jalan.....	72
4.2.2	Infrastruktur Jembatan.....	73
4.2.3	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritaas	75
4.3	Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman	76
4.3.1	Infrastruktur Air Minum	76
4.3.2	Infrastruktur Sanitasi.....	78
4.3.3	Kawasan Kumuh	80
4.3.4	Cagar Budaya	83
4.3.5	Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Prioritas.....	84
4.4	Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan.....	86
4.4.1	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	86
4.4.2	<i>Backlog</i> Perumahan.....	86
4.4.3	Rumah Khusus.....	87
4.4.4	Rumah Susun.....	87
4.5	Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR	89
4.5.1	Infrastruktur Perhubungan.....	89
4.5.2	Infrastruktur Jaringan Energi	89
4.5.3	Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi	89
BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....		92
BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH		97
6.1	Proyeksi Pertumbuhan	97
6.1.1	Proyeksi Demografi	97
6.1.2	Proyeksi Ekonomi.....	99
6.1.3	Keberlanjutan Lingkungan	101
6.2	Visi dan Strategi.....	103
6.2.1	Perumusan Vlsi Wilayah.....	103
6.2.2	Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata.....	104
6.3	Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan).....	110
6.3.1	Penentuan Kawasan Prioritas	110
6.3.2	Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas	112
BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		114
7.1	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah.....	114
7.1.1	Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi D.I. Yogyakarta	114
7.1.2	Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata.....	123
7.2	Analisis Keterpaduan Infrastruktur.....	144
BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.....		152
8.1	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR	153
8.1.1	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	153
8.1.2	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	157
8.1.3	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	161
8.1.4	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	174
8.2	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur.....	177
BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW		201
9.1	Latar Belakang.....	201
9.2	Tujuan	202
9.3	Jenis Pemantauan dan Evaluasi	202

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi D.I. Yogyakarta	16
Tabel 2.2. Target Renstra Kementerian PUPR	19
Tabel 2.3. Agenda Global	22
Tabel 2.4. Rumusan Arahan Kebijakan di Provinsi D.I. Yogyakarta	25
Tabel 2.5. Pemanfaatan PSN dan <i>Major Project</i> RPJMN	30
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta	46
Tabel 3.2 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Provinsi D.I. Yogyakarta	50
Tabel 3.3 Pendapatan Per Kapita Provinsi D.I. Yogyakarta (2018-2022)	52
Tabel 3.4 Jumlah Industri Pengolahan di Provinsi D.I. Yogyakarta	53
Tabel 3.5 Interaksi Antar-KSPN di Provinsi D.I. Yogyakarta	64
Tabel 3.6 Interaksi Antar Hub dan KSPN di Provinsi D.I. Yogyakarta	65
Tabel 4.1 Sumber Air Baku Provinsi DIY	67
Tabel 4.2 Luas DI dan LP2B Provinsi DIY	68
Tabel 4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas	75
Tabel 4.4 Profil Akses Air Minum Aman dan Layak Provinsi DIY	77
Tabel 4.5 Layanan PDAM di Provinsi DIY	77
Tabel 4.6 Rencana Pembagian SPAM Provinsi DIY	78
Tabel 4.7 Layanan Persampahan Provinsi DIY Tahun 2019	79
Tabel 4.8 Layanan Sanitasi Provinsi DIY	79
Tabel 4.9 Kinerja Infrastruktur Sanitasi Provinsi DIY	80
Tabel 4.10 Kawasan Kumuh Provinsi DIY Tahun 2020	80
Tabel 4.11 Infrastruktur Permukiman Prioritas Provinsi D.I. Yogyakarta	84
Tabel 4.12 RTLH di Provinsi DIY Tahun 2020	86
Tabel 4.13 <i>Backlog</i> Provinsi DIY Tahun 2021	86
Tabel 4.14 Rumah Khusus Provinsi D.I. Yogyakarta	87
Tabel 4.15 Rumah Susun Provinsi D.I. Yogyakarta	87
Tabel 5.1 Rumusan Isu Strategis Provinsi D.I. Yogyakarta	94
Tabel 6.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi DIY	98
Tabel 6.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi DIY	98
Tabel 6.3 Proyeksi Wisatawan Provinsi DIY	99
Tabel 6.4 Proyeksi Nilai PDRB ADHK Provinsi DIY	99
Tabel 6.5 Proyeksi Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Provinsi DIY Tahun 2029	100
Tabel 6.6 Proyeksi Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Strategis Provinsi DIY	101
Tabel 6.7 Analisis <i>PESTLE</i> (Makro) Fokus Pariwisata	106
Tabel 6.8 Analisis 5 FORCES (Meso) Fokus Pariwisata	107
Tabel 6.9 Analisis SWOT Fokus Pariwisata	107
Tabel 6.10 <i>Scoring Strengths</i> dan <i>Weaknesses</i> Fokus Pariwisata	108
Tabel 6.11 <i>Scoring Opportunities</i> dan <i>Threats</i> Fokus Pariwisata	109
Tabel 6.12 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata	111
Tabel 6.13 Penilaian Kawasan Fokus Pariwisata	111
Tabel 6.14 Tahapan pengembangan kawasan prioritas di D.I. Yogyakarta	112
Tabel 6.15 Deliniasi Kawasan Prioritas 2025-2034 Provinsi DIY	112
Tabel 7.1 Perhitungan Peningkatan Kapasitas Tampung Bendungan	114
Tabel 7.2 Waktu Tempuh Rata-Rata Jalan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta	115
Tabel 7.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta	116
Tabel 7.4 Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga Menurut Kategori Kota	117
Tabel 7.5 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Perkotaan Provinsi D.I. Yogyakarta	117
Tabel 7.6 Proyeksi Penyediaan Air Bersih Provinsi D.I. Yogyakarta	118
Tabel 7.7 Proyeksi Timbulan Air Limbah Provinsi D.I. Yogyakarta	118
Tabel 7.8 Proyeksi Layanan Air Limbah Provinsi D.I. Yogyakarta	119
Tabel 7.9 Proyeksi Layanan Sanitasi Aman Provinsi D.I. Yogyakarta	119
Tabel 7.10 Timbulan Sampah Rumah Tangga Menurut Kategori Kota	121
Tabel 7.11 Proyeksi Timbulan Sampah Provinsi D.I. Yogyakarta	121
Tabel 7.12 Proyeksi Layanan Persampahan Provinsi D.I. Yogyakarta	121
Tabel 7.13 Tingkat Kepemilikan Rumah di Provinsi D.I. Yogyakarta	122
Tabel 7.14 Proyeksi Penyediaan Perumahan di Provinsi D.I. Yogyakarta	123
Tabel 7.15 Proyeksi Penduduk dan Wisatawan Pada Kawasan Prioritas	125
Tabel 7.16 <i>Relevant Road For Tourism</i>	127
Tabel 7.17 Proyeksi VCR KSPN Prioritas Provinsi D.I. Yogyakarta	128
Tabel 7.18 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KSPN Yogyakarta	132
Tabel 7.19 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KSPN Prambanan-Kalasan	133
Tabel 7.20 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Air Minum KSPN Pansela DIY Dsk	134
Tabel 7.21 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KSPN Karst Gunungkidul Dsk	136
Tabel 7.22 Proyeksi Kebutuhan Persampahan KSPN Yogyakarta Kota dsk	137
Tabel 7.23 Proyeksi Kebutuhan Persampahan KSPN Prambanan - Kalasan dsk	138

Tabel 7.24 Proyeksi Persampahan KSPN Pansela DIY dsk.....139

Tabel 7.25 Timbulan Lumpur Tinja KSPN Yogyakarta Kota Dsk.....141

Tabel 7.26 Gap Sanitasi KSPN Yogyakarta Kota Dsk.....141

Tabel 7.27 Timbulan Lumpur Tinja KSPN Prambanan-Kalasan Dsk.....142

Tabel 7.28 Gap Sanitasi KSPN Prambanan - Kalasan Dsk.....142

Tabel 7.29 Timbulan Lumpur Tinja KSPN Pansela DIY dsk142

Tabel 7.30 Gap Sanitasi KSPN Pansela DIY dsk143

Tabel 7.31 Timbulan Lumpur Tinja KSPN Karst Gunungkidul dsk.143

Tabel 7.32 Gap Sanitasi KSPN Karst Gunungkidul Dsk.....143

Tabel 7.33 Analisis Keterpaduan Infrastruktur..... 146

Tabel 7.34 Matriks Keterpaduan Infrastruktur Prioritas Provinsi D.I. Yogyakarta..... 150

Tabel 8.1 Rencana Aksi Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi D.I. Yogyakarta....153

Tabel 8.2 Rencana Aksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi D.I. Yogyakarta .157

Tabel 8.3 Rencana Aksi Infrastruktur Cipta Karya Provinsi D.I. Yogyakarta161

Tabel 8.4 Rencana Aksi Infrastruktur Perumahan Provinsi D.I. Yogyakarta.....174

Tabel 8.5 Matriks Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur.....177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	3
Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW.....	6
Gambar 2.1 Delineasi KSN Prambanan.....	13
Gambar 2.2 <i>Timeline</i> Pemerataan Pembangunan Daerah	14
Gambar 2.3 Visium PUPR 2030.....	18
Gambar 3.1 Grafik Pertumbuhan Penduduk Provinsi DIY Tahun 2015-2030.....	47
Gambar 3.2 Piramida Penduduk Provinsi DIY	47
Gambar 3.3 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020	48
Gambar 3.4 Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Provinsi D.I. Yogyakarta	48
Gambar 3.5 Grafik TPT Provinsi D.I. Yogyakarta 2016-2020	49
Gambar 3.6 Grafik Penduduk Miskin Provinsi D.I. Yogyakarta	50
Gambar 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta	51
Gambar 3.8 Peta Sebaran Kawasan Industri di Provinsi D.I. Yogyakarta	53
Gambar 3.9 Perkembangan Nilai Ekspor Impor Provinsi D.I. Yogyakarta	54
Gambar 3.10 Sebaran Tujuan Ekspor Impor Provinsi D.I. Yogyakarta	54
Gambar 3.11 Produksi Padi Provinsi D.I. Yogyakarta 2020-2021	55
Gambar 3.12 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi D.I. Yogyakarta 2016-2020	55
Gambar 3.13 Sebaran Destinasi Wisatawan Domestik	56
Gambar 3.14 Sebaran Destinasi Wisatawan Mancanegara	57
Gambar 3.15 Sebaran <i>Geoheritage</i> Provinsi D.I. Yogyakarta	58
Gambar 3.16 Data Investasi Provinsi D.I. Yogyakarta 2018 – 2022 (Juta Rupiah)	59
Gambar 3.17 Realisasi Investasi D.I. Yogyakarta Berdasarkan Sektor (2020)	59
Gambar 3.18 Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2022	60
Gambar 3.19 Sebaran Cagar Budaya Nasional di Provinsi D.I. Yogyakarta	62
Gambar 3.20 Ragam Upacara Adat di Provinsi D.I. Yogyakarta	64
Gambar 3.21 Peta <i>Destination – Origin</i> Provinsi D.I. Yogyakarta	65
Gambar 4.1 Penyediaan Air Baku Provinsi DIY	67
Gambar 4.2 Sebaran Infrastruktur Ketahanan Bencana Provinsi DIY	70
Gambar 4.3 Sebaran Infrastruktur Jembatan Provinsi DIY	73
Gambar 4.4 Sebaran Cagar Budaya Nasional di Provinsi D.I. Yogyakarta	83
Gambar 5.1 Alur Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis	92
Gambar 6.1 Hasil <i>Multicriteria Analysis</i> Jasa Ekosistem Provinsi D.I. Yogyakarta	103
Gambar 6.2 Bagan Tahapan Analisis Penyusunan Strategi	105
Gambar 6.3 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata	110
Gambar 7.1 Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD	120
Gambar 7.2 Sebaran Infrastruktur Permukiman di KSPN Prioritas DIY	131
Gambar 8.1 Rangkuman Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur	152

DAFTAR PETA

Peta 2.1 Peta Sintesis Arah Kebijakan Provinsi D.I. Yogyakarta 27

Peta 3.1 Peta Administratif Provinsi D.I. Yogyakarta 32

Peta 3.2 Peta Topografi dan Geologi Provinsi D.I. Yogyakarta 34

Peta 3.3 Peta Hidrologi Provinsi D.I. Yogyakarta 37

Peta 3.4 Jasa Ekosistem Penyediaan Air Provinsi D.I. Yogyakarta 38

Peta 3.5 Jasa Ekosistem Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Provinsi DIY 39

Peta 3.6 Tutupan Lahan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011.....40

Peta 3.7 Tutupan Lahan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019..... 41

Peta 3.8 Peta Rawan Bencana Provinsi D.I. Yogyakarta 45

Peta 4.1 Infrastruktur Sumber Daya Air dan Ketersediaan Air D.I. Yogyakarta 71

Peta 4.2 Peta Kinerja Jalan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta 74

Peta 4.3 Peta Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi D.I. Yogyakarta 82

Peta 4.4 Profil Infrastruktur Perumahan Provinsi D.I. Yogyakarta..... 88

Peta 4.5 Peta Infrastruktur Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta90

Peta 4.6 Peta Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Provinsi D.I. Yogyakarta 91

Peta 6.1 Skenario Pengembangan Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta113

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini dijelaskan pokok-pokok penyusunan RPIW pada setiap wilayah perencanaan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Cakupannya meliputi: latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta.

1.1 Latar Belakang

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekuatan kebudayaan yang masih lestari hingga saat ini. Hal tersebut menjadi salah satu alasan keistimewaan tata pemerintahan Provinsi DIY yang dikepalai oleh sultan. Kebudayaan dan tradisi lokal masyarakat yang masih melekat menjadi daya tarik utama bagi pengembangan sektor pariwisata nasional maupun global. Dalam skala nasional, Provinsi DIY merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur yang menjadi agenda prioritas nasional 2020-2024. Selanjutnya dalam skala global, Candi Prambanan sebagai peninggalan sejarah Hindu Syiwa merupakan warisan dunia UNESCO (*World Heritage Site*).

Dengan keunikan daya tarik tersebut, minat kunjungan wisata ke Provinsi DIY sangat tinggi. Pada tahun 2019 (sebelum pandemi), jumlah wisatawan mencapai 28 juta orang (ke-6 tertinggi nasional). Seiring berkembangnya kegiatan pariwisata dan MICE di DIY, realisasi PMA sektor hotel dan restoran pada 2021 tercatat sebesar Rp 4,19 T dari Rp 22,69 Triliun PMA (18,5%) dan industri kreatif (tekstil dan komoditas berbahan kulit) menyumbang PMA sebesar Rp 1,07 Triliun.

Selain wisata budaya, Provinsi DIY juga memiliki potensi wisata alam dan belanja. Berdasarkan RIPPARNAS, terdapat 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu KSPN Yogyakarta Kota dsk, KSPN Prambanan-Kalasan dsk, KSPN Pansela DIY dsk, KSPN Karst Gunungkidul dsk, dan KSPN Merapi-Merbabu dsk. KSPN Karst Gunungkidul dsk merupakan bagian dari *Gunung Sewu UNESCO Global Geopark*, yang mempunyai bentang alam karst, pantai, gua, gunung purba, dan sungai bawah tanah. Potensi pengembangan pariwisata DIY didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (YIA), Bandara Adisucipto, dan Stasiun Yogyakarta sebagai pintu masuk wisatawan.

Dalam pengembangan pariwisata Provinsi DIY dihadapkan pada berbagai isu permasalahan, diantaranya konsentrasi aktivitas wisata di Kota Yogyakarta, tingginya risiko bencana, dan melemahnya nilai tradisi akibat modernisasi. Aktivitas wisata yang berpusat di Kota Yogyakarta menimbulkan permasalahan kemacetan lalu lintas dan tingginya kebutuhan sarana dan prasarana wisata. Selanjutnya, risiko bencana letusan Gunung

Merapi dan potensi tsunami/abrasi Pantai Selatan menjadi tantangan pengembangan pariwisata. Selain itu, urbanisasi dan modernisasi di kawasan perkotaan dapat berpengaruh pada berkurangnya keunikan wisata budaya.

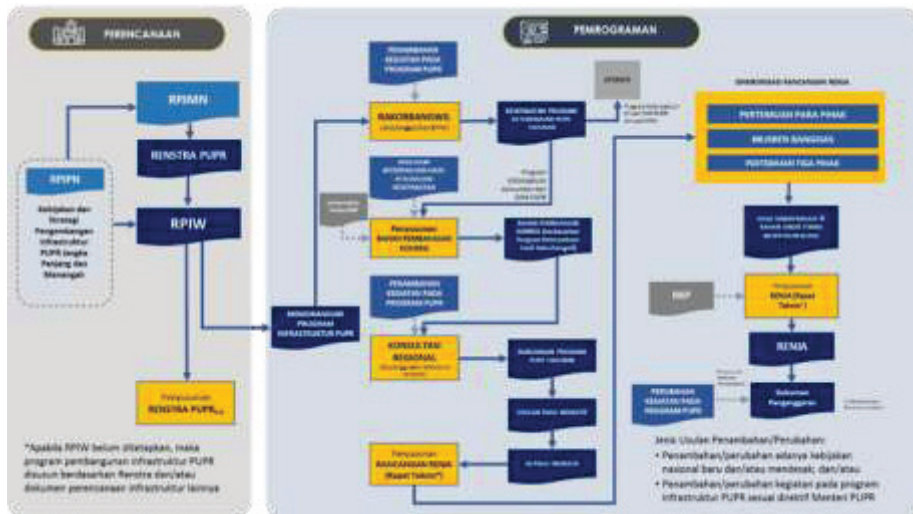
Untuk memperkuat dan mengatasi permasalahan pengembangan sektor pariwisata DIY, diperlukan keterlibatan berbagai pihak baik pusat, daerah, maupun masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta mitigasi dampak risiko bencana. Untuk memastikan keterlibatan semua sektor diperlukan suatu acuan perencanaan secara terpadu. Untuk itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II melakukan Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi DIY sebagai acuan dalam perencanaan dan pemrograman khususnya infrastruktur PUPR.

1.2 Kedudukan dalam Kebijakan

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dalam Peraturan Menteri PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPIW diberikan tugas untuk menyusun dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Muatan dokumen RPIW Provinsi DIY terdiri atas Arah Kebijakan, Profil Wilayah dan Potensi Daerah, Profil dan Kinerja Infrastruktur, Permasalahan dan Isu Strategis, Skenario Pengembangan Wilayah, Analisis Kebutuhan Infrastruktur, dan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur. Dokumen RPIW telah disusun dengan melibatkan unsur dari kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Unit Organisasi di Kementerian PUPR, sehingga diharapkan dokumen RPIW akan menjadi masukan Rencana Strategis PUPR periode mendatang dan memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rakorbangwil. Dokumen ini akan dilakukan peninjauan dengan memperhatikan dinamika kebijakan dan lingkungan strategis.

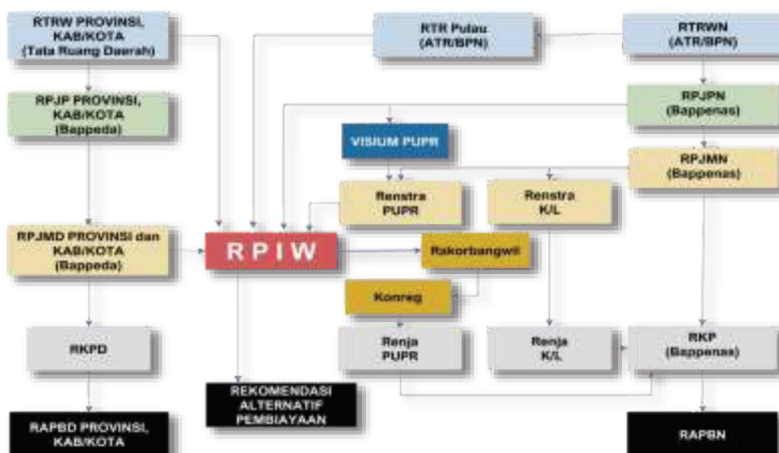
Dokumen RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan input bagi penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan acuan dalam perumusan Memorandum Program Infrastruktur PUPR yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) setiap tahunnya. Memorandum Program Rakorbangwil kemudian dibahas dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang menghasilkan rancangan program tahunan Kementerian PUPR.



Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Kerangka Peraturan Menteri PUPR tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PUPR

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

Dalam penyusunan RPIW Provinsi DIY, kebijakan dan strategi pada dokumen perencanaan nasional dan daerah menjadi acuan dasar dalam menentukan arah pengembangan wilayah. Kebijakan tersebut mencakup arahan terkait aspek spasial dan sektoral baik jangka Panjang maupun jangka menengah.



Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

1.3 Urgensi Penyusunan

Pembangunan infrastruktur PUPR harus dapat mendorong, mendukung pemerataan dan pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Dukungan ini dapat diwujudkan dengan **pembangunan infrastruktur yang sinergi dan terpadu secara internal PUPR dan lintas sektor**. Dokumen RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu lintas sektor pada tingkat nasional dan daerah.

Selain sebagai acuan pembangunan infrastruktur yang terpadu, dokumen RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta juga dapat menjadi alat untuk memprioritaskan penanganan kawasan dan dukungan program infrastruktur di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi salah satu solusi dalam menghadapi keterbatasan pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

1.4 Muatan RPIW

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi D.I. Yogyakarta memuat 9 Bab dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;
2. **Arah Kebijakan**, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam visium PUPR 2030 serta agenda global;
3. **Profil Wilayah dan Potensi Daerah**, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
4. **Profil dan Kinerja Infrastruktur**, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur PUPR dan non-PUPR;
5. **Permasalahan dan Isu Strategis**, meliputi potensi/keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
6. **Skenario Pengembangan Wilayah**, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritas);
7. **Analisis Kebutuhan Infrastruktur**, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
8. **Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur**, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam jangka

waktu 2025 - 2034 beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan

9. **Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW**, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5 Manfaat RPIW

Terdapat 3 manfaat RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu:

1. Memadukan kebijakan lintas sektor di tingkat nasional dan daerah untuk merumuskan strategi dan program pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien di Provinsi D.I. Yogyakarta;
2. Memadukan proses perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PUPR di Provinsi D.I. Yogyakarta dalam jangka waktu 2025-2034; dan
3. Menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan lainnya.

1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Tahapan utama dalam penyusunan RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri dari 5 tahapan, yaitu: persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan skenario pengembangan, dan penyusunan rencana aksi.

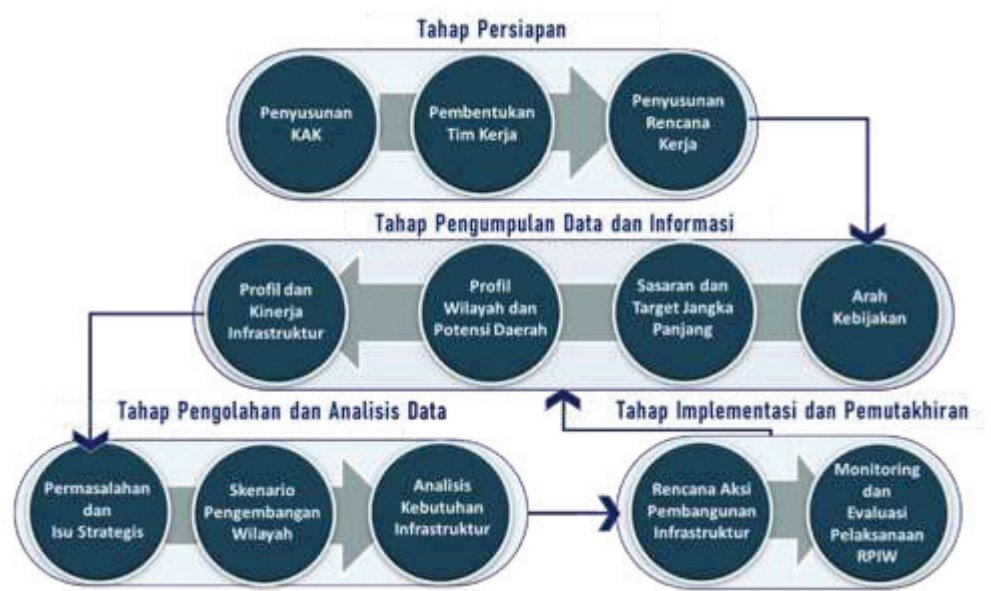
Pada tahap persiapan, dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), pembentukan tim kerja, dan penyusunan rencana kerja. Tahap pengumpulan data dan informasi dimulai dengan perumusan arah kebijakan berdasarkan tinjauan terhadap berbagai dokumen kebijakan baik secara spasial dan sektoral. Perumusan arah kebijakan akan menghasilkan fokus perencanaan dan sasaran jangka panjang pengembangan wilayah Provinsi DIY. Setelah perumusan arah kebijakan, akan disusun profil wilayah dan profil infrastruktur yang sesuai dengan fokus perencanaan.

Tahapan selanjutnya, yaitu proses pengolahan dan analisis data yang dimulai dari perumusan permasalahan dan isu strategis berdasarkan arah kebijakan, kondisi eksisting wilayah, dan potensi pengembangan di masa mendatang. Berikutnya adalah penyusunan skenario pengembangan wilayah yang menghasilkan *grand strategy* masing-masing fokus perencanaan untuk menjawab isu permasalahan dan mewujudkan sasaran jangka panjang. Analisa penyusunan *grand strategy* yang digunakan adalah analisa PESTLE & 5 FORCES dan IFAS EFAS. Dalam penyusunan skenario juga dilakukan penentuan kawasan prioritas dengan metode *multi criteria analysis* (MCA) sesuai dengan fokus perencanaan yang akan diprioritaskan sampai dengan tahun 2034. Pada kawasan prioritas terpilih kemudian

dilakukan perhitungan terkait kebutuhan infrastruktur berdasarkan strategi yang telah dihasilkan.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah penyusunan rencana aksi pembangunan infrastruktur dan monitoring-evaluasi pelaksanaan. *Grand strategy* yang dihasilkan dari skenario pengembangan wilayah akan diturunkan ke dalam program-program yang memuat rencana aksi yang terpadu antar sektor. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pelaksanaan rencana aksi dan mendapatkan umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya.

Secara sistematis, kerangka pikir penyusunan RPIW dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

BAB 2 ARAH KEBIJAKAN

Suatu arah kebijakan sangat diperlukan sebagai panduan dalam mencapai suatu tujuan, dalam bab ini dijelaskan arah kebijakan yang memuat sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global. Juga dalam bab 2 ini berisi tentang uraian kebijakan spasial dan sektoral baik tingkat nasional maupun tingkat daerah yang menjadi acuan perumusan sintesis kebijakan pengembangan wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Arah kebijakan inilah yang menjadi landasan dalam perumusan skenario pengembangan wilayah (Bab 6).

2.1 Kebijakan Penataan Ruang

Subbab ini berisi poin penting Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 13 Tahun 2017), Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali (Perpres No. 28 Tahun 2019), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi D.I. Yogyakarta (Perda D.I. Yogyakarta No. 5 Tahun 2019 tentang RTRW D.I. Yogyakarta Tahun 2019-2039).

2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

RTRWN mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu sistem perkotaan, penguatan konektivitas dan logistik (pengembangan jaringan jalan dan simpul transportasi), wilayah sungai, kawasan lindung, kawasan andalan, serta Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Terkait sistem perkotaan, terdapat 1 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 2 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKN Yogyakarta berfungsi sebagai simpul utama transportasi skala nasional dan melayani beberapa provinsi. Sementara itu, kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKW adalah PKW Bantul dan PKW Sleman yang berfungsi pusat kegiatan skala provinsi atau melayani beberapa kabupaten/kota.

Untuk penguatan konektivitas dan logistik di Provinsi DIY, RTRWN menetapkan rencana pengembangan jalan bebas hambatan (JBH) dan simpul transportasi. Terdapat dua rencana pembangunan JBH yaitu ruas tol Yogyakarta – Solo, tol Yogyakarta– Bawen, dan tol Yogyakarta – Kulon Progo. Simpul transportasi di D.I. Yogyakarta berupa bandara pengumpul primer yaitu Bandara Adisucipto dan Bandara Kulon Progo. Tidak ada pelabuhan nasional di Provinsi DIY.

Terkait pengelolaan sumber daya air, terdapat 1 Wilayah Sungai (WS) yang ditetapkan RTRWN yaitu WS Progo-Opak-Serang dan 1 WS lintas provinsi yaitu WS Serayu-Bogowonto.

RTRWN juga menetapkan kawasan lindung berupa suaka margasatwa, cagar alam, kawasan bentang alam, taman nasional, taman hutan rakyat, dan taman wisata alam. Kawasan lindung tersebut adalah Suaka Margasatwa Paliyan dan Sermo, Cagar Alam Mangunan/Imogiri dan Gunung Batu Gamping, Kawasan Bentang Alam Gunung Sewu, Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Hutan Rakyat Gunung Bunder, serta Taman Wisata Alam Gunung Batu Gamping.

Selain itu, ditetapkan pula kawasan andalan Provinsi DIY berupa Kawasan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan berupa pariwisata, pertanian, industri, perikanan dan pertambangan. Terdapat 2 Kawasan Strategis Nasional di Provinsi DIY yaitu Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Kawasan Candi Prambanan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arahan kebijakan RTRWN terhadap pengembangan wilayah Provinsi DIY mencakup **peningkatan akses perkotaan dan pengembangan kawasan berbasis pariwisata, pertanian, industri, perikanan dan pertambangan** yang didukung **penguatan konektivitas dan simpul transportasi** dengan tetap **mempertahankan fungsi kawasan lindung**.

2.1.2 Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa-Bali

RTR Pulau Jawa-Bali mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu tujuan penataan ruang, penguatan konektivitas dan keterpaduan simpul transportasi antarmoda, jaringan energi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Berdasarkan PP No 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, tujuan penataan ruang Pulau Jawa-Bali adalah untuk mewujudkan Pulau Jawa sebagai lumbung pangan utama nasional; kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; sebagai pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan; pemanfaatan potensi perikanan, perkebunan, dan kehutanan secara berkelanjutan; pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional; pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran; kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan; Pulau Jawa bagian selatan yang berkembang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana; serta jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing.

Pulau Jawa ditetapkan sebagai lumbung pangan utama nasional. Di Provinsi DIY, PKW Bantul dan PKW Sleman berperan sebagai lahan pertanian tanaman pangan. Agar tidak bertentangan dengan fungsinya sebagai lumbung pangan, maka pengembangan perkotaan di Provinsi DIY sebaiknya berbentuk kompak, berbasis mitigasi bencana, dan adaptif terhadap bencana, mengingat Provinsi DIY berada di Jawa bagian selatan

yang pengembangannya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kerawanan bencana.

Provinsi DIY juga ditetapkan sebagai pusat pariwisata berdaya saing internasional dengan industri kreatif di Kota Yogyakarta. Provinsi DIY merupakan PKN yang, bersama dengan PKN Surakarta, menjadi satu kesatuan tujuan pariwisata di Pulau Jawa-Bali. Selain itu, PKN Yogyakarta juga ditetapkan sebagai pusat kegiatan MICE (*meeting, incentive, convention, exhibition*).

Dalam RTRW Pulau Jawa-Bali mengatur sistem jaringan transportasi nasional di Provinsi DIY meliputi jaringan jalan arteri primer Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa ruas Wates-Yogyakarta, jaringan jalan kolektor primer Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa ruas Yogyakarta-Wonosari-Rongkop, jaringan jalan strategis nasional Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa ruas Parangtritis-Tlagawarak-Legundi-Kanigoro-Baron-Tepus-Jerukwudel-Rongkop (Baron), jaringan jalan arteri primer meliputi Jalan Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta dan Jalan Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro, dan jaringan jalan kolektor primer ruas Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis.

Selain itu, diatur pula pengembangan keterpaduan antarmoda transportasi darat dan udara melalui pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan mendukung PKN Yogyakarta-PKN Surakarta, jaringan jalan arteri primer penghubung PKN Yogyakarta – Bandar Udara Adisutjipto, serta jalan bebas hambatan Solo-Yogyakarta-Bawen dan Cilacap-Yogyakarta.

Terkait sistem jaringan sumber daya air di Provinsi DIY terdapat 1 WS (Progo-Opak-Serang) dan 2 waduk (Sermo dan Tambak Boyo). Pengelolaan SDA diarahkan pada rehabilitasi DAS kritis Progo dan Opakpeningkatan fungsi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada DI untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di DI Tuk Kuning, DI Karangtalun, dan DI Kalibawang.

Untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup, terdapat arahan untuk mempertahankan kawasan lindung di 3 kabupaten, pengendalian alih fungsi lahan CAT Wonosari, pengendalian pemanfaatan sempadan Sungai Opak dan Progo, pengendalian pemanfaatan sempadan Waduk Sermo dan Sapon.

Pengembangan sektor perumahan di Provinsi DIY diarahkan untuk optimalisasi ruang Kota Yogyakarta secara kompak, vertikal, hemat energi dan sumber daya; pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Sleman dan Bantul secara horizontal dan mengelompok untuk perkotaan sedang dan Kawasan perkotaan kecil; pengendalian *urban sprawl* di sepanjang jalan arteri dan kolektor primer; serta pengembangan permukiman berbasis mitigasi bencana di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam RTR Pulau Jawa-Bali dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan sebagai **lumbung pangan utama nasional, kawasan perkotaan, industri/perdagangan**, dan **pariwisata** yang berdaya saing internasional, yang didukung oleh **konektivitas** perkotaan dan lintas selatan, **pengembangan perkotaan** dengan optimalisasi ruang, dan **sumber daya air** dengan memperhatikan **kawasan lindung** dan **kawasan rawan bencana**.

2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) D.I. Yogyakarta

Perda Provinsi D.I. Yogyakarta No. 5 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY Tahun 2019-2039 mengatur berbagai aspek pembangunan terutama dalam hal tujuan pembangunan, sistem perkotaan, konektivitas dan aksesibilitas, sistem jaringan energi, wilayah sungai dan ketersediaan air, kawasan lindung, cagar budaya, dan kerawanan bencana.

Pembangunan wilayah Provinsi DIY bertujuan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antarsektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang Provinsi DIY, dan lingkungan.

Terkait sistem perkotaan, terdapat 1 PKN yaitu PKN Yogyakarta dengan delineasi meliputi Kota Yogyakarta, Kecamatan Depok, sebagian Kecamatan Ngaglik, sebagian Kecamatan Mlati, sebagian Kecamatan Godean, sebagian Kecamatan Gamping, sebagian Kecamatan Ngemplak, sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon, dan sebagian Kecamatan Banguntapan. Selain itu, juga ditetapkan 2 PKW yaitu PKW Bantul dan PKW Sleman, serta ditetapkan pula 19 PKL.

Untuk meningkatkan aksesibilitas di Provinsi DIY terdapat jaringan jalan nasional, jalan bebas hambatan, jalan provinsi, dan jalan strategis provinsi yang didukung dengan simpul transportasi berupa 4 terminal penumpang. Diatur pula rencana peningkatan aksesibilitas jaringan kereta api bandara baru Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, rel kereta api *double track* Jakarta-Yogyakarta-Surabaya, kereta api metropolitan Yogyakarta-Solo-Semarang, reaktivasi jalur kereta api Yogyakarta-Magelang, dan jalur kereta api bandara baru-Samas-Parangtritis. Untuk mendukung pengembangan kawasan berorientasi transit (*TOD/Transit Oriented Development*) di 9 stasiun. Terdapat dua bandara pengumpul primer di Provinsi DIY yaitu Bandara di Kecamatan Temon dan Bandara Adisutjipto.

Wilayah sungai di Provinsi DIY meliputi WS Progo-Opak-Serang, yang didukung dengan 5 CAT (cekungan air tanah). Terdapat 35 daerah irigasi (DI) lintas kabupaten/kota dan 6 DI kabupaten/kota. Penyediaan air baku Provinsi DIY berasal dari suplai Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Serang, Waduk Sermo, Waduk Bener, Sungai Bawah Tanah Bribin, Seropan, Ngobaran, Baron, air tanah, dan penampungan air hujan. Distribusi air minum di Provinsi DIY dilaksanakan dengan adanya SPAM Regional

Kartamantul, SPAM Regional Panjatan, SPAM Regional KAPET Kulon Progo, SPAM Regional Sistem Banyusoco/Sungai Oyo, dan SPAM Regional Sistem Sungai Bawah Tanah Gunungkidul. Pelayanan limbah dilayani oleh IPAL Regional Sewon, tempat pemrosesan akhir sampah regional di Kecamatan Piyungan Bantul, Kecamatan Nanggulan dan Kecamatan Pengasih Kulon Progo, dan Kecamatan Wonosari Gunungkidul.

Kawasan lindung di Provinsi DIY meliputi cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan rakyat, taman wisata alam, cagar alam geologi, dan kawasan perlindungan air tanah di 3 bentang alam karst. Di antara kawasan lindung tersebut, Taman Nasional Gunung Merapi dan cagar alam geologi (terutama Karst dan Gumuk Pasir) menjadi perhatian utama. Selain itu, kawasan cagar budaya Provinsi DIY yang terdiri dari Prambanan, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Kota Baru, Imogiri, dan Kerto-Pleret menjadi prioritas pengembangan.

Provinsi DIY berada di kawasan rawan bencana alam geologi yaitu letusan gunung api di sisi utara, rawan bencana tanah longsor, tsunami, gelombang pasang, banjir, gempa bumi dan kekeringan. Rawan gelombang pasang dan tsunami berada di sepanjang pesisir selatan Provinsi DIY.

Dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam RTRW Provinsi DIY dapat disimpulkan bahwa pengembangan Provinsi DIY diarahkan sebagai **pusat pelayanan perkotaan berbasis budaya dan pendidikan** serta **daerah tujuan wisata** yang berdaya saing dengan memperhatikan **daya dukung lingkungan dan kebencanaan**, serta didukung dengan **konektivitas regional dan antarkawasan**.

2.1.4 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Prambanan

RTR ini disusun sebagai alat operasionalisasi RTRWN dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Candi Prambanan untuk menjamin kelestarian Kawasan Candi Prambanan sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia. RTR KSN Prambanan berfungsi sebagai pedoman pembangunan, pemanfaatan ruang, keterpaduan, dan pengelolaan Kawasan Candi Prambanan.

RTR KSN Prambanan menetapkan delineasi seluas 81 km² mencakup 4 kepanewonan di Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta dan 3 kecamatan Provinsi Jawa Tengah. Delineasi tersebut mempertimbangkan kebutuhan perlindungan candi-candi di sekitar Prambanan, sebaran potensi cagar budaya yang belum tergali, pengendalian bentang pandang ke arah Gunung Merapi.

RTR KSN Prambanan disusun dengan tujuan untuk menjamin upaya pelestarian Kawasan Candi Prambanan sebagai warisan budaya yang selaras dengan pengembangan ekonomi lokal masyarakat dengan tetap memenuhi keseimbangan ideologis, akademis dan ekologis. Kebijakan

penataan ruang di Kawasan Candi Prambanan meliputi: 1) perlindungan situs warisan budaya, 2) pengendalian pertumbuhan kawasan perkotaan, 3) pelestarian nuansa pedesaan, 4) peningkatan ekonomi masyarakat melalui wisata budaya berbasis kearifan lokal, dan 5) peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan.

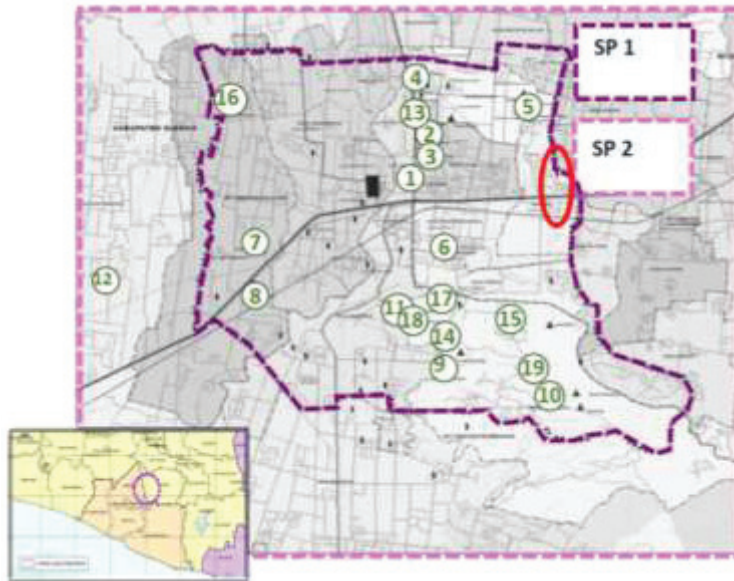
RTR KSN Candi Prambanan membagi kawasan ke dalam dua zona sub-pelestarian (SP), yaitu SP-1 dan SP-2. SP -1 merupakan zona inti yang perlu diprioritaskan pengendalian pengembangannya untuk melindungi bentang pandang dan lanskap pedesaan sebagai *outstanding universal value* (OUV) Kawasan Candi Prambanan. Sedangkan, SP-2 menjadi zona penyangga, dimana terdapat 18 buah situs cagar budaya yang sudah terzonasi.

Terdapat 5 tema pengembangan Kawasan Candi Prambanan di SP-1 dan SP-2. Tema tersebut dibagi sesuai zona yaitu SP-1: a) perlindungan bentang pandang, b) perlindungan situs candi dan taman, c) perlindungan karakter pedesaan, dan d) perlindungan Cagar Geologi Bukit Ijo. Sementara SP-2 memiliki tema pengembangan ke-5 yaitu perlindungan sebaran potensi cagar budaya yang belum tergali.

Untuk meningkatkan konektivitas Kawasan Candi Prambanan, terdapat ruas jalan arteri primer, kolektor primer dan jalan bebas hambatan (Solo-Yogyakarta-Kulon Progo). Terdapat rencana pembangunan jalan khusus angkutan massal dan sentral parkir khusus agar penyediaan infrastrukturnya sejalan dengan upaya pelestarian yang ada. Selain itu, juga terdapat Stasiun Kalasan dan Stasiun Brambanan untuk mengoneksikan kawasan dengan pusat-pusat kegiatan.

Penyediaan air baku Kawasan Candi Prambanan berasal dari mata air, air sungai DAS Opak dan DAS Bengawan Solo, embung, dan CAT. Selain itu, juga terdapat sistem pengendalian banjir dan banjir lahar dingin di tebing Sungai Opak dan Sungai Simping. Kawasan ini juga dilayani 4 jaringan irigasi primer dan 43 jaringan irigasi sekunder.

Sistem sarana prasarana perkotaan di KSN Prambanan meliputi penyediaan SPAM di Kapanewonan Kalasan dan Kapanewonan Prambanan Sleman, Kec. Prambanan Klaten dan Kec. Gantiwarno, serta penyediaan sistem air limbah (IPAL) di Kec. Prambanan, Kapanewonan Kalasan, dan Kapanewonan Berbah, serta Kecamatan Prambanan.



Gambar 2.1 Delineasi KSN Prambanan

Sumber: Draft RTR KSN Prambanan, 2022

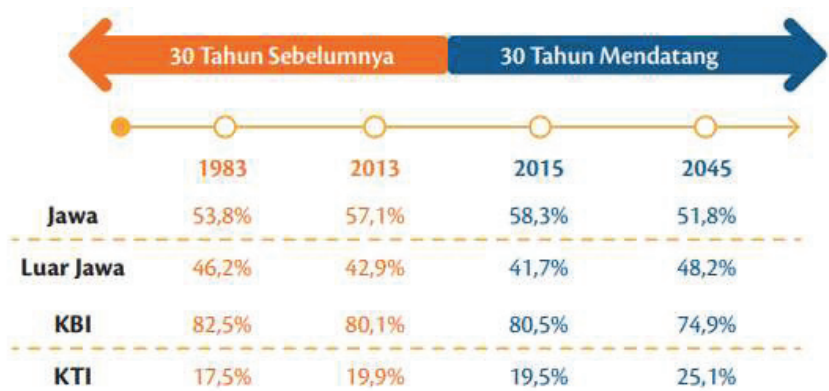
Berdasarkan uraian kebijakan pengembangan kawasan prioritas dapat disimpulkan diperlukan **pengendalian pengembangan** untuk melindungi bentang pandang dan lanskap pedesaan **sesuai OUV Candi Prambanan**, serta **mitigasi bencana gunung berapi**.

2.2 Kebijakan Sektor

Subbab ini berisi poin penting kebijakan sektoral tingkat nasional dan daerah, yaitu: Visi Indonesia 2045, RPJMN Tahun 2020-2024, Proyek Strategis Nasional, RPJMD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2022, Visium PUPR 2030, Renstra PUPR Tahun 2020-2024.

2.2.1 Visi Indonesia 2045

Dalam visi Indonesia 2045, pemerataan pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) terus diupayakan. Kawasan Timur Indonesia (KTI) didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah KBI. Pemerataan juga terus didorong antara wilayah Jawa dan Luar Jawa. Dalam 30 tahun ke depan, peranan Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 48,2 persen dari 25,1 persen dari perekonomian nasional.



Gambar 2.2 *Timeline* Pemerataan Pembangunan Daerah

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Terdapat 4 pilar untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Infrastruktur menjadi salah satu *prime mover* pencapaian 4 pilar tersebut. Dukungan infrastruktur untuk Pilar 1 berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; untuk Pilar 2 berupa penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan *ease of doing business/investment*; untuk Pilar 3 berupa penyediaan infrastruktur dalam upaya mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), serta Wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa; dan untuk Pilar 4 berupa reformasi birokrasi pada seluruh instansi (kementerian/lembaga pemerintah).

Arahan Visi Indonesia 2045 adalah **pengembangan infrastruktur** mendukung **pendidikan, pertumbuhan ekonomi** berkelanjutan dan **kemudahan investasi**, serta **pengurangan disparitas** Jawa-Luar Jawa dan KBI-KTI.

2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

RPJMN mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu koridor pemerataan, target pembangunan, arahan pengembangan wilayah, serta *Major Project*.

RPJMN 2020-2024 menetapkan Provinsi DIY sebagai koridor pemerataan yang menghubungkan PKW Magelang-PKW Sleman-PKW Bantul-PKW Kebumen. Target RPJMN 2020-2024 meliputi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,92%, pengurangan tingkat kemiskinan rata-rata 8,98%, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka rata-rata 3,7%.

Arahan RPJMN terhadap pengembangan Provinsi DIY antara lain pengembangan sektor unggulan berupa tebu dan perikanan budidaya.

Peningkatan konektivitas secara terintegrasi diwujudkan melalui pembangunan tol Yogya – Bawen, tol Solo-Yogyakarta, dan tol Cilacap – Yogyakarta. Pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi DIY dilakukan melalui peningkatan kualitas Kota Yogyakarta.

Major Project disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* di Provinsi DIY berupa pengembangan kawasan strategis DPP Borobudur dan sekitarnya berupa perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Dukungan tersebut diwujudkan dalam Proyek Prioritas Nasional meliputi pembangunan jalan akses KSPN Borobudur, pengembangan Bandara Kulon Progo, dan percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas.

Proyek prioritas nasional terkait pengembangan kota besar, kota sedang, kota kecil di Provinsi DIY meliputi pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta, pengembangan bandara Kulon Progo, elektrifikasi jalur KA Jogja-Solo, pembangunan jalan tol non-Trans Jawa (Bawen-Yogya, Solo-Yogya), pembangunan rumah susun (buruh, pekerja, dan ASN), pembangunan SPALD-T skala kota/regional, skala permukiman dan IPLT, pembangunan TPA, pembangunan TPST, dan pembangunan TPS3R.

Dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam RPJMN 2020-2024, pengembangan Provinsi DIY diarahkan sebagai salah satu **pusat pertumbuhan dan hub transportasi di koridor pemerataan tengah-selatan Jawa** melalui pengembangan sektor unggulan **pariwisata dan layanan perkotaan**, serta **penguatan konektivitas** dengan memperhatikan **mitigasi bencana**.

2.2.3 Proyek Strategis Nasional (PSN)

Sejak tahun 2016 daftar PSN mengalami beberapa perubahan berdasarkan penetapan berbagai Perpres. Beberapa PSN yang direncanakan dibangun di Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu 1) *double track* Jawa Selatan, 2) Bandara Internasional di Provinsi DIY, dan 3) percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih untuk 10 KSPN Prioritas. Dari 3 proyek tersebut, seluruhnya telah terlaksana.

Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) telah ditetapkan proyek strategis nasional di Provinsi DIY, antara lain:

1. Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen;
2. Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo;

3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi DIY Kamijoro (Bantul, Kulon Progo).

PSN berfokus pada **percepatan pertumbuhan** dan **pemerataan pembangunan** Provinsi DIY melalui **penguatan konektivitas** dan **pemenuhan infrastruktur dasar** untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010 - 2025

RIPPARNAS menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010-2025. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat satu atau lebih Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Beberapa KPPN ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Terdapat 2 DPN, 6 KPPN, dan 5 KSPN, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi D.I. Yogyakarta

DPN	KPPN/KSPN
DPN Solo-Sangiran dsk	KPPN Karst Gunungkidul dsk
DPN Borobudur -Yogyakarta dsk	KPPN Borobudur-Mendut -Pawon dsk KPPN Prambanan-Kalasan dsk KPPN Yogyakarta Kota dsk KPPN Pantai Selatan Yogyakarta dsk KPPN Merapi-Merbabu dsk
	KSPN Prambanan-Kalasan dsk KSPN Yogyakarta Kota dsk KSPN Pantai Selatan Yogya dsk KSPN Karst Gunungkidul dsk KSPN Merapi-Merbabu dsk

Sumber: RIPPARNAS, 2010-2025

Dengan memperhatikan sebaran kawasan strategis pariwisata tersebut, pengembangan pariwisata Provinsi DIY diarahkan sebagai kawasan **pariwisata nasional dan internasional** dengan pengembangan KSPN Prambanan-Kalasan dsk, KSPN Yogyakarta Kota dsk, KSPN Pantai Selatan Yogya dsk, KSPN Karst Gunungkidul dsk, dan KSPN Merapi-Merbabu dsk mendukung skenario dekonsentrasi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. **Pemantapan sektor pariwisata Provinsi DIY** ditekankan pada aspek kepariwisataan **berkelanjutan** serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui **penguatan aspek manajemen** industri kepariwisataan.

2.2.5 Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

Kebijakan perkeretaapian nasional di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kebijakan kereta api sebagai angkutan massal nasional. Pengembangan jaringan perkeretaapian nasional diwujudkan melalui

pengembangan jaringan dan layanan kereta api antarkota, kereta api perkotaan, kereta api menuju simpul transportasi (bandara, pelabuhan), kereta api penghubung wilayah pertambangan dan sumber daya alam, kereta api cepat Jakarta-Surabaya, kereta api penghubung Pulau Jawa-Bali-Sumatera (interkoneksi), pembangunan jalur ganda, elektrifikasi dan peningkatan sintelis. Selain itu, juga dilakukan reaktivasi dan peningkatan jalur KA, peningkatan keterpaduan antar dan intermodal berbasis TOD, serta subsidi angkutan umum dalam bentuk layanan KA Perintis dan *public service obligation*.

Kebijakan perkeretaapian di Provinsi D.I. Yogyakarta diarahkan untuk meningkatkan konektivitas Pulau Jawa bagian selatan melalui: 1) Pengembangan jaringan dan layanan KA Regional: Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang), 2) Pengembangan jaringan dan layanan KA Perkotaan: Yogyakarta, 3) Pengembangan jaringan dan layanan KA Bandara: Adisutjipto, dan 4) Peningkatan kapasitas KA melalui elektrifikasi: elektrifikasi lintas Kutoarjo-Yogyakarta-Solo.

Dengan memperhatikan arahan tersebut, kebijakan perkeretaapian di Provinsi DIY bertujuan untuk mendukung **penyediaan kereta api** sebagai **angkutan massal nasional perkotaan dan regional** untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan **penguatan konektivitas** melalui pengembangan KA Regional Joglosemar dan KA Bandara YIA-Stasiun Yogyakarta.

2.2.6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta

RPJMD Provinsi D.I. Yogyakarta 2022-2027 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pergub No. 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah D.I Yogyakarta menjelaskan bahwa visi pengembangan Provinsi DIY adalah *Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Dirumuskan empat misi untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi DIY 2022-2027 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan,
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat,
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi,

4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Tujuan pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi DIY 2022-2027 adalah 1) terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, 2) mengecilnya ketimpangan wilayah, 3) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan 4) terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik.

Dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam RPJMD 2022-2027, Provinsi DIY diarahkan untuk **pemenuhan layanan** dan **infrastruktur dasar** serta pengembangan **pusat-pusat pertumbuhan** baru dan **aksesibilitas antar wilayah**, dan **pengurangan ketimpangan wilayah Pantai Selatan** dengan mengoptimalkan kemajuan **teknologi informasi**, **pelestarian lingkungan dan warisan budaya**.

2.2.7 Visium PUPR 2030

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu: bendungan multifungsi dengan kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun; kemantapan jalan mencapai 99% dengan integrasi antar moda, memanfaatkan sebanyak banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*; serta 100% *smart living* (hunian cerdas) yang didukung infrastruktur dasar yang memadai. Secara detail sasaran visium tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah.

	SUMBER DAYA AIR	BINA MARGA	CIPTA KARYA	PENYEDIAAN PERUMAHAN
RENSTRA PUPR 2015 - 2019	Kapasitas Tampung 50 m ³ /c/th (baseline 2014) Anggaran Rp.316 T	Jalan Mantap 96% Jalan Tol 3000 Km Jalan Baru 2850 Km Jembatan Baru/FO 28.859 H Anggaran Rp.278 T	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.328 T	5,4 Jt Backlog MBR Pembangunan 4,47 juta unit Anggaran Rp.186 T
GAP 2017 - 2019	Kapasitas Tampung 57,75 m ³ /c/th Anggaran Rp.306 T	Jalan Mantap 94% Jalan Tol 824 Km Jalan Baru 1.320 Km Jembatan Baru/FO 39.000 H Anggaran Rp.183 T Investasi Rp.303 T	78% Air Minum 27.000 ha Kumuh 78% Sanitasi Anggaran Rp.48 T	5,4 Jt Backlog MBR Pembangunan 2,79 juta unit Anggaran Rp.414 T 10% APBN/APBD 90% Masyarakat
VISIUM 2030- 2034	Kapasitas Tampung 68,11 m ³ /c/th Anggaran Rp.577 T	Jalan Mantap 97% Jalan Tol 1.500 Km Jalan Baru 2.500 Km Jembatan Baru/FO 60.000 H Anggaran Rp.330 T Investasi Rp.243 T	88% Air Minum 17.000 ha Kumuh 88% Sanitasi Anggaran Rp.128 T	5 Jt Backlog MBR Pembangunan 3,9 juta unit Anggaran Rp.780 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat
VISIUM 2030	Kapasitas Tampung 120 m ³ /c/th Anggaran Rp.1.423 T	Jalan Mantap 99% Jalan Tol 2.000 Km Jalan Baru 3.000 Km Jembatan Baru/FO 70.000 H Anggaran Rp.448 T Investasi Rp.380 T	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.170 T	3 Jt Backlog MBR Pembangunan 4,88 juta unit Anggaran Rp.1.320 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat

Gambar 2.3 Visium PUPR 2030

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Visium PUPR 2030 berfokus pada **penyediaan infrastruktur tampungan air**, peningkatan

konektivitas, pemenuhan air minum, pengurangan kawasan kumuh, penanganan sanitasi, penurunan backlog dan penyediaan rumah swadaya.

2.2.8 Rencana Strategis Kementerian PUPR

Target pengembangan infrastruktur PUPR hingga tahun 2024 ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Untuk infrastruktur sumber daya air, targetnya mencakup penyediaan air baku, pengembangan daerah irigasi serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Untuk infrastruktur jalan dan jembatan targetnya mencakup pembangunan jalan tol, jalan baru (termasuk *flyover/underpass*) dan jembatan. Untuk infrastruktur cipta karya mencakup penyediaan air minum, sanitasi, penanganan kumuh dan pengolahan sampah, serta sarana pendidikan dan olahraga. Untuk perumahan mencakup pembangunan rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU).

Tabel 2.2. Target Renstra Kementerian PUPR

Infrastruktur Daya Air	Sumber	Infrastruktur Bina Marga	Infrastruktur Karya	Cipta	Infrastruktur Perumahan
- Kapasitas tampung infrastruktur SDA 58,5 m ³ /kapita/ tahun - 61 bendungan - 500 embung - 500.000 ha DI - 2 juta rehabilitasi DI - 50 m ³ /dt air baku - 2.100 km pengendali banjir dan pengaman pantai		- 2.500 km jalan tol - 3.000 km jalan baru - 38.328 m jembatan - 31.053 FO/UD	- 100% air minum layak - 30% air minum perpipaan - 90 % sanitasi layak - 15 % sanitasi aman - 10.000 ha penanganan kumuh - 100% hunian dengan akses pengelolaan sampah - 5.555 unit Sarana Pendidikan Olahraga		- 51.340 rusun - 10.000 rusus - 813.660 rumah swadaya - 262.345 PSU

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 berfokus pada **peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses air**, kelancaran dan pemerataan **konektivitas, pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman**.

2.2.9 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Undang-undang keistimewaan Yogyakarta merupakan dasar keistimewaan kedudukan hukum dan kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi D.I. Yogyakarta. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, tata ruang, dan atas dana istimewa.

Kewenangan istimewa tata cara pengisian jabatan Provinsi DIY terlihat dari syarat calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur. Calon Gubernur harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan calon Wakil Gubernur harus bertakhta sebagai Adipati Paku Alam. Dalam segi kewenangan kebudayaan, Provinsi DIY memiliki hak dalam memelihara dan mengembangkan norma, adat istiadat, tradisi luhur yang mengakar dalam

masyarakatnya. Ketentuan pelaksanaan ini diatur dalam Perda Keistimewaan DIY.

Kewenangan pertanahan Provinsi DIY menetapkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang memiliki hak milik atas tanah. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan dari Kasultanan dan Kadipaten.

Pemerintah pusat menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan Provinsi DIY yang disebut Dana Keistimewaan. Nilai yang ditetapkan berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Gubernur wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan keistimewaan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Dengan memperhatikan hal-hal yang diatur pada UU No 13 Tahun 2023 diatas, Provinsi DIY memiliki beberapa **kewenangan istimewa** dalam hal **kepemilikan dan pengelolaan tanah** dan **dana istimewa**. Kewenangan pengelolaan dan pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah DIY secara khusus **diserahkan kepada Kasultanan dan Kadipaten** untuk memastikan **ketertiban dan keamanan pembangunan di Provinsi DIY**.

2.2.10 ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

ITMP Borobudur – Yogyakarta – Prambanan disusun sebagai acuan dalam upaya peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata; penguatan keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata; dan mendorong investasi swasta di wilayah destinasi pariwisata prioritas.

ITMP Borobudur – Yogyakarta – Prambanan menetapkan 3 destinasi wisata utama (*KTA/key tourism area*) yaitu KTA Borobudur, KTA Yogyakarta, dan KTA Prambanan. KTA Borobudur mencakup Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid, KTA Prambanan mencakup Kecamatan Prambanan (Sleman) dan Kecamatan Prambanan (Klaten). Delineasi KTA Yogyakarta mencakup Kecamatan Kraton, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Kotagede, dan Kecamatan Gondomanan.

ITMP Borobudur – Yogyakarta – Prambanan merumuskan skenario pengembangan terpilih berupa skenario dekonsentrasi atau pendistribusian kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di sekitar Candi Borobudur, dimana saat ini kunjungan di Candi Borobudur telah mengalami *overtourism*. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan meliputi: (1) Pengaturan jumlah pengunjung ke Candi dalam rangka pelestarian dengan menyebarkan pengembangan atraksi lain di sekitarnya (*visitor management plan*), (2) Merestorasi zona pelestarian Borobudur dan

Prambanan sesuai konvensi warisan dunia, (3) Mengembangkan kekhasan Bale Ekonomi Desa (balkondes)/ Desa Wisata eksisting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Candi, 4) Mengurai kemacetan dan memberikan alternatif akses menuju atraksi, serta 5) Memperpanjang masa tinggal wisatawan dengan memperkaya jenis wisata non-candi.

KTA Yogyakarta terdiri dari 2 sub-KTA (Sumbu Filosofis dan Kotagede) sebagai kawasan bersejarah tertua sejak abad 17-18 Masehi. Pengembangan KTA Yogyakarta bertema *wisata sejarah berwawasan budaya sesuai perkembangan zaman dan berkelanjutan*, sebagai perwujudan narasi sejarah Yogyakarta dalam satu kerangka yang utuh dan berkesinambungan. Pengembangan kawasan difokuskan pada **pengembangan wisata budaya** karena adanya bangunan/kawasan budaya, museum/monumen, dan atraksi budaya.

KTA Prambanan diarahkan untuk dikembangkan sebagai **kawasan kota kuno** Prambanan untuk mempertahankan peninggalan arkeologi, lanskap budaya, karakter pedesaan dan kawasan cagar alam geologi. **Pengembangan wisata** di KTA Prambanan difokuskan pada pengembangan **wisata candi tanpa pembangunan yang masif**, pengembangan desa wisata dengan kekayaan lanskap pedesaan dan wisata alam.

2.2.11 Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Kawasan Candi Prambanan mengatur mengenai pengelolaan dan pengendalian di Candi Roro Jonggrang, Lumbung, Bubrah, Sewu, Plaosan, dan Sojiwan. Kawasan Candi Prambanan dibagi menjadi tiga zona pelestarian yaitu 1) Zona 1 seluas 39,8 ha untuk perlindungan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan fisik candi, 2) Zona 2 seluas 37,2 ha untuk pembangunan taman wisata sebagai tempat kepariwisataan, penelitian, kebudayaan, dan pelestarian lingkungan candi, serta 3) Zona 3 seluas 663 ha untuk permukiman terbatas, pertanian, jalur hijau atau fasilitas penunjang keseimbangan zona 1.

2.3 Agenda Global

Agenda global berisi tentang poin penting arahan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *New Urban Agenda* (NUA), *Prambanan Temple Compound UNESCO*, *Gunung Sewu UNESCO Global Geopark*, *Paris Agreement*, dan *Sendai Framework*.

Tabel 2.3. Agenda Global

No	Kebijakan	Arahan
1.	Sustainable Development Goal (SDGs)	- Merupakan kebijakan global sebagai upaya pemenuhan standar minimum perkotaan. Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. - Implikasi SDGs terhadap arahan pengembangan infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut: a. Dukungan terhadap perwujudan ketahanan air dan kedaulatan pangan termasuk peningkatan kapasitas air baku baik untuk irigasi maupun air bersih. b. Pengelolaan sumber daya air. c. Dukungan infrastruktur PUPR untuk mendorong perkembangan wilayah melalui pengembangan seluruh kawasan strategis. d. Seluruh MBR memiliki akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan hunian layak. e. Peningkatan kinerja infrastruktur permukiman (peningkatan cakupan pelayanan & peningkatan kapasitas eksisting) agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar sehingga terwujud kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. f. Penyelenggaraan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antarwilayah. g. Adaptasi RAN-MAPI
2.	New Urban Agenda (NUA)	- New Urban Agenda/NUA merupakan penjabaran yang lebih spesifik dari SDGs terutama tujuan 11 (<i>Sustainable Cities and Communities</i>) yang keduanya mengusung semangat inklusivitas. NUA juga diimplementasikan dalam perumusan konsep kota masa depan yang diakomodir dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkotaan Nasional (KSPPN). - Pembangunan harus melindungi bumi dan mendorong peluang bagi penduduk, baik yang tinggal di permukiman formal maupun informal, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan bermanfaat serta memaksimalkan potensi manusia seutuhnya. - Kunci Agenda Baru Perkotaan berdasarkan New Urban Agenda (NUA): a. Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan penghapusan kemiskinan b. Pembangunan kota yang berkelanjutan lingkungan dan berketahanan c. Kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif d. Membangun struktur pemerintahan perkotaan: membangun kerangka pendukung e. Perencanaan dan pengelolaan tata ruang perkotaan
3.	Prambanan Temple Compound UNESCO	- Kawasan Candi Prambanan ditetapkan sebagai UNESCO <i>World Heritage</i> dengan nomor registrasi C-642. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 M dan ditemukan kembali di abad ke-17. <i>Outstanding Universal Value</i> (OUV) yang menyebabkan Candi Prambanan disahkan sebagai UNESCO <i>World Heritage</i> adalah: i. Kawasan Candi Prambanan menyajikan Budaya Hindu Siwa yang megah sebagai mahakarya periode klasik di Indonesia dan kawasan di sekitarnya. iv. Kawasan Candi Prambanan merupakan kompleks keagamaan yang megah dengan karakteristik Hindu Siwa abad ke 10. - Terdapat ancaman di kawasan Candi Prambanan berupa bencana alam dan erupsi gunung berapi. Berdasarkan <i>State of Conservation of World</i>

No	Kebijakan	Arahan
		<i>Heritage Properties</i> mengenai Candi Prambanan tahun 2013, tidak ada kondisi terbaru yang perlu dilaporkan setelah terjadinya usaha perbaikan Candi karena letusan Gunung Merapi pada 2010.
4.	Gunung Sewu UNESCO Global Geopark	- Ditetapkan sebagai UNESCO <i>Global Geopark</i> pada 2015, seluas 1.802 km². Perlindungan dan preservasi warisan alam menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan agen perjalanan wisata yang mengelola dan mengembangkan kawasan geopark sebagai daya tarik wisata. Sedangkan Pemerintah Pusat membuat payung hukum berupa Kepmen ESDM No. 3045K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu. - 7 Rekomendasi UNESCO tentang Geopark Gunung Sewu (2020): a. Menambah visibilitas geopark dengan pemasangan rambu atau penunjuk arah ke geosite. b. Mengaktifkan website, media sosial, dan media promosi berbahasa Indonesia dan Inggris. c. Optimalisasi kependuan geotourism, dan fasilitas Museum Karst Wonogiri dan Etalase Geopak Pancerdoor Pacitan. d. Meningkatkan implementasi edukasi di kawasan Gunung Sewu UNESCO <i>Global Geopark</i>. e. Pemkab Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul agar meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan mitigasi bencana untuk isu perubahan iklim dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mitigasi bencana. f. Menyusun masterplan Gunung Sewu UNESCO <i>Global Geopark</i> 2019-2023 dan mempublikasikannya di website, serta mengembangkan dan menginventarisasi warisan tak berwujud (intangible heritage). g. Meningkatkan kerja sama dan berperan aktif dalam promosi internasional keberadaan Geopark Gunung Sewu dalam forum <i>Global Geoparks Network</i> (GGN) dan <i>Asia Pacific Geoparks Network</i> (APGN).
5.	Paris Agreement	Pengembangan dan transfer teknologi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengembangan kapasitas SDM terkait ketahanan terhadap perubahan untuk negara berkembang.
6.	Sendai Framework	- Berisi tentang perlunya pemahaman yang lebih baik tentang risiko bencana dalam semua dimensi keterpaparan, kerentanan dan karakteristik bahayanya. - Perlu adanya penguatan tata kelola risiko bencana, termasuk platform nasional, akuntabilitas manajemen risiko bencana, kesiapan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik”, identifikasi pemangku kepentingan dan peran mereka, mobilisasi investasi yang peka terhadap risiko untuk menghindari terciptanya risiko baru, ketahanan infrastruktur kesehatan, warisan budaya dan tempat kerja, penguatan kerjasama internasional dan kemitraan global, serta kebijakan dan program donor yang mengetahui risiko, termasuk dukungan keuangan dan pinjaman dari lembaga keuangan internasional.

Sumber: Hasil Analisis RPIW, 2022

2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan pengembangan infrastruktur memuat arah kebijakan pengembangan wilayah dan arah kebijakan pemanfaatan infrastruktur.

2.4.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian arahan kebijakan di atas, dirumuskan fokus dan lokus kebijakan penataan ruang, kebijakan sektor, kebijakan pengembangan kawasan prioritas, serta agenda global. Kebijakan penataan ruang berfokus pada pengembangan pariwisata, perkotaan, jasa pendidikan, industri kreatif, ketahanan bencana, dan konservasi cagar budaya.

Kebijakan sektor berfokus pada pengembangan pariwisata, perkotaan, perdagangan jasa, konservasi cagar budaya, dan infrastruktur dasar. Agenda global berfokus pada konservasi bentang alam dan cagar budaya. Setelah melakukan iterasi terhadap seluruh fokus kebijakan dihasilkan **satu konteks perencanaan utama yaitu pengembangan pariwisata** di Provinsi D.I. Yogyakarta.

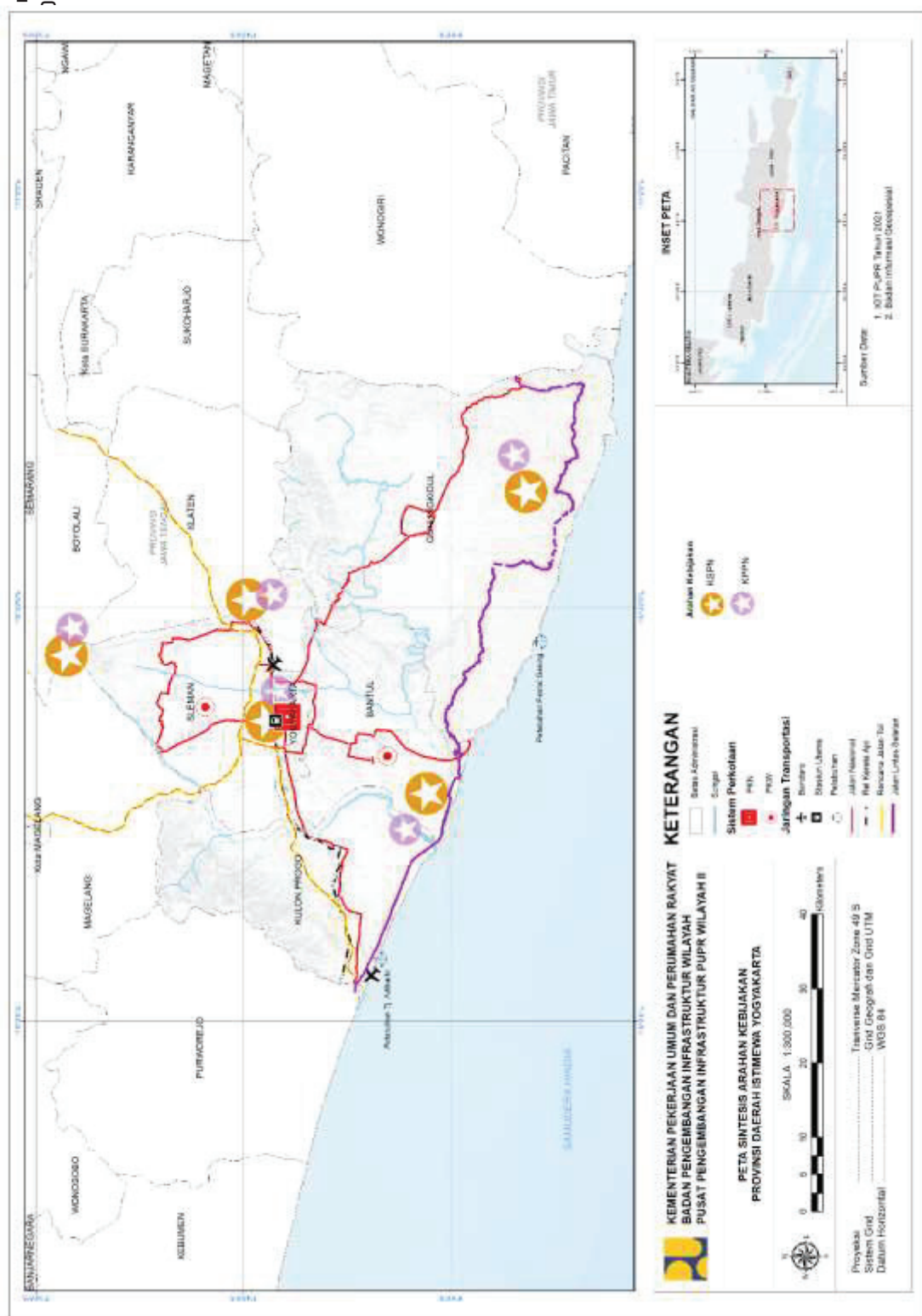
Fokus perencanaan ini menjadi dasar dalam menguraikan bab-bab berikutnya dalam dokumen RPIW D.I. Yogyakarta. Kawasan pengembangan pariwisata di Provinsi D.I. Yogyakarta meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu KPPN Prambanan dsk, KPPN Pantai Selatan Yogya dsk, KPPN Karst Gunungkidul dsk, KPPN Merapi-Merbabu dsk, KSPN Yogyakarta Kota dsk, KSPN Prambanan dsk, KSPN Pansela DIY dsk, KSPN Karst Gunungkidul dsk, KSPN Merapi-Merbabu dsk, dan KSPN Yogyakarta Kota dsk. Secara lengkap, sintesis arah kebijakan di Provinsi DIY dapat dilihat pada tabel berikut yang secara spasial dapat dilihat pada Peta 2.1.

Tabel 2.4. Rumusan Arah Kebijakan di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas	Sasaran dan Target
Kebijakan Penataan Ruang	RTRW Nasional PP 13/2017	DIY: Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata dan perkotaan yang didukung oleh penguatan konektivitas dan simpul transportasi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung.	• Pariwisata • Perkotaan • Jasa • Pendidikan • Industri Kreatif • Ketahanan Bencana • Konservasi cagar budaya	Pariwisata • KSPN Yogyakarta Kota dsk • KSPN Prambanan dsk • KSPN Pansela DIY dsk • KSPN Karst Gunungkidul dsk • KSPN Merapi-Merbabu dsk • KSPN Yogyakarta Kota dsk • KPPN Prambanan dsk • KPPN Pantai Selatan Yogya dsk • KPPN Karst Gunungkidul dsk • KPPN Merapi-Merbabu dsk	RIPPARNAS - Peningkatan kunjungan wisman 20 juta dan wisnus 371 juta pada 2025 - Peningkatan PDB pariwisata 6% pada 2025 Visi Indonesia 2045: - Pertumbuhan jumlah wisatawan mencapai 2-4% per tahun - Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 73,6 juta pada tahun 2045 - Pariwisata Indonesia menempati posisi 10 besar destinasi wisata berdaya saing dunia
	RTR Jawa-Bali Perpres 28/2012	DIY: Pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan sebagai lumbung pangan utama nasional, kawasan perkotaan, industri/ perdagangan, dan pariwisata yang berdaya saing internasional, yang didukung oleh konektivitas lintas utara-tengah-selatan, sistem jaringan energi, dan sumber daya air dengan memperhatikan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.			
	RTRW Provinsi DIY Perda 5/2019	DIY: Pusat pelayanan perkotaan berbasis budaya dan pendidikan serta daerah tujuan wisata yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kebencanaan, serta didukung dengan konektivitas regional dan antarkawasan.			
	RTR KSN Prambanan	Prambanan: Pengendalian pengembangan untuk melindungi bentang pandang dan lanskap pedesaan sesuai OUV Candi Prambanan, serta mitigasi bencana gunung berapi.			
Kebijakan Sektor	Visi Indonesia 2045	Indonesia: Pengembangan infrastruktur mendukung pendidikan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kemudahan investasi, serta pengurangan disparitas Jawa-Luar Jawa dan KBI-KTI.	• Pariwisata • Perkotaan • Perdagangan • Jasa • Infrastruktur Dasar		
	RPJMN 2020-2024 Perpres 18/2020	DIY: Pusat pertumbuhan dan hub transportasi di koridor pemerataan tengah-selatan Jawa melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata dan layanan perkotaan, serta penguatan konektivitas dengan memperhatikan mitigasi bencana.			
	Proyek Strategis Nasional Perpres 109/2020	DIY: Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Provinsi DIY melalui penguatan konektivitas dan pemenuhan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat.			
	RPJMD Pergub DIY 7/2022	DIY: Pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dan aksesibilitas antar wilayah.			
	RIPPARNAS 2010-2025 PP 50/2011	DIY: Pemantapan sektor pariwisata DIY ditekankan pada aspek kepariwisataan berkelanjutan serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan aspek manajemen industri kepariwisataan.			

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas	Sasaran dan Target
Agenda Global	Visium PUPR 2030	Indonesia: Penyediaan infrastruktur tampungan air, peningkatan konektivitas, pemenuhan air minum, pengurangan kawasan kumuh, penanganan sanitasi, penurunan <i>backlog</i> dan penyediaan rumah swadaya	• Konservasi Bentang Alam dan Cagar Budaya		
	Renstra PUPR 2020-2024	Indonesia: Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses air, kelancaran dan pemerataan konektivitas, pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman.			
	UU RI No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY	DIY: Kewenangan pengelolaan dan pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah DIY secara khusus diserahkan kepada Kasultanan dan Kadipaten untuk memastikan ketertiban dan keamanan pembangunan di DIY.			
	ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	DIY: Pelestarian Cagar Budaya Candi Borobudur dengan pendekatan pengembangan dekonsentrasi dari KSPN Borobudur ke destinasi wisata Magelang dan DIY serta wilayah Joglosemar.			
	Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	DIY: Mendorong moda transportasi rel kereta api sebagai angkutan massal perkotaan dan regional untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan penguatan konektivitas.			
	Prambanan Temple Compound UNESCO	Prambanan: Perlindungan OUV Candi Prambanan sebagai mahakarya dan kompleks keagamaan Hindu Siwa abad X.			
	Keppres No. 1/1992 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Kawasan Candi Prambanan	Prambanan: Pengananan dan pelestarian nilai budaya Kawasan Candi Prambanan melalui pembatasan pengembangan tanpa merusak kawasan candi.			
	Gunung Sewu UNESCO Global Geopark	Karst Gunungkidul: Perlindungan dan preservasi warisan alam geopark sebagai daya tarik wisata dan warisan budaya UNESCO.			

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022



2.4.2 Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas

Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project RPJMN 2020-2024, sesuai dengan peraturan pemerintah. Infrastruktur PUPR meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan, yang dibangun di kawasan strategis dan prioritas seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), kawasan metropolitan, kawasan pertanian (Food Estate), kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika infrastruktur yang terbangun belum termanfaatkan secara maksimal. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- **Menurunnya kualitas infrastruktur.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa depan.
- **Menyebabkan ketimpangan pembangunan.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- **Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat.
- **Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penurunan kualitas sumber daya air, serta peningkatan risiko

bencana alam. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun, seperti meningkatkan konektivitas antarinfrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin kelangsungan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR prioritas dalam 10 tahun ke depan:

- **Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat saling mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan.
- **Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- **Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur.
- **Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur.
- **Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PUPR terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Hal ini juga meliputi peningkatan kapabilitas dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis.

Tabel 2.5. Pemanfaatan PSN dan *Major Project* RPJMN

No.	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Provinsi	Kab/Kota	Dasar Hukum
1	Permukiman	Pengembangan KSPN Borobudur Gerbang Klangan	DIY	Kulon Progo	ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
2	Permukiman	SPAM Regional Kartamantul (Tahap I)	DIY	Bantul, Sleman, Yogyakarta	RTRW Provinsi D.I. Yogyakarta
3	Permukiman	SPAM Regional Kamijoro	DIY	Kulon Progo, Bantul	Permenko Nomor 9 Tahun 2022
4	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA	Jawa Tengah, DIY	Sleman, Kulon Progo	Permenko Nomor 9 Tahun 2022
5	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Jawa Tengah, DIY	Sleman, Yogyakarta	Permenko Nomor 9 Tahun 2022

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2023

Matriks Infrastruktur Prioritas PUPR berdasarkan: Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan Permenko Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal khusus berupa sketsa geografis atau lebih dikenal dengan istilah profil suatu wilayah, dan potensi daerah merupakan segala kekayaan asli yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Profil wilayah dan potensi daerah menjadi pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur, juga sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis. Dengan demikian dalam bab 3 ini dijelaskan tentang profil fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial budaya dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan.

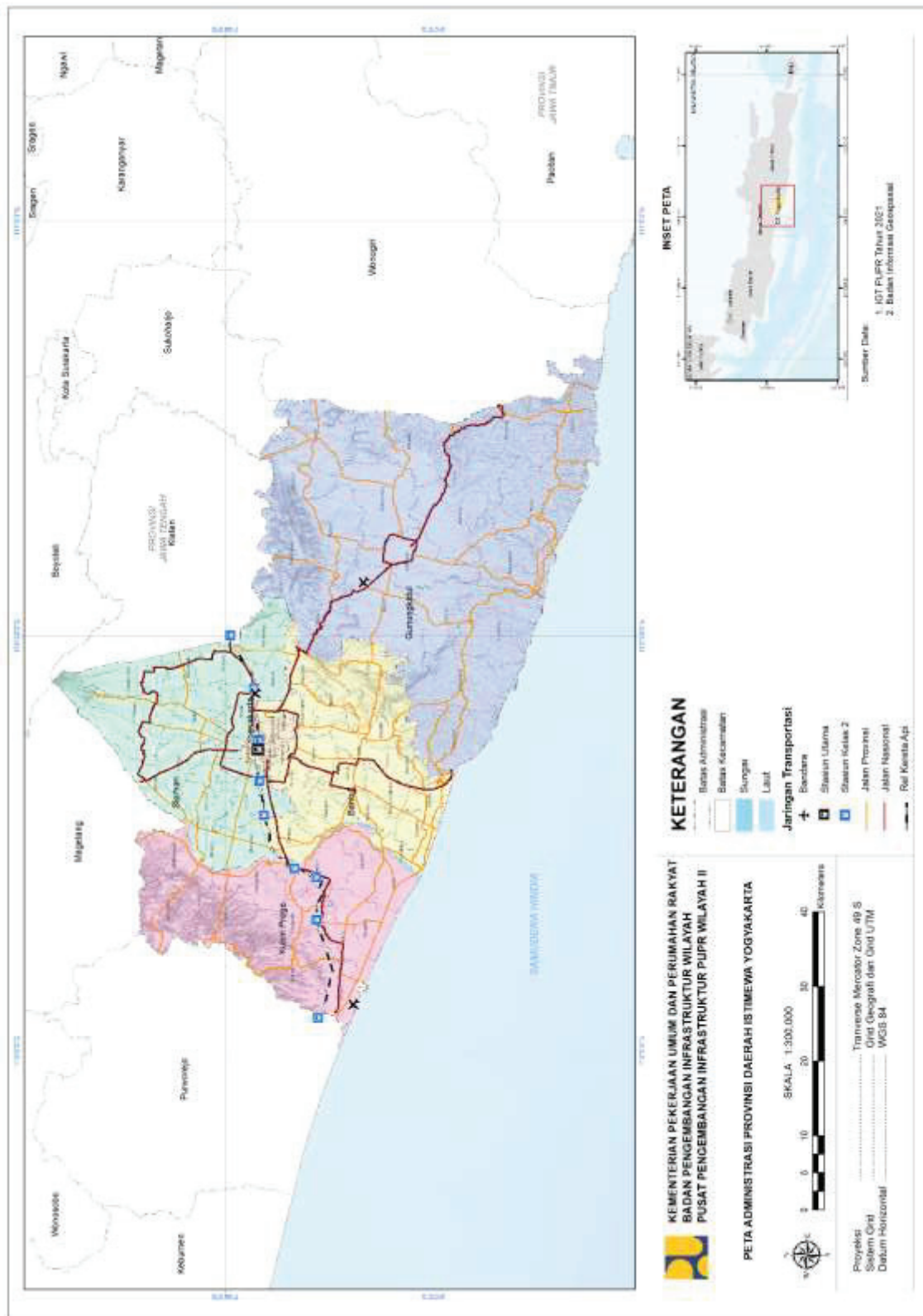
3.1 Profil Fisik dan Kebencanaan

Profil fisik dan kebencanaan Provinsi DIY berisikan profil dan kondisi terkait wilayah administrasi, topografi, geologi, klimatologi, hidrologi, penyediaan jasa ekosistem air dan pangan, sebaran tutupan lahan, serta kerawanan bencana seperti: gempa bumi, longsor, tsunami, banjir, gunung berapi, dan kekeringan.

3.1.1 Profil Administrasi

Provinsi D.I. Yogyakarta terletak di 7.33' - 8.12' Lintang Selatan dan 110.00' - 110.50' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.133,15 km² atau 2,44% dari luas Pulau Jawa. Provinsi DIY terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Bagian selatan Provinsi DIY dibatasi oleh Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Klaten di sebelah timur laut, Kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara, Kabupaten Purworejo di sebelah barat, dan Kabupaten Magelang di sebelah barat laut.

Provinsi DIY terbagi menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota, 78 kapanewon/kemantren (kecamatan), dan 438 kalurahan (desa). Wilayah terluas berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 1.431,42 km² dan wilayah terkecil berada di Kota Yogyakarta seluas 32,5 km². Menurut Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta memiliki luas 3.133,15 km² yang terdiri dari, Kabupaten Kulonprogo seluas 586,28 km² (18,71 persen), Kabupaten Bantul seluas 508,13 km² (16,22 persen), Kabupaten Gunungkidul seluas 1.431,42 km² (45,69 persen), Kabupaten Sleman seluas 574,82 km² (18,35 persen), dan Kota Yogyakarta seluas 32,50 km² (1,04 persen).



Peta 3.1 Peta Administratif Provinsi D.I. Yogyakarta

3.1.2 Profil Topografi

Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta sebagian besar berada di ketinggian 100-499 mdpl yaitu 65% dari luas wilayahnya termasuk dalam dataran rendah, 28% wilayah berada di ketinggian kurang dari 100 mdpl yang merupakan wilayah pesisir, 5% wilayah berada di ketinggian 500-999 mdpl berupa pegunungan, dan 0,47% wilayah berada di ketinggian lebih dari 1.000 mdpl atau pegunungan tinggi. Kemiringan lahan dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu 0-8% seluas 1585.76 km², 8-15% seluas 627.01 km², 15-25% seluas 489,5 km², 25-45 % seluas 378,03 km², dan kemiringan lebih dari 45% seluas 90,09 km².

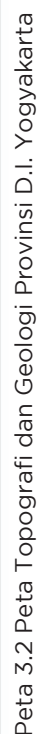
Provinsi DIY mempunyai penampang topografis yang beragam yaitu gunung api, karst, dataran aluvial, dan Samudera Hindia yang terbagi dalam beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

1. Satuan Pegunungan Selatan (150-700 mdpl, 1.656 km²): wilayah perbukitan batu gamping yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Di bagian tengah merupakan batuan induk batuan gamping dengan lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang.
2. Satuan Gunung Berapi Merapi (80-2.911 mdpl, 582 km²): termasuk bentang alam vulkanik meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul. Kawasan hulu Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dengan Pegunungan Kulon Progo (0-80 mdpl, 215 km²): merupakan wilayah yang subur. Selain itu juga terdapat bentang alam *marine & aeoline* dan memiliki gumuk pasir di Pantai Parangtritis.

3.1.3 Profil Geologi

Kondisi geologi di Provinsi D.I. Yogyakarta terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, bagian tengah yang terdiri dari breksi vulkan, lava dan tuf dari endapan lahar, bagian timur terdiri dari batu gamping konglomerat, batu pasir, tufa dan batu lanau, bagian barat terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu kempung, serpih, tuf, dan aglomerat yang cenderung berlerang curam, sering tererosi dan longsor, serta wilayah pantai selatan yang terdiri dari batu gamping dan batu pasir napalan.

Jenis batuan di Provinsi DIY terdiri dari Aluvium, Formasi Gunungapi Merapi, Endapan Vulkanik Tua, Formasi Kepek, Formasi Wonosari-Punung, Formasi Oyo, dan Formasi Semilir. Dari semua jenis batuan tersebut, jenis batuan yang dominan adalah Formasi Gunungapi Merapi dan Formasi Wonosari-Punung. Hal ini disebabkan wilayah Provinsi DIY terdapat gunung api dan karst.



3.1.4 Profil Klimatologi

Kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah disebut iklim, merupakan keadaan atmosfer dalam periode yang panjang dan dalam wilayah yang luas. Provinsi DIY seperti daerah lain di Indonesia juga beriklim tropis, dengan memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Rata-rata jumlah curah hujan di Provinsi DIY sebanyak 2.488,3 mm dengan hari hujan sebanyak 116 hari, serta suhu rata - rata 26,7OC Kelembaban udara Provinsi D.I. Yogyakarta berada di antara 48-97%. Wilayah D.I. Yogyakarta yang mengalami curah hujan tinggi adalah Kab. Kulon Progo dan Kab. Sleman (hulu Gunung Merapi). Sedangkan wilayah yang memiliki curah hujan cukup rendah adalah Kabupaten Gunungkidul dan sebagian Kab. Sleman dan Kab. Bantul. Pada musim penghujan, kawasan dengan curah hujan yang tinggi perlu diwaspadai karena rawan banjir dan genangan, terutama di kawasan lereng Merapi rawan terjadi banjir lahar dingin.

3.1.5 Profil Hidrologi

Ketersediaan sumber daya air Provinsi D.I. Yogyakarta berasal dari Wilayah Sungai Progo Opak Serang dan cekungan air tanah. Berdasarkan Pola Sumber Daya Air (PSDA), Provinsi D.I. Yogyakarta dilalui juga oleh WS Serayu Bogowonto di sebagian Kabupaten Kulon Progo, dimana keduanya adalah wilayah sungai kewenangan nasional.

WS Progo Opak Serang memiliki luas 4.077,43 km² dengan luasan lahan kritis mencapai 1.158.527,15 Ha. Jumlah hujan per tahun di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang bervariasi antara 1700 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun, dengan variasi bulanan antara 33 s/d 385 mm. Ketersediaan air total di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang selama setahun sebesar 3,55 juta m³, sedangkan kebutuhan total selama setahun sebesar 1,75 juta m³.

3.1.6 Jasa Ekosistem

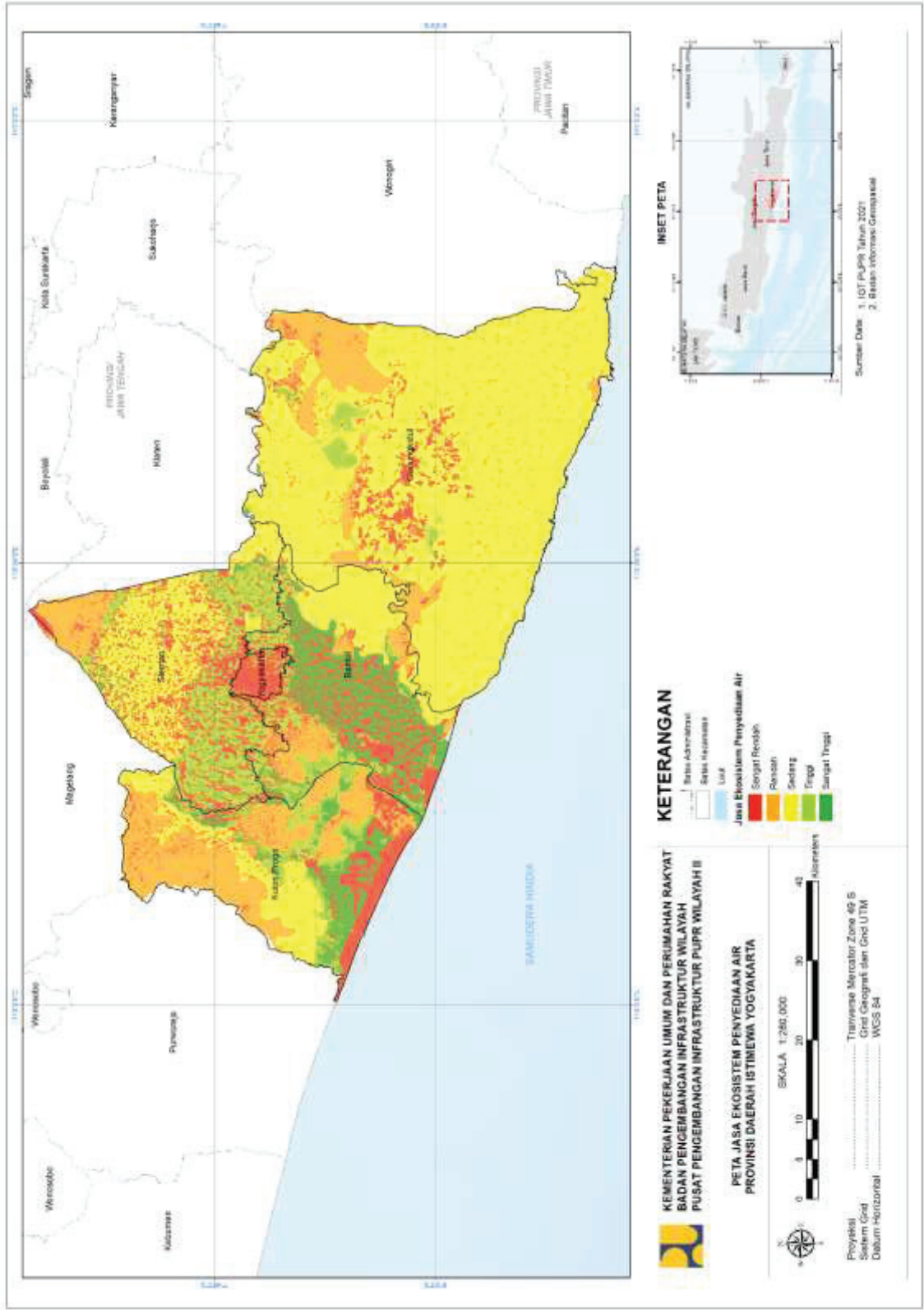
Jasa ekosistem Provinsi D.I, Yogyakarta membahas dua kebutuhan dasar yaitu air serta fungsi tempat tinggal dan ruang hidup. Wilayah D.I Yogyakarta dengan ketersediaan air sangat rendah berada di Kota Yogyakarta (seluruh kecamatan), Kabupaten Kulon Progo (Kec. Temon, Panjatan, Galur, Lendah), Kabupaten Bantul (menyebar di Kec. Srandakan, Sanden, Bambanglipuro, Pundong, Bantul, Pleret, Purwosari), Kabupaten Gunungkidul (Kec. Wonosari, Playen, Paliyan, Semin) dan Kabupaten Sleman (tersebar hampir di seluruh kecamatan). Nilai daya dukung ketersediaan air rata-rata untuk Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 3,71 dengan status aman. Nilai daya dukung ketersediaan air tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul sebesar 6,09 (status aman) dan terendah berada Kota Yogyakarta sebesar 1,34 (status aman bersyarat).

Jasa ekosistem ketersediaan tempat tinggal dan ruang hidup tertinggi berada di Kec. Moyudan di Kabupaten Sleman; Kec. Paliyan, Kec. Semanu, Kec. Karangmojo, Kec. Wonosari, Kec. Playen di Kabupaten Gunungkidul;

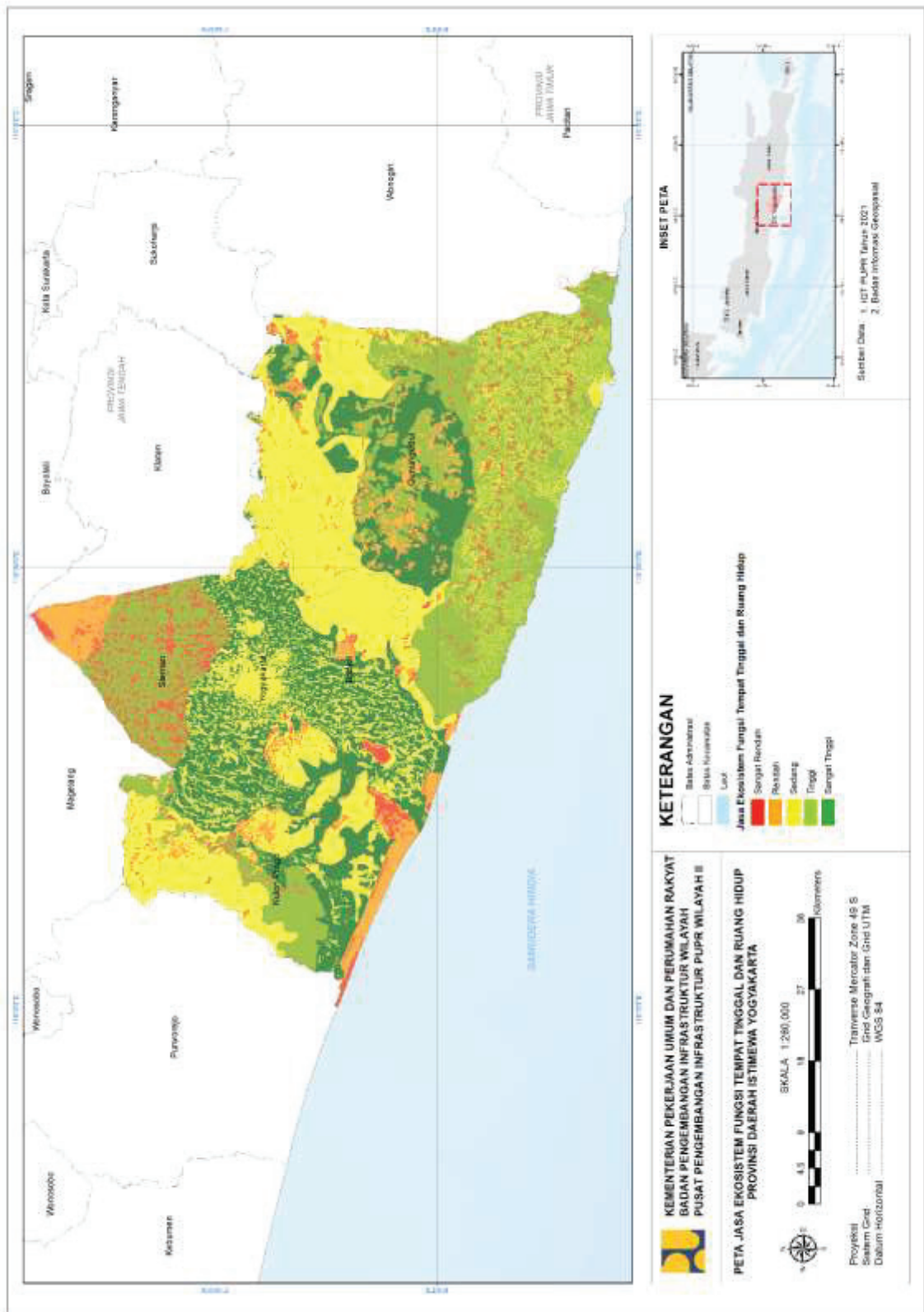
Kec. Banguntapan di Kabupaten Bantul; Kec. Temon, Kec. Sentolo, Kec. Pengasih di Kabupaten Kulon Progo. Jasa penyedia tempat tinggal dan ruang hidup sangat rendah berada di Kec. Ngangglik, Kec. Sleman, Kec. Tempel, Kec. Turi, Kec. Pakem, Kec. Cangkringan di Kabupaten Sleman; Kec. Paliyan, Kec. Tepus, Kec. Rongkop di Kabupaten Gunungkidul; dan Kec. Galur di Kabupaten Kulon.

3.1.7 Tutupan Lahan

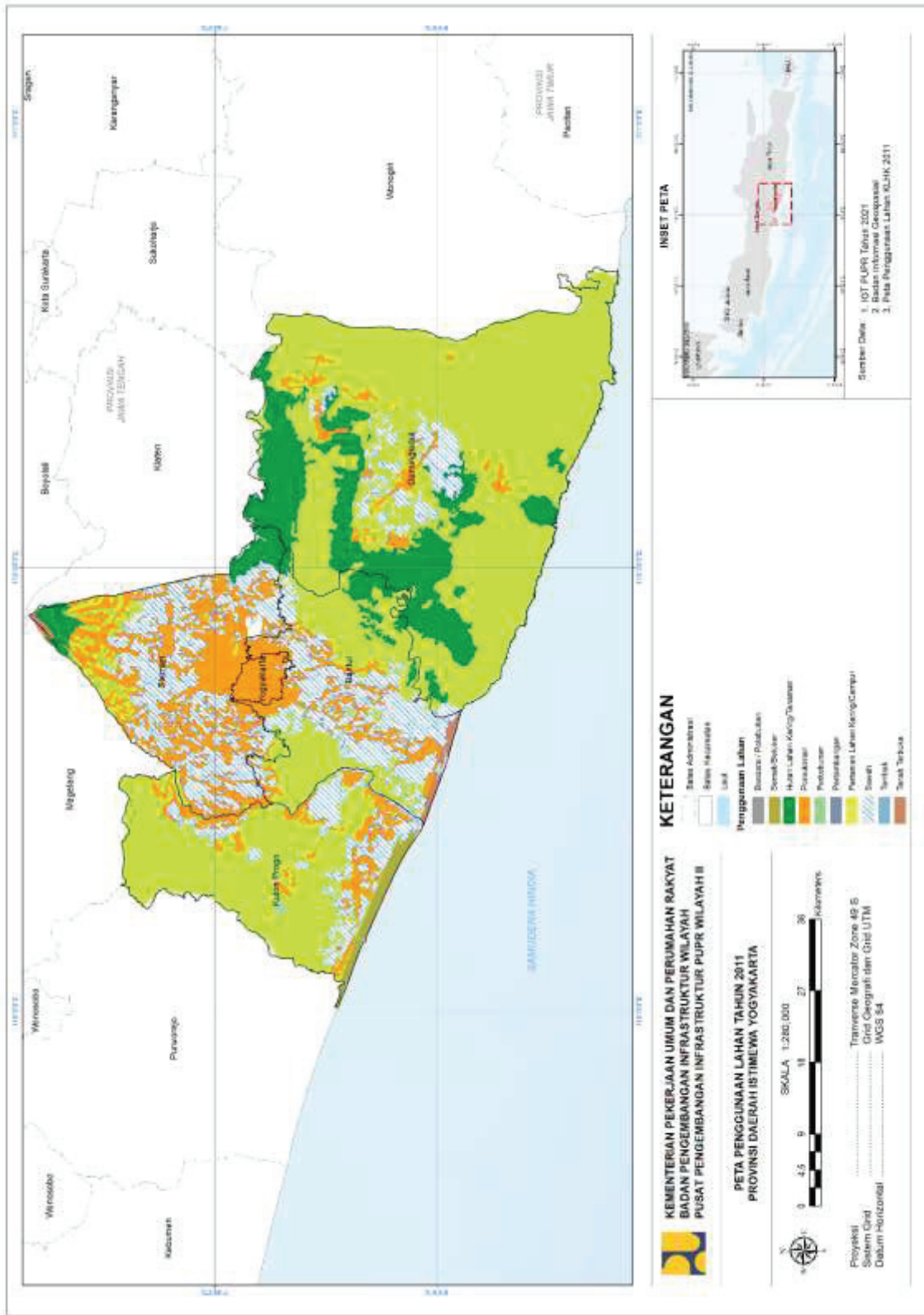
Terjadi perubahan tutupan lahan secara signifikan berupa meluasnya kawasan permukiman Yogyakarta ke arah selatan , berkurangnya tanah terbuka di Kabupaten Bantul menjadi sawah , berkurangnya lahan belukar menjadi sawah di Pansela , meluasnya lahan permukiman di sekitar YIA , Kabupaten Kulon Progo, dan berkurangnya lahan sawah menjadi kawasan permukiman di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah pengurangan sawah di Provinsi D.I. Yogyakarta dari 2011-2019 mencapai 9.733 ha, sedangkan penambahan luasan permukiman mencapai 88.579,5 ha.



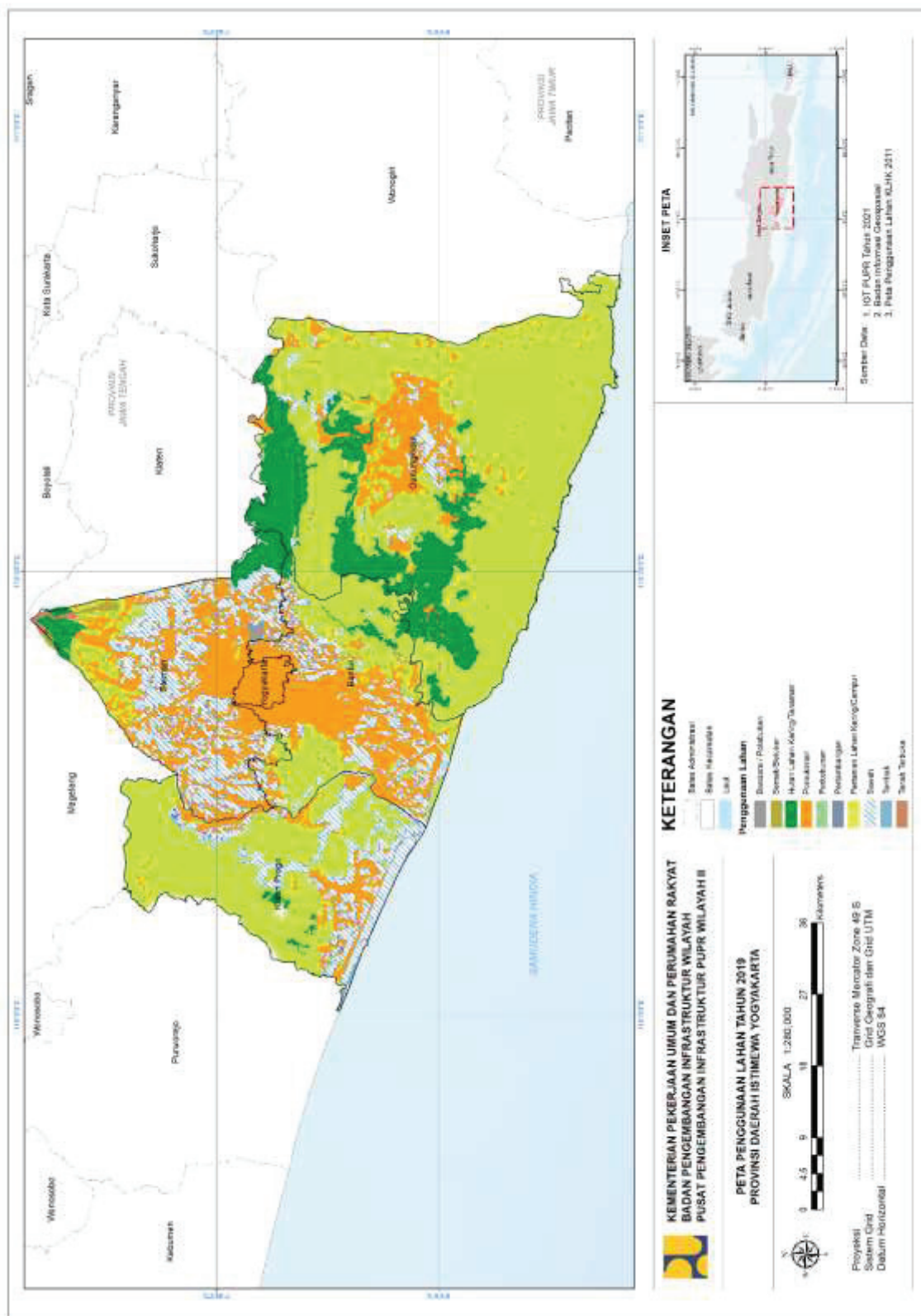
Peta 3.4 Jasa Ekosistem Penyediaan Air Provinsi D.I. Yogyakarta



Peta 3.5 Jasa Ekosistem Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Provinsi DIY



Peta 3.6 Tutupan Lahan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011



Peta 3.7 Tutupan Lahan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019

3.1.8 Kerawanan Bencana

Indonesia merupakan negara rawan bencana, termasuk wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta juga memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir dan abrasi, serta kekeringan. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta termasuk dalam kelas risiko bencana sedang dengan skor 126,34. Terdapat 2 kabupaten/kota di wilayah D.I. Yogyakarta yang masuk kategori risiko bencana tinggi, dan 3 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kulon Progo dan Bantul. Meskipun mengalami penurunan nilai indeks risiko dari tahun ke tahun, namun potensi kejadian alam di D.I. Yogyakarta masih tetap perlu diantisipasi secara komprehensif.

A. Rawan Gempa Bumi

Gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dipengaruhi oleh keberadaan Sesar Opak yang melintang di Kabupaten Sleman hingga Kabupaten Bantul. Sesar ini berada di sepanjang Sungai Opak sepanjang 40 kilometer ke arah Pantai Selatan dan 30 kilometer ke arah Prambanan Klaten. Sesar inilah yang menyebabkan terjadi gempa bermagnitudo 5,9 SR di Yogyakarta pada Mei 2006. Gempa tersebut menyebabkan meninggalnya 6.234 jiwa dengan korban luka hingga 137.883 orang. Gempa juga mengakibatkan kerusakan parah di 1.950 rumah dan sebanyak 12.073 rumah rata dengan tanah. Selain itu, gempa tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada candi-candi di Kawasan Prambanan, Candi Borobudur, dan Makam Imogiri. Kerugian material akibat gempa tersebut diperkirakan mencapai Rp 29,2 Triliun di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

Selain adanya Sesar Opak, sisi utara DIY rawan terhadap gempa bumi vulkanik karena aktivitas Gunung Merapi. Sedangkan sisi selatan DIY rawan terhadap ancaman gempa tektonik karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan potensi pergerakan lempeng Afrika, Indo-Australia, dan Antartik. Wilayah yang masuk dalam daerah risiko tsunami berada di sepanjang pesisir pantai selatan Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo (Kepanewonan Galur, Kepanewonan Temon dan Kepanewonan Wates) dan Kabupaten Bantul (Kepanewonan Kretek dan Kepanewonan Sanden).

B. Rawan Kekeringan

Rawan kekeringan tersebar hampir di seluruh wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2019 terjadi darurat kekeringan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Darurat kekeringan di Kabupaten Gunungkidul terjadi sejak Mei di 18 kepanewonan, 68 desa dengan pasokan air 41,62 juta liter; di Kabupaten Bantul terjadi sejak Juli di 11 kecamatan, 18 desa dengan pasokan air sebanyak 3,32 juta liter; di Kabupaten Kulon Progo terjadi sejak September di 9 kecamatan, 20 desa dengan pasokan air bersih sebanyak

1,037 juta liter. Kekeringan juga terjadi di Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Moyudan di 5 desa dengan pasokan air bersih sebanyak 2,71 juta liter.

Kejadian kekeringan pada tahun 2020 terjadi di hampir semua wilayah, yaitu di Kabupaten Sleman (Kalasan, Berbah, Depok, Gamping, Ngaglik), Kabupaten Kulon Progo (Lendah, Pengasih, Panjatan, Kokap), Kabupaten Bantul (Piyungan, Pundong, Banguntapan, Imogiri, Bantul, Dlingo, Srandakan, Pajangan, Jetis, Kasihan, Pleret, Sewon, dan Bambanglipuro), Kabupaten Bantul (Playen), dan Kota Yogyakarta (Tegalrejo, Umbulharjo). Kekeringan yang terjadi mengakibatkan berkurangnya pasokan air untuk irigasi dan rumah tangga, serta meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan.

C. Rawan Letusan Gunung Berapi

Provinsi DIY berada di daerah rawan letusan Gunung Merapi yang menjadi gunung teraktif di dunia. Gunung Merapi mempunyai periode letusan pendek (2-5 tahun), menengah (5-7 tahun), dan besar (100 tahun). Berdasarkan RTRW Provinsi D.I. Yogyakarta kawasan rawan letusan gunung berapi kategori tinggi berada di Kabupaten Sleman, yaitu di Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Cangkringan dengan luas 3.355,86 Ha.

Zona rawan bencana letusan Gunung Merapi dibagi ke dalam 3 kawasan rawan bencana (KRB) yaitu KRB I (kawasan rawan terkena lahar/banjir lahar, awan panas, hujan abu lebat, lontaran batu pijar, yang umumnya berada di sepanjang sungai atau hilir sungai yang berhulu di puncak Merapi), KRB II (berpotensi terkena awan panas, aliran lava, lontaran batu, guguran/hujan abu lebat, yang umumnya berada di lereng, kaki gunung dan aliran lahar), dan KRB III (rawan terkena awan panas, aliran lava, lontaran bom vulkanik, gas beracun dan guguran batu pijar). Pada KRB III tidak direkomendasikan adanya hunian tetap dan wilayah komersial.

Sejarah mencatat sejak 1930 letusan Gunung Merapi menyebabkan dampak berupa rusaknya rumah, lahan pertanian, dan wisata Kaliadem, matinya hewan ternak, gelapnya langit di Kabupaten Sleman, serta dikosongkannya 4 desa di Kabupaten Magelang. Letusan 2010 yang menjadi letusan terbesar sejak 1872 mengakibatkan 11.000 penduduk kehilangan rumah, 350 ribu orang dievakuasi, kerugian material mencapai Rp7 Triliun (hutan, pertanian, infrastruktur, permukiman).

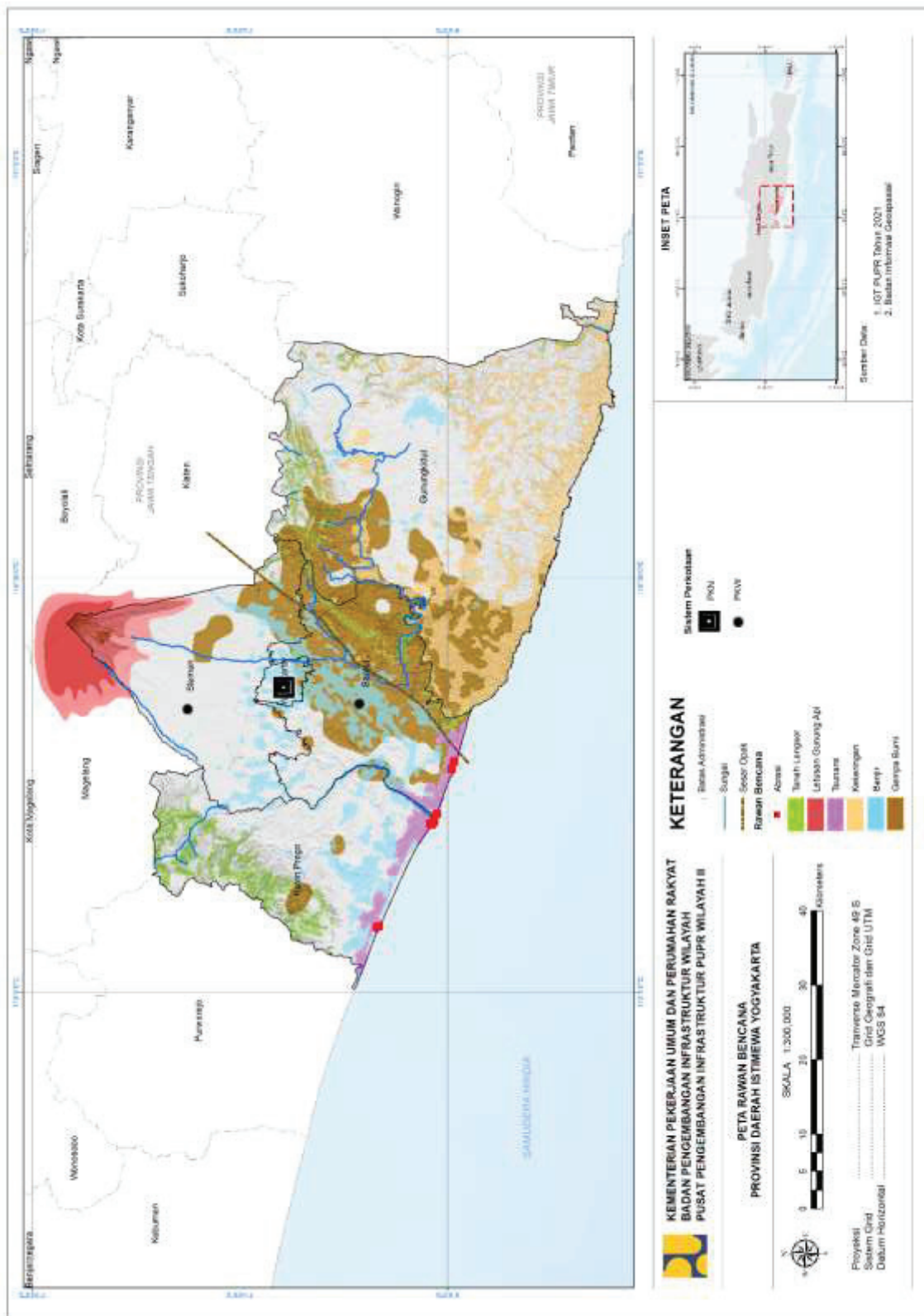
D. Karakteristik Pantai Selatan Provinsi D.I. Yogyakarta

Kawasan Pantai Selatan merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki nilai filosofis sejarah dan nilai strategis pariwisata yang mampu menarik jutaan wisatawan domestik setiap tahunnya. Identifikasi karakteristik Pantai Selatan dilakukan untuk melihat potensi kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sesuai dengan karakter pantai, mengingat Pantai Selatan mempunyai laut yang langsung menghadap ke

Samudera Hindia. Beberapa karakter Pantai Selatan Yogyakarta, terutama di sepanjang Pantai Parangtritis adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat palung laut dengan titik terdalam hingga 7.455 km berjarak 320 km dari bibir pantai. Palung di Pantai Parangtritis merupakan cekungan pasir sedalam 2-6 meter yang letak dan kedalamannya berubah-ubah sesuai arah angin dan membahayakan untuk aktivitas berenang.
- b. Tinggi gelombang rata-rata Pansela Bantul setinggi 1,67-2,25 m (cukup tinggi) dengan kecepatan angin 1,25-2 m/s (angin hembusan). Pantai Selatan D.I. Yogyakarta kurang cocok dijadikan lokasi berselancar dikarenakan hembusan anginnya cukup kuat, ombak yang tidak putus-putus sehingga sulit ditunggangi, dan ramai akan aktivitas pantai lainnya.
- c. Pantai di Selatan D.I. Yogyakarta sendiri memiliki karakteristik sedikit curam dan curam (Bantul) dan bukit terjal (Gunungkidul), sehingga perlu diberikan perhatian mengenai keamanan aktivitas wisata pantai.
- d. Kawasan pesisir laut selatan D.I. Yogyakarta memiliki historis gempa > 4,5 magnitude dari tahun 1945-2022. Titik kedalaman gempa berada di 20-70 km permukaan laut *datum mean sea level* (Data United States Geological Survey, USGS).

Dari karakteristik di atas, Pantai Selatan D.I. Yogyakarta dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata, namun perlu mempertimbangkan aspek keamanan (pengamanan pantai, zona aman berenang) dan mitigasi bencana.



Peta 3.8 Peta Rawan Bencana Provinsi D.I. Yogyakarta

3.2 Profil Demografi

Dinamika kependudukan, karakteristik dari populasi penduduk, dapat diketahui dari demografi suatu daerah, oleh karena itu profil demografi tidak lepas dari dokumen ini karena dapat mendeskripsikan kondisi demografi wilayah perencanaan 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk menyusun analisis perhitungan perencanaan kebutuhan infrastruktur PUPR. Bab ini membahas profil kependudukan berupa jumlah dan kepadatan penduduk, penduduk menurut jenis pekerjaan, jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2.1 Profil Kependudukan

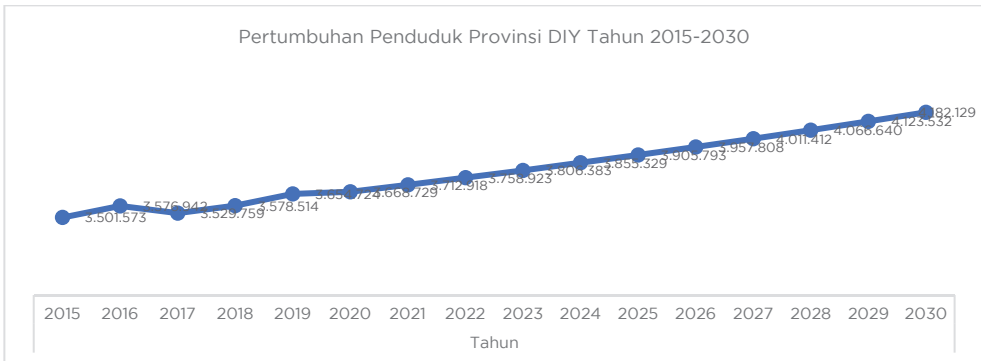
Jumlah penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 3.172.918 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 97. Rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.959.651 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.010.569 jiwa. Data dan informasi jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Populasi terbanyak berada di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.265.429 jiwa dan terendah berada di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 442.724 jiwa. Jumlah penduduk dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Eksisting (orang)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	412.229	416.200	425.758	447.246	436.395	442.724
Bantul	910.783	914.841	925.110	949.325	985.780	1.050.308
Gunungkidul	722.479	729.364	736.210	768.523	747.161	767.464
Sleman	1.113.707	1.046.622	1.063.938	1.075.575	1.125.804	1.265.429
Yogyakarta	417.744	422.732	427.498	414.055	373.589	444.295
D.I. Yogyakarta	3.576.942	3.529.759	3.578.514	3.654.724	3.668.729	3.970.220

Sumber: BPS, 2022

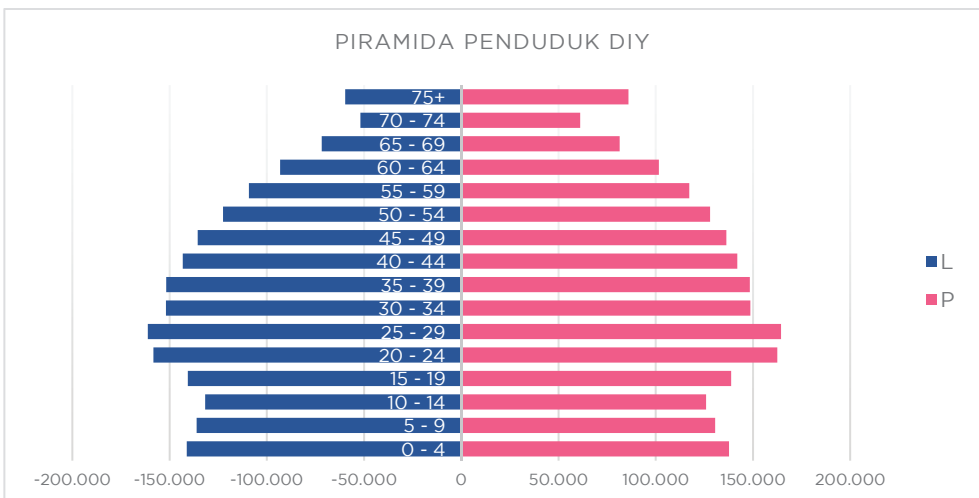
Populasi penduduk Provinsi DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk (CAGR) setiap tahunnya sebesar 0,87%. Pada tahun 2030, diproyeksikan jumlah penduduknya mencapai lebih dari 4,1 juta jiwa. Proyeksi penduduk dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Grafik Pertumbuhan Penduduk Provinsi DIY Tahun 2015-2030

Sumber: BPS, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

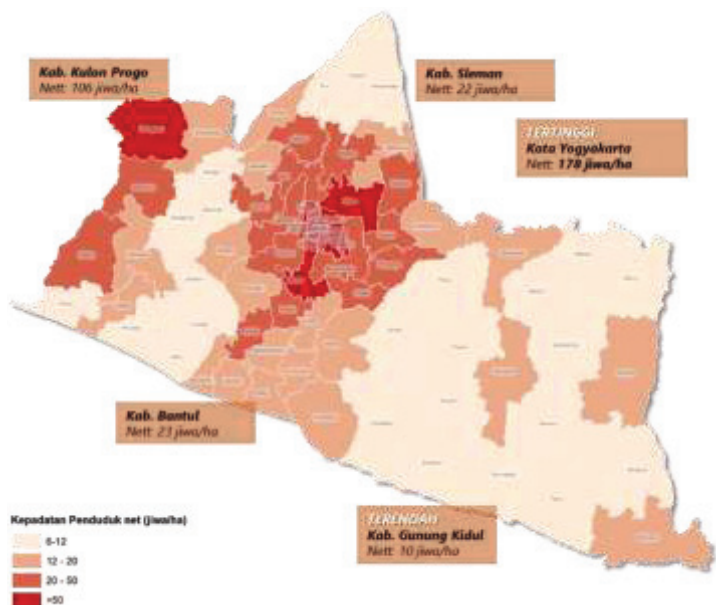
Sebagian besar penduduk Provinsi DIY adalah penduduk berusia 15-60 tahun, artinya sebagian besar penduduk Provinsi DIY dalam kategori usia produktif. Penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif artinya *dependency ratio* atau angka ketergantungan di Provinsi DIY adalah rendah.



Gambar 3.2 Piramida Penduduk Provinsi DIY

Sumber: BPS, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

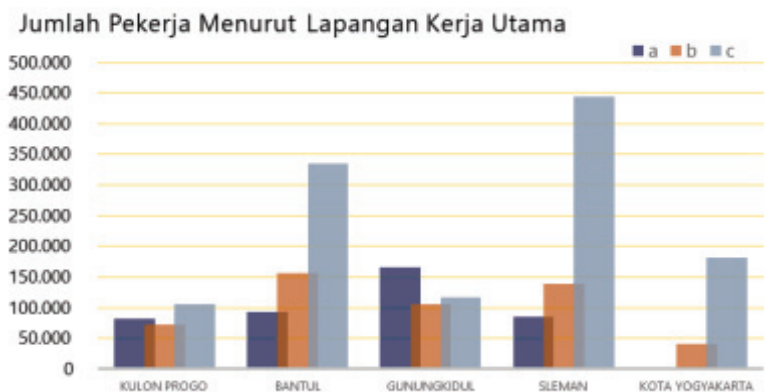
Perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang disebut kepadatan penduduk, dapat dibedakan menjadi dua yaitu kepadatan penduduk *gross* dan *netto*. Kepadatan penduduk *gross* merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas administrasi wilayah, sedangkan kepadatan penduduk *netto* merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas kawasan budidaya saja. Kepadatan penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta adalah 13 jiwa/ha (2020). Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebanyak 178 jiwa/ha dan terendah berada di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 10 jiwa/ha.



Gambar 3.3 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020
Sumber: BPS, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

3.2.2 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Mayoritas penduduk bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda; pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan industri pengolahan. Berdasarkan lapangan kerja utama, 56% penduduk D.I. Yogyakarta bekerja di sektor perdagangan & jasa, transportasi pergudangan, akomodasi dan makan minum, serta jasa-jasa dengan jumlah tertinggi berada di Kabupaten Sleman sebesar 443.541 orang. Jumlah penduduk di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul sebesar 166.150 orang.



Gambar 3.4 Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Provinsi D.I. Yogyakarta
Sumber: BPS, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

Keterangan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi D.I. Yogyakarta:

- a. Pertanian, kehutanan, perikanan.
- b. Pertambangan & Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik & Gas; Pengelolaan Sampah, limbah, daur ulang; konstruksi.
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

3.2.3 Pengangguran

Jumlah Pengangguran di Provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 101.846 jiwa, dengan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) D.I. Yogyakarta sebesar 4,6% dimana nilai ini masih dibawah TPT nasional yaitu sebesar 7,1% pada tahun 2020. Tingkat pengangguran mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 57.036 jiwa. Jumlah pengangguran tertinggi berada di Kota Yogyakarta dan terendah berada di Kabupaten Gunungkidul.

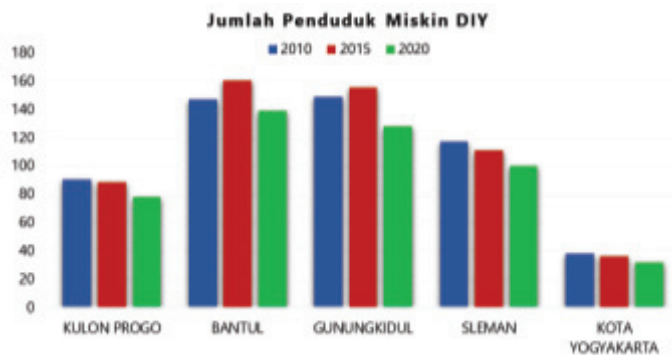


Gambar 3.5 Grafik TPT Provinsi D.I. Yogyakarta 2016-2020

Sumber: BPS, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

3.2.4 Kemiskinan

Kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat disebut dengan istilah kemiskinan Kriteria penduduk miskin di D.I. Yogyakarta adalah penduduk yang pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Rp482.855,- (Bappeda D.I. Yogyakarta). Jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta mengalami penurunan sejak tahun 2010 dari 540 ribu jiwa menjadi 475 ribu jiwa. (BPS, 2021). Pada tahun 2022, D.I. Yogyakarta menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa dengan presentase penduduk miskin mencapai 11,49%.



Gambar 3.6 Grafik Penduduk Miskin Provinsi D.I. Yogyakarta

Sumber: BPS, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi dimana penghasilan sebesar \$1,9/hari, prevalensi stunting tinggi, presentase sanitasi layak rendah, presentase air miinum layak rendah, dan ada/tidaknya target penanganan kumuh 2020-2024.

Tabel 3.2 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Provinsi D.I. Yogyakarta

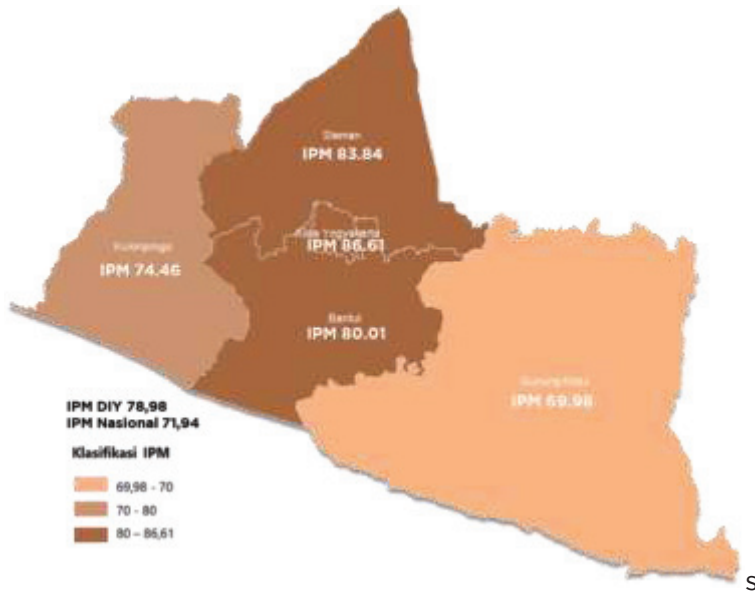
Kabupaten	% Kemiskinan (BPS,2021)	Prevalensi Stunting (SSBGI, 2019)	% Sanitasi Layak (BPS, 2020)	% Sumber Air Minum Layak (BPS, 2020)	Target Kumuh 2020-2024
Kulon Progo	18,01	27,20	95,06	92,56	v
Bantul	13,5	18,50	97,96	97,65	-
Gunungkidul	17,07	23,00	95,80	94,50	-
Sleman	8,12	19,20	97,55	95,20	-

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan data penanggulangan kemiskinan eskترم, D.I. Yogyakarta masuk ke dalam 212 fokus wilayah kemiskinan ekstrem tahun 2022 yang mencakup Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau menentukan level pembangunan suatu wilayah. IPM rata-rata Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2020 adalah 78,98 (di atas rata-rata nasional: 71,94). Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten dengan IPM terendah sebesar 69,98, sedangkan Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan IPM tertinggi sebesar 86,61. Angka harapan hidup terendah berada di Kabupaten Bantul sebesar 73,77 tahun sedangkan tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,20 tahun. Lama sekolah di D.I. Yogyakarta adalah 9,64 dan angka harapan lama sekolah adalah 15,64 tahun. Angka lama harapan lama sekolah tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 11,72 tahun dan 17,6 tahun.



Gambar 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta

Sumber: BPS, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

3.3 Profil Ekonomi

Profil ekonomi mendeskripsikan kondisi ekonomi wilayah perencanaan 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk menyusun analisa perhitungan perencanaan kebutuhan infrastruktur PUPR, diantaranya adalah: PDRB, pendapatan per kapita, sektor unggulan wilayah, serta perkembangan investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).

3.3.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010.

PDRB ADHK Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2020 sebesar 101,68 triliun rupiah yang berkontribusi 4,26% terhadap PDRB Pulau Jawa dan 0,97% terhadap PDB Nasional. Terdapat lima sektor dengan kontribusi PDRB tertinggi di Provinsi DIY pada tahun 2020 yaitu sektor informasi dan komunikasi (13,77%), industri pengolahan (12,42%), konstruksi (9,5%), jasa pendidikan (9,4%), serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (8,39%). Sektor pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum) berada di peringkat ke-6 dengan kontribusi sebesar 8,35%.

Kabupaten dengan PDRB tertinggi adalah Kabupaten Sleman (45,8 triliun rupiah atau 40,43% PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta) tertinggi dari sektor industri pengolahan, konstruksi, dan jasa pendidikan. Kabupaten dengan sumbangan PDRB terendah adalah Kabupaten Gunungkidul (13,5 triliun rupiah). Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2020 sebesar 2,97%, turun dari tahun sebelumnya (6,59%) karena pandemi Covid-19.

3.3.2 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan indikator/tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Selain itu, pendapatan per kapita dijadikan sebagai acuan dalam mengukur kelancaran pelaksanaan aktivitas ekonomi negara. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki PDB per kapita sebesar Rp 71 Juta atau sebesar Rp 5,91 Juta/bulan. Rata-rata pendapatan per kapita D.I. Yogyakarta adalah Rp 3,67 Juta per bulan (dibawah pendapatan per kapita nasional). Kabupaten dengan pendapatan per kapita tertinggi adalah Kota Yogyakarta dengan pendapatan Rp 78,8 Juta, dan terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan pendapatan Rp 19,5 Juta.

Tabel 3.3 Pendapatan Per Kapita Provinsi D.I. Yogyakarta (2018-2022)

Kabupaten/Kota	PDRB per kapita (dalam ribu)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	18.152	20.300	19.453	19.938	20.869
Bantul	18.030	18.728	19.141	19.806	20.538
Gunung Kidul	17.542	18.159	18.124	18.766	19.447
Sleman	27.462	28.659	30.085	31.462	32.762
Kota Yogyakarta	61.117	63.899	72.291	75.493	78.813

Sumber: BPS, 2022

3.3.3 Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor ekonomi unggulan Provinsi D.I. Yogyakarta antara lain industri, pertanian, dan pariwisata.

A. Sektor Industri

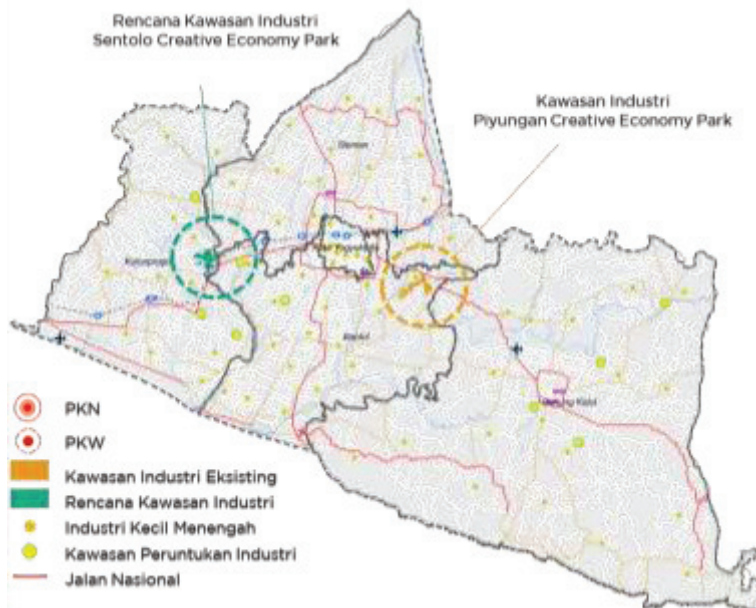
Berisi tentang profil industri dan perkembangan investasi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Industri pengolahan D.I. Yogyakarta didominasi oleh komoditas industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian serta barang logam. PDRB sektor industri pengolahan menyumbang 12,2 % PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta. Jenis industri pengolahan tertinggi berasal dari Industri Makanan dan Minuman (Rp7,2 Triliun), Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (Rp1,37 Triliun), dan Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik (Rp0,79 Triliun). Industri di Provinsi DIY didominasi oleh industri mikro, kecil, dan sedang. Terdapat Kawasan Industri Piyungan *Creative Economy Park* dan rencana pengembangan rencana Kawasan Industri Sentolo *Creative Economy Park* yang menjadi

kawasan industri kewenangan Provinsi D.I. Yogyakarta (tidak terdapat dalam RIPIN).

Tabel 3.4 Jumlah Industri Pengolahan di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Industri Besar dan Sedang	Industri Mikro dan Kecil
Kulon Progo	15	21.044
Bantul	167	46.246
Gunungkidul	19	48.663
Sleman	222	24.280
Yogyakarta	90	6.425
D.I. Yogyakarta	513	146.658

Sumber: BPS, 2021

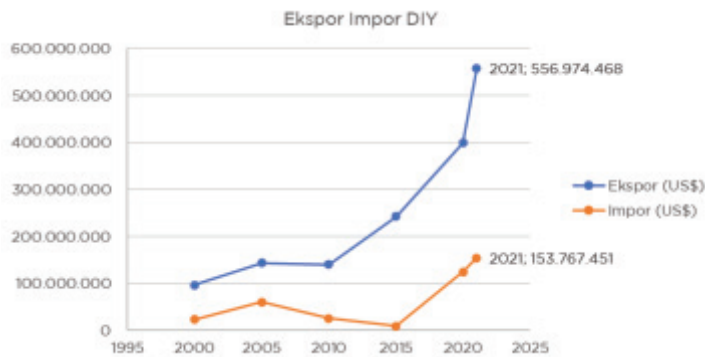


Gambar 3.8 Peta Sebaran Kawasan Industri di Provinsi D.I. Yogyakarta

Sumber: Berbagai sumber diolah oleh Tim Puswil II, 2022

B. Ekspor Impor

Ekspor dengan nilai tertinggi dari D.I. Yogyakarta berasal dari komoditas pakaian jadi bukan rajutan, sedangkan impor dengan nilai tertinggi berupa *sparepart* mesin pertanian dan tekstil. Tujuan ekspor tertinggi adalah AS (USD17,9 juta/42,93%), disusul Jerman sebesar USD4,2 juta (10,07%), dan Australia sebesar USD2,7 juta (6,47%). Nilai ekspor ke negara ASEAN sebesar USD0,7 juta (1,68%), dimana Singapura menjadi negara dengan ekspor tertinggi (USD0,3 juta). Komoditas ekspor terbesar adalah pakaian jadi bukan rajutan, perabot, penerangan rumah, dan barang-barang rajutan.



Gambar 3.9 Perkembangan Nilai Ekspor Impor Provinsi D.I. Yogyakarta
Sumber: BPS, 2022

Tujuan impor tertinggi D.I. Yogyakarta adalah negara Tiongkok dengan valuasi USD3,4 juta (39,08%), disusul Hongkong sebesar USD 2,0 juta (22,99%), dan Taiwan sebesar USD1,2 juta (13,79%). Nilai impor dari negara ASEAN tertinggi dari Vietnam senilai USD0,2 juta (2,3%). Komoditas impor terbesar adalah lokomotif dan peralatan kereta api, filamen buatan, dan kain rajutan.

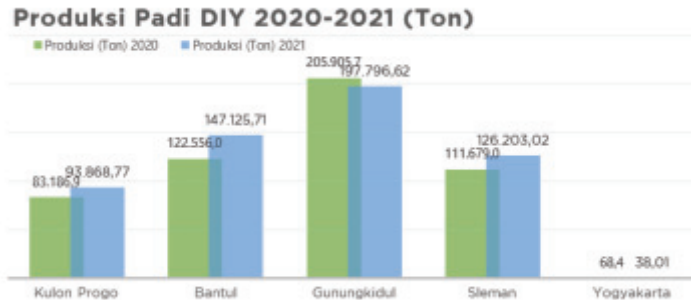


Gambar 3.10 Sebaran Tujuan Ekspor Impor Provinsi D.I. Yogyakarta
Sumber: BPS, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

C. Sektor Pertanian

Luas panen padi di D.I. Yogyakarta pada 2020 seluas 110,55 ribu hektar dengan total produksi padi sebesar 523,4 ribu ton gabah kering giling. Dari jumlah tersebut, Provinsi D.I. Yogyakarta berkontribusi sebesar 0,96% terhadap produksi padi nasional. Berdasarkan data *Luas Panen dan Produksi Padi di DI Yogyakarta (2020)*, produksi padi tertinggi dihasilkan pada bulan April 2020 (66,24 ribu ton) dan terendah pada bulan November 2020 (7,2 ribu ton). Produksi padi pada 2020 turun sebesar 1,89% dari produksi padi tahun 2019 sebesar 533,48 ribu ton. Sedangkan luas panen pada 2020 menurun 0,83% (0,93 ha) dibandingkan luas panen 2019 seluas

111,48 ha. Distribusi PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki persentase masing masing yaitu Tanaman Pangan (42%), Tanaman Hortikultura (29%), Peternakan (23%), Pertanian, perburuan dan jasa pertanian (5%).



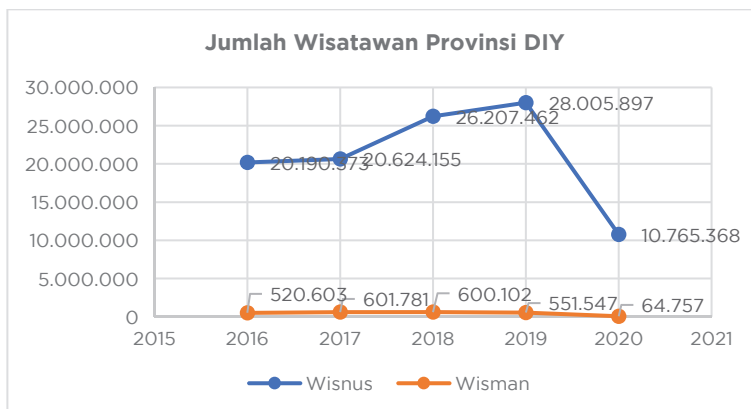
Gambar 3.11 Produksi Padi Provinsi D.I. Yogyakarta 2020-2021

Sumber: BPS, 2022

D. Sektor Pariwisata

Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan ke D.I. Yogyakarta sebanyak 10,8 juta jiwa, turun sebesar 17,7 juta jiwa (62%) dikarenakan pandemi covid-19. Wisatawan yang berkunjung di Provinsi DIY didominasi oleh wisatawan domestik sebanyak 28 juta jiwa pada 2019. Jumlah ini berada di urutan enam terbesar kunjungan wisatawan domestik di Indonesia.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi D.I. Yogyakarta 2016-2020



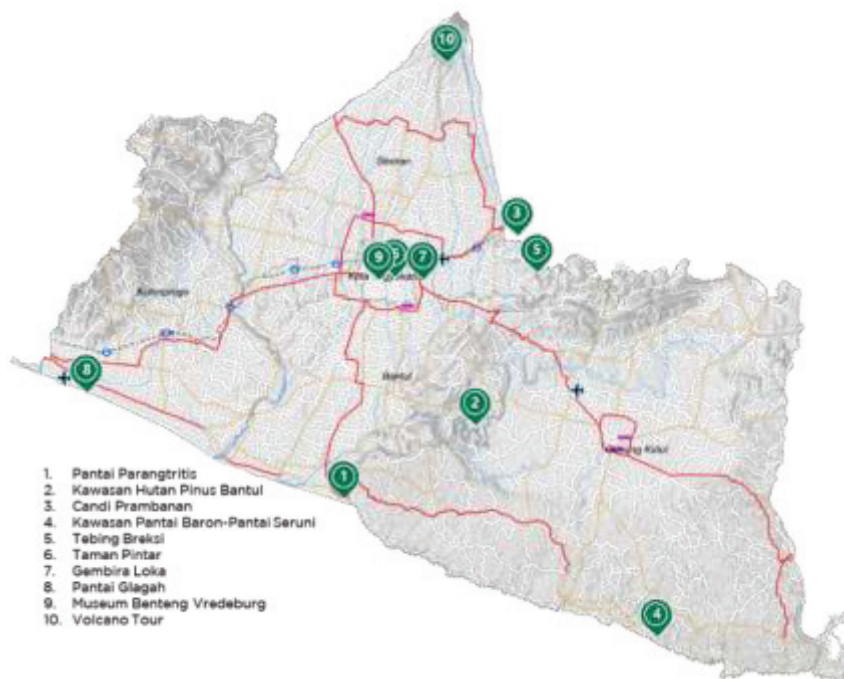
Gambar 3.12 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi D.I. Yogyakarta 2016-2020

Sumber: Statistik Kepariwisata D.I. Yogyakarta, 2021

Terdapat 280 DTW di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan keanekaragaman daya tarik alam, wisata, belanja, kuliner, pendidikan dan desa wisata. Terdapat 106 destinasi budaya berupa alun-alun, arca, candi, bangunan cagar budaya, kraton, museum, masjid, dan makam raja. Juga teradapat 93 destinasi wisata alam dengan DTW berupa agrowisata, air terjun, goa, gunung, suaka margasatwa, pantai, hutan, dan waduk. Selain itu, Provinsi DIY mempunyai destinasi wisata kuliner, belanja, dan pendidikan.

Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 5 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yaitu KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Prambanan-Kalasan, KSPN Pansela DIY, KSPN Karst Gunungkidul, dan KSPN Merapi-Merbabu. Selain KSPN, juga terdapat 4 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional) yaitu KPPN Borobudur-Mendut -Pawon dsk, KPPN Prambanan-Kalasan dsk, KPPN Yogyakarta Kota dsk, KPPN Pantai Selatan Yogyakarta dsk, dan KPPN Merapi-Merbabu dsk.

Provinsi DIY memiliki 10 destinasi wisata utama dengan total kunjungan mencapai 10 juta pengunjung, yaitu Pantai Parangtritis, Kawasan Hutan Pinus, Candi Prambanan, Kawasan Pantai Baron-Pantai Seruni, Tebing Breksi, Taman Pintar, Gembira Loka, Pantai Glagah, Museum Benteng Vredenburg, Volcano Tour. Hampir 60% wisatawan berkunjung ke Pantai Parangtritis, Kawasan Hutan Pinus, dan Candi Prambanan. Sebaran destinasi wisata domestik dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.13 Sebaran Destinasi Wisatawan Domestik

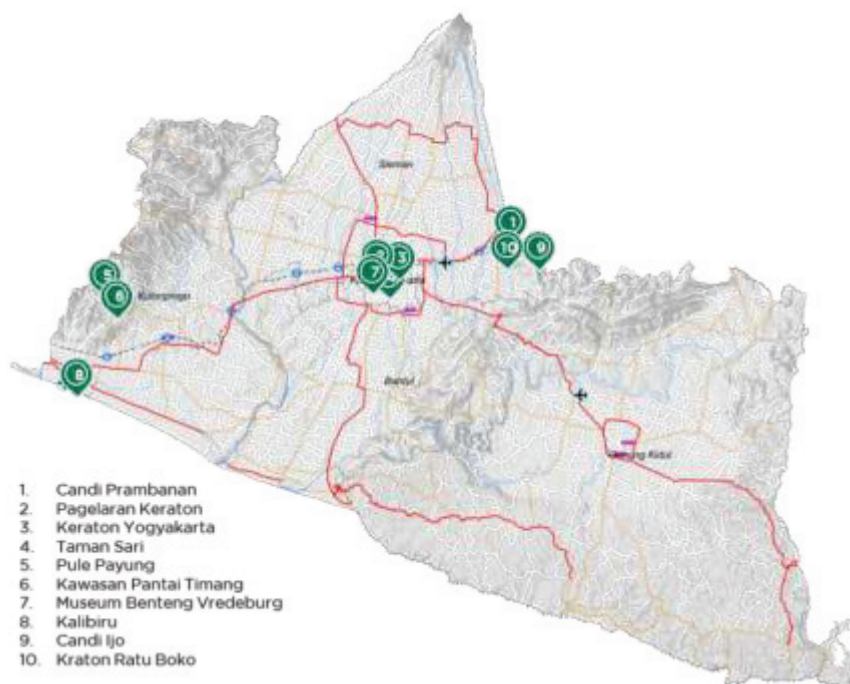
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pantai Parangtritis menjadi DTW yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik (2.789.354 jiwa), diikuti Hutan Pinus Bantul (2.583.049 jiwa), dan Candi Prambanan (2.326.128 jiwa). Sebagian besar wisnus berkunjung di DTW yang terletak di Kota Yogyakarta, terutama di Kawasan Malioboro, seperti Taman Pintar dan Museum Benteng Vredenburg, serta Kebun Binatang Gembira Loka.

Terkait kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), pada tahun 2019 jumlah pengunjung wisman sebesar 551.547 (2% dari total kunjungan).

Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 3% dari total wisman yang mengunjungi Indonesia (16.106.954 jiwa). Sepuluh destinasi wisata utama yang dikunjungi wisman yaitu Candi Prambanan, Pagelaran Kraton, Kraton Yogyakarta, Taman Sari, Pule Payung, Kawasan Pantai Timang, Museum Benteng Vredeburg, Kalibiru, Candi Ijo, dan Kraton Ratu Boko.

DTW bertemakan sejarah, budaya, dan wisata minat khusus menjadi tempat pilihan wisman dalam berwisata. Candi Prambanan menjadi DTW yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara (183.527 jiwa), diikuti dengan Kraton, Taman Sari, Pantai Timang, Museum Benteng Vredeburg, dan Candi Ijo. Sebaran destinasi wisata mancanegara dapat dilihat pada gambar berikut.



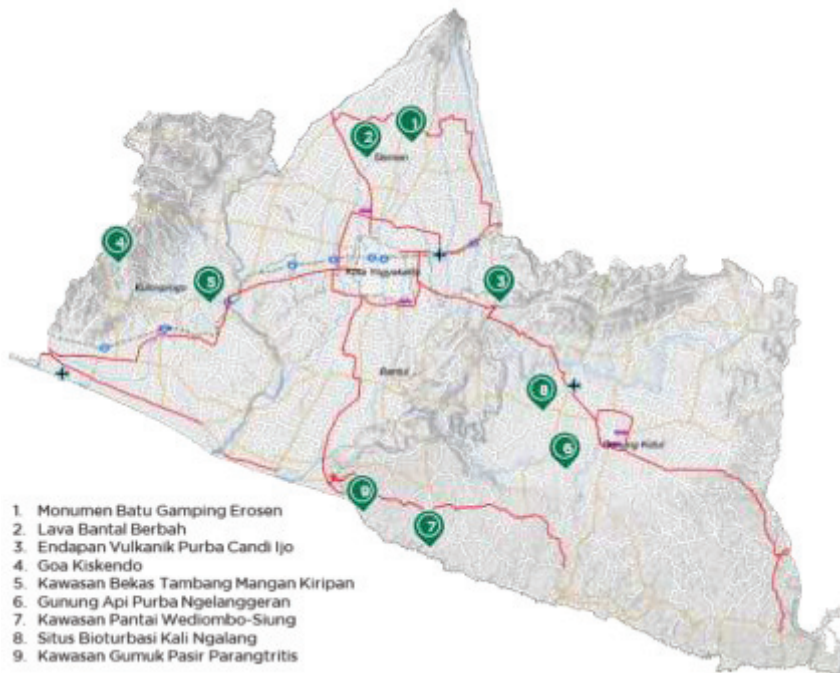
Gambar 3.14 Sebaran Destinasi Wisatawan Mancanegara

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pada tahun 2019, mayoritas wisatawan domestik berasal dari Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (30%). Mayoritas wisatawan yang berkunjung D.I. Yogyakarta-Borobudur masuk melalui Bandara Yogyakarta, sebanyak 96% merupakan wisatawan domestik, sebesar 60% pengunjung Candi Borobudur juga berkunjung ke Candi Prambanan, motivasi utama berwisata adalah wisata budaya (82%), wisata alam (63%), dan MICE (53%). (Sumber: ITMP Borobudur – Yogyakarta - Prambanan, 2019).

Berdasarkan Pergub D.I. Yogyakarta No 115 Tahun 2015 tentang pelestarian kawasan warisan Geologi, terdapat beberapa titik *geoheritage* yang menjadi destinasi wisata di D.I. Yogyakarta yaitu Monumen Batu Gamping Eosen, Lava Bantal Berbah, Endapan Vulkanik Purba, Candi Ijo, Goa

Kiskendo, Kawasan Bekas Tambang Mangan Kiripan, Gunung Api Purba Ngelanggeran, Situs Bioturbasi Kali Ngalang, dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.

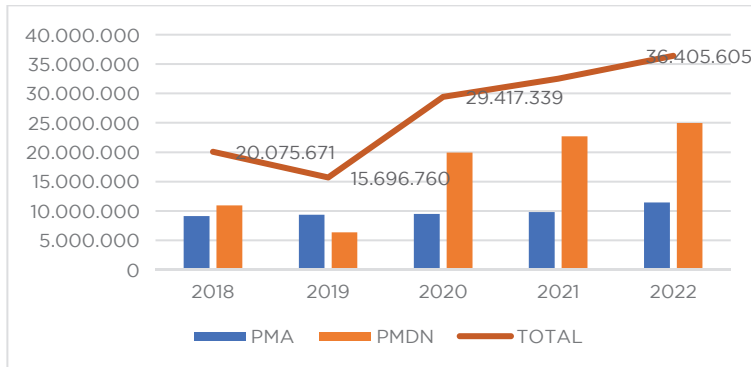


Gambar 3.15 Sebaran *Geoheritage* Provinsi D.I. Yogyakarta

Sumber: Berbagai Sumber Diolah Oleh Penyusun, 2022

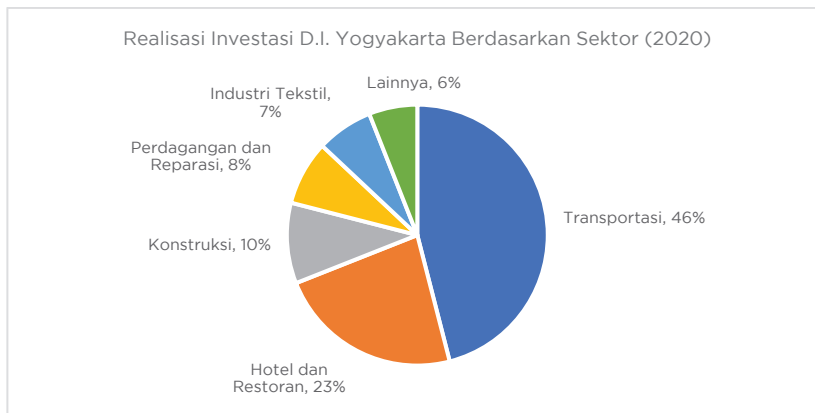
3.3.4 Perkembangan Investasi

Investasi di Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami penurunan pada 2018-2019 dan mulai mengalami peningkatan kembali pada 2020-2022 karena banyaknya kebijakan terkait pemulihan ekonomi D.I. Yogyakarta. Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi berada di tahun 2022 dan nilainya stagnan dari tahun 2018-2022. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDA) meningkat signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2018. Total nilai PMA dan PMDA Provinsi DIY pada tahun 2022 mencapai 36,4 juta USD.



Gambar 3.16 Data Investasi Provinsi D.I. Yogyakarta 2018 – 2022 (Juta Rupiah)
Sumber: Diolah Berbagai Sumber Oleh Tim Puswil II; Permenkeu No.193/PMK.07/2022; BPS Provinsi D.I. Yogyakarta 2022

Realisasi investasi Provinsi DIY yang paling besar berada pada sektor transportasi, diikuti oleh hotel dan restoran. Realisasi investasi hotel dan restoran terus mengalami peningkatan dan masuk ke dalam 2 besar realisasi investasi di D.I. Yogyakarta. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah hotel, khususnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Akibatnya di kedua wilayah tersebut terjadi kelebihan pasokan kamar hotel. Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Pemerintah menghentikan pemberian izin pembangunan hotel kecuali hotel bintang empat dan lima dengan syarat ketat. Salah satunya adalah luas lahan minimum.



Gambar 3.17 Realisasi Investasi D.I. Yogyakarta Berdasarkan Sektor (2020)
Sumber: DPMPTSP D. I. Yogyakarta, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

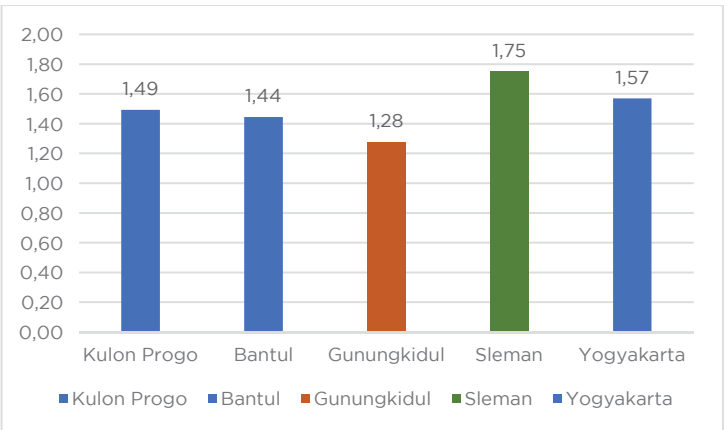
Ketahanan investasi di Kota Yogyakarta lebih kuat dibandingkan dengan Borobudur, dikarenakan adanya permintaan pasar akan *MICE* dan rekreasi pelajar/mahasiswa/perusahaan yang membutuhkan fasilitas penginapan yang baik. Dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, penginapan di Borobudur cenderung tinggi saat tiba musim liburan karena belum didukung dengan kinerja pelayanan akomodasi yang memadai.

3.3.5 Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)

KFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Kapasitas tersebut kemudian dipetakan untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio KFD.

Peta KFD dapat digunakan untuk: a) pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; b) penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; c) pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah; d) pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/atau e) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi D.I. Yogyakarta tergolong sangat rendah (1,23). Sedangkan, indeks kapasitas fiskal kab/kota yang tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah Kabupaten Sleman sebesar 1,75 (sedang), diikuti oleh Kota Yogyakarta sebesar 1,57 (sedang), Kabupaten Kulon Progo sebesar 1,49 (rendah), Kabupaten Bantul sebesar 1,44 (rendah) dan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,27 (rendah).



Gambar 3.18 Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, tahun 2022
Sumber: Diolah Berbagai Sumber Oleh Tim Puswil II; Permenkeu No.193/PMK.07/2022; BPS Provinsi D.I. Yogyakarta 2022

Indeks kapasitas fiskal Provinsi D.I. Yogyakarta dibandingkan provinsi lain se-Indonesia setara dengan Provinsi Jambi dan Sulawesi Tenggara dengan kategori nilai berkisar antara 1,20-1,30. Kapasitas fiskal mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya untuk meningkatkan investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi.

3.4 Profil Sosial Budaya

Profil sosial budaya terdiri dari pembahasan terkait cagar budaya yang harus dilestarikan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Meskipun tidak terdapat masyarakat adat di Provinsi D.I. Yogyakarta, namun pada bab ini akan dibahas profil budaya yang diperkaya dengan upacara adat sebagai satu-kesatuan budaya di Provinsi D.I. Yogyakarta.

A. Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

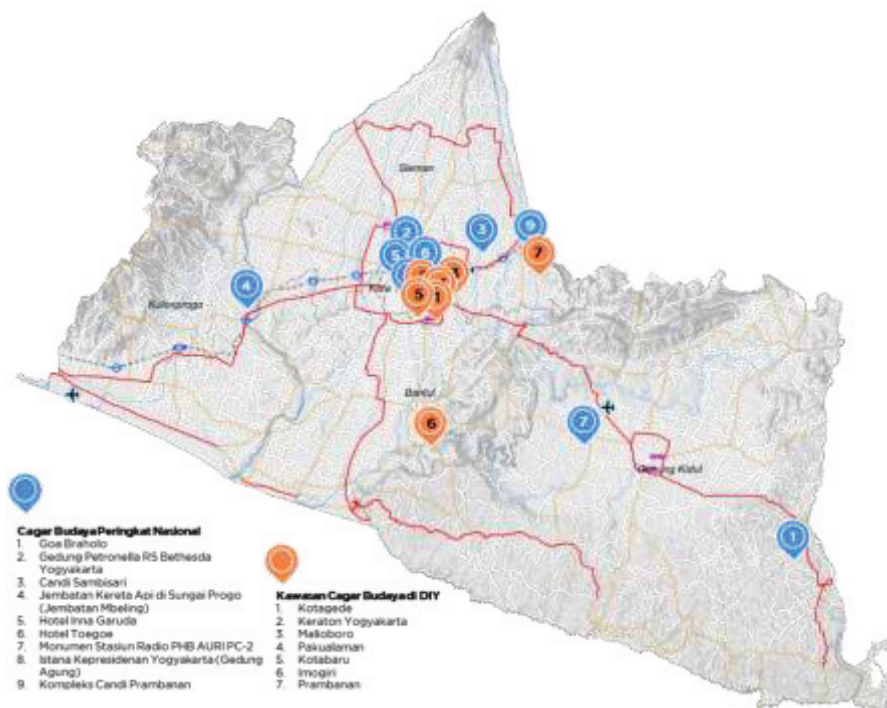
Provinsi DIY adalah wilayah yang dikenal dengan berbagai kekayaan budaya, yang tidak dapat dilepaskan dari peninggalan kebudayaan fisik berupa cagar budaya. Terdapat sembilan cagar budaya peringkat nasional di Provinsi DIY yang terdiri dari 6 bangunan cagar budaya, dua situs cagar budaya, dan satu struktur cagar budaya. Kesembilan cagar budaya peringkat nasional itu adalah Goa Braholo, Gedung Petronella RS Bethesda Yogyakarta, Candi Sambisari, Jembatan Kereta Api di Sungai Progo (Jembatan Mbeling), Hotel Inna Garuda, Hotel Toegoe, Monumen Stasiun Radio PHB AURI PC-2, Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), dan Kompleks Candi Prambanan.

Selain cagar budaya nasional, berdasarkan data Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Provinsi DIY, terdapat 1.622 benda cagar budaya, 260 struktur cagar budaya, 1.465 bangunan cagar budaya, 323 situs cagar budaya, dan 31 kawasan cagar budaya. Mengacu pada Surat Keputusan Gubernur No. 186/2011 D.I. Yogyakarta, terdapat enam kawasan cagar budaya yaitu Kotagede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kotabaru, dan Imogiri.

1. **Kotagede** adalah kota kuno bekas ibukota Kerajaan Mataram Islam yang berdiri tahun 1532 M, secara administrasi terletak di kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Kotagede merupakan daerah budaya dengan banyak peninggalan sejarah baik arsitektur bangunan maupun kehidupan sosial budaya.
2. **Kraton** Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bangunan istana resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I.
3. **Malioboro** merupakan kawasan jalan di Kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan Kantor Pos Yogyakarta dan menjadi poros garis imajiner Kraton Yogyakarta.

Kawasan ini sudah diusulkan menjadi cagar budaya UNESCO sejak 2014 yang saat ini masih dalam penilaian UNESCO.

4. **Pakualaman** merupakan negara sendiri sebelum 1950. Namun pada tahun 1950 status keduanya diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi (Daerah Istimewa Yogyakarta). Saat ini Pakualaman menjadi daerah tempat tinggal Wakil Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta.
5. **Kotabaru** merupakan kota bersejarah dengan peninggalan bangunan-bangunan berarsitektur Eropa. Kotabaru ditetapkan sebagai kawasan *heritage* dan menjadi kawasan penopang keistimewaan D.I. Yogyakarta.
6. **Imogiri** merupakan salah satu lokasi pemakaman raja-raja Mataram Baru yang dibangun oleh Sultan Agung, yang hingga saat ini masih digunakan untuk pemakaman keturunan raja Mataram Yogyakarta dan Surakarta.



Gambar 3.19 Sebaran Cagar Budaya Nasional di Provinsi D.I. Yogyakarta

Sumber: Kemendikbud diolah oleh Puswil II, 2022

Salah satu cagar budaya tingkat Provinsi DIY telah diajukan ke dalam *tentative list* cagar budaya dunia UNESCO oleh Gubernur DIY, yaitu Sumbu Filosofis Yogyakarta. Tema yang diangkat adalah *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*. Sumbu filosofis adalah konsep penataan tata ruang Keraton Yogyakarta yang merupakan perwujudan dari Simbol Daur Hidup Manusia yang diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Proses pengajuan telah dimulai sejak 2014, yang saat ini sudah masuk ke dalam *tentative list* dan menunggu pembahasan dalam *Extended 45th Session of the World Heritage Committee* di Riyadh, Saudi Arabia pada

September 2023. Terdapat dua komponen yang masuk ke dalam daftar warisan dunia, yaitu:

- 1) Komponen pertama (Sumbu Filosofi) adalah sumbu selatan-utara sepanjang 6 km di Kota Yogyakarta, dengan Kompleks Kraton sebagai pusatnya. Sumbu Filosofi Selatan termasuk didalamnya adalah Beteng, Plengkung dan Pojok Beteng, Kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Tamansari, Kagungan Dalem Masjid Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sedangkan Sumbu Filosofi Utara adalah Pasar Beringharjo, Kompleks Kepatihan dan Tugu.
- 2) Komponen kedua (Makam Imogiri) adalah makam kerajaan di Imogiri, terletak 16 km ke arah tenggara. Komponen kedua ini terdiri dari makam raja-raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Imogiri, Dalem Bupati Puralaya Kraton Yogyakarta, dan Rute Pemakaman Sultan.

Selain itu, juga terdapat struktur cagar budaya berupa Selokan Mataram (bagian dari DI Karangtalun) sesuai No. 231/K/2021 tentang penetapan Selokan Mataram. Kanal irigasi ini dibangun oleh Hamengkubowono IX pada 1944 untuk menghindarkan rakyat D.I. Yogyakarta dari kerja romusha Jepang. Kanal irigasi ini hingga saat ini masih digunakan sebagai daerah irigasi kewenangan nasional di bawah pengelolaan BBWS Serayu-Opak.

B. Upacara Adat

Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa yang ditandai dengan adanya Keraton Yogyakarta dan kekayaan budayanya. Tradisi dan kebudayaan tersebut tidak hanya dijadikan khasanah budaya bagi masyarakat setempat, namun juga mampu menarik kedatangan wisatawan asing dan domestik. Beberapa upacara adat yang masih dilestarikan antara lain:

1. Upacara Grebeg Maulid dan Sekaten merupakan rangkaian acara Sekaten yang digelar untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW (Maulud Nabi). Setiap tahunnya, Keraton Yogyakarta mengadakan tradisi Grebeg Maulud pada tanggal 12 bulan Maulud (Rabiul Awal). Upacara Sekaten dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 5 - 11 dengan puncak acara keluarnya Gunung dari Keraton menuju Masjid Besar.
2. Upacara Numplak Wajik dilaksanakan empat hari menjelang penyelenggaraan Upacara Grebeg Mulud, tepatnya pada tanggal 8 bulan Mulud.
3. Upacara Labuhan Parangkusumo adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh raja-raja di Keraton Yogyakarta sebagai peringatan penobatan.
4. Upacara Kamasan Pusaka atau siraman pusaka adalah tradisi memandikan pusaka milik Ngarsa Dalem (milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat). Tradisi upacara ini diselenggarakan setiap bulan Sura (Muharram).

5. Upacara Saparan atau *bekakak* adalah tradisi Jawa yang dilaksanakan untuk mengenang jasa seorang abdi dalem kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yakni Ki Wirosuto. Upacara ini dilaksanakan pada bulan Safar dalam kalender Jawa.



Gambar 3.20 Ragam Upacara Adat di Provinsi D.I. Yogyakarta
Sumber: Berbagai sumber diolah oleh Tim Puswil II, 2022

3.5 Profil Interaksi Antarkawasan

Interaksi antar KSPN di Provinsi D.I. Yogyakarta ditunjukkan dengan perkiraan jarak tempuh, waktu tempuh, dan kecepatan rata-rata. Jarak interaksi antar KSPN terdekat di Provinsi DIY adalah KSPN Prambanan dan KSPN Yogyakarta. Sedangkan jarak antar KSPN terjauh adalah KSPN Gunungkidul dan KSPN Prambanan. Jarak KSPN secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Interaksi Antar-KSPN di Provinsi D.I. Yogyakarta

KSPN	Jarak Tempuh (km)	Waktu tempuh (jam)	Kecepatan (km/jam)
Prambanan - Yogyakarta	16,6	0,6	28,5
Yogyakarta - Pansela	29,7	1,0	28,7
Pansela - Gunungkidul	50	1,2	43,5
Gunungkidul - Prambanan	62,6	1,7	37,9

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

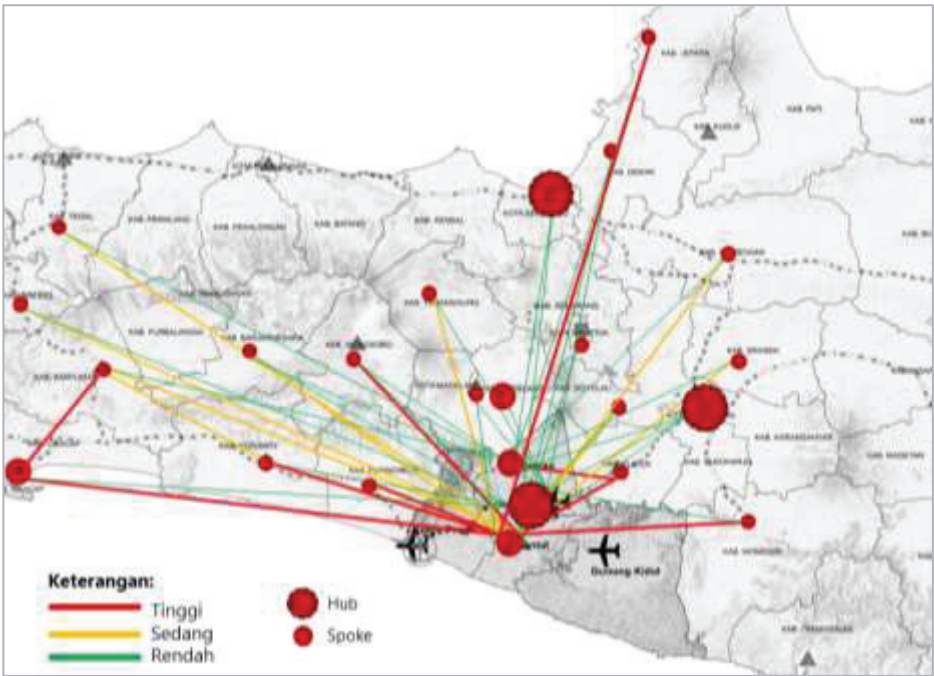
Interaksi antarkawasan di Provinsi D.I. Yogyakarta dapat juga dilihat berdasarkan orientasi setiap kawasan dari Bandara Internasional Kulon Progo (YIA). KSPN terdekat dari bandara YIA adalah KSPN Yogyakarta Kota dan KSPN Pansela, sedangkan KSPN terjauh dari YIA adalah KSPN Karst Gunungkidul. Secara lebih rinci interaksi antar hub dan KSPN diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6 Interaksi Antar Hub dan KSPN di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Kawasan Strategis		Jarak (km)	Waktu (jam)	Kecepatan (km/jam)*
	Tujuan	Dari			
1.	KSPN Prambanan	YIA	65,3	1,9	35,3
2.	KSPN Yogyakarta	YIA	43,5	1,3	33,9
3.	KSPN Pansela	YIA	40,4	1,1	36,7
4.	KSPN Karst Gunungkidul	YIA	90,6	2,3	39,4
5.	KSPN Merapi-Merbabu	YIA	68,1	1,8	37,1

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Pada skala regional, pergerakan asal-tujuan DIY menuju Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi. Pergerakan dengan kategori tinggi terjadi antara wilayah DIY dan beberapa kota di Jawa Tengah yaitu Wonogiri, Klaten Banyumas, Kebumen, Purworejo, dan Cilacap. Secara lebih rinci, pergerakan asal-tujuan DIY dengan kota sekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.21 Peta Destination - Origin Provinsi D.I. Yogyakarta

Sumber: Survei ATTN, 2018

Berdasarkan analisis matriks pergerakan asal-tujuan dapat disimpulkan bahwa koridor selatan DIY mempunyai pergerakan yang tinggi karena adanya hub transportasi dan destinasi wisata di sisi selatan Pulau Jawa. Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai salah satu hub utama wilayah Jawa selatan mempunyai dua bandara utama (Bandara Adisucipto dan YIA) dan Stasiun Yogyakarta. PKW Bantul dan PKW Sleman berperan sebagai spoke di D.I. Yogyakarta yang terhubung dengan PKW Magelang, PKW Kebumen, dan PKW Klaten di Jawa Tengah.

BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Deskripsi mengenai kondisi infrastruktur bidang PUPR dan non-PUPR di Provinsi DIY, dijelaskan dalam bab ini. Pembahasan pada profil dan kinerja infrastruktur bidang PUPR terbagi atas kajian infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. Sedangkan pada penjelasan infrastruktur bidang non-PUPR terdiri dari bahasan infrastruktur perhubungan, energi, dan jaringan telekomunikasi. Dari profil dan kinerja infrastruktur ini menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis (Bab 5) dan analisis kebutuhan infrastruktur (Bab 7).

4.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

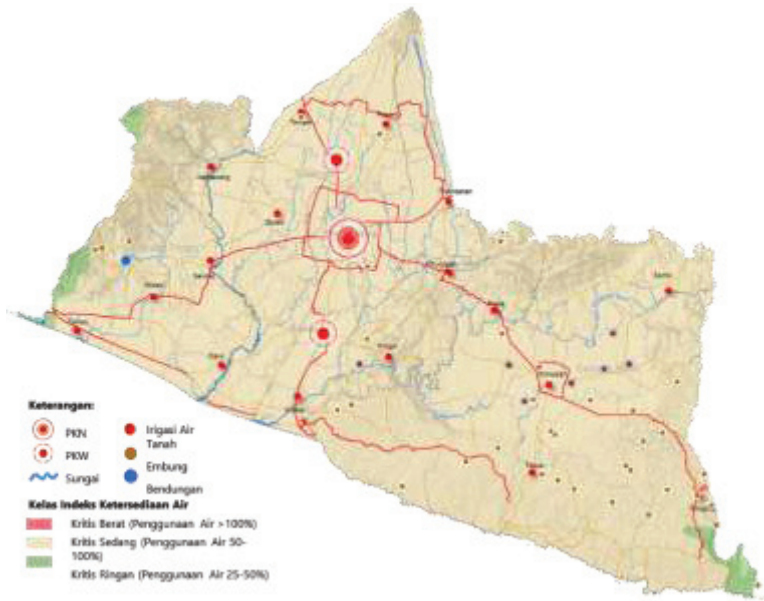
Sumber daya air adalah salah satu sumber daya alam yang berguna atau potensial bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Sumber daya air termasuk sumber daya alam yang tidak hidup (abiotik) namun dapat diperbaharui (*renewable resources*). Berdasarkan penjelasan UU No. 17 Tahun 2019, sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.

Provinsi DIY memiliki potensi sumber daya air berupa satu buah waduk dengan kapasitas tampung 25 juta m³, 4 sungai utama sebagai sumber air baku, 245 buah embung, dan 3 daerah irigasi kewenangan pusat. Total DI pusat yang dialiri seluas 8.252 ha, DI provinsi 10.157 ha, dan DI kabupaten seluas 25.508 ha.

Infrastruktur SDA telah melayani kebutuhan irigasi, mengurangi banjir, dan menyediakan air baku untuk domestik, industri, dan pariwisata. Namun, pelayanan infrastruktur SDA masih perlu ditingkatkan untuk menjamin produktivitas pertanian, ketahanan bencana, dan pemenuhan air baku bagi masyarakat.

4.1.1 Infrastruktur Penyediaan Air Baku

Upaya pengelolaan sumber daya air di Provinsi DIY dilakukan melalui penentuan Wilayah Sungai (WS). Provinsi DIY berada di WS Progo - Opak - Serang dan WS Serayu - Bogowonto di bawah koordinasi BBWS Serayu - Opak. Dari data yang tersedia, mayoritas wilayah Provinsi DIY memiliki indeks ketersediaan air kritis sedang dengan penggunaan air rata-rata 50-100%. Tidak terdapat lahan dengan kelas indeks kritis berat. Luas lahan kritis sedang seluas 311.234,42 ha (98%) dan luas lahan kritis ringan sebesar 5.528,24 ha (2%).



Gambar 4.1 Penyediaan Air Baku Provinsi DIY

Sumber: Berbagai sumber, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

Air baku Provinsi DIY berasal dari Waduk Sermo, satu-satunya bendungan yang ada, dimana air bakunya berasal dari Sungai Progo. Terdapat 4 sungai utama lainnya dengan debit air yang besar yaitu Sungai Serang, Sungai Opak, Sungai Progo, dan Sungai Oyo. Selain dari air permukaan, Kabupaten Gunungkidul dengan bentang alam karst mengambil air baku dari keberadaan sungai bawah tanah (SBT) karena langkanya sumber air permukaan. Salah satu sumber air baku sumur bawah tanah dengan potensi terbesar adalah SBT Bribin sebesar 750 liter/detik, namun baru dimanfaatkan 10% dari total potensinya. Pengelolaan air baku dari SBT Bribin diwujudkan dengan pembangunan Bendung Bribin (untuk menaikkan elevasi air) pada tahun 2014. Namun, saat ini bendung tersebut mengalami kerusakan karena badai cempaka tahun 2018 dan mengganggu pasokan air baku bagi wilayah sekitarnya.

Tabel 4.1 Sumber Air Baku Provinsi DIY

Kab/Kota	DAS	Sumber Air Baku	Potensi Air Baku (m ³ /detik)
Gunungkidul	-	SBT Seropan	0,95
		SBT Songgilap	0,01
		SBT Bribin	0,75
		SBT Baron	0,80
		SBT Ngobaran	0,18
	Sub-DAS Oyo	Sungai Oyo	9,31
Kulon Progo	DAS Serang	Sungai Ngrancah (Waduk Sermo)	10,83
Kulon Progo, Sleman	DAS Progo	Sungai Progo	120,88
YK, Sleman, Bantul	DAS Opak	Sungai Opak	12,35
Total			156,06

Sumber: Berbagai sumber, diolah oleh Tim Puswil II, 2022

4.1.2 Infrastruktur Penyediaan Irigasi

Berdasarkan kewenangannya, terdapat 3 DI kewenangan pusat di Provinsi D.I. Yogyakarta seluas 8.279,63 ha. DI tersebut meliputi DI Karangtalun (3.243,14 ha), DI Kalibawang (4.946,56 ha), dan DI Tuk Kuning (89,93 ha). Untuk mendukung peran Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional, D.I. Yogyakarta berkontribusi 0,98% terhadap produksi padi nasional. Luas areal sawah di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 76.390 ha dengan luas LP2B sebesar 70.437 ha. Luas LP2B yang belum memiliki daerah irigasi (DI) sebesar 33.078 ha (47% dari luas LP2B).

Tabel 4.2 Luas DI dan LP2B Provinsi DIY

Kabupaten	LP2B (ha)	DI Pusat (ha)	DI Provinsi (ha)	DI Kabupaten (ha)
Bantul	14.147,19	309,94	5.895,26	6.474,78
Gunung Kidul	27.509,32	-	1.549,42	1.980,49
Kota Yogyakarta	86,84	9,91	36,71	12,20
Kulonprogo	9.759,87	4.917,18	1.848,02	3.142,39
Sleman	18.969,95	3.015,09	828,29	13.898,42
Total (ha)	70.473,17	8.252,12	10.157,70	25.508,29

Sumber: Pusdatin PUPR, 2022

Terdapat beberapa bendung irigasi di DIY yaitu Bendung Tinalah (1,5 liter/detik) bersumber dari Sungai Tinalah dan saat ini dalam kondisi rusak. Juga terdapat *intake* Banyusoco dengan potensi air baku sebesar 200 liter/detik (berasal Kali Opak 100 liter/detik & mata air 100 liter/detik). *Intake* ini direncanakan sebagai sumber air baku SPAM Banyusoco (*beyond* 2025) yang melayani Kabupaten Gunungkidul sisi utara dan KSPN Prambanan. Sebelum SPAM Banyusoco dibangun, air baku di KSPN Prambanan saat ini dipenuhi dari *intake* Pendekan dan sedang dibangun SPAM Berbah dengan kapasitas 50 liter/detik.

Irigasi di sisi selatan DIY didukung dengan adanya Bendung Kamijoro bersumber dari Kali Progo yang mengalir DI Pijenan seluas 2.370 ha (kewenangan provinsi). Bendung ini juga berfungsi sebagai jalan akses penghubung Kabupaten Kulon Progo - Kabupaten Bantul. Bendung Kamijoro direncanakan sebagai sumber air baku SPAM Kamijoro (300 liter/detik) yang melayani Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Pembagian layanan meliputi Aerotropolis YIA sebesar 100 liter/detik. Sedangkan KI Sentolo, KI Sedayu, dan Kabupaten Bantul bagian selatan sebesar 200 liter/detik. Pembangunan SPAM Kamijoro belum dilaksanakan karena masih dalam tahap penyiapan *readiness criteria* (penyesuaian dokling dan pembebasan lahan).

Kawasan pertanian di sisi utara barat DIY dialiri oleh Bendung Karangtalun dengan luasan DI Karangtalun sebesar 5.159 ha. Terdapat saluran irigasi yang ditetapkan sebagai cagar budaya yaitu Selokan Mataram (ke arah timur) dan Saluran Van Der Wijk (arah selatan). Saluran van der Wijk berfungsi untuk mengalir 20.000 ha sawah di Kabupaten Bantul. Saluran ini dibangun pada 1909-1932 oleh Belanda untuk mengalir perkebunan tebu

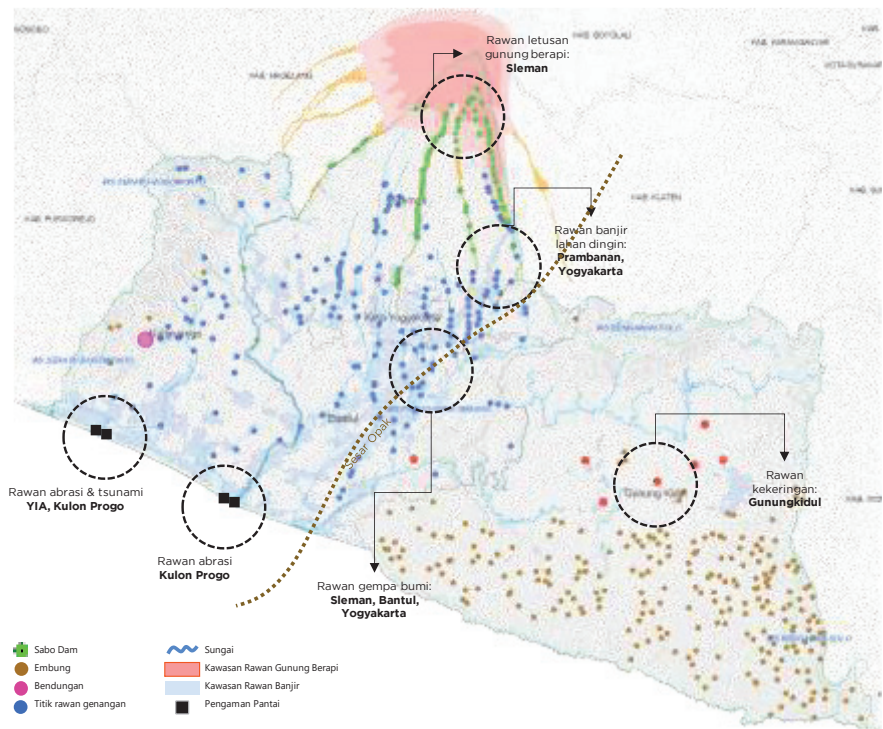
di Yogyakarta. Saat ini, saluran van der Wicjk juga dikenal dengan nama *Buk Renteng*, berupa kanal irigasi yang memanfaatkan gaya gravitasi.

4.1.3 Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air

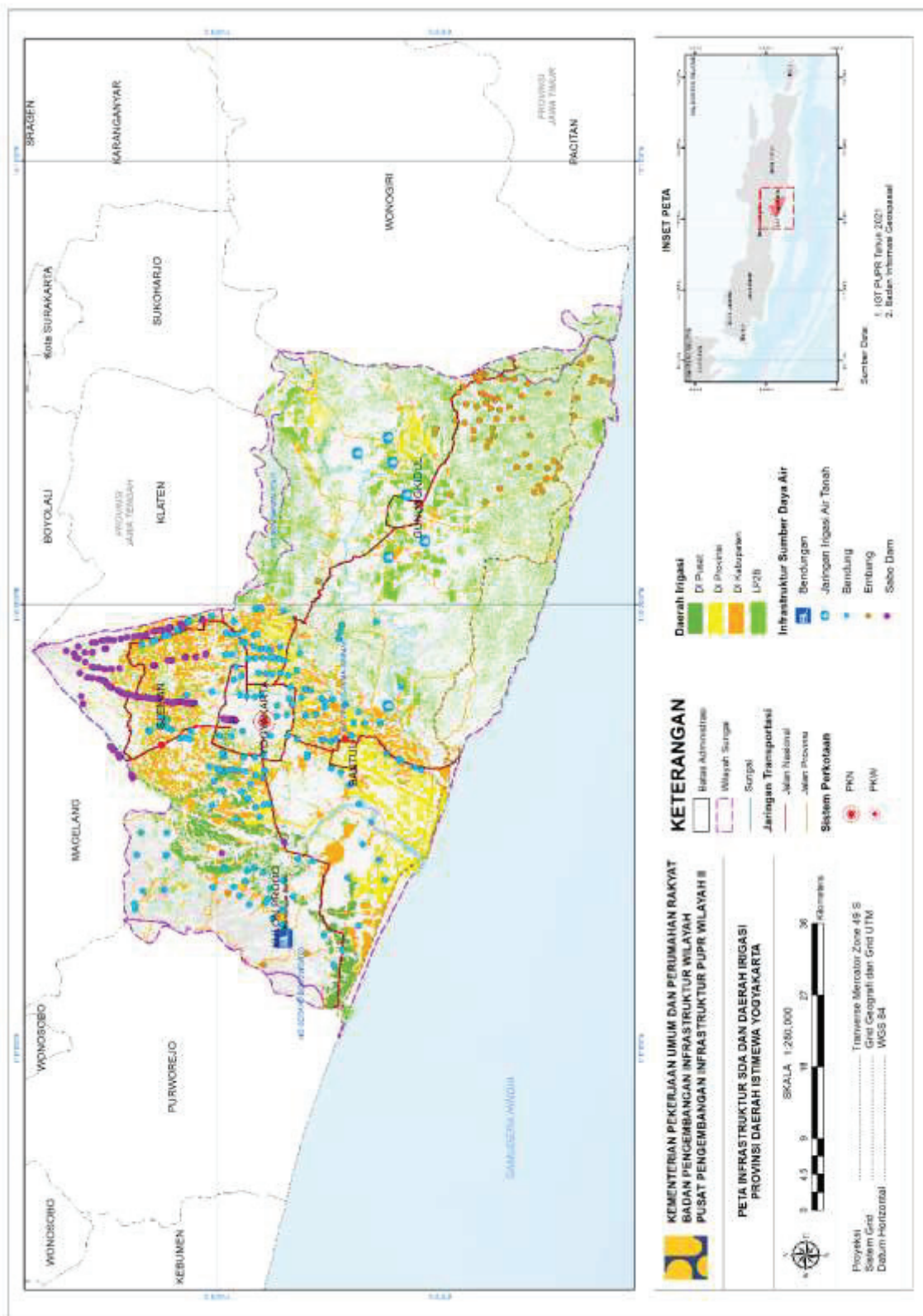
Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan wilayah dengan kerawanan bencana tinggi, terutama gempa bumi, banjir lahar dan muara, letusan gunung berapi, kekeringan, dan abrasi. Beberapa infrastruktur eksisting telah dibangun sebagai upaya mitigasi dan penanganan dampak bencana. Untuk mengatasi banjir lahar, dibangun 272 sabodam untuk menahan, mengurangi kecepatan aliran lahar, dan meminimalisir risiko banjir lahar dari Gunung Merapi. Saat ini, 54 sabodam berada dalam kondisi rusak. Banjir lahan dapat mencapai Kota Yogyakarta dan Kawasan Candi Prambanan yang membahayakan situs candi dan areal pertanian di sekitarnya.

Untuk mencegah dampak banjir muara dan abrasi, dibangun pengaman pantai di muara Sungai Bogowonto (sisi barat YIA) dan pengaman Pantai Glagah untuk mengatasi banjir di muara Sungai Serang (sisi timur YIA) pada tahun 2021-2022. Terdapat isu genangan di depan Jogja *Expo Center* yang sering menjadi lokasi MICE, yang terletak di jalan provinsi. Perlu dilakukan penghapusan asset oleh D.I. Yogyakarta agar kondisi tersebut dapat ditangani oleh BBWS Serayu Opak.

Kabupaten Gunungkidul berada di wilayah karst yang rawan kekeringan karena minimnya sumber air permukaan. Namun, pada tahun 2017 terjadi Badai Cempaka yang menyebabkan meluapnya sungai bawah tanah pada saat debit air tinggi. Banjir tersebut menyebabkan rusaknya Bendung Bawah Tanah Bribin, meluapnya Sungai Oyo, dan merendam Kecamatan Wonosari. Diperlukan perbaikan pompa Bribin untuk menormalisasi distribusi air baku bagi SPAM Bribin.



Gambar 4.2 Sebaran Infrastruktur Ketahanan Bencana Provinsi DIY
Sumber: Berbagai sumber diolah oleh Tim Puswil II, 2022



Peta 4.1 Infrastruktur Sumber Daya Air dan Ketersediaan Air D.I. Yogyakarta

4.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Ruas jalan nasional di Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki panjang 247,91 km dengan kemantapan jalan 99,84%, IRI rata-rata 3,8, dan VCR rata-rata 0,61. Untuk meningkatkan konektivitas barang dan manusia di Jawa bagian tengah-selatan, saat ini sedang dibangun tol Solo-Yogya-Kulon Progo dan tol Yogya-Bawen yang ditargetkan dapat beroperasi pada 2025. Sedangkan daerah selatan dihubungkan dengan jaringan jalan lintas selatan (JJLS) yang menjadi kesatuan Pansela Banten – Jawa Barat – Jawa Tengah – D.I. Yogyakarta – Jawa Timur.

4.2.1 Infrastruktur Jaringan Jalan

Infrastruktur jaringan jalan membahas jaringan jalan primer penghubung antaribukota provinsi, jalan tol, serta jalan strategis nasional. Panjang jalan nasional di D.I. Yogyakarta adalah 247,91 km dengan kemantapan jalan nasional sebesar 99,84% dan IRI rata-rata sebesar 3,8. Nilai VCR rata-rata jalan nasional di DIY sebesar 0,6. Ruas jalan dengan VCR $<0,8$ (arus stabil) di Provinsi DIY sebesar 44,09% atau sepanjang 108,08 km. Ruas jalan dengan VCR $>0,8$ (arus tidak stabil) sebesar 55,91% atau sepanjang 137,02 km. Ruas jalan dengan VCR $>0,8$ berada di dalam Kota Yogyakarta dan jalan penghubung antarkota Magelang, Bantul, dan Klaten.

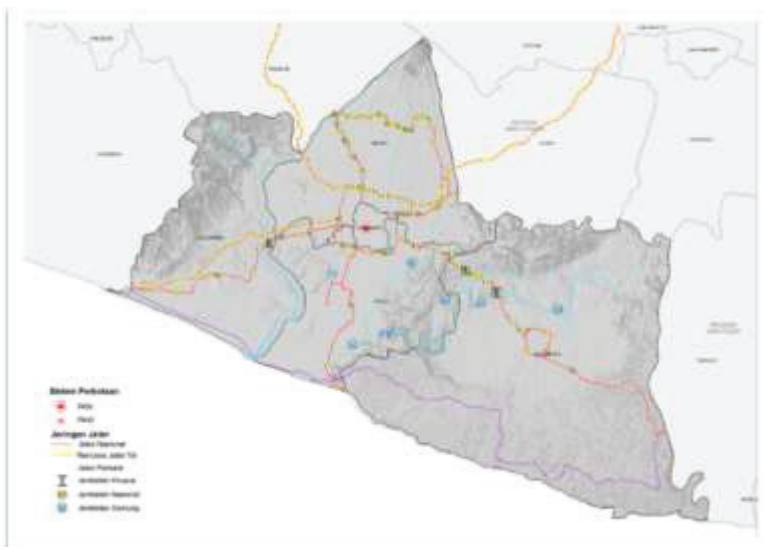
Untuk meningkatkan konektivitas Joglosemar, saat ini sedang dibangun jalan tol Yogya-Bawen dan Solo-Yogya-Kulon Progo yang keduanya akan terhubung dengan jalan tol Solo-Bawen (sudah beroperasi). Dalam jangka panjang, terdapat rencana pembangunan jalan tol Gedebage-Cilacap-Yogyakarta-Pacitan-Lumajang (*beyond 2030*). Tol Yogya-Bawen sepanjang 77,83 km mulai dibangun pada 2022 dan ditargetkan beroperasi pada 2025. Tol Yogya-Bawen terdiri dari enam seksi yaitu Seksi 1 (Yogyakarta-SS Banyurejo), Seksi 2 (SS Banyurejo-SS Borobudur), Seksi 3 (SS Borobudur-SS Magelang), Seksi 4 (SS Magelang-SS Temanggung), Seksi 5 (SS Temanggung-SS Ambarawa), dan Seksi 6 (SS Ambarawa-JC Bawen). Pembangunan dimulai dari Seksi I (Yogyakarta-SS Banyurejo).

Tol Solo-Yogya-Kulon Progo memiliki panjang 96,57 km. Proses konstruksi Seksi 1 (Solo-Purwomartani) dimulai sejak 2021 dan ditargetkan selesai di 2024. Tol Solo-Kulon Progo akan tersambung dengan tol Yogya-Bawen. Tol Solo-Yogya-Kulon Progo terdiri dari tiga seksi yaitu seksi 1 Solo-Purwomartani (35,64 km), seksi 2 Purwomartani-JC Sleman (22,36 km), dan seksi 3 JC Sleman-Kulon Progo (38,57 km). Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap memiliki panjang sebesar 167,07 km dan masuk dalam rencana umum jalan nasional tahun 2020-2029. Belum terdapat pembahasan mengenai konstruksi tol ini, diperkirakan baru akan beroperasi setelah tahun 2030.

Konektivitas Pulau Jawa bagian selatan dihubungkan melalui jaringan jalan lintas selatan (JJLS) yang terbentang dari Pandeglang (Banten) hingga ke Malang (Jawa Timur). JJLS Provinsi DIY dimulai dari Kabupaten Kulon Progo hingga Kabupaten Gunungkidul sepanjang 116 km. Terdapat bagian JJLS yang belum tersambung sepanjang 41,08 km di segmen 3 (Pandansimo-Samas) dan Jembatan Srandakan 3 (Kulon Progo-Bantul), serta segmen 4 Kretek-Girijati (Bantul-Gunungkidul). Ruas JJLS segmen 5 (Planja- Baron-Tepus-Jeruk Wudel) ditangani di tahun 2021-2022 dan ditargetkan beroperasi 2023. Selain itu, segmen 6 (Jalan Tepus-Jerukwudel II) masih berlangsung hingga 2023.

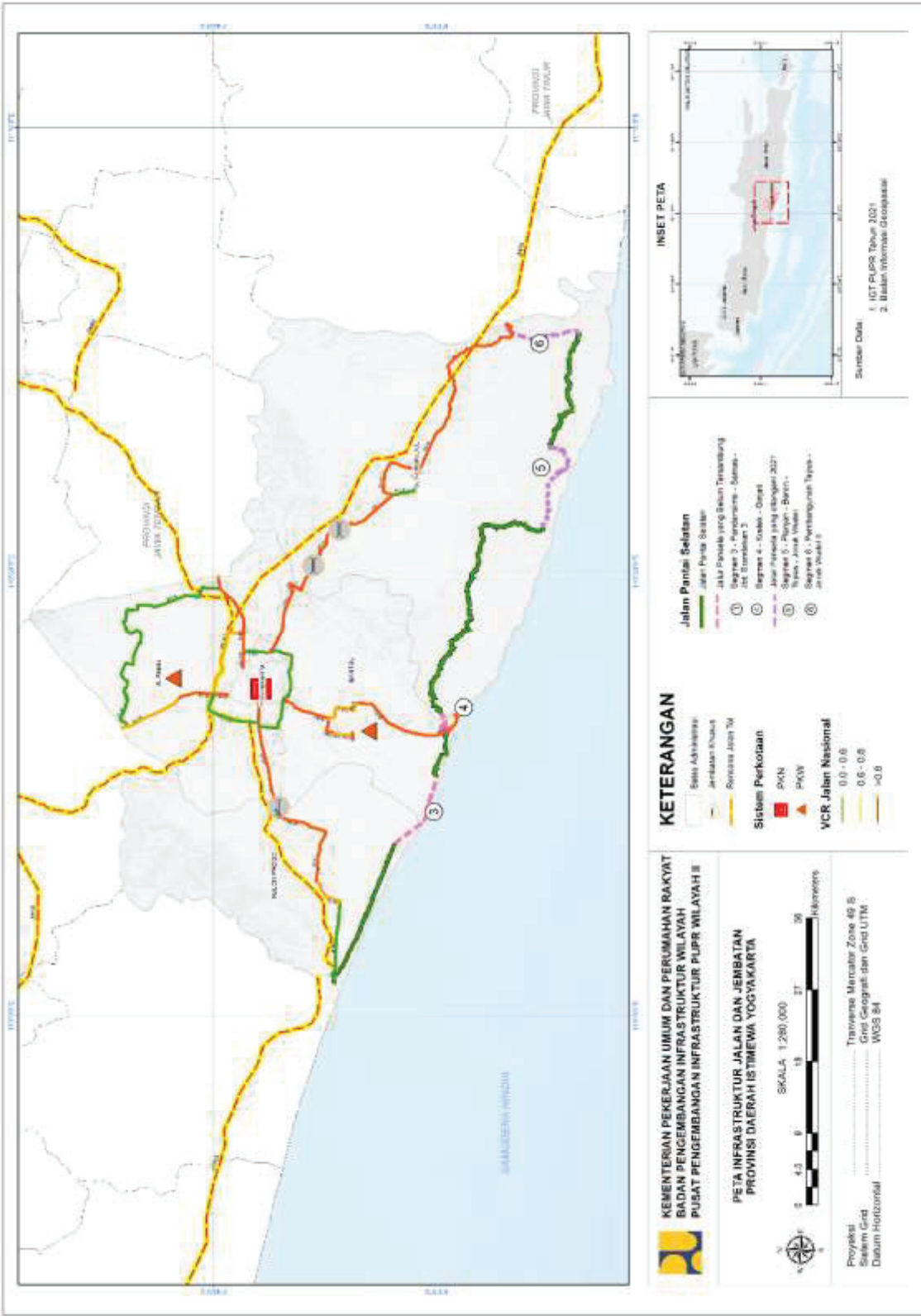
4.2.2 Infrastruktur Jembatan

Infrastruktur jembatan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang berperan penting dalam memperlancar mobilitas dan efektivitas waktu tempuh pada akses yang terputus atau terpisah akibat kondisi geografis. Terdapat 135 unit jembatan di Provinsi D.I. Yogyakarta yang terbagi ke dalam 3 klasifikasi jembatan, yaitu 8 unit jembatan gantung di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, 3 unit jembatan khusus di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo, serta 124 unit jembatan nasional tersebar di Provinsi D.I. Yogyakarta. Untuk menuntaskan konektivitas di sepanjang jalur Pantai Selatan DIY, terdapat rencana pembangunan Jembatan Srandakan 3 dengan panjang 1,9 km sebagai jalur logistik dan pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Jarak tempuh diharapkan dapat berkurang dari 20-30 menit menjadi 5 menit. Saat ini kedua wilayah tersebut dihubungkan dengan Jembatan Srandakan 2 dengan jarak tempuh yang lebih jauh.



Gambar 4.3 Sebaran Infrastruktur Jembatan Provinsi DIY

Sumber: Kementerian PUPR, 2022



Peta 4.2 Peta Kinerja Jalan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta

4.2.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritaas

Kementerian PUPR ditugaskan untuk mendukung target nasional dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai salah satu proyek prioritas. Beberapa infrastruktur jalan dan jembatan prioritas sesuai dengan PSN di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah pembangunan jalan tol Solo - Yogyakarta - NYIA dan tol Yogyakarta - Bawen, yang keduanya saat ini berstatus dalam tahap konstruksi dengan target dapat diselesaikan pada 2024 dan 2025. Penjelasan mengenai infrastruktur tersebut disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas
Provinsi D.I. Yogyakarta**

Infrastruktur	Status	Volume		Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA	Konstruksi (2022-2025)	96,57 km	53,94% (seksi 1) dan 4,57% (seksi 2)	- Meningkatkan waktu tempuh menuju bandara di Yogyakarta-Solo-Semarang - Terhubung dengan ruas tol Yogyakarta-Bawen dan tol Trans Jawa Semarang-Solo	On going	- Terlambatnya proses pembebasan lahan karena terkait dengan pembebasan fasum fasos, tanah kas desa, dan tanah Sultan - Masih terdapat bidang tanah yang belum mendapat persetujuan dari warga
Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Konstruksi (2022-2024)	76,3 km	Per 8 November 2023 - Seksi 1 61,153% - Seksi 6 1,54%	- Meningkatkan waktu tempuh Semarang-Yogyakarta dari 3 jam menjadi 1,5 jam dengan kecepatan rencana 80 km/jam - Memperlancar arus distribusi barang dan jasa - Mendukung pengembangan industri dan pariwisata - Meningkatkan konektivitas khususnya di selatan Pulau Jawa - Masa konsesi 40 tahun	On going	- Seksi 1 dan 6 dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai di 2024 - Progres pembebasan lahan keseluruhan 26,01% - Terdapat penambahan pembebasan lahan (18,8 ha) agar pondasi/kolom tidak berada di zona inti atau di luar jalan - Inspeksi Saluran Mataram - Terdapat keberatan nilai dan mekanisme ganti kerugian lahan oleh pemilik bangunan cagar budaya

Infrastruktur	Status	Volume		Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
						Limasan seluas 1.193 m ² - Terdapat potensi lahan tidak termanfaatkan karena struktur tunnel (550 m) mengakibatkan perubahan trase jalan tol (8,2 ha) dan penambahan lahan seluas 5,7 ha - Terdapat penambahan biaya Pemerintah sebesar Rp3,99 T dan perpanjangan masa konsensi menjadi 50 tahun, termasuk penyesuaian tarif tol di 2024

Sumber: Berbagai sumber, dianalisis oleh BPIW, 2023

4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

Pembangunan infrastruktur permukiman dilaksanakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan dasar dalam mendukung perwujudan permukiman yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Provinsi D.I. Yogyakarta telah terlayani oleh layanan air minum perpipaan, pengolahan sanitasi, dan pengelolaan persampahan. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman juga termasuk diantaranya penuntasan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan-kawasan strategis.

Adapun capaian akses sanitasi layak Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 91,25%, layanan TPA tahun 2019 sebesar 60,83%, akses air minum layak sebesar 91,25%, akses air minum aman sebesar 31,25 %, dan luas Kawasan kumuh 858,22 ha.

4.3.1 Infrastruktur Air Minum

Tersedianya infrastruktur dasar termasuk penyediaan air minum dan sanitasi merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatkan kesehatan, kondisi kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, tingkat akses air minum perpipaan di Provinsi D.I. Yogyakarta berada pada kisaran 31,3%. Perpipaan tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul sebesar 38,65% dan akses perpipaan terendah berada di Kabupaten Bantul 16,82%. Provinsi DIY memiliki rata-rata akses air minum layak sebesar 95,93%. Kota Yogyakarta

memiliki akses air minum layak tertinggi sebesar 99,75%, sedangkan untuk akses air minum layak terendah berada di Kabupaten Gunungkidul sebesar 94,5%.

Tabel 4.4 Profil Akses Air Minum Aman dan Layak Provinsi DIY

Kabupaten/Kota	Akses Aman (Perpipaan %)	Akses Layak (%)
Kulon Progo	35,06	92,56
Bantul	16,82	97,65
Gunungkidul	38,65	94,5
Sleman	29,74	95,2
Kota Yogyakarta	36	99,75
D.I. Yogyakarta	31,254	95,932

Sumber: BPS, 2020

Terdapat 5 PDAM yang melayani setiap kota/kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan jumlah pelanggan sebanyak 166.652 sambungan rumah (SR). Jumlah pelanggan terbanyak berada di Kabupaten Sleman sebanyak 41.174 SR, sedangkan jumlah pelanggan terendah berada di Kabupaten Gunungkidul sebesar 16.857 SR.

Total kapasitas terpasang di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 2.441,50 liter/detik dengan kapasitas terpasang paling besar di Kota Yogyakarta sebesar 880 liter/detik dengan volume produksi riil sebesar 550 liter/detik, sehingga masih terdapat *idle capacity* sebesar 330 liter/detik. Sementara itu, kapasitas paling kecil berada di Kabupaten Bantul sebesar 160 liter/detik dengan volume produksi riil sebesar 100 liter/detik.

Tabel 4.5 Layanan PDAM di Provinsi DIY

Nama PDAM	Kapasitas Terpasang (l/detik)	Volume Produksi Riil (l/detik)	Belum Terpakai (l/detik)	Jumlah Pelanggan (SR)
PDAM Tirta Binangun Kulon Progo	400	298,73	101,27	36.138
PDAM Tirta Dharma Bantul	160	100	60	40.120
Eksisting PDAM	60	30	30	
SPAM Regional Kartamantul I	100	70	30	
SPAM Regional Kartamantul II	50	0	50	
PDAM Tirta Handayani Gunungkidul	204,5	110	94,5	16.857
PDAM Tirta Sembada Sleman	597	360	237	41.174
Eksisting PDAM	497	343	154	
SPAM Kartamantul Tahap I	100	17	83	
SPAM Regional Kartamantul II	50	0	50	
PDAM Tirta Marta Yogyakarta	880	550	330	32.363
Eksisting PDAM	680	525	155	
SPAM Kartamantul I	200	25	175	
SPAM Kartamantul II	100	0	100	
Provinsi D.I. Yogyakarta	2.441,5	1.418,7	1.022,8	166.652,0

Sumber: Berbagai Sumber, Diolah oleh Penyusun, 2022

Terdapat 4 rencana SPAM Regional di Provinsi DIY yaitu SPAM Kartamantul yang telah dibangun dan beroperasi, SPAM Kamijoro, SPAM Banyusoco, dan Sumur Bawah Tanah Gunungkidul.

SPAM Kartamantul mempunyai kapasitas terpasang sebesar 700 liter/detik dan dibangun dalam dua tahap. Daerah layanan SPAM Kartamantul meliputi Kota Yogyakarta (400 liter/detik), Kabupaten Bantul (150 liter/detik) dan Kabupaten Sleman (150 liter/detik). Dari kapasitas terpasang 700 liter/detik, *idle capacity*-nya masih 688 liter/detik atau baru terserap 28% pada tahun 2022.

SPAM Kamijoro direncanakan dibangun untuk menyuplai air bersih bagi Aerotropolis YIA, wilayah barat dan selatan Kabupaten Bantul. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Gunungkidul terdapat rencana pembangunan SPAM Banyusoco dan SPAM Sungai Bawah Tanah (*beyond 2030*).

Tabel 4.6 Rencana Pembagian SPAM Provinsi DIY

Wil. Pelayanan	Debit (liter/detik)	Idle Capacity (l/detik)	Keterangan
SPAM Kartamantul I			
Kota Yogyakarta	200	175	Seluruh kecamatan
Kabupaten Sleman	100	83	Kec. Gamping, Kec. Godean, Kec. Mlati, Kec. Depok, Kec. Ngemplak dan Kec . Ngaglik
Kabupaten Bantul	100	30	Kec. Banguntapan, Kec. Kasihan, Kec. Sewon dan Kec. Pajangan
SPAM Kartamantul II			
Kota Yogyakarta	200	200	Seluruh kecamatan
Kabupaten Sleman	50	50	Kec. Gamping, Kec. Godean, Kec. Mlati, Kec. Depok, Kec. Ngemplak dan Kec . Ngaglik
Kabupaten Bantul	50	50	Kec. Banguntapan, Kec. Kasihan, dan Kec. Sewon
SPAM Kamijoro			
Kabupaten Kulon Progo	100	0	Aerotropolis YIA
Kabupaten Bantul	200	0	Wilayah selatan dan barat Bantul

Sumber: Hasil Survei, 2022

4.3.2 Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi erat hubungannya dengan kesehatan dan pola hidup masyarakat. Infrastruktur sanitasi terdiri dari layanan persampahan dan layanan sanitasi, dimana kinerja capaiannya dinilai berdasarkan akses layak dan aman.

A. Layanan Persampahan

Pada tahun 2020, tingkat layanan pengelolaan persampahan di Provinsi D.I. Yogyakarta mencapai 60,83%. Terdapat 2 TPA kabupaten/kota di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, serta satu TPA Regional di Kabupaten Bantul. Timbulan sampah di Provinsi DIY mencapai

876.887 ton/tahun pada 2019. Penanganan sampah di Provinsi DIY masih menggunakan metode *open dumping* yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Pelayanan tertinggi berada di Kabupaten Bantul dengan adanya TPA Regional Piyungan yang sudah *overload*. Sedangkan kinerja pelayanan TPA Banyuroto di Kabupaten Kulon Progo dan TPA Wukirsari di Kabupaten Gunungkidul masih di bawah 25%.

TPA Regional Piyungan terletak di Kabupaten Bantul untuk melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Timbulan sampah yang masuk ke TPA Regional Piyungan mencapai 750 ton/hari pada kondisi normal dan 900 ton/hari saat lebaran. Pada 2020-2022 dilakukan penataan TPA untuk memperpanjang masa pakai hingga 2024. Terdapat rencana perluasan TPA pada 2023 di lahan baru seluas 5,8 ha dengan sistem *sanitary landfill*. Kedepannya, pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan akan menggunakan teknologi pengolahan sampah menggunakan skema KPBUs yang ditargetkan siap beroperasi pada 2026.

TPA Banyuroto di Kabupaten Kulon Progo melayani persampahan di Kabupaten Kulon Progo dan YIA. Besaran sampah dari YIA rata-rata sebesar 2,4 ton/hari. TPA Wukirsari yang berada di Kabupaten Gunungkidul diperkirakan akan *overload* pada 2024 dan sedang disusun *readiness criteria* perluasan TPA.

Tabel 4.7 Layanan Persampahan Provinsi DIY Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Kapasitas TPA (ton/tahun)	Sampah Masuk TPA (ton/Tahun)	Luas (ha)	Layanan TPA (%)
1	Kulonprogo	66.620	23.202	17.378	4,29	26,08
2	Bantul	250.062	63.547	255.241	12,5	102,07
3	Gunungkidul	132.864	15.468	21.466	1,8	16,16
4	Sleman	289.536	0	66.645	0	23,02
5	Yogyakarta	137.806	0	97.353	0	70,64
DI Yogyakarta		876.887	102.216	458.082		60,83

Sumber: Berbagai Sumber Diolah BPIW, 2022

B. Layanan Sanitasi

Akses sanitasi aman di Provinsi DIY rata-raya sebesar 14,47% (standar nasional 15%). Akses sanitasi tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 29,57% dan terendah berada di Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,36%. Akses sanitasi layak di Provinsi DIY telah mencapai 91,25% dengan akses sanitasi layak tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 95,54% dan terendah di Kabupaten Kulon Progo sebesar 85,65%.

Tabel 4.8 Layanan Sanitasi Provinsi DIY

Kabupaten/Kota	Akses Aman (%)	Akses Layak (%)
Kulonprogo	10,78	85,65
Bantul	17,07	93,2
Gunungkidul	2,36	87,37

Kabupaten/Kota	Akses Aman (%)	Akses Layak (%)
Sleman	12,57	94,51
Yogyakarta	29,57	95,54
DI Yogyakarta	14,47	91,25

Sumber: Kementerian PUPR, 2021

Terdapat 4 IPLT dan 1 IPAL Regional di Provinsi DIY yaitu IPLT Sewon di Kabupaten Bantul, IPLT Madurejo di Kabupaten Sleman, IPLT Banyuroto di Kabupaten Kulon Progo, dan IPLT Wukirsari di Kabupaten Gunungkidul, serta IPAL Regional Sewon di Kabupaten Bantul. IPLT Sewon dan IPLT Madurejo sudah *overcapacity*, dimana IPLT Sewon melayani pengolahan limbah dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. IPLT Madurejo sedang ditingkatkan kapasitasnya dari 25 m³/hari menjadi 75 m³/hari untuk melayani Kabupaten Sleman dan KSPN Prambanan.

Untuk mendukung pengelolaan limbah di kawasan perkotaan Yogyakarta, IPAL Regional Sewon telah ditingkatkan kapasitasnya menjadi 52.000 liter/hari untuk melayani 75.000 SR. Jumlah pelanggan terbanyak berada di Kota Yogyakarta sebanyak 19.097 SR, sedangkan pelanggan Kabupaten Bantul sebanyak 3.124 SR dan Kabupaten Sleman sebanyak 3.829 SR.

Tabel 4.9 Kinerja Infrastruktur Sanitasi Provinsi DIY

Infrastruktur Sanitasi	Kapasitas Terpasang (m ³ /hari)	Kapasitas Pengolahan (m ³ /hari)	Limbah Masuk (m ³ /hari)	Idle Capacity (m ³ /hari)	Kinerja
IPLT Sewon	100	100	120-150	0	<i>Overcapacity</i>
IPLT Madurejo	25	25	50	0	<i>Overcapacity</i>
IPLT Wukirsari	25	0	0	25	Memadai
IPLT Banyuroto	20	4	4	16	Memadai

Sumber: Berbagai sumber, diolah oleh Penyusun, 2022

4.3.3 Kawasan Kumuh

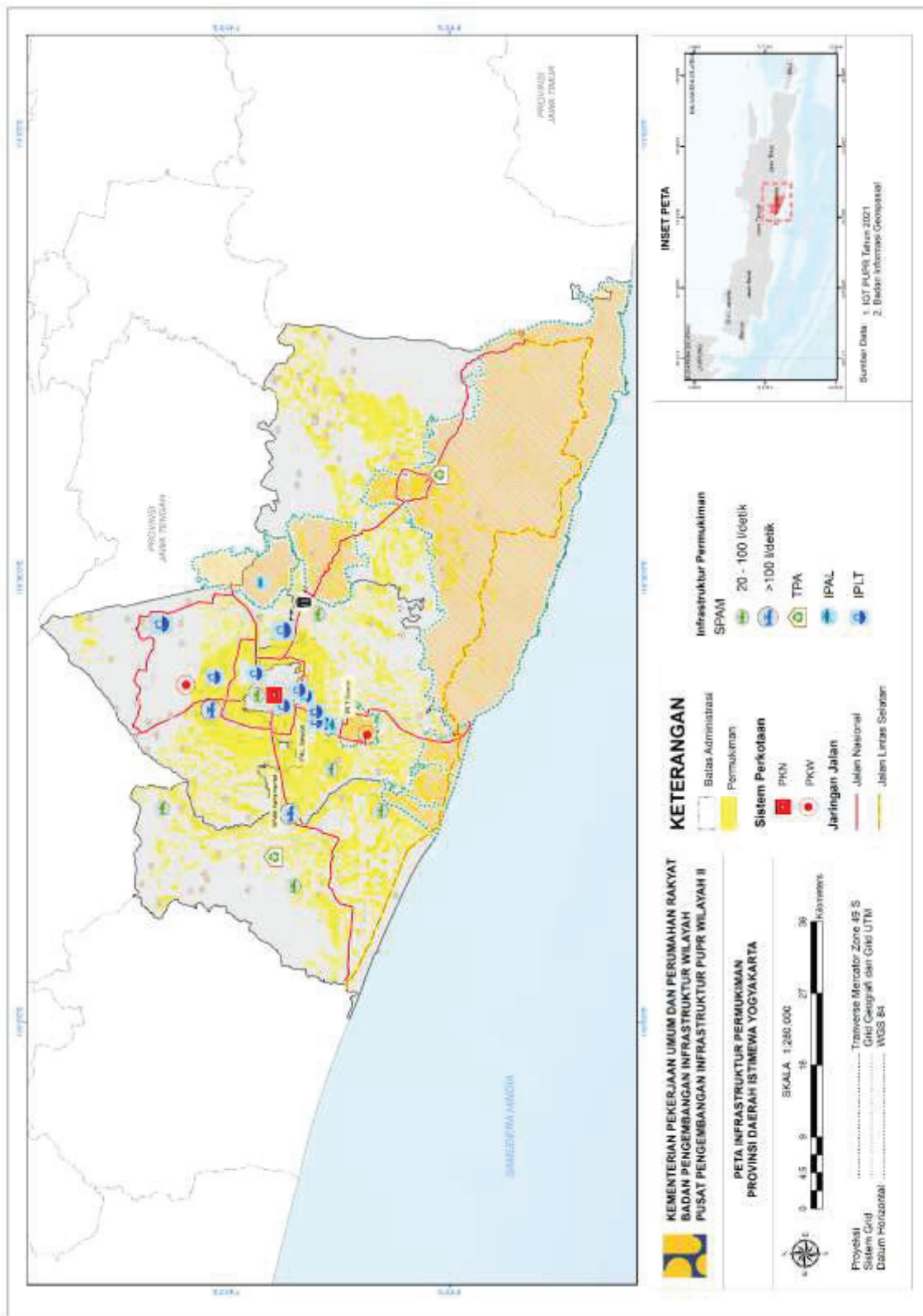
Berdasarkan SK Kumuh Nasional/Kabupaten/Kota Tahun 2021, luasan total Kawasan kumuh di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah 858,22 ha. Dari total luasan tersebut, kawasan kumuh terluas berada di Kabupaten Bantul seluas 330,26 ha dan terkecil berada di Kabupaten Sleman seluas 96,61 ha. Luasan kumuh >15 ha menjadi kewenangan nasional. Total luasan kumuh Provinsi DIY yang ditangani nasional seluas 349 ha, dimana Kabupaten Gunungkidul memiliki luasan kumuh terbesar yang menjadi kewenangan nasional yaitu seluas 140,08 ha. Penanganan kumuh di DIY menggunakan konsep 3MK (*mundur, mungghah, madhep kali*).

Tabel 4.10 Kawasan Kumuh Provinsi DIY Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	SK Kumuh	Luasan Kumuh 2020 (ha)			Total
			<10	10-15	>15	
1	Kulonprogo	2020	69,07	12,67	70,05	151,79
2	Bantul	2021	213,15	70,34	46,77	330,26
3	Gunungkidul	2017	24,76	0	140,08	164,84

No	Kabupaten/Kota	SK Kumuh	Luasan Kumuh 2020 (ha)			Total
			<10	10-15	>15	
4	Sleman	2020	46,2	14,22	36,19	96,61
5	Yogyakarta	2021	22,04	36,68	56	114,72
	DI Yogyakarta		375,22	133,91	349,09	858,22

Sumber: SK Kumuh, 2021



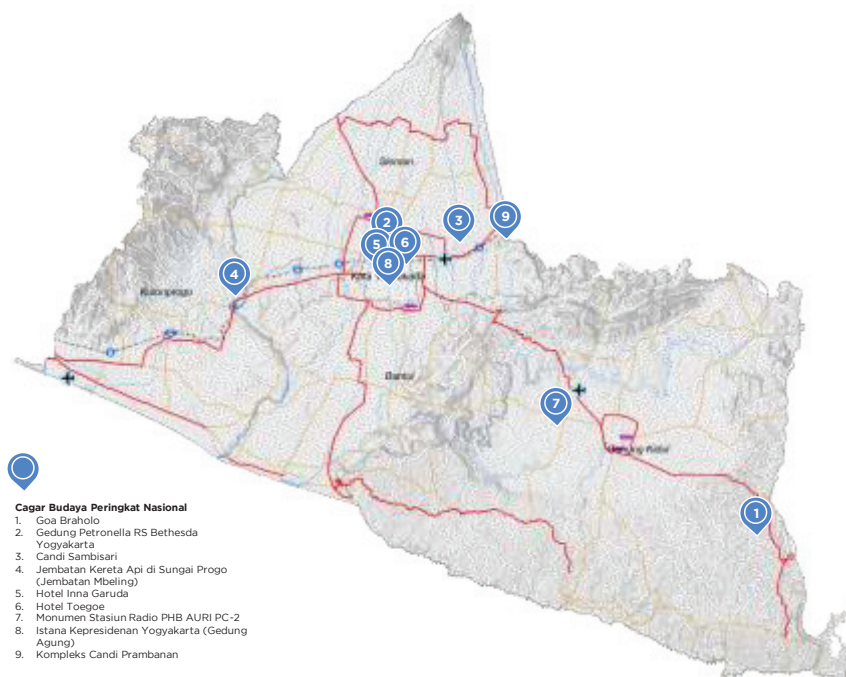
Peta 4.3 Peta Profil Infrastruktur Perumahan Provinsi D.I. Yogyakarta

4.3.4 Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Terdapat sembilan cagar budaya peringkat nasional di Provinsi DIY yaitu Goa Braholo, Gedung Petronella RS Bethesda Yogyakarta, Candi Sambisari, Jembatan Kereta Api di Sungai Progo (Jembatan Mbeling), Hotel Inna Garuda, Hotel Toegoe, Monumen Stasiun Radio PHB AURI PC-2, Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), dan Kompleks Candi Prambanan. Kesembilan cagar budaya nasional tersebut berada dalam kondisi yang baik dan terawat.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Provinsi DIY, terdapat 1.622 benda cagar budaya, 260 struktur cagar budaya, 1.465 bangunan cagar budaya, 323 situs cagar budaya, dan 31 kawasan cagar budaya. Mengacu pada Surat Keputusan Gubernur No. 186/2011 D.I. Yogyakarta, terdapat enam kawasan cagar budaya yaitu Kotagede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kotabaru, dan Imogiri.



Gambar 4.4 Sebaran Cagar Budaya Nasional di Provinsi D.I. Yogyakarta
Sumber: Kemendikbud diolah oleh Puswil II, 2022

4.3.5 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Prioritas

Kementerian PUPR ditugaskan untuk mendukung target nasional dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai salah satu proyek prioritas. Beberapa infrastruktur permukiman prioritas sesuai dengan PSN di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah pengembangan KSPN Borobudur Gerbang Klangon, SPAM Regional Kartamantul (Tahap I), dan pembangunan SPAM Kamijoro. Gerbang Klangon dan SPAM Regional Kartamantul (Tahap I) telah terbangun, sedangkan SPAM Kamijoro akan dibangun pada 2024. Penjelasan mengenai infrastruktur tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.11 Infrastruktur Permukiman Prioritas Provinsi D.I. Yogyakarta

Infrastruktur	Status	Volume		Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
Pengembangan KSPN Borobudur Gerbang Klangon	Terbangun (2020)	0,5 ha	0,5 ha	Satu buah gerbang penanda utama dari gerbang kedatangan YIA	Gerbang kedatangan ikonik menuju Borobudur dari arah YIA	Pemeliharaan - Sudah dilakukan serah terima pengelolaan dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan gerbang dan ruang serbaguna belum dimanfaatkan secara optimal karena ketiadaan dana operasional dari Pemkab Kulon Progo. Saat ini, pembiayaan penjaga keamanan secara bergantian (<i>shift</i>) masih dibiayai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. - Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Kulon Progo melakukan lelang pengelolaan gerbang Klangon ke pihak ketiga dengan anggaran dari UPT Dinas Kebudayaan Kab. Kulon Progo Pemanfaatan - Telah menjadi penanda ikonik menuju KSPN Borobudur dari arah YIA, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai tempat pagelaran seni atau pengungkit ekonomi lokal lainnya
SPAM Regional Kartamantul (Tahap I)	Terbangun (2018)	Tahap I (Intake Bantar) 400	Tahap I (Intake Bantar) Kapasitas	Terbangunnya SPAM Regional Kartamantul Tahap I	Terbangunnya SPAM Regional Kartamantul Tahap I berkapasitas 400	Produksi, distribusi - Dari 400 liter/detik kapasitas produksi yang dibangun, baru memanfaatkan

Infrastruktur	Status	Volume		Fungsi		Permasalahan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
		liter/detik (2 IPA masing- masing 200 liter/detik)	produksi 400 liter/detik (2 IPA masing- masing 200 liter/detik)	1 berkapasitas 400 liter/detik Wilayah layanan: Kawasan Perkotaan Yogyakarta	liter/detik (2 IPA 200 liter/detik) Wilayah layanan: Kawasan Perkotaan Yogyakarta, dengan area manfaat seluas 35.366 ha	sebesar 30% dengan idle capacity mencapai 70% (288 liter/detik). - Pelayanan air bersih belum dapat dirasakan secara optimal karena masih terkendala dengan pipa distribusi dan minimnya keuntungan yang diperoleh oleh PDAM karena harga air curah masih dianggap cukup tinggi. - Terdapat keterbatasan lebar diameter pipa PDAM Kota Yogyakarta sehingga tidak dapat mengalirkan air secara maksimal (belum ada rehabilitasi pipa sejak zaman Belanda), yang rentan mengalami kebocoran jika digunakan untuk distribusi air dalam debit besar. - Adanya kebutuhan pelayanan air bersih PDAM Kota Yogyakarta yang melintasi jalur kereta api.
SPAM Regional Kamijoro	Konstruksi (2024)	100 liter/detik	<i>Belum terlaksana</i>	IPA berkapasitas 100 liter/detik untuk melayani YIA dan aerotropolis Kulon Progo.	<i>Belum terlaksana</i>	- Reviu desain pada tahun 2023, untuk pelaksanaan di 2024.

Sumber: Berbagai sumber, dianalisis oleh BPIW, 2023

4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan

Pada sub bab ini menjelaskan kondisi dan sebaran RTLH, serta tingkat kebutuhan rumah (*backlog*) yang saat ini masih menjadi permasalahan mendasar bagi kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

4.4.1 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar hampir merata di seluruh kabupaten/kota. RTLH di Provinsi DIY mencapai 77.983 rumah atau 6,97% dari total jumlah keluarga. RTLH tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo sejumlah 44.144 rumah (37,70%) dan terendah berada di Kabupaten Sleman sejumlah 4.343 rumah (1,18%).

Tabel 4.12 RTLH di Provinsi DIY Tahun 2020

Kota/ Kabupaten	Jumlah Keluarga	Jumlah RTLH	RTLH (%)
Kulon Progo	117.095	44.144	37,70%
Bantul	281.170	7.091	2,52%
Gunungkidul	202.537	19.915	9,83%
Sleman	368.889	4.343	1,18%
Kota Yogyakarta	148.719	2.490	1,67%
Provinsi DIY	1.118.410	77.983	6,97%

Sumber: e-rtlh, 2020

4.4.2 Backlog Perumahan

Berdasarkan data BPS tahun 2021, total *backlog* kepemilikan rumah di Provinsi DIY mencapai 284.635 rumah, dengan *backlog* tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 82.108 rumah (29% dari total *backlog* Provinsi D.I Yogyakarta) dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 10.978 rumah (3,86% dari total *backlog* Provinsi DIY). Berdasarkan data di bawah, *backlog* kepemilikan rumah pada wilayah perkotaan (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman) tergolong tinggi karena adanya konsentrasi penduduk dengan ketersediaan lahan yang terbatas dan harga tanah yang tinggi. Sementara itu *backlog* di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul cenderung rendah karena rendahnya kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan yang cukup luas.

Tabel 4.13 Backlog Provinsi DIY Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepemilikan (%)
Kulon Progo	117.095	11.440	9,77%
Bantul	281.170	62.139	22,10%
Gunungkidul	202.537	10.978	5,42%
Sleman	368.889	118.118	32,02%
Kota Yogyakarta	148.719	82.108	55,21%
Provinsi DIY	1.118.410	284.635	25,45%

Sumber: BPS, 2021

4.4.3 Rumah Khusus

Kementerian PUPR telah membangun rumah khusus sebanyak 121 unit di Provinsi DIY yang tersebar di empat kabupaten. Rumah khusus tersebut diperuntukkan untuk keperluan riset, penyediaan hunia bagi warga terdampak pembangunan proyek nasional, dan rumah khusus bagi atlet berprestasi. Berikut merupakan tabel jenis rumah khusus terbangun di Provinsi DIY.

Tabel 4.14 Rumah Khusus Provinsi D.I. Yogyakarta

No.	Kabupaten	Rumah Khusus	Target Hunian	Jumlah Unit
1	Gunungkidul	Rusus Riset	Riset	16
2	Kulonprogo	Rusus Temon	Relokasi Bandara	50
3	Kulonprogo	Masyarakat Relokasi Pembangunan Bandara	Dampak Program Pembangunan	53
4	Sleman	FPTI Medali Emas - Atlet Fitriyani	Atlet	1
5	Bantul	Rusus Atlet Berprestasi Gayuh Satrio	Atlet	1

Sumber: *sigi.pu.go.id*

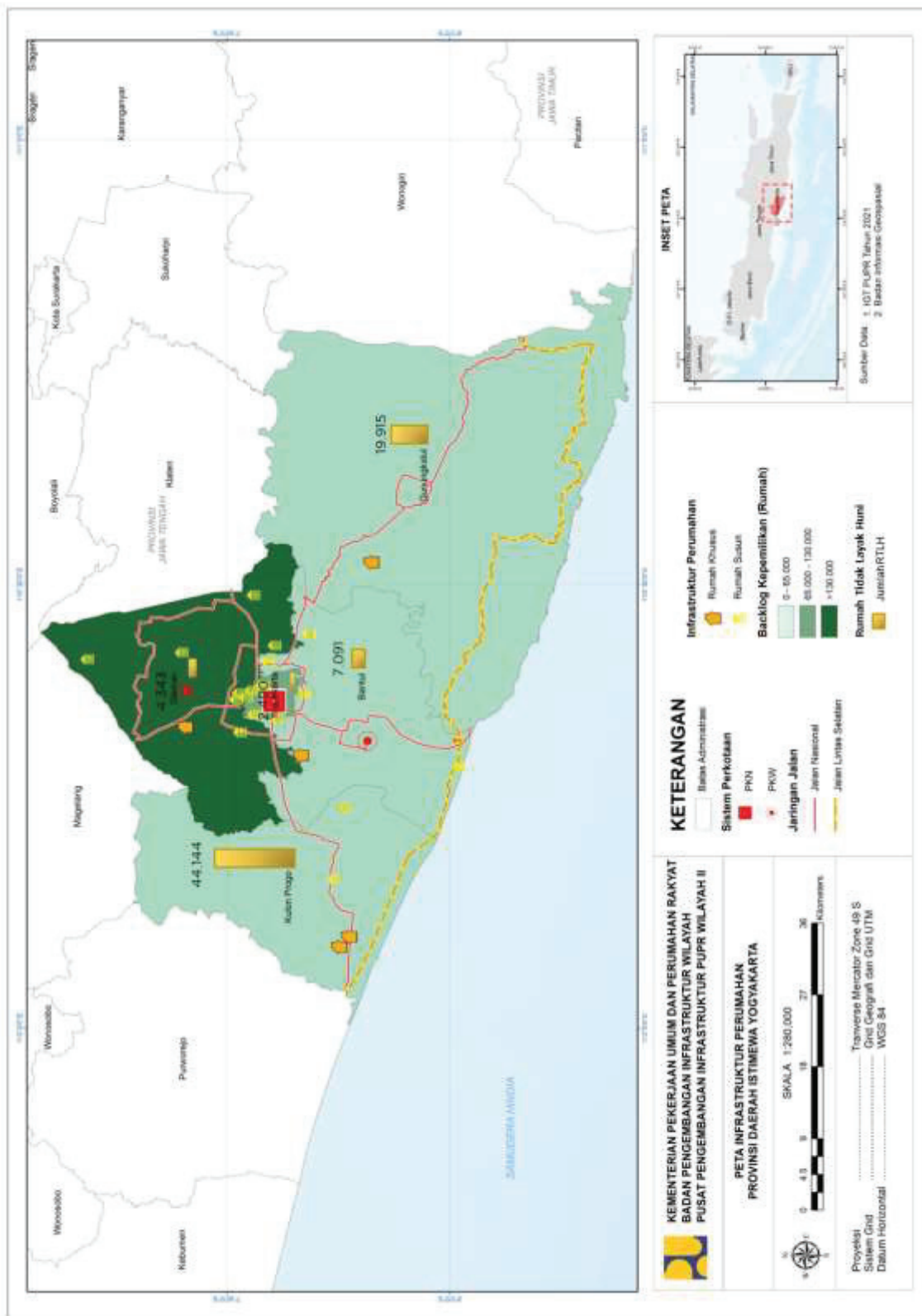
4.4.4 Rumah Susun

Kementerian PUPR telah membangun 19 buah rusun di empat kabupaten di Provinsi DIY. Berbeda dengan rumah khusus, rumah susun adalah kompleks perumahan bertingkat/vertikal. Berikut merupakan jenis rumah susun dan target huniannya di Provinsi DIY.

Tabel 4.15 Rumah Susun Provinsi D.I. Yogyakarta

No.	Rumah Susun	Kabupaten/Kota	Target Hunian
1	Pemkot Bantul	Bantul	Pekerja industri
2	Pemkot Bantul	Bantul	Pekerja industri
3	TNI AU	Bantul	TNI AU
4	Rusun Aspol Polair DIY	Bantul	POLRI
5	Ponpes Islamic Centre Bin Baz	Bantul	Santri Ponpes
6	UGM (Lanjutan DJCK)	Kulon Progo	Mahasiswa
7	Dinas Perkim PU Kulon Progo	Kulon Progo	MBR
8	TNI AU	Sleman	TNI AU
9	Dinas PUP dan ESDM Prov DI. Yogyakarta	Sleman	MBR
10	PP Bidayatussalikin	Sleman	Santri Ponpes
11	UGM Sendowa-Barek	Sleman	Mahasiswa
12	Lanjutan Asrama UGM - Asrama Kinanthi I	Sleman	Mahasiswa-Tingkat Tinggi
13	Ponpes Muhammadiyah Boarding School (MBS Yogyakarta)	Sleman	Santri Ponpes
14	Univ. 'Aisyiyah Yogyakarta	Sleman	Mahasiswa
15	Yayasan Syantikara	Sleman	Mahasiswa
16	Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta	Yogyakarta	Mahasiswa
17	POLDA DAISTA YOGYAKARTA	Yogyakarta	POLRI
18	Pekerja Istana Presiden	Yogyakarta	ASN
19	Madrasah Muallimin Muhammadiyah	Yogyakarta	Santri Ponpes

Sumber: *sigi.pu.go.id*



Peta 4.4 Profil Infrastruktur Perumahan Provinsi D.I. Yogyakarta

4.5 Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR

Subbab ini menjelaskan tentang profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR yang meliputi infrastruktur perhubungan, energi, dan telekomunikasi.

4.5.1 Infrastruktur Perhubungan

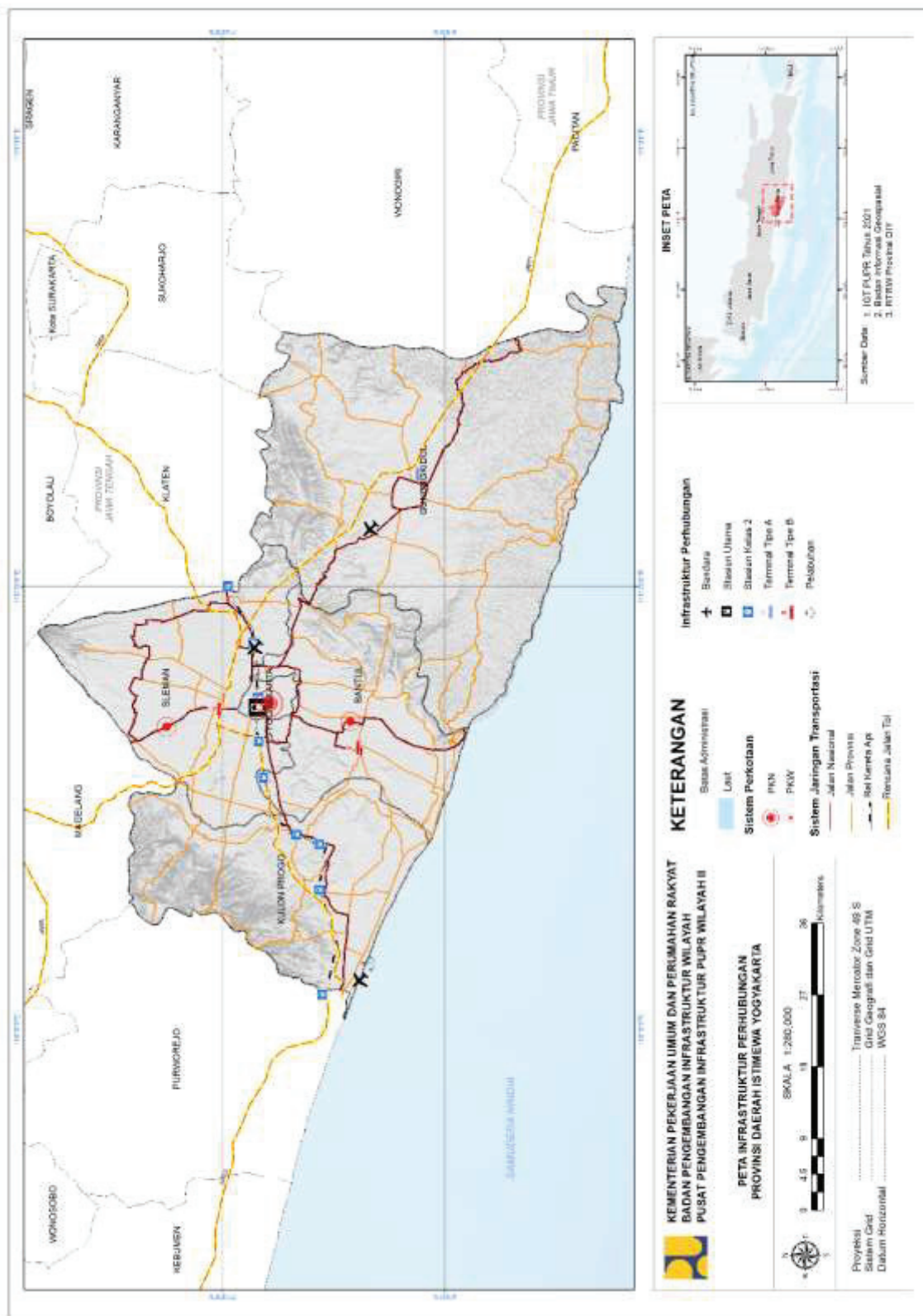
Simpul utama transportasi manusia Provinsi D.I. Yogyakarta berpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo melalui jaringan rel kereta api dan bandara udara. Adapun pergerakan barang bertumpu pada jaringan jalan antarkota antarprovinsi. Terdapat dua bandara utama yaitu Bandara Adisucipto dan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo sebagai hub penerbangan internasional. Untuk mendukung konektivitas transportasi berbasis rel di Pulau Jawa, terdapat satu buah stasiun utama yaitu Stasiun Tugu Yogyakarta di Kota Yogyakarta, stasiun kelas dua yaitu Stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo, dan 7 buah stasiun kelas tiga di masing-masing kabupaten. Selain itu, terdapat lima buah terminal di masing-masing kabupaten/kota. Sesuai dengan arahan kebijakan RTRW Provinsi DIY, terdapat rencana pengembangan kawasan transit (*Transit Oriented Development*) di Stasiun Tugu, Stasiun Wates, dan kawasan Bandara YIA.

4.5.2 Infrastruktur Jaringan Energi

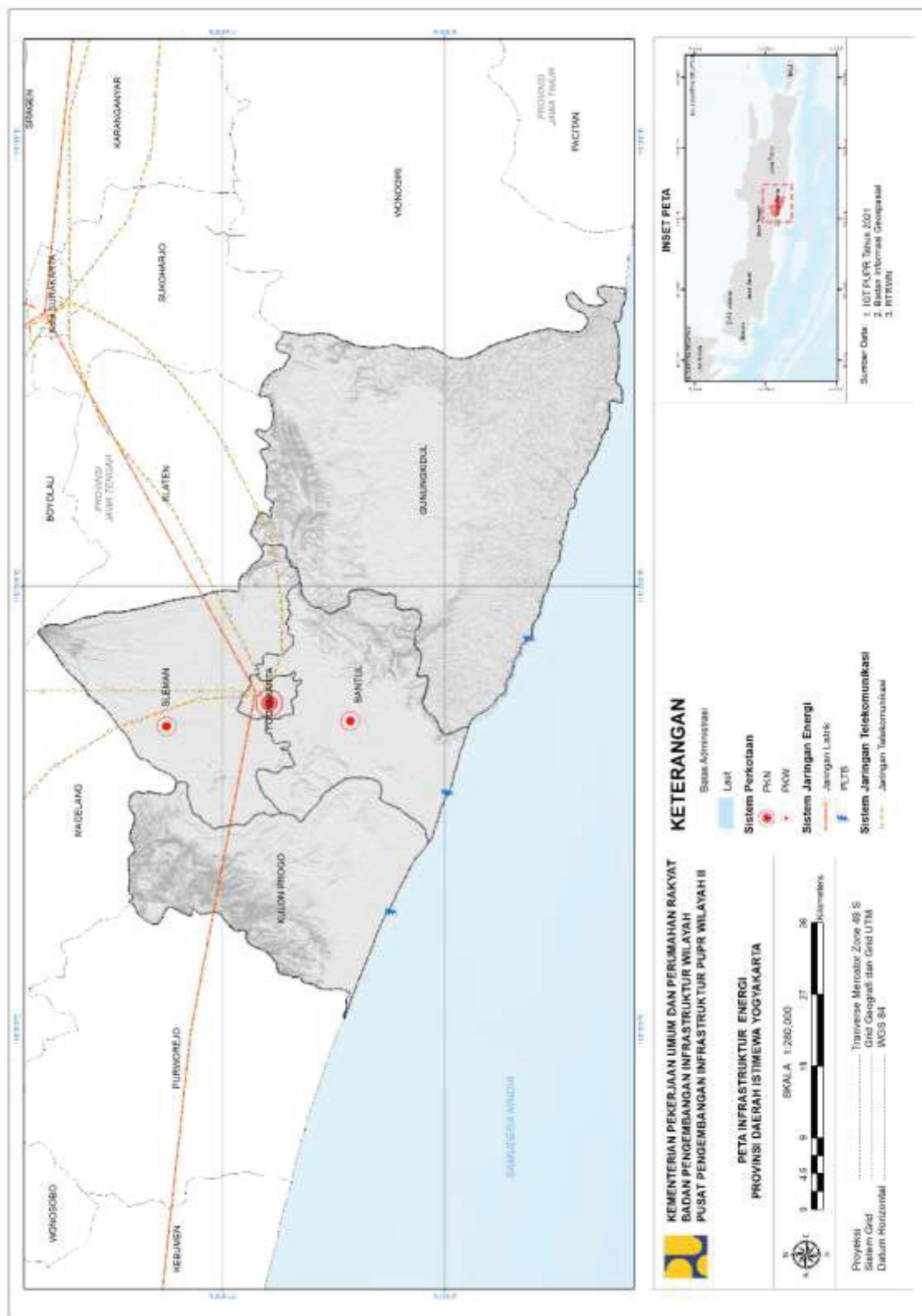
Sebaran infrastruktur energi di Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri atas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dan stasiun bahan bakar. Sumber energi ketenagalistrikan Provinsi D.I. Yogyakarta berasal dari pasokan listrik jaringan interkoneksi Jawa-Madura-Bali (JAMALI), PLTU/PLTGU Tambaklorok Semarang, PLTA Mrica Banjarnegara, PLTU Cilacap, dan PLTP Dieng. Pelayanan listrik telah menjangkau 99,99% masyarakat dengan kapasitas sebesar kapasitas 2.549,90 KWp dan PLMTH dengan kapasitas 700 Kwh. Jumlah keluarga yang menggunakan listrik di Provinsi D.I. Yogyakarta (PLN dan Non-PLN) pada tahun 2022 sebanyak 1,4 juta KK.

4.5.3 Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan provinsi kedua setelah DKI Jakarta dengan jumlah desa/kelurahan penerima sinyal kuat seluler terkecil di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 348 desa/kelurahan. Infrastruktur jaringan telekomunikasi Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 terdiri atas beberapa elemen, antara lain jaringan Pemda DIY di 269 titik, jaringan fiber optik (FO) di 194 titik, jaringan wireless di 74 titik, jaringan Virtual Privat Network (VPN) sebanyak 1 titik, serta CCTV sebanyak 29 titik.



Peta 4.5 Peta Infrastruktur Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta



Peta 4.6 Peta Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Provinsi D.I. Yogyakarta

BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menyusun suatu perencanaan terutama rencana pengembangan, pastinya tidak terlepas dari *root cause* (akar masalah) yang harus diketahui sebelumnya, kemudian dilakukan *mapping* atau pemetaan hingga analisis yang tepat, sehingga menghasilkan rencana aksi (*action plan*) yang sesuai untuk mencapai *goal*/atau tujuan yang diharapkan.

Permasalahan dan isu strategis selalu muncul dalam dinamika suatu negara, apalagi dengan Indonesia sebagai negara berkembang, yang tentunya juga terjadi di Provinsi DIY. Permasalahan adalah hal yang menjadi masalah atau persoalan; dan isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Perumusan potensi dan kendala (termasuk limitasi/daya dukung dan daya tampung) yang harus ditangani serta peluang dan ancaman yang dapat memberikan dampak dan pengaruh signifikan terhadap arahan kebijakan pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PUPR, dibahas dalam bab 5 ini, yang kemudian menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah pada bab 6.



Gambar 5.1 Alur Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Sumber: SE Pedoman Muatan RPIW, 2022

Perumusan permasalahan dan isu strategis dilakukan berdasarkan fokus perencanaan yang dihasilkan dari rumusan arah kebijakan. Fokus perencanaan adalah pengembangan pariwisata. Isu strategis juga menjadi dasar masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah berdasarkan fokus perencanaan. Permasalahan dan isu strategis pada

setiap fokus ditinjau dalam 3 konteks perencanaan yaitu perencanaan makro (tinjauan Nasional-Pulau Jawa), meso (tinjauan Konstelasi Regional Joglosemar), dan mikro (tinjauan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kawasan Strategis). Isu strategis diperoleh dengan mempertimbangkan *baseline* (kondisi eksiting dan fokus kebijakan) dan skenario (opsi masa depan dan masalah utama dalam mewujudkan opsi masa depan).

Berdasarkan arahan kebijakan, profil wilayah dan potensi daerah, serta profil dan kinerja infrastruktur yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, isu di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah **tingginya aktivitas pariwisata berpotensi merusak cagar budaya**. Sektor pariwisata merupakan *prime mover* pertumbuhan ekonomi di DIY, yang terlihat dari tingginya jumlah kunjungan wisatawan mencapai 28 juta pada tahun 2019 (tertinggi ke-6 nasional). Hal ini diperkuat dengan pertumbuhan sektor industri kreatif, terutama kuliner dan pakaian. Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki daya tarik wisata beragam dari wisata alam, budaya, minat khusus, dan MICE, yang telah diakui baik secara nasional maupun global.

KSPN Yogyakarta Kota dsk identik dengan keberadaan Kraton Ngayogyakarta yang hingga saat ini masih lestari dan dipimpin oleh sultan. Pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan tata pemerintahan kepada sultan untuk menjadi gubernur Provinsi DIY. Kekuatan budaya dan tradisi masyarakat lokal yang masih melekat hingga saat ini menyebabkan Kawasan Kraton Ngayogyakarta dsk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional.

Meskipun sektor pariwisata merupakan sektor unggulan, kontribusi terhadap PDRB baru sebesar 9,13 triliun rupiah (9%). Hal ini disebabkan oleh masih **terkonsentrasinya aktivitas pariwisata di Kawasan Perkotaan Yogyakarta**, sedangkan KSPN lainnya belum berkembang secara optimal. Pemusatan aktivitas wisata di kawasan perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya: **kemacetan akibat bangkitan kendaraan** yang cukup besar tanpa didukung oleh manajemen lalu lintas yang baik, peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana, serta **kerusakan cagar budaya** dan **hilangnya kearifan lokal** akibat ***overtourism***. Tantangan lainnya dalam pengembangan pariwisata DIY adalah tingginya risiko **bencana alam** berupa letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, abrasi, banjir, dan kekeringan.

Kekuatan keunggulan komparatif pariwisata Provinsi DIY masih membutuhkan peningkatan kualitas agar mempunyai daya saing yang tinggi. Produk wisata dan industri kreatif belum terstandardisasi dan kualitas atraksi masih perlu peningkatan. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas SDM pariwisata untuk memastikan pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian permasalahan dan isu strategis di atas dapat disimpulkan bahwa **aktivitas pariwisata masih terpusat di Kota Yogyakarta**, sehingga pertumbuhan industri pariwisata tidak tersebar ke kawasan pariwisata lain dan dapat **mengancam kelestarian cagar budaya**.

KONTEKS PERENCANAAN LOKUS (1)	PERTIMBANGAN (2)	BASELINE		KAWASAN PRIORITAS (5)	SKENARIO		ISU STRATEGIS (8)
		KONDISI EKSTING (3)	FOKUS KEBIJAKAN (4)		OPSI MASA DEPAN (6)	MASALAH UTAMA (7)	
MIKRO (DIY dan Kawasan Prioritas)		Jumlah penumpang harian Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (YIA) lebih besar dari bandara lain di Joglosemar					
	Ekonomi dan Budaya	Perkembangan pariwisata DIY merupakan satu kesatuan dengan kawasan wisata budaya Joglosemar (termasuk Borobudur dan Kraton Surakarta)	Pengembangan pariwisata DIY terintegrasi dengan pariwisata Borobudur		Pengembangan pariwisata DIY terintegrasi dengan pariwisata Borobudur	Terjadinya konsentrasi pengunjung wisata di koridor DIY-Borobudur	
		DIY menjadi pusat pelayanan kegiatan pariwisata Borobudur					
		Sektor pariwisata menyumbang PDRB DIY sebesar Rp9,13 Triliun (9% PDRB DIY)	Penguatan pariwisata DIY melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif mendukung pariwisata		Penguatan pariwisata DIY melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif mendukung pariwisata	Sulitnya untuk standarisasi kualitas produk ekonomi kreatif	
	Atraksi, amenitas, dan aksesibilitas	Sektor ekonomi kreatif (terutama tekstil dan bahan kulit) dan kuliner di DIY sudah berkembang sebagai salah satu pendukung utama sektor pariwisata budaya					
		Terdapat 5 KSPN di DIY, yaitu KSPN Yogyakarta kota dsk, KSPN Prambanan-Kalasan dsk, KSPN Pansela DIY dsk, KSPN Karst Gunungkidul dsk, KSPN Merapi-Merbabu dsk.	Peningkatan kualitas atraksi dan infrastruktur pendukung pariwisata		Pengembangan diversifikasi atraksi dan amenitas pariwisata berbasis ekonomi lokal dan potensi masing-masing KSPN	Diversifikasi atraksi dapat menyebabkan hilangnya keunikan/kekhasan kawasan wisata tertentu	
		Atraksi unggulan DIY berupa wisata alam, budaya, pendidikan dan belanja					
		Amenitas di kawasan pariwisata DIY relatif masih				Terbengkalainya amenities bila tidak diimbangi dengan	

RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2025-2034

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS (5)	SKENARIO		ISU STRATEGIS (8)
LOKUS (1)	PERTIMBANGAN (2)	KONDISI EKSTING (3)	FOKUS KEBIJAKAN (4)		OPSI MASA DEPAN (6)	MASALAH UTAMA (7)	
		belum memadai kecuali di KSPN Yogyakarta Kota dsk.				kemampuan pengelolaan	
		Kawasan Perkotaan Yogyakarta menjadi pusat akomodasi dan pelayanan jasa wisata di Joglosemar					
		Aksesibilitas antar DTW utama belum terkoneksi secara efisien karena seluruh pergerakan antar DTW masih melalui Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang padat					
	Kelestarian Lingkungan dan Cagar Budaya	Sebagian besar DTW utama berada di kawasan rawan bencana tinggi (letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan)	Pelestarian bentang pandang sesuai OUV dan pengembangan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk mengurangi risiko bencana	Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ketahanan bencana	Kurangnya pengendalian perkembangan sektor pariwisata sehingga bertentangan dengan prinsip pelestarian cagar budaya dan ketahanan bencana		
Terjadi pengurangan lahan sawah seluas 37,76 ha di Kawasan Prambanan dari 2011-2019 yang seharusnya dipertahankan sesuai OUV							

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Provinsi DIY bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan wilayahnya, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pada prinsipnya, pengembangan wilayah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan indikator pendapatan per kapita yang merata.

Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan analisis untuk memahami dan mengantisipasi segala perubahan atau ketidakpastian yang dapat menguntungkan atau merugikan. Ketika berbicara tentang tujuan, berarti sekaligus membahas tentang masa depan, sehingga dapat menyiapkan langkah pengendalian dan siap untuk menghadapi tantangan.

Analisis skenario pengembangan wilayah bermanfaat untuk memprediksi peristiwa yang akan terjadi di masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, dengan mengidentifikasi tren, peristiwa resiko, perubahan teknologi, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Tim penyusun dokumen RPIW telah melakukan kajian dan riset yang mendalam disertai dengan beberapa analisis. Pada pembahasan bab 6 ini, disajikan analisis skenario pengembangan wilayah yang merumuskan proyeksi pertumbuhan, visi dan strategi, serta skenario perumusan kawasan prioritas.

6.1 Proyeksi Pertumbuhan

Proyeksi dapat diartikan sebagai perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada (sekarang). Proyeksi pertumbuhan dalam sub bab ini menjelaskan perkiraan kondisi atau perkembangan wilayah perencanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kecenderungan perkembangan yang meliputi: proyeksi demografi, proyeksi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

6.1.1 Proyeksi Demografi

Metode yang digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan model eksponensial dimana jumlah penduduk akan terus meningkat setiap tahunnya. Alasan penggunaan model eksponensial adalah untuk mendapatkan jumlah proyeksi penduduk yang maksimal, terkait perhitungan optimal kebutuhan infrastruktur.

Dalam 10 tahun terakhir hasil survei kependudukan pertumbuhan penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta meningkat pesat dan diproyeksikan wilayah Provinsi DIY terus mengalami pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan tahunan penduduk untuk Provinsi DIY adalah 1,59% atau setara dengan rata-rata 58.259 jiwa setiap tahunnya. Penduduk Provinsi DIY pada tahun 2029 diproyeksikan akan mencapai 4,12 juta jiwa. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2029 berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 1,2 juta jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kota Yogyakarta sebesar 394 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terus meningkat, sehingga pada tahun 2034 terdapat 4,42 juta penduduk di Provinsi DIY. Penduduk terbanyak terletak di Kabupaten Sleman, sedangkan penduduk paling kecil berada di Kota Yogyakarta.

Tingginya jumlah penduduk jika dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah akan menjadi modal penting untuk meningkatkan pembangunan, salah satunya sebagai tenaga kerja. Tingginya jumlah penduduk berarti memiliki lebih banyak sumber daya untuk menghasilkan lebih banyak output, peningkatan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi boomerang dan beban bagi negara. Berikut merupakan tabel proyeksi penduduk Provinsi DIY sampai tahun 2034.

Tabel 6.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi DIY

Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)								
Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
D.I. Yogyakarta	3.806.383	3.855.329	3.905.793	3.957.808	4.011.412	4.066.640	4.123.532	4.427.173
Kulon Progo	463.869	474.550	485.498	496.722	508.227	520.023	532.116	597.343
Bantul	1.025.692	1.039.577	1.053.708	1.068.091	1.082.731	1.097.633	1.112.802	1.192.842
Gunungkidul	792.434	810.161	828.304	846.873	865.880	885.334	905.247	1.012.095
Sleman	1.144.491	1.148.849	1.153.452	1.158.310	1.163.431	1.168.825	1.174.504	1.200.294
Yogyakarta	379.897	382.193	384.830	387.813	391.143	394.825	398.863	424.599

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pada tahun 2023 berdasarkan SNI 03-1733-2004 kepadatan bruto Provinsi DIY berada dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 150 jiwa/ha. Sementara kepadatan tertinggi berada di Kota Yogyakarta dengan 76 jiwa/ha. Kabupaten dengan kepadatan terendah berada di Gunungkidul yang hanya mencapai 6 jiwa/ha. Pada tahun 2029 dan 2034 kepadatan penduduk di kabupaten/kota di Provinsi DIY tidak banyak berubah yaitu meningkat dari 12 jiwa/hektar menjadi 13 jiwa/hektar.

Tabel 6.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto Provinsi DIY

Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)								
Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
D.I. Yogyakarta	12	12	12	13	13	13	13	13
Kulon Progo	8	8	9	9	9	9	9	11
Bantul	20	20	21	21	21	21	22	20
Gunungkidul	6	6	6	6	6	6	6	7

Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)								
Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Sleman	19	19	19	19	19	19	19	20
Yogyakarta	76	76	77	78	78	79	80	85

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Sementara itu, proyeksi wisatawan di Provinsi DIY mengacu pada data Statistik Kepariwisata Provinsi DIY tahun 2016-2020, dengan proyeksi pertumbuhan untuk wisman sebesar 3,5% dan wisnus 5% sesuai dengan target pertumbuhan wisatawan pasca Covid-19. Proyeksi wisatawan di Provinsi DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.3 Proyeksi Wisatawan Provinsi DIY

Kab/Kota	Proyeksi Wisatawan (pengunjung)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
D.I. Yogyakarta	8.247.174	8.659.436	9.092.307	9.546.818	11.603.730	14.808.899
Kulon Progo	954.562	1.002.290	1.052.405	1.105.025	1.343.164	1.714.254
Bantul	2.960.735	3.108.770	3.264.208	3.427.417	4.166.043	5.317.037
Gunungkidul	2.034.517	2.136.242	2.243.054	2.355.207	2.862.768	3.653.697
Sleman	1.815.148	1.905.823	2.001.029	2.100.991	2.553.353	3.258.178
Yogyakarta	482.212	506.310	531.611	558.178	678.402	865.733

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Jumlah wisatawan di Provinsi DIY mengalami peningkatan, terutama jumlah wisatawan domestik yang naik dari tahun ke tahun. Jumlah wisatawan di Provinsi DIY pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 11,6 juta pengunjung dan sebesar 14,8 juta pada tahun 2034. Jumlah wisatawan tertinggi berada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, dimana daya tarik wisata utamanya berupa wisata alam. Pelaku wisata di Provinsi DIY kebanyakan merupakan masyarakat setempat sehingga tidak terjadi penambahan pekerja wisata dari luar daerah.

6.1.2 Proyeksi Ekonomi

Proyeksi nilai PDRB menggunakan rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2012-2021. Pertumbuhan PDRB menggunakan model CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) dan mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun proyeksi sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2012-2021. Pada tahun 2023 nilai PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 113.889 miliar rupiah. Dengan asumsi pertumbuhan sebesar 4,62% per tahun, PDRB Provinsi DIY diperkirakan mencapai 143.127 miliar pada 2029 dan 173.499 miliar rupiah pada 2034.

Tabel 6.4 Proyeksi Nilai PDRB ADHK Provinsi DIY

Tahun	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)
2023	113.889
2024	118.290
2025	122.869
2026	127.634

Tahun	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)
2027	132.593
2028	137.754
2029	143.127
2034	173.499

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2029, PDRB ADHK memiliki presentase terbesar di sektor informasi dan komunikasi (20,55%), industri pengolahan (10,34%), serta konstruksi (10,29%). Meski tidak masuk ke dalam 3 besar kontributor PDRB Provinsi DIY, sektor pariwisata berada di urutan ke-5 melalui sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,7 triliun rupiah. Selain itu sektor industri pengolahan di Provinsi DIY didominasi oleh sektor ekonomi kreatif (terutama tekstil dan bahan kulit) dan kuliner berada di urutan kedua sebagai pendukung utama sektor pariwisata budaya yang menjadi unggulan Provinsi DIY.

Tabel 6.5 Proyeksi Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Provinsi DIY Tahun 2029

Kode	Lapangan Usaha	2029	%	2034	%
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	9.688	6,06%	15.442	8,00%
B	Pertambangan dan penggalian	546	0,34%	886	0,46%
C	Industri Pengolahan	16.536	10,34%	22.792	11,81%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	243	0,15%	300	0,16%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	151	0,09%	199	0,10%
F	Konstruksi	16.448	10,29%	19.210	9,95%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.531	7,21%	15.072	7,81%
H	Transportasi dan Pergudangan	5.094	3,19%	8.037	4,16%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.681	7,93%	16.424	8,51%
J	Informasi dan Komunikasi	32.858	20,55%	29.374	15,22%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.928	3,71%	6.869	3,56%
L	Real Estate	10.923	6,83%	13.739	7,12%
M, N	Jasa Perusahaan	1.503	0,94%	2.026	1,05%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.568	5,98%	13.099	6,79%
P	Jasa Pendidikan	15.516	9,70%	18.048	9,35%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.188	3,87%	6.192	3,21%
R, S, T,U	Jasa lainnya	4.474	2,80%	5.318	2,76%
D.I. Yogyakarta		153.965	100%	193.030	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dengan asumsi pertumbuhan 4,62% hingga 2034 diperkirakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi DIY meningkat menjadi Rp193 Triliun. Sektor dominan berupa Informasi and Komunikasi; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Sektor pariwisata berupa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berada di posisi ke-5 sebesar Rp16,4 Triliun atau mencapai 8,51% dari total PDRB DIY pada 2034.

Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan, permasalahan, dan isu strategis di Provinsi DIY, sektor lapangan usaha yang diprediksi akan menjadi

penggerak ekonomi regional, yaitu sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata melalui lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan sebesar 4,2% per tahun, diproyeksikan pada tahun 2029 akan berkontribusi sebesar 7,93% terhadap PDRB Provinsi DIY atau sekitar 12,68 triliun rupiah.

Tabel 6.6 Proyeksi Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Strategis Provinsi DIY

Sektor/ Lapangan Usaha	CAGR (%)	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					% PDRB Provinsi	
		2023	2025	2027	2029	2034	2029	2034
Pariwisata								
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,19	9.911,9	10.760,2	11.680,9	12.680,5	16.424	7,9	8,51

Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.1.3 Keberlanjutan Lingkungan

Jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (*valuation*) suatu ekosistem. Ketersediaan jasa ekosistem bervariasi seiring dengan berjalannya waktu. Ketersediaannya secara aktual dan potensial di masa depan harus menjadi bagian dari penilaian jasa ekosistem.

Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Jasa ekosistem dapat dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung.

A. Jasa Ekosistem Penyedia Air

Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi oleh daerah dengan jasa ekosistem air kategori sedang dan tinggi. Artinya penyediaan air bersih di daerah tersebut tergolong sedang dan tinggi. Secara umum, jasa ekosistem air Provinsi D.I. Yogyakarta berada dalam status aman dengan kondisi aman bersyarat berada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang berkarakteristik perkotaan.

Wilayah dengan penyediaan air sangat rendah berada di Kota Yogyakarta, hulu Merapi, Pantai Selatan Kulon Progo dan Bantul, serta Perkotaan Gunungkidul. Wilayah tersebut merupakan wilayah perkotaan, pesisir serta daerah karst yang minim sumber air permukaan dan tidak dapat menyimpan air.

B. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi oleh daerah dengan jasa ekosistem pangan rendah. Artinya sebagian lahan di daerah tersebut adalah lahan yang mampu menyediakan bahan pangan dengan potensi rendah. Wilayah penyedia pangan sangat tinggi sebesar 13% yang perlu dipertahankan

mengingat wilayahnya yang subur sesuai untuk tanaman pangan. Sedangkan wilayah penyedia pangan rendah sebesar 54%.

Wilayah dengan penyediaan pangan sangat tinggi berada di sisi selatan Kabupaten Kulon Progo dan tersebar di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sedangkan penyediaan pangan rendah tersebar di sisi barat Kabupaten Kulon Progo, hulu Gunung Merapi, seluruh Kota Yogyakarta, dan sebagian besar wilayah Gunungkidul yang berupa karst.

C. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

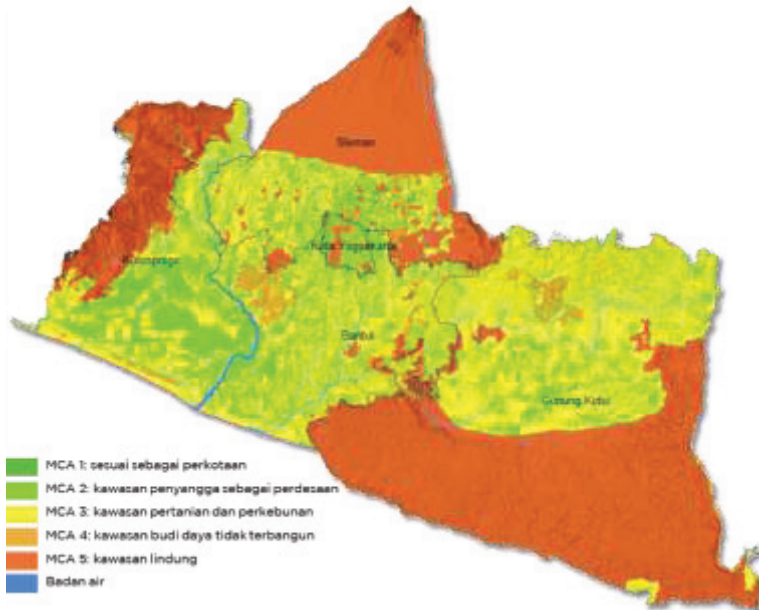
Kemampuan pengaturan tata air dan banjir Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi oleh daerah dengan pengelolaan tata air dan banjir yang rendah sebesar 50,9%. Kemampuan pengaturan tata air dan banjir sangat tinggi hanya seluas 19% berada di hulu Gunung Merapi dan pedesaan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan kemampuan sangat rendah terutama berada di wilayah perkotaan, pesisir selatan, dan Gunungkidul yang berupa tanah karst.

D. Jasa Ekosistem Perlindungan dan Pencegahan Bencana

Kemampuan regulasi perlindungan dan pencegahan bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta tergolong sangat tinggi (29,4%), namun di beberapa tempat termasuk rendah (33,9%). Wilayah dengan perlindungan dan pencegahan bencana sangat tinggi utamanya berada di dataran rendah.

E. Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Kemampuan pengaturan tempat tinggal dan ruang hidup Provinsi D.I. Yogyakarta tergolong sedang dan tinggi sebesar 35% dan 29,2% dari wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Daerah yang memiliki daya dukung tinggi untuk permukiman terutama berada di wilayah dataran rendah yang memiliki ketersediaan pangan tinggi dan di luar kawasan lindung dan berfungsi lindung.



Gambar 6.1 Hasil *Multicriteria Analysis* Jasa Ekosistem Provinsi D.I. Yogyakarta
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung, Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki wilayah yang sangat terbatas untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi (perkotaan) sebesar 0,3% dari total luasan wilayah. Untuk itu, pengembangan budi daya terbangun perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana terlihat dari gambar di atas, mengingat wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi dengan daya dukung untuk pertanian dan perkebunan, serta kawasan lindung.

6.2 Visi dan Strategi

Pada subbab visi dan strategi menjelaskan tentang perumusan visi dan penyusunan strategis sesuai fokus perencanaan.

6.2.1 Perumusan Visi Wilayah

Visi wilayah dirumuskan dari hasil analisis arah kebijakan di Bab II, dengan meninjau kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur di Bab III dan IV, serta menjawab permasalahan dan isu strategis di Bab V. Pengembangan wilayah di Provinsi D.I. Yogyakarta pada pengembangan kawasan perkotaan sebagai unggulan.

Visi/tujuan pengembangan infrastruktur wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta:

“Pengembangan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata Terintegrasi dengan Joglosemar”

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat lima misi yang akan dilakukan. Keempat misi tersebut sekaligus akan menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan wilayah D.I. Yogyakarta yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa melalui pengembangan pagelaran seni dan kebudayaan, serta penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan seni dan budaya;
2. Integrasi kegiatan kepariwisataan antar DTW melalui penguatan atraksi dan manajemen pariwisata dengan penguatan atraksi dan potensi lokal serta penguatan manajemen pengelolaan pariwisata;
3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal untuk mendukung industri pariwisata melalui penguatan kapasitas SDM di bidang ekonomi kreatif serta penguatan produksi dan pemasaran ekonomi kreatif;
4. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar DTW untuk memperlancar lalu lintas pergerakan wisatawan melalui peningkatan konektivitas jaringan transportasi dan pengembangan angkutan massal yang terintegrasi;
5. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata yang berkelanjutan dan berketahanan bencana melalui pengembangan infrastruktur serta mitigasi dan pemulihan pascabencana.

6.2.2 Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata

Untuk menyusun strategi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dilakukan serangkaian analisis yang tajam dan mendalam. Pada sub bab ini menjelaskan tentang analisis fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan Analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut dengan Analisis *Five Forces*. Analisis PESTLE merupakan metode manajemen risiko yang digunakan agar bisa melakukan evaluasi lingkungan eksternal. Analisis ini dilakukan dengan cara membagi peluang dan risiko menjadi faktor-faktor PESTLE yaitu: *Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environment*.

Analisis *Five Forces* (*Porter Five Force Analysis*) atau lima kekuatan porter adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa kekuatan kompetitif di dalam suatu industri yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Peluang dan tantangan di *level* meso dijabarkan berdasarkan beberapa aspek yaitu *rivalry among existing competitor* (Persaingan Antar Kompetitor Eksisting), *bargaining power of customers* (Daya Tawar Pelanggan), *bargaining power of suppliers* (Daya Tawar Pemasok), *threat of new entrants* (Ancaman Pendatang Baru), dan *threat of substitutes* (Ancaman Produk Pengganti).

Kelima aspek tersebut masing-masing memiliki tiga parameter, yaitu: 1) Parameter untuk aspek *rivalry among existing competitor* adalah 'konversi

threat menjadi *opportunity*', 'kualitas yang diinginkan', dan 'inovasi'; 2) Parameter untuk aspek *bargaining power of customers* adalah 'sensitivitas target', 'trend existing', dan 'penciptaan nilai'; 3) Parameter untuk aspek *bargaining power of suppliers* adalah 'ketergantungan saat ini', 'kualifikasi yang dibutuhkan', dan 'daya dukung existing'; 4) Parameter untuk aspek *threat of new entrants* adalah 'tantangan yang dihadapi', 'strategi untuk memenangkan kompetisi', dan 'ancaman terhadap legacy'; dan 5) Parameter untuk aspek *threat of substitutes* adalah 'trend analisis PESTLE', 'trend yang mengganggu kebijakan', dan 'peralihan cost'. Parameter yang digunakan pada masing-masing aspek didapatkan berdasarkan pembobotan tertinggi yang dinilai paling relevan dalam pengembangan fokus perencanaan di Provinsi DIY.

Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari kedua analisis tersebut akan menjadi masukan terhadap analisis IFAS dan EFAS, sehingga menghasilkan analisis SWOT. IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*), merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap terbentuknya *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) di mana faktor ini bersangkutan dengan kondisi yang terjadi di dalam. Sementara EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*), adalah faktor eksternal yang mempengaruhi terbentuknya *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman), faktor ini bersangkutan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar. Hasil pembobotan IFAS dan EFAS kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-masing fokus perencanaan. Tahapan analisis yang dilakukan dijelaskan dalam bagan berikut ini.



Gambar 6.2 Bagan Tahapan Analisis Penyusunan Strategi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Analisis *PESTLE*, *5 FORCES*, *IFAS EFAS*, *SWOT*, dan *grand strategy* sektor pariwisata diuraikan sebagai berikut.

1) Analisis **PESTLE Fokus Pariwisata**

Hasil analisis *Pestle* fokus pariwisata menunjukkan bahwa parameter ekonomi diikuti oleh parameter sosial dan lingkungan menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pengembangan pariwisata di DIY. Secara sosial Provinsi DIY menjadi satu-satunya provinsi yang ditetapkan sebagai daerah istimewa dengan kekuatan budaya dan tradisi lokal yang masih melekat di masyarakat. Hal ini menjadi potensi pengembangan sektor pariwisata DIY agar pengembangan pariwisata DIY dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdaya saing global sesuai dengan keunikannya. Analisis *Pestle* fokus pariwisata secara lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 6.7 Analisis **PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata**

Parameter	Opportunities	Threats	Bobot
<i>POLITICAL</i>	Penetapan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagai salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional	Berubahnya agenda prioritas nasional sektor pariwisata	14%
<i>ECONOMIC</i>	Kunjungan wisnus DIY pada 2022 berada di peringkat ke-6 tertinggi nasional	Kondisi ekonomi global yang berdampak pada sektor pariwisata Indonesia (bencana, pandemi, krisis ekonomi)	18%
<i>SOCIOLOGICAL</i>	Provinsi DIY memiliki kekuatan budaya dan tradisi lokal yang masih melekat di masyarakat, sehingga menjadi satu-satunya provinsi yang secara administratif ditetapkan sebagai daerah istimewa	Masifnya perkembangan pariwisata dapat menyebabkan kerusakan cagar budaya dan hilangnya kearifan lokal	23%
<i>TECHNOLOGICAL</i>	Kemudahan akses teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata	Pelaku wisata belum memiliki kapasitas dalam merespon perkembangan teknologi	14%
<i>LEGAL</i>	RIPPARNAS menetapkan 5 KSPN di DIY, yaitu KSPN Yogyakarta Kota dsk, KSPN Prambanan-Kalasan dsk, KSPN Pansela DIY dsk, KSPN Karst Gunungkidul dsk, KSPN Merapi-Merbabu dsk dengan tema yang beragam	Belum adanya regulasi yang mengatur pengembangan kawasan pariwisata sehingga peningkatan ekonomi dari aktivitas wisata tidak dapat dioptimalkan dan keberlanjutan pariwisata tidak dapat dijamin	14%
<i>ENVIRONMENT</i>	Sebagian besar DTW di DIY yang telah diakui secara nasional dan internasional	Sebagian besar DTW utama berada di kawasan rawan bencana tinggi (letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan)	18%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) Analisis **5 FORCES Fokus Pariwisata**

Dalam Analisis **5 FORCES fokus pariwisata**, 5 aspek yang ditinjau adalah fungsi sebagai pusat pelayanan, atraksi wisata, pengembang pariwisata, konektivitas, dan kekuatan budaya. Secara rinci Analisis **5 FORCES** fokus pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.8 Analisis 5 FORCES (Meso) Fokus Pariwisata

PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR		
Kualitas yang Diinginkan	DIY menjadi pusat pelayanan kegiatan pariwisata Borobudur	Munculnya pusat pelayanan baru mendukung Borobudur dapat berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi pariwisata DIY
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS		
Trend Eksisting	Terdapat 5 KSPN dengan tema alam, budaya, pendidikan, dan belanja	Terjadinya <i>overcapacity</i> di DTW unggulan yang bertentangan dengan daya dukung lingkungan dan budaya
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS		
Kualifikasi yang Dibutuhkan	Perkembangan pariwisata DIY merupakan satu kesatuan dengan kawasan wisata budaya Joglosemar (termasuk Borobudur dan Kraton Surakarta)	Pengembangan kawasan pariwisata Joglosemar di luar DIY berpotensi menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan, jika kualitas pariwisata DIY tidak ditingkatkan
THREAT OF NEW ENTRANTS		
Strategi untuk Memenangkan Kompetisi	Posisi strategis DIY didukung adanya bandara, stasiun, dan kereta komuter sebagai simpul transportasi utama di Jawa bagian Selatan	Perbaikan konektivitas dan sistem transportasi dapat menyebabkan pergeseran hub dari DIY ke wilayah lain
THREAT OF SUBSTITUTES		
Trend Analisis PESTLE	Provinsi DIY memiliki kekuatan budaya dan tradisi lokal yang masih melekat di masyarakat, sehingga menjadi satu-satunya provinsi yang secara administratif ditetapkan sebagai daerah istimewa	Masifnya perkembangan pariwisata dapat menyebabkan kerusakan cagar budaya dan hilangnya kearifan lokal

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Analisis SWOT (IFAS – EFAS) Fokus Pariwisata

Analisis SWOT untuk fokus pariwisata ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6.9 Analisis SWOT Fokus Pariwisata

Strengths		Weaknesses	
1	Kraton Ngayogyakarta merupakan wilayah sumbu filosofis yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional	1	Sulitnya untuk standardisasi kualitas produk ekonomi kreatif
2	Sektor pariwisata menyumbang PDRB DIY sebesar Rp9,13 Triliun (9% PDRB DIY)	2	Diversifikasi atraksi dapat menyebabkan hilangnya keunikan/kekhasan kawasan wisata tertentu
3	Sektor ekonomi kreatif (terutama tekstil dan bahan kulit) dan kuliner di DIY sudah berkembang sebagai salah satu pendukung utama sektor pariwisata budaya	3	Terbengkalainya amenitas bila tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan
4	Atraksi unggulan DIY berupa wisata alam, budaya, pendidikan dan belanja	4	Kurangnya pengendalian perkembangan sektor pariwisata sehingga bertentangan dengan prinsip pelestarian cagar budaya dan ketahanan bencana
5	Kawasan Perkotaan Yogyakarta menjadi pusat akomodasi dan pelayanan jasa wisata di Joglosemar	5	Sebagian besar DTW utama berada di kawasan rawan bencana tinggi (letusan

		gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan)
Opportunities		Threats
1	DIY menjadi pusat pelayanan kegiatan pariwisata Borobudur	1 Munculnya pusat pelayanan baru mendukung Borobudur dapat berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi pariwisata DIY
2	Terdapat 5 KSPN dengan tema alam, budaya, pendidikan, dan belanja	2 Terjadinya overcapacity di DTW unggulan yang bertentangan dengan daya dukung lingkungan dan budaya
3	Perkembangan pariwisata DIY merupakan satu kesatuan dengan kawasan wisata budaya Joglosemar (termasuk Borobudur dan Kraton Surakarta)	3 Pengembangan kawasan pariwisata Joglosemar di luar DIY berpotensi menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan, jika kualitas pariwisata DIY tidak ditingkatkan
4	Posisi strategis DIY didukung adanya bandara, stasiun, dan kereta komuter sebagai simpul transportasi utama di Jawa bagian Selatan	4 Perbaikan konektivitas dan sistem transportasi dapat menyebabkan pergeseran hub dari DIY ke wilayah lain
5	Provinsi DIY memiliki kekuatan budaya dan tradisi lokal yang masih melekat di masyarakat, sehingga menjadi satu-satunya provinsi yang secara administratif ditetapkan sebagai daerah istimewa	5 Masifnya perkembangan pariwisata dapat menyebabkan kerusakan cagar budaya dan hilangnya kearifan lokal

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Masing-masing komponen dalam SWOT kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor. Pembobotan untuk faktor internal ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6.10 *Skoring Strengths dan Weaknesses Fokus Pariwisata*

Faktor Internal			Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Kraton Ngayogyakarta merupakan wilayah sumbu filosofis yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional	0,21	4	0,86
	2	Sektor pariwisata menyumbang PDRB DIY sebesar Rp9,13 Triliun (9% PDRB DIY)	0,14	4	0,57
	3	Sektor ekonomi kreatif (terutama tekstil dan bahan kulit) dan kuliner di DIY sudah berkembang sebagai salah satu pendukung utama sektor pariwisata budaya	0,21	5	1,07
	4	Atraksi unggulan DIY berupa wisata alam, budaya, pendidikan dan belanja	0,21	3	0,64
	5	Kawasan Perkotaan Yogyakarta menjadi pusat akomodasi dan pelayanan jasa wisata di Joglosemar	0,21	2	0,43
Sub Total			1,00		3,57
Weaknesses	1	Sulitnya untuk standardisasi kualitas produk ekonomi kreatif	0,21	-4	-0,86
	2	Diversifikasi atraksi dapat menyebabkan hilangnya keunikan/kekhasan kawasan wisata tertentu	0,21	-3	-0,64
	3	Terbengkalainya amenitas bila tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan	0,21	-3	-0,64
	4	Kurangnya pengendalian perkembangan sektor pariwisata sehingga bertentangan dengan prinsip pelestarian cagar budaya dan ketahanan bencana	0,14	-2	-0,29
	5	Sebagian besar DTW utama berada di kawasan rawan bencana tinggi (letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan)	0,21	-3	-0,64
Sub Total			1,00		-3,07
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL			0,50		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

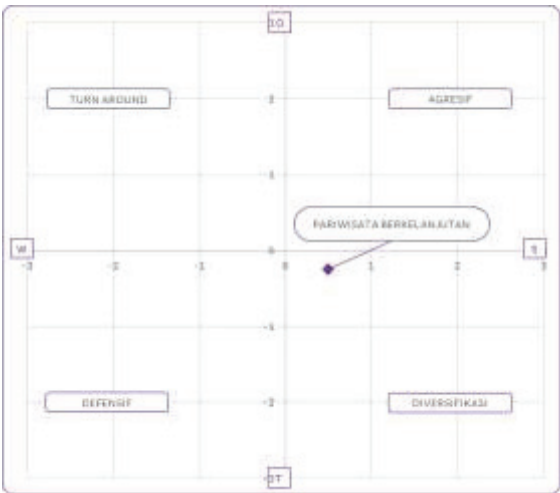
Pembobotan untuk faktor eksternal ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6.11 Skoring Opportunities dan Threats Fokus Pariwisata

Faktor Eksternal			Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	DIY menjadi pusat pelayanan kegiatan pariwisata Borobudur	0,21	3	0,64
	2	Terdapat 5 KSPN dengan tema alam, budaya, pendidikan, dan belanja	0,14	3	0,43
	3	Perkembangan pariwisata DIY merupakan satu kesatuan dengan kawasan wisata budaya Joglosemar (termasuk Borobudur dan Kraton Surakarta)	0,21	3	0,64
	4	Posisi strategis DIY didukung adanya bandara, stasiun, dan kereta komuter sebagai simpul transportasi utama di Jawa bagian Selatan	0,21	4	0,86
	5	Provinsi DIY memiliki kekuatan budaya dan tradisi lokal yang masih melekat di masyarakat, sehingga menjadi satu-satunya provinsi yang secara administratif ditetapkan sebagai daerah istimewa	0,21	3	0,64
Sub Total			1,00		3,21
Threats	1	Munculnya pusat pelayanan baru mendukung Borobudur dapat berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi pariwisata DIY	0,23	-3	-0,69
	2	Terjadinya overcapacity di DTW unggulan yang bertentangan dengan daya dukung lingkungan dan budaya	0,15	-3	-0,46
	3	Pengembangan kawasan pariwisata Joglosemar di luar DIY berpotensi menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan, jika kualitas pariwisata DIY tidak ditingkatkan	0,23	-5	-1,15
	4	Perbaikan konektivitas dan sistem transportasi dapat menyebabkan pergeseran hub dari DIY ke wilayah lain	0,23	-3	-0,69
	5	Masifnya perkembangan pariwisata dapat menyebabkan kerusakan cagar budaya dan hilangnya kearifan lokal	0,15	-3	-0,46
Sub Total			1,00		-3,46
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL			-0,25		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus pariwisata berada pada kuadran **diversifikasi**, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan ancaman (*threats*).



Gambar 6.3 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Strategi memperkuat daya saing sektor pariwisata di Provinsi D.I. Yogyakarta dijabarkan menjadi:

1. Penguatan Kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa (S1-T2-T5)
2. Integrasi kegiatan kepariwisataan antar DTW melalui penguatan atraksi dan manajemen pariwisata (S4-T3)
3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal untuk mendukung industri pariwisata (S3-T3-T5)
4. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar DTW untuk memperlancar lalu lintas pergerakan wisatawan (S2-S4-T4)
5. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata yang berkelanjutan dan berketahanan bencana (S5-T5)

6.3 Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan)

Skenario perumusan kawasan prioritas meliputi penentuan kawasan prioritas dan tahapan pengembangannya.

6.3.1 Penentuan Kawasan Prioritas

Dalam menentukan kawasan prioritas disusun penilaian kawasan berdasarkan metode *Multi Criteria Analysis* (MCA). Daftar panjang kawasan prioritas yang telah disusun pada bab 2 diberikan bobot berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai untuk mendapatkan daftar kawasan prioritas yang akan ditangani hingga tahun 2034.

A. Pariwisata

Parameter penilaian untuk fokus pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 6.12 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata

Kode	Parameter	Penilaian	
A	Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam RTRWN	Tercantum dalam dokumen kebijakan terkait	1
B	Major Project RPJMN	Merupakan Major Project RPJMN	1
C	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) RIPPARNAS	Tercantum dalam dokumen kebijakan terkait	1
D	UNESCO <i>World Heritage Site/Global Geopark</i>	Terdaftar sebagai warisan dunia/alam UNESCO	1
E	KTA ITMP BYP	KTA ITMP Borobudur - Yogyakarta - Prambanan atau KTA Perluasan MADA ITMP BYP 2045	1
F	Kunjungan wisatawan	Masuk 3 besar kunjungan wisatawan di DIY	1
G	Jumlah DTW	Terdapat < 30 DTW di satu KSPN	1
		Terdapat 30-60 DTW di satu KSPN	2
		Terdapat > 60 DTW di satu KSPN	3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penilaian MCA untuk focus pariwisata adalah sebagai berikut.

Tabel 6.13 Penilaian Kawasan Fokus Pariwisata

No	Longlist Kawasan Prioritas	Parameter							Total
		A	B	C	D	E	F	G	
1	KPPN Karst Gunungkidul dsk	0	0	0	1	0	0	0	1
2	KPPN Prambanan - Kalasan dsk	0	0	0	1	1	0	0	2
3	KPPN Yogyakarta Kota dsk	0	0	0	0	1	0	0	1
4	KPPN Pantai Selatan Yogyakarta dsk	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KPPN Merapi-Merbabu dsk	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KSPN Yogyakarta Kota dsk	0	1	1	1	1	1	3	8
7	KSPN Prambanan-Kalasan dsk	1	1	1	1	1	1	2	8
8	KSPN Pansela DIY dsk	0	1	1	0	1	1	1	5
9	KSPN Karst Gunungkidul dsk	0	0	1	1	1	0	3	6
10	KSPN Merapi-Merbabu dsk	1	0	1	0	0	0	1	3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian di atas, kawasan prioritas fokus pariwisata adalah **KSPN Yogyakarta Kota dsk.**, **KSPN Prambanan-Kalasan dsk.**, **KSPN Pansela DIY dsk.**, dan **KSPN Karst Gunungkidul dsk.**

B. Kawasan Prioritas di D.I. Yogyakarta

Berdasarkan hasil *Multi Criteria Analysis* (MCA) yang telah dilakukan terdapat 4 kawasan prioritas terpilih di D.I. Yogyakarta, yaitu KSPN Yogyakarta Kota dsk., KSPN Prambanan-Kalasan dsk., KSPN Pansela DIY dsk., dan KSPN Karst Gunungkidul dsk. untuk fokus pariwisata.

6.3.2 Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas

Pengembangan Kawasan prioritas dibagi ke dalam dua tahapan. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2025-2034 yakni bagi kawasan prioritas terpilih sesuai dengan hasil *multicriteria analysis*. Sedangkan bagi Kawasan prioritas lainnya, pengembangan dilakukan setelah tahun 2029. Keterangan lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.14 Tahapan pengembangan kawasan prioritas di D.I. Yogyakarta

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Tahap I	Tahap II
			2025-2029	2030-2034
Pariwisata				
1	KSPN Yogyakarta Kota dsk	KSPN Yogyakarta Kota dsk		
2	KSPN Prambanan-Kalasan dsk	KSPN Prambanan-Kalasan dsk		
3	KSPN Pansela DIY dsk	KSPN Pansela DIY dsk		
4	KSPN Karst Gunungkidul dsk	KSPN Karst Gunungkidul dsk		
5	KSPN Merapi-Merbabu dsk	KSPN Merapi-Merbabu dsk		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

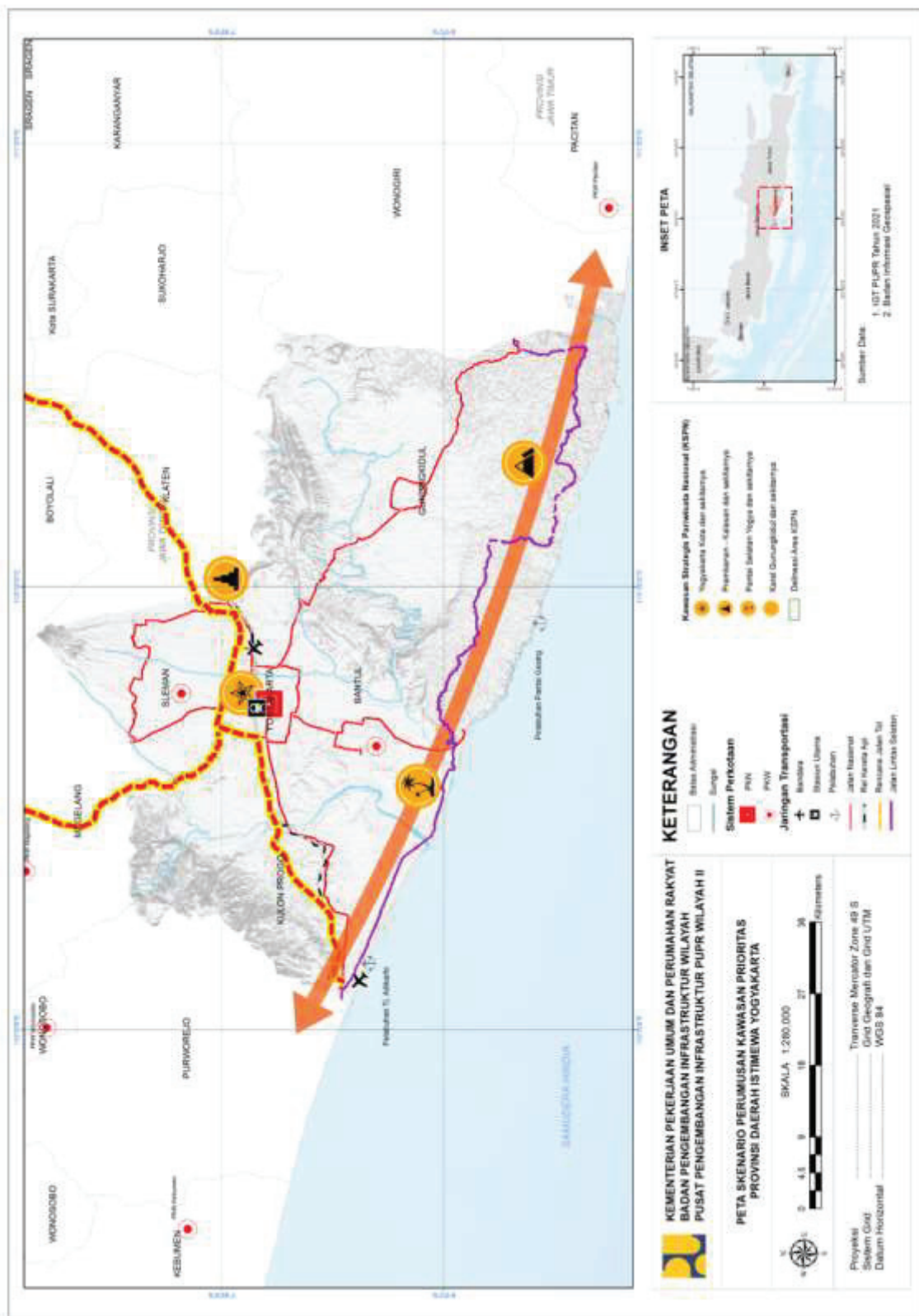
Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan perhitungan kebutuhan dan *gap* infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas di Provinsi DIY yang mendukung fokus utama pariwisata. Untuk itu, dilakukan deliniasi kawasan prioritas sebagai berikut.

Tabel 6.15 Deliniasi Kawasan Prioritas 2025-2034 Provinsi DIY

No	Kawasan	Deliniasi (Kecamatan)
1	KSPN Yogyakarta Kota	Jetis, Gondokusuman, Gedongtengen, Danurejan, Gondomanan, Pakualaman, Kraton, Ngampilan, Wirobrajan, Mergangsari, Mantriweron
2	KSPN Prambanan	Prambanan (Sleman), Prambanan (Klaten)
3	KSPN Pansela DIY	Bantul, Srandakan, Sanden, Kretek
4	KSPN Karst Gunungkidul	Purwosari, Panggang, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Semanu, Wonosari

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sedangkan, rumusan kawasan prioritas dan tahapan pengembangannya dapat dilihat dalam peta skenario pengembangan wilayah dan pentahapan.



Peta 6.1 Skenario Pengembangan Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta

BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Analisis kebutuhan infrastruktur mendeskripsikan analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur sesuai kaidah waktu, urutan fungsi, dan dukungan terhadap sektor non-PUPR. Guna mendapatkan hasil yang aktual, analisis kebutuhan infrastruktur dilakukan pada setiap kawasan prioritas di Jawa Tengah, sehingga hasil analisis kebutuhan infrastruktur ini menjadi salah satu dasar untuk menyusun rencana aksi (*Action Plan*) pembangunan infrastruktur (pada bab 8).

7.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah

Subbab ini akan menjelaskan mengenai proyeksi kebutuhan infrastruktur masa mendatang berdasarkan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kawasan, dan perkembangan sektor prioritas, yang dibandingkan dengan ketersediaan masa kini sehingga menghasilkan gap kebutuhan pembangunan infrastruktur.

7.1.1 Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi D.I. Yogyakarta

Standar pelayanan minimum dihitung untuk Infrastruktur PUPR di setiap kabupaten/kota di Provinsi DIY meliputi layanan air baku, layanan jalan nasional, layanan infrastruktur permukiman, serta layanan perumahan.

1) Infrastruktur Sumber Daya Air

Total kapasitas tampung di Provinsi DIY adalah 31.535.695 m³. Terdiri dari satu buah bendungan dengan kapasitas tampung sebesar 25.000.000 m³, 251 embung nasional dengan kapasitas tampung sebesar 1.716.000 m³, 25 embung provinsi dengan kapasitas 161.290 m³, serta dua buah bendung dengan kapasitas total sebesar 4.657.406 m³. Dengan jumlah penduduk Provinsi DIY sebanyak 3.654.724 jiwa, maka kapasitas tampung per kapita per tahun baru mencapai 8,63 m³/tahun/kapita. Jumlah tersebut masih berada jauh di bawah target nasional sebesar 62,51 m³/ tahun/kapita dan 87 m³/tahun/kapita pada tahun 2029.

Tabel 7.1 Perhitungan Peningkatan Kapasitas Tampung Bendungan

Tahun	Kapasitas Tampung Bendungan (m ³ /cap/tahun)											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kapasitas Tampung Per Kapita	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Target renstra	62,51	62,51	63,45	65,09	66,7	68,4	70	79	88	97	106	115
Gap Pemenuhan Renstra	-53,9	-53,9	-54,8	-56,5	-58,1	-59,7	-61,4	-70,4	-79,4	-88,4	-97,4	-106,4

Sumber: Analisis, 2023

Meski jumlah kapasitas tampung di Provinsi DIY tergolong sangat rendah, air baku Provinsi DIY saat ini sebagian besar berasal dari sumber air permukaan yaitu Sungai Progo (potensi air baku 120.880 liter/detik), Sungai Opak (potensi air baku 12.350 liter/detik), DAS Serang (10.830 liter/detik), serta sungai bawah tanah dengan potensi air baku total mencapai 2.694 liter/detik.

Terdapat gap kapasitas tampung bendungan sebesar -106,4 m³/cap/tahun pada tahun 2034 sesuai target pemenuhan kebutuhan infrastruktur jangka panjang. Namun hingga tahun 2034 tidak ada rencana pembangunan bendungan baru di Provinsi DIY, mengingat terbatasnya ketersediaan lahan dan kondisi geografis yang kurang memungkinkan. Sehingga pemenuhan air baku di Provinsi DIY dapat memanfaatkan potensi air permukaan dan sumur bawah tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

2) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pengukuran konektivitas jalan diukur melalui waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu yang diperlukan (dalam jam) untuk menempuh perjalanan sepanjang 100 km. Waktu tempuh terbagi dalam dua kategori yaitu waktu tempuh lintas utama dan waktu tempuh perkotaan. Target kinerja untuk peningkatan konektivitas jalan dan jembatan adalah dengan peningkatan konektivitas jaringan jalan nasional dengan pencapaian IKSS waktu tempuh sebesar 2,2 jam per 100 km di lintas utama pulau (2024). Target tersebut meningkat menjadi 1,7 jam per 100 km pada 2029 dan 1,6 jam per 100 km pada 2034.

Ditjen Bina Marga menetapkan pencapaian waktu tempuh tersebut di 52 koridor terpilih, dimana ruas jalan tol Yogyakarta – Surakarta merupakan salah satu ruas tersebut (Renstra Ditjen Bina Marga 2020-2024). Target tersebut ditujukan untuk mengurangi waktu tempuh yang berdampak pada tinggi rendahnya biaya logistik. Dalam skala besar, tingginya biaya logistik dapat menghambat daya saing Indonesia di dunia global.

Waktu tempuh perkotaan dihitung pada ruas-ruas jalan perkotaan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY. Waktu tempuh perkotaan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7.2 Waktu Tempuh Rata-Rata Jalan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Ruas Jalan	Jarak (km)	Waktu Rata-Rata (Menit)	Waktu Rata-Rata (Jam)	Waktu Tempuh (jam/100 km)	Kemantapan Jalan (%)
1	Yogyakarta - Surakarta	63,45	130	2,17	3,41	100
	Ruas Dalam Kota					
2	Ringroad utara (Jl. Padjajaran)	18,7	30	0,50	2,67	100
3	Ringroad selatan (Jl. Majapahit)	16,6	32,25	0,54	3,24	100
4	Perkotaan Sleman (Bts. Kota Sleman-Sp. Jombor)	8,1	14,75	0,25	3,03	100
5	Perkotaan Bantul (Yogyakarta-Bts. Kota Bantul-Sp. Weden)	9,9	19,5	0,33	3,28	100

No	Ruas Jalan	Jarak (km)	Waktu Rata-Rata (Menit)	Waktu Rata-Rata (Jam)	Waktu Tempuh (jam/100 km)	Kemantapan Jalan (%)
6	Perkotaan Kulon Progo (Jl. Chudori-Jl. Kol. Sugiyono)	6,8	11,75	0,20	2,88	100
7	Perkotaan Gunungkidul (Sp. Gading-Gledag)	19,7	29,5	0,49	2,50	100
8	Peningkatan Kapasitas ruas Jl. Bts. Kota – Pelem Gurih (Gamping) (Yogyakarta-YIA)	43,5	97,25	1,62	3,00	100
	Rata-rata				3,00	100

Sumber: Google Maps, diolah 2023

Mengacu pada waktu tempuh standar 2,2 jam per 100 km, maka seluruh ruas jalan utama dan jalan nasional di Provinsi DIY memiliki kecepatan sebesar 3 jam per 100 km (dua kali lebih lambat dari target nasional pada 2029 dan 2034). Diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan waktu tempuh dengan pembangunan jalan baru dan peningkatan kemantapan jalan nasional. Kemantapan ruas jalan utama di Provinsi DIY telah mencapai 100% sehingga peningkatan waktu tempuh diwujudkan melalui pembangunan jalan tol (jalan baru) Yogyakarta – Bawen dan Solo – Yogyakarta – Kulon Progo.

Konstruksi jalan tol Yogyakarta – Bawen dimulai pada 2022 dan tol Yogyakarta – Kulon Progo dimulai pada 2023. Keduanya diharapkan mampu mempersingkat waktu tempuh, terutama di Joglosemar dimana Surakarta-Yogyakarta menjadi 30 menit saja dan akses dari Yogyakarta ke Bawen menjadi 1,5 jam dari awalnya 3 jam.

Dengan adanya peningkatan kemudahan akses melalui jalan tol dan tren penambahan penggunaan kendaraan bermotor diperlukan manajemen lalu lintas dan peningkatan layanan transportasi umum karena tidak dimungkinkan adanya peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan.

3) Infrastruktur Permukiman

Pemenuhan infrastruktur permukiman yang menjadi tugas Kementerian PUPR adalah penyediaan air bersih aman, pengelolaan air limbah, dan peningkatan pelayanan persampahan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Perhitungan infrastruktur didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk. Perkembangan jumlah penduduk di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta

Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)								
Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
D.I. Yogyakarta	3.806.383	3.855.329	3.905.793	3.957.808	4.011.412	4.066.640	4.123.532	4.427.173
Kulon Progo	463.869	474.550	485.498	496.722	508.227	520.023	532.116	597.343
Bantul	1.025.692	1.039.577	1.053.708	1.068.091	1.082.731	1.097.633	1.112.802	1.192.842
Gunungkidul	792.434	810.161	828.304	846.873	865.880	885.334	905.247	1.012.095

Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)								
Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Sleman	1.144.491	1.148.849	1.153.452	1.158.310	1.163.431	1.168.825	1.174.504	1.200.294
Yogyakarta	379.897	382.193	384.830	387.813	391.143	394.825	398.863	424.599

Sumber: Hasil Analisis, 2022

A. Air Bersih

Perhitungan kebutuhan air baku perkotaan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi DIY sebesar 3,8 juta jiwa dan diproyeksikan menjadi 4,1 juta jiwa pada tahun 2029 dan 4,4 juta jiwa pada 2034.

Kebutuhan air baku perkotaan dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Semakin besar jumlah penduduknya maka akan semakin besar pula kebutuhan air untuk setiap orangnya. Standar kebutuhan tersebut terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.4 Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga Menurut Kategori Kota

No	Kategori Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan air bersih (liter/orang/hari)
1	Semi urban (ibu kota kecamatan/desa)	3.000-20.000	60-90
2	Kota kecil	20.000-100.000	90-110
3	Kota sedang	100.000-500.000	100-125
4	Kota besar	500.000-1.000.000	120-150
5	Metropolitan	>1.000.000	150-200

Sumber: SNI 6728.1:2015

Berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU (1996), tingkat konsumsi air rumah tangga bergantung pada kategori kota. Konsumsi air rumah tangga di kota sedang diasumsikan sebesar 100 liter/detik dan kota besar sebesar 120-150 liter/detik. Berdasarkan Permen PUPR 18/2007, kebutuhan air non-domestik adalah 15% dari kebutuhan air domestik, dengan faktor kehilangan air sebesar 20-30%, dan faktor hari maksimum sebesar 1,15-1,25. Total kebutuhan air bersih di Provinsi DIY dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.5 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Perkotaan Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten	Baseline (l/detik)	Proyeksi (liter/detik)				
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
D.I. Yogyakarta	5.028	6.379	6.453	6.529	6.859	7.321
Kulon Progo	607	621	635	649	712	799
Bantul	1.354	1.645	1.667	1.690	1.785	1.913
Gunungkidul	1.037	1.060	1.084	1.108	1.211	1.354
Sleman	1.525	2.293	2.301	2.311	2.353	2.404
Yogyakarta	506	761	766	771	799	851

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penyediaan air bersih perkotaan dihitung berdasarkan sambungan rumah air perpipaan PDAM. Pada tahun 2022 layanan air bersih di Provinsi DIY telah mencapai 31% sehingga diperlukan perhitungan gap pemenuhan target 2029 dan 2034. Perhitungan gap antara kebutuhan dengan ketersediaan air bersih dihitung dengan melihat proyeksi presentase pelayanan air perpipaan. Hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.6 Proyeksi Penyediaan Air Bersih Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/ Kota	Kebutuhan 2022 (liter/ detik)	Layanan Air Perpipaan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022- 2029	2022- 2034
		liter/detik	%	liter/detik	%	liter/detik	%	liter/detik	
Kulon Progo	607	214	35%	366	51,36%	599	75%	-152	-386
Bantul	1.354	225	17%	917	51,36%	1.435	75%	-692	-1.210
Gunungkidul	1.037	392	38%	622	51,36%	1.015	75%	-230	-623
Sleman	1.525	452	30%	1208	51,36%	1.803	75%	-756	-1.351
Yogyakarta	506	180	36%	410	51,36%	638	75%	-230	-458
D.I. Yogyakarta	5.028	1.463	31%	3.523	51,36%	5491	75%	-2.060	-4.028

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Untuk memenuhi target 51,36% pada 2029, dibutuhkan penyediaan air minum perpipaan dengan penambahan suplai sebesar -2.060 liter/detik. Sedangkan gap yang perlu dipenuhi pada tahun 2034 sebesar -4.028 liter/detik. Target tersebut termasuk tinggi mempertimbangkan kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah dalam penyerapan dan distribusi air bersih ke rumah tangga.

Saat ini kapasitas produksi terpasang di PDAM di 5 kabupaten di Provinsi DIY sebesar 2.241,5 liter/detik dengan volume produksi riil 1.418,7 liter/detik. Diperlukan adanya optimalisasi *idle capacity* diantaranya penyerapan air bersih dari SPAM regional, peremajaan jaringan distribusi sekunder, dan peningkatan kemampuan daerah dalam peningkatan jumlah sambungan rumah.

B. Air Limbah

Timbulan air limbah dihitung sebesar 70-80% dari debit air minum. Proyeksi timbulan air limbah pada setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.7 Proyeksi Timbulan Air Limbah Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten	Baseline (l/detik)	Proyeksi (liter/detik)				
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
D.I. Yogyakarta	1.170	1.639	1.823	2.013	2.818	4.393
Kulon Progo	171	186	202	219	292	479
Bantul	180	284	354	426	733	1.148
Gunungkidul	314	337	361	387	498	812
Sleman	362	601	660	720	967	1.443
Yogyakarta	144	231	246	261	328	510

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Akses sanitasi layak adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi oleh kloset dengan leher angsa dan bangunan bawah menggunakan tangki septik apabila berada di perkotaan, dan apabila berada di perdesaan bangunan bawah menggunakan lubang tanah. Sementara itu, akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi pribadi yang dilengkapi dengan bangunan dan memiliki dengan leher angsa serta menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya dalam 5 tahun kemudian diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Target layanan sanitasi aman pada tahun 2024 adalah sebesar 15% sementara untuk tahun 2029 adalah sebesar 30% dan 2034 sebesar 55%. Perhitungan timbulan dan gap pemenuhan sanitasi aman hingga 2034 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.8 Proyeksi Layanan Air Limbah Provinsi D.I. Yogyakarta

Limbah Cair	Timbulan 2022 liter/detik	Layanan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034		2022- 2029	2022- 2034
		liter/detik	%	liter/detik	%	liter/detik	%	liter/detik	
Kulon Progo	171	18,4	10,78	87,7	30	479	55	-69,3	-461,0
Bantul	180	30,7	17,07	220,0	30	1.148	55	-189,3	-1117,2
Gunungkidul	314	7,4	2,36	149,3	30	812	55	-141,9	-804,9
Sleman	362	45,5	12,57	290,0	30	1.443	55	-244,5	-1397,2
Yogyakarta	144	42,6	29,57	98,5	30	510	55	-55,8	-467,7
D.I. Yogyakarta	1170	144,6	14,47	845,5	30	4.393	55	-700,9	-4248,0

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari data sanitasi layak di Provinsi DIY menunjukkan bahwa sebagian besar rumah telah mempunyai toilet dan tangki septic sendiri. Akan tetapi kondisi tangki septic masih belum memenuhi standar, hal ini terlihat dari rendahnya akses aman. Rendahnya akses aman yang berarti bahwa tanki septic tidak pernah disedot menunjukkan bahwa kondisi tangki septic masih rembes/tidak kedap sehingga tanpa perlu disedot pun tangki septic tidak penuh. Perhitungan kebutuhan peningkatan sanitasi aman dengan SPALDS dapat dilihat pada perhitungan berikut.

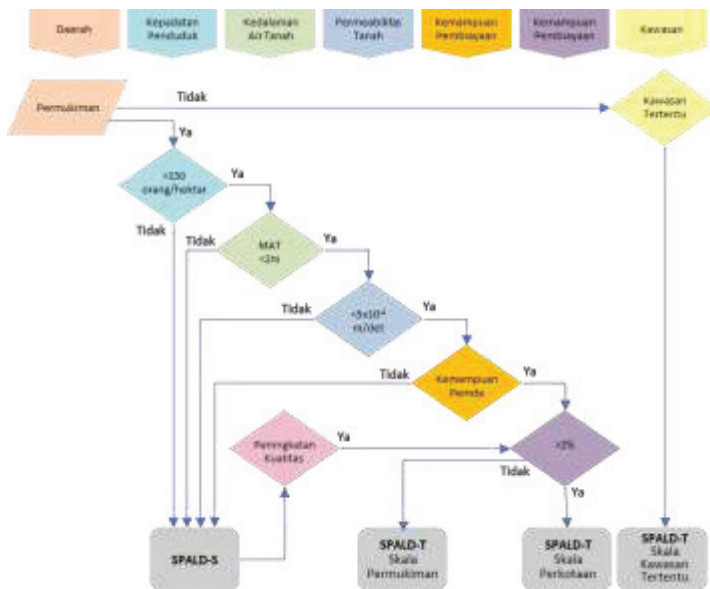
Tabel 7.9 Proyeksi Layanan Sanitasi Aman Provinsi D.I. Yogyakarta

Limbah Cair	Jumlah Keluarga 2022 KK	Layanan						GAP	
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2029		2022- 2029	2022- 2034
		KK	%	KK	%	KK	%	KK	KK
Kulon Progo	117.095	12.623	10,78	35.129	30	64.402	55	-22.506	-51.779
Bantul	281.170	19.988	17,07	84.351	30	154.644	55	-64.363	-134.655
Gunungkidul	202.537	2.763	2,36	60.761	30	111.395	55	-57.998	-108.632
Sleman	368.889	14.719	12,57	110.667	30	202.889	55	-95.948	-188.170
Yogyakarta	148.719	34.625	29,57	44.616	30	81.795	55	-9.991	-47.170
D.I. Yogyakarta	1.118.410	84.718	14,47	335.523	30	615.126	55	-250.805	-530.407

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Untuk menentukan sistem pengolahan air limbah yang tepat, dipertimbangkan beberapa aspek seperti kepadatan penduduk,

kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, dan kemampuan pembiayaan. Alur pemilihan sistem pengolahan air limbah terangkum pada diagram berikut.



Gambar 7.1 Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD

Sumber: Kemen PUPR, diolah 2023

Pada tahun 2022 layanan sanitasi aman di Provinsi DIY baru mencapai 14,47% atau mendekati target nasional (15%). Untuk memenuhi target 30% pada 2029 dibutuhkan peningkatan pengelolaan sanitasi aman pada 250 ribu KK dengan gap pengelolaan di Provinsi DIY diperkirakan mencapai -700 liter/detik pada 2029.

Pemenuhan layanan sanitasi aman di Provinsi DIY pada 2034 ditargetkan sebesar 55% dengan peningkatan pengolahan yang diperlukan mencapai -4.248 liter/detik atau sebesar 530 ribu KK di Provinsi DIY. Peningkatan layanan terbesar terdapat di Kabupaten Sleman (188 ribu KK) dan Kabupaten Sleman (134 ribu KK) mengingat berkembangnya topologi kedua PKW tersebut sebagai kawasan perkotaan.

Permasalahan pengelolaan limbah cair di wilayah perkotaan Bantul, Sleman dan Yogyakarta dilayani IPAL Regional Sewon yang telah disiapkan untuk mengelola limbah hingga tahun 2045. Kapasitas pengolahan harian telah dipersiapkan mencapai 52.000 liter/detik.

Peningkatan pengelolaan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul dapat dilakukan melalui fasilitasi pembangunan SPALDS bagi warga yang telah memiliki sarana sanitasi akan tetapi masih belum memenuhi standar. Dalam SPALD-S tidak hanya dibangun toilet ataupun tangki septic, tetapi perlu juga dipastikan keberadaan dan keberfungsian IPLT dan truk pengangkut lumpur tinja. Oleh karena itu diperlukan

penambahan angkutan lumpur tinja untuk membantu optimalisasi *idle capacity* pengolahan di IPLT Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

C. Persampahan

Perhitungan timbulan sampah perkotaan dihitung berdasarkan SNI 19-3983-1995, dimana koefisien timbulan sampah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7.10 Timbulan Sampah Rumah Tangga Menurut Kategori Kota

No	Kategori Kota	Koefisien timbulan sampah	
		liter/orang/hari	kilogram/orang/hari
1	Kota Besar	2,75 - 3,25	0,7 - 0,8
2	Kota Sedang	2,75 - 3,25	0,7 - 0,8
3	Kota Kecil	2,75 - 3,25	0,625 - 0,7

Sumber: SNI, 1995

Hasil perhitungan timbulan sampah di setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel 7.11 Proyeksi Timbulan Sampah Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Kulon Progo	106,72	106,67	106,57	106,41	105,15	186,37
Bantul	315,60	312,52	309,33	306,00	291,35	493,12
Gunungkidul	171,03	177,28	183,72	190,37	219,12	386,82
Sleman	457,52	440,42	423,28	406,08	336,52	543,01
Yogyakarta	366,61	368,78	371,28	374,12	388,89	413,98
D.I. Yogyakarta	1.417,49	1.405,68	1.394,17	1.382,97	1.341,03	2.023,31

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sampah terangkut di Provinsi DIY pada tahun 2022 telah mencapai 55,57%. Target sampah terkelola pada tahun 2029 adalah sebesar 38% dengan nilai pengurangan sampah sebesar 20%. Target pengolahan sampah pada 2034 sebesar 60% dengan pengurangan sampah sebesar 25%. Perhitungan proyeksi layanan persampahan di setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel 7.12 Proyeksi Layanan Persampahan Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten Kota	Timbulan Sampah 2022 Ton/Hari	Pelayanan Persampahan						Gap	
		Baseline 2022		Proyeksi 2029		Proyeksi 2034		2022 - 2029	2022- 2034
		Ton/Hari	%	Ton/Hari	%	Ton/Hari	%	Ton/Hari	
Provinsi DIY	2.655,17	1.417,49	55,57%	1.341,03	50,40%	2.023,31	68%	76,45	- 605,83
Kulon Progo	235,79	106,72	45,26%	105,15	38,00%	186,37	60%	1,57	- 79,65
Bantul	697,30	315,60	45,26%	291,35	38,00%	493,12	60%	24,25	- 177,52
Gunungkidul	493,75	171,03	34,64%	219,12	38,00%	386,82	60%	-48,09	- 215,79
Sleman	859,84	457,52	53,21%	336,52	38,00%	543,01	60%	121,00	- 85,49
Yogyakarta	368,49	366,61	99,49%	388,89	100,00%	413,98	100%	-22,28	- 47,37

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tingkat layanan persampahan di Provinsi DIY telah mencapai 55,57% pada tahun 2022. Dengan demikian, target sampah terkelola di Provinsi DIY pada tahun 2022 telah melampaui target nasional. Jika didasarkan pada target tersebut masih akan ada sampah yang tidak terangkut jika didasarkan pada capaian 38% pada 2029.

Saat ini, kondisi TPA Regional Piyungan yang melayani Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta telah *overload*. Timbulan harian pada 2022 mencapai 1.139 ton/hari, sedangkan kapasitas rencananya sebesar 493 ton/hari. Diperlukan peningkatan kapasitas pengolahan sampah pada TPA Regional Piyungan menggunakan teknologi ramah lingkungan karena keterbatasan penyediaan lahan jika dilakukan perluasan TPA. Untuk mendukung pengurangan timbulan sampah ke TPA Regional Piyungan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengarahkan pembangunan TPST Bantul dengan kapasitas tampung harian 49 ton/hari. Timbulan sisanya kemudian akan dikelola di TPS3R yang tersebar di Kabupaten Bantul. Sehingga diperkirakan tidak akan ada lagi residu sampah yang masuk ke TPA Regional Piyungan.

Pada tahun 2029 diperlukan peningkatan pengolahan persampahan di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta sebesar -48,09 ton/hari dan -22,28 ton/hari. Peningkatan ini dapat berupa penambahan transportasi persampahan dan penataan TPA. Di skala rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga.

Pada tahun 2034 pelayanan persampahan ditargetkan sebesar 60% dan layanan pada perkotaan Yogyakarta mencapai 100%. Berdasarkan jumlah perhitungan timbulan sampah domestik dan non-domestik gap timbulan sampah yang perlu dikelola di Provinsi DIY sebesar -605,8 ton/hari. Timbulan sampah terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul.

4) Infrastruktur Perumahan

Kebutuhan infrastruktur perumahan dibutuhkan diantaranya adalah ketersediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Target yang ditentukan hingga tahun 2029 sebesar 73% dan tahun 2034 sebesar 86%. Kepemilikan rumah pribadi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.13 Tingkat Kepemilikan Rumah di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Kabupaten/ Kota	Kepemilikan Rumah						Gap 2022- 2029 (KK)	Gap 2022- 2034 (KK)
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
		KK	%	KK	%	KK	%		
1	Kulon Progo	117.095	90,23	85.479	73%	100.702	86%	-20.175	-15.222
2	Bantul	281.170	77,90	205.254	73%	241.806	86%	-13.777	-36.552
3	Gunungkidul	202.537	94,58	147.852	73%	174.182	86%	-43.707	-26.330
4	Sleman	368.889	67,98	269.289	73%	317.245	86%	18.518	-47.956

No	Kabupaten/ Kota	Kepemilikan Rumah						Gap 2022- 2029 (KK)	Gap 2022- 2034 (KK)
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
		KK	%	KK	%	KK	%		
5	Kota Yogyakarta	148.719	44,79	108.565	73%	127.898	86%	41.954	-19.333
	Provinsi DIY	1.118.410	74,55	816.439	73%	961.833	86%	-17.335	-145.393

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kepemilikan rumah di Provinsi D.I. Yogyakarta perlu ditingkatkan karena baru mencapai 74,5% pada 2022 untuk mencapai target 86% pada 2034. Peningkatan kepemilikan rumah yang perlu ditingkatkan pada tahun 2029 berada di Kabupaten Kulon Progo (20.175 unit), Kabupaten Bantul (13.777 unit) dan Kabupaten Gunungkidul (43.707 unit). Sedangkan untuk memenuhi target kepemilikan rumah 86% pada 2034 perlu dilakukan upaya kepemilikan rumah sebesar 145.393 unit di seluruh Provinsi DIY dengan peningkatan tertinggi berada di Kabupaten Sleman sebesar 47.956 unit.

Sementara untuk, perumahan layak di Provinsi D.I. Yogyakarta sudah tergolong tinggi dengan persentase mencapai 93%, lebih dari target 2029 dan 2034. Kabupaten Kulon Progo menjadi satu-satunya kabupaten yang membutuhkan penanganan rumah layak huni dengan kebutuhan 12.528 unit pada 2029 dan 27.751 unit pada 2034. Ketersediaan rumah hunian layak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.14 Proyeksi Penyediaan Perumahan di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Kota/ Kab.	Jumlah KK	Rumah Layak Huni						Gap 2022- 2029 (KK)	Gap 2022- 2034 (KK)
			Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
			KK	%	KK	%	KK	%		
1	Kulon Progo	117.095	72.951	62%	85.479	73%	100.702	86%	-12.528	-27.751
2	Bantul	281.170	274.079	97%	205.254	73%	241.806	86%	68.825	32.273
3	Gunungkidul	202.537	182.622	90%	147.852	73%	174.182	86%	34.770	8.440
4	Sleman	368.889	364.546	99%	269.289	73%	317.245	86%	95.257	47.301
5	Kota Yogyakarta	148.719	146.229	98%	108.565	73%	127.898	86%	37.664	18.331
	Provinsi DIY	1.118.410	1.040.427	93%	816.439	73%	961.833	86%	223.988	78.594

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penanganan kebutuhan infrastruktur perumahan di Provinsi D.I. Yogyakarta akan difokuskan pada penanganan backlog dan RTLH. Untuk mengatasi isu kepemilikan rumah diperlukan program penyediaan rumah murah atau subsidi pembiayaan yang tersebar merata di Provinsi DIY. Sedangkan penanganan peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni dapat difokuskan di Kabupaten Kulon Progo selama 10 tahun ke depan.

7.1.2 Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, fokus pariwisata menjadi prioritas penanganan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Terdapat 4 kawasan prioritas penanganan hingga tahun

2034 yaitu KSPN Yogyakarta Kota dsk., KSPN Prambanan-Kalasan dsk., KSPN Pansela DIY dsk., dan KSPN Karst Gunungkidul dsk.

7.1.2.1. Daya Tarik Wisata

Terdapat kurang lebih 220 daya Tarik wisata (DTW) yang tersebar di 4 kawasan prioritas. Masing-masing kawasan prioritas memiliki keunikan dari jenis wisata yang ditawarkan, seperti wisata alam, budaya, belanja, kuliner, dan desa wisata.

Pada KSPN Yogyakarta Kota terdapat 86 DTW populer yang mampu mendatangkan wisatawan 5 juta orang pada tahun 2019. Jenis wisata yang ditawarkan mencakup wisata budaya, kuliner dan belanja. Daya tarik wisata tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang merupakan deliniasi KSPN Yogyakarta Kota, yaitu kecamatan Jetis, Gondokusuman, Gedongtengen, Danurejan, Gondomanan, Pakualaman, Kraton, Ngampilan, Wirobrajan, Mergangsan, dan Mantrijeron. Sedangkan untuk KSPN Prambanan-Kalasan lebih berfokus pada wisata budaya. KSPN ini berada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten. Selain daya tarik wisata budaya berupa situs Candi Prambanan, terdapat 31 wisata lainnya yang juga menyumbang pertumbuhan wisatawan mencapai 3,9 juta (tahun 2019).

DIY memiliki potensi gunung karst yang berada di KSPN karst Gunungkidul yang memiliki kurang lebih 90 daya tarik wisata, salah satunya yang cukup populer adalah Pantai Baron. Terdapat dua *key tourism area* (KTA) dan 1 pusat pelayanan pada kawasan Gunungkidul, yaitu KTA Pansela Gunungkidul dengan deliniasi kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Girisubo dan KTA Patuk-Semanu dengan deliniasi kecamatan Patuk dan Semanu. Sedangkan untuk Pusat pelayanan KSPN Karst Gunungkidul berada di Kecamatan Wonosari. Kawasan prioritas lainnya adalah KSPN Pansela DIY yang sebagian besar daya tarik wisata berjenis alam. Sebanyak 13 DTW populer ini tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bantul, Srandakan, Sanden, dan Kretek.

Potensi ragam daya tarik wisata pada Provinsi DIY memiliki tantangan dalam perkembangannya. Perkembangan kawasan wisata yang mendatangkan wisatawan berpengaruh pada perubahan lahan disekitarnya. Perubahan penggunaan lahan terjadi disebabkan oleh jumlah amenitas yang terus meningkat sehingga terjadinya *demand* pada fasilitas/amenitas di kawasan wisata. Tingginya tingkat pembangunan usaha akomodasi pariwisata dengan jumlah lahan yang sangat terbatas menjadi salah satu tantangan yang dihadapi. Pada salah satu kasus di KSPN Prambanan-Kalasan sebagai kawasan *world heritage* UNESCO harus menjaga bentang hijau di sekitar situs Candi Prambanan. Sehingga perubahan fungsi lahan hijau tidak diperbolehkan sebagai salah satu cara untuk pelestarian cagar budaya.

Selain perubahan lahan, modernisasi juga menjadi tantangan bagi budaya dan peninggalan sejarah. Tanpa disadari budaya-budaya yang ada di Yogyakarta telah digeser oleh modernisasi. Budaya lokal telah banyak dilupakan padahal sejatinya budaya berpengaruh penting mengatur hubungan sosial antar individu, menata sistem pemerintahan, hingga dalam pendidikan di Provinsi DIY. Konservasi dan pelestarian juga membutuhkan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Dalam perkembangan wisatawan yang semakin bertambah dan tidak terbatas golongan, penjagaan kelestarian pada bangunan-bangunan peninggalan sejarah harus juga ditingkatkan.

Posisi DIY yang berada di wilayah dengan risiko kerawanan bencana tinggi menjadi tantangan lain bagi kawasan wisata. DIY berada pada daerah rawan letusan Gunung Merapi yang menjadi gunung teraktif di dunia dengan kawasan rawan kategori tinggi berada di Kab Sleman. Sedangkan Pantai Selatan Yogyakarta merupakan kawasan rawan gempa bumi dan tsunami kategori tinggi karena keberadaan Sesar Opak. Selain itu karakteristik di sepanjang Pantai Selatan menjadi salah satu pertimbangan dalam aspek keamanan dan mitigasi bencana.

Penataan kawasan wisata diarahkan untuk menjadi kawasan wisata yang tanggap bencana. Mitigasi bencana baik mitigasi struktural dan non struktural harus ditempatkan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sektor pariwisata. Mitigasi dan pengurangan risiko bencana hendaknya ditempatkan sebagai investasi dalam pembangunan pariwisata itu sendiri.

7.1.2.2. Proyeksi Penduduk dan Wisatawan

Untuk melakukan perhitungan terhadap kebutuhan infrastruktur pariwisata, diperlukan proyeksi terhadap jumlah penduduk alami dan wisatawan. Perkiraan jumlah penduduk alami di kawasan prioritas Provinsi DIY pada tahun 2029 sebesar 954.738 jiwa dan 2034 sebesar 1,2 juta jiwa.

Selain pertambahan penduduk, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan prioritas Provinsi DIY juga diperkirakan akan bertambah. Pada tahun 2029 total jumlah wisatawan diperkirakan sebanyak 9,93 juta jiwa dan pada 2034 sebesar 13,13 juta jiwa. Perhitungan proyeksi penduduk dan wisatawan pada kawasan prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.15 Proyeksi Penduduk dan Wisatawan Pada Kawasan Prioritas

KSPN	Penduduk				Wisatawan			
	2023	2025	2029	2034	2023	2025	2029	2034
KSPN Yogyakarta Kota	239.591	239.971	240.787	241.910	1.459.306	1.482.762	1.554.838	1.675.599
KSPN Prambanan	108.226	109.498	112.109	307.323	1.487.833	1.593.804	3.022.452	3.756.544
KSPN Pansela DIY	161.685	165.399	173.125	183.368	1.679.855	1.799.502	2.553.309	3.954.052

KSPN	Penduduk				Wisatawan			
	2023	2025	2029	2034	2023	2025	2029	2034
KSPN Karst Gunungkidul	376.762	393.304	428.717	477.747	2.023.045	2.167.136	2.808.253	3.751.343
Total	886.264	908.172	954.738	1.210.348	6.650.039	7.043.204	9.938.852	13.137.538

Sumber: Hasil Analisis, 2023

7.1.2.3. Infrastruktur Ketahanan Bencana

Infrastruktur pengendali banjir lahar menjadi elemen penting dalam mitigasi bencana alam, terutama di Provinsi DIY yang secara geografis berada di wilayah erupsi Gunung Merapi. Salah satu infrastruktur pengendalian banjir utama adalah sabodam yang membendung aliran sungai guna menahan dan mengalihkan aliran lahar dan debris erupsi untuk mencegah kerusakan permukiman dan infrastruktur lain di sekitarnya.

Kawasan wisata prioritas di Provinsi DIY secara umum berada di zona rawan bencana erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan abrasi. Untuk mengatasi banjir lahar, diperlukan 95 sabodam baru untuk menahan, mengurangi kecepatan aliran lahar, dan meminimalisir risiko banjir lahar dari Gunung Merapi.

Saat ini terdapat 272 unit sabodam dimana 54 sabodam berada dalam kondisi rusak dan perlu direhabilitasi. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banjir lahar dapat mencapai Kota Yogyakarta dan Kawasan Candi Prambanan yang membahayakan situs candi dan areal pertanian di sekitarnya. Berdasarkan kemampuan pembiayaan dan kesiapan *readiness criteria* diperkirakan terdapat dua unit sabodam yang dapat dibangun per tahunnya.

7.1.2.4. Relevant Road For Tourism

Jaringan jalan menjadi satu kesatuan pengembangan sistem transportasi yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi, termasuk pariwisata sebagai pembangkit kegiatan ekonomi sosial. Kegiatan pariwisata menimbulkan bangkitan lalu lintas, terutama dari hub utama transportasi menuju DTW yang tersebar di empat KSPN prioritas di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan kondisi saat ini aksesibilitas pariwisata bertumpu pada jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Akses masuk utama berada di jalan nasional sebagai penghubung Provinsi D.I. Yogyakarta dengan kabupaten/kota di sekitarnya telah memiliki VCR > 0,8 yang menandakan adanya lalu lintas yang tinggi sehingga rawan terjadi kemacetan. Dampaknya dapat menimbulkan bertambahnya biaya dan waktu tempuh yang dibutuhkan wisatawan.

KSPN prioritas di Provinsi DIY cukup mudah dijangkau dari hub transportasi bandara dan stasiun, dengan jarak terjauh sekitar 55 km dan waktu tempuh 1,5 jam. Dari bandara atau stasiun, wisatawan melewati

jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Selain itu, konektivitas wisatawan di sisi selatan DIY dihubungkan dengan adanya jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang menghubungkan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (YIA) dengan KSPN Pansela DIY.

Meski demikian, akses dari Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (YIA) menuju KSPN Karst Gunungkidul via JJLS belum terhubung karena pembangunan Jembatan Srandakan 3 saat ini belum terlaksana (memutar lewat Jalan Imogiri).

Secara rinci, perkiraan jarak dan waktu tempuh KSPN dari hub transportasi dan antar-KSPN dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 7.16 Relevant Road For Tourism

Rute	Waktu	Jarak (km)	Kecepatan (km/jam)
KSPN Yogyakarta Kota dsk			
Kraton - YIA	1 jam 11 menit	42,2	35,76
Kraton - Borobudur	1 jam 15 menit	42,3	33,84
Kraton - Lava Tour Merapi	1 jam 7 menit	27,9	24,91
Kraton - Candi Prambanan	42 menit	18,8	26,85
Kraton - Baron (Gunungkidul)	1 jam 32 menit	55,7	36,33
KSPN Prambanan-Kalasan dsk			
Candi Prambanan - Lava Tour Merapi	1 jam	25,2	25,2
Candi Prambanan - YIA	2 jam 30 menit	67,2	26,9
Candi Prambanan - Kota Yogyakarta	39 menit	16,4	25,3
Candi Prambanan - Parangtritis (via ringroad)	2 jam	45	22,5
Candi Prambanan - Candi Borobudur	1 jam 50 menit	51,5	28,1
Candi Prambanan - Solo	1 jam 35 menit	50,9	32,1
KSPN Pansela DIY			
Parangtritis - YIA	1 jam 11 menit	41,2	34,82
Parangtritis - Borobudur	2 jam 1 menit	72,1	35,75
Parangtritis - Kota Yogyakarta	57 menit	27,1	28,53
Parangtritis - Prambanan	1 jam 24 menit	44,1	31,5
Parangtritis - Karst Gunungkidul	1 jam 13 menit	51,1	42
KSPN Karst Gunungkidul dsk			
Baron - Magelang/Borobudur	2 jam 40 menit	101	37,88
Baron - Kota Yogyakarta	1 jam 32 menit	55,7	36,33
Baron - Wonosari (Gunungkidul)	37 menit	22,5	36,49
Baron - YIA	2 jam 1 menit	81,5	40,41
Baron - Prambanan	1 jam 27 menit	67,6	46,62
Baron - Pacitan	1 jam 56 menit	65,1	33,67
Baron - Sukoharjo	2 jam	74,4	37,20

Sumber: Google Maps, diolah BPIW 2022

Jalan nasional antar-KSPN prioritas Provinsi DIY memiliki kemantapan jalan lebih dari 98% pada tahun 2022. Meski demikian, beberapa ruas jalan utama telah memiliki nilai VCR >0,8 (mendekati jenuh) dan hingga tahun 2034 akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah bangkitan lalu lintas domestik dan wisatawan. Ruas jalan yang memiliki **nilai VCR lebih dari ≥ 1** menunjukkan bahwa kinerja ruas jalan berada dalam kriteria buruk karena volume kendaraan telah melebihi kapasitas ruas jalan.

Pada tahun 2023 terdapat 5 ruas jalan yang memiliki nilai VCR >1 dan pada tahun 2034 terdapat 12 ruas jalan dengan nilai VCR >1. Ruas jalan tersebut **berada di batas-batas kota** yang menjadi **pintu masuk utama** menuju **pusat pelayanan**, sehingga memerlukan pelebaran jalan jika dimungkinkan, manajemen lalu lintas, serta peningkatan layanan transportasi umum untuk mengurangi intensitas kendaraan pribadi. Berdasarkan data eksisting tersebut, dilakukan perhitungan proyeksi mengacu pada MKJI (1997) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7.17 Proyeksi VCR KSPN Prioritas Provinsi D.I. Yogyakarta

No Ruas (260)	Nama Ruas	Panjang (km)	Lebar (m)	VCR			
				2023	2025	2029	2034
001	Karang Nongko (Bts. Prov. Jateng) - Toyan	9,91	7,02	0,14	0,15	0,17	0,21
002	Toyan - Bts. Kota Wates	4,95	8,06	0,81	0,87	1,02	1,24
003	Bts. Kota Wates - Milir	3,3	7,06	0,20	0,21	0,25	0,30
004	Milir - Sentolo	7,9	7,01	0,27	0,30	0,35	0,42
005	Sentolo - Bts. Kabupaten Sleman	1,00	6,73	1,16	1,26	1,47	1,79
006	Bts. Kabupaten Kulon Progo - Pelem Gurih (Gamping)	11,21	14,13	0,56	0,61	0,71	0,87
008	Yogyakarta - Piyungan	8,8	6,94	0,30	0,33	0,38	0,47
009	Sp. Piyungan - Sp. Patuk	4,00	7,62	0,23	0,25	0,29	0,36
010	Sp. Patuk - Sp. Gading	13,72	6,96	0,54	0,58	0,68	0,83
011	Sp. Gading - Sp. Gledag	4,9	7,69	0,55	0,59	0,69	0,84
012	Gledag - Wonosari (Lingkar Utara Wonosari)	8,69	7,04	0,93	1,01	1,18	1,43
013	Lingkar Selatan Wonosari	5,77	7,09	0,16	0,17	0,20	0,24
014	Bts. Kota Wonosari - Ngeposari - Pacucak - Bedoyo - Duwet	26,56	6,89	0,15	0,17	0,20	0,24
016	Bts. Kota Sleman - Sp. Jombor	5,62	14,03	1,18	1,28	1,50	1,82
019	Janti - Prambanan (Bts. Prov. Jateng)	10,1	14,28	0,49	0,53	0,62	0,75
020	Yogyakarta - Bts. Kota Bantul	6,3	7,57	1,38	1,49	1,75	2,12
021	Bantul - Sp. Weden	4,44	6,89	0,46	0,50	0,58	0,71
022	Sp. Weden - Bakulan	1,49	6,08	0,32	0,35	0,41	0,50
023	Bakulan - Kretek	9,09	7,11	0,87	0,94	1,10	1,34
024	Kretek - Parangtritis	6,30	6,41	0,33	0,36	0,42	0,51
026	Pakem - Prambanan	20,35	6,4	0,31	0,34	0,40	0,48
00211K	Jln. Chudori (Wates)	0,6	7,92	0,83	0,90	1,05	1,28
00311K	Jln. Kol. Sugiyono (Wates)	0,66	6,70	0,80	0,87	1,02	1,24
00611K	Jln. Batas Kota - Pelem Gurih (Gamping) (Yogyakarta)	2,09	13,75	0,93	1,01	1,18	1,43
00711K	Jl. Majapahit (Bantul)	3,18	21,07	0,42	0,46	0,53	0,65

No Ruas (260)	Nama Ruas	Panjang (km)	Lebar (m)	VCR			
				2023	2025	2029	2034
01613K	Bts. Kota - Sp. Jombor (Yogyakarta)	2,21	14	0,93	1,01	1,18	1,82
01711K	Jln. Siliwangi (Sleman)	8,58	18,27	0,07	0,07	0,09	0,11
01811K	Jl. Padjajaran (Sleman)	10,0	18,05	0,17	0,18	0,21	0,26
01911K	Bts. Kota Yogyakarta - Janti (Yogyakarta)	2,12	14	1,58	1,70	1,99	2,43
02011K	Jln. Pemuda (Bantul)	1,80	7,00	1,72	1,86	2,18	2,65
02012K	Jln. Kol. Sugiyono (Bantul)	1,40	6,00	0,32	0,35	0,41	0,50
02013K	Jln. Brigjen Katamso (Bantul)	1,80	6,21	0,39	0,42	0,50	0,60
02014K	Jln. P. Senopati (Bantul)	1,20	7,37	0,67	0,72	0,84	1,02
027	Congot-Ngremang	19,35	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
029	Pandansimo-Samas	5,80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
031	Girijati-Legundi	13,40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
032	Legundi-Saptosari	10,40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
033	Saptosari-Planjan	9,20	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
036	Jerukwudel-Baran-Duwet	11,60	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Keterangan: n/a tidak tersedia data di ruas jalan tersebut, karena merupakan ruas jalan nasional baru sesuai Kepmen PUPR No. 430 Tahun 2022.

Terdapat rencana pembangunan tol Solo-Yogya-Kulon Progo dan tol Yogyakarta-Bawen yang diperkirakan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 40% pada ruas-ruas jalan utama, yang mempengaruhi nilai VCR tidak terlalu tinggi.

Sesuai dengan hasil analisis di atas, terdapat beberapa ruas yang perlu mendapat penanganan berupa manajemen lalu lintas, pelebaran jalan, dan penataan simpang. Manajemen lalu lintas diperuntukkan bagi ruas jalan yang sudah jenuh, namun memiliki keterbatasan untuk ditingkatkan kapasitasnya secara teknis. Rekomendasi pelebaran jalan dilakukan contohnya pada ruas Yogyakarta-Bts. Bantul yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pelebaran, dimana saat ini lebar eksisting 7,57 meter.

7.1.2.5. Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Penyediaan air minum di kawasan pariwisata memanfaatkan sumber air baku dari mata air, air tanah, sungai, dan tangki air terutama di kawasan pesisir. Sungai Progo dan Sungai Opak merupakan sumber air baku utama yang dikelola PDAM. Pelayanan air perpipaan di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 31,3% dengan layanan perpipaan tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 36%. Air baku bagi kawasan pariwisata yang terletak di perkotaan umumnya berasal dari PDAM, sedangkan air minum di kawasan pesisir berasal dari air tanah dan tangki air.

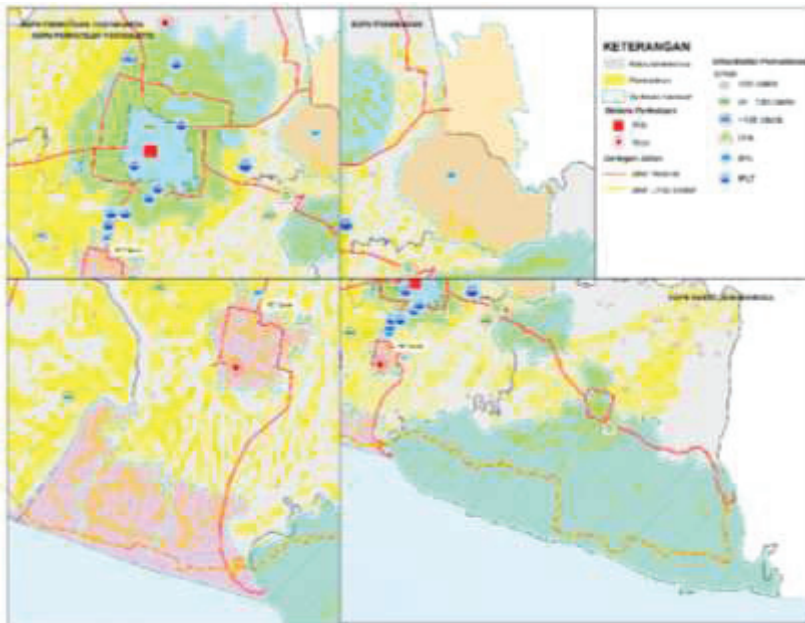
Untuk saat ini, kawasan wisata yang masih mengalami defisit air minum adalah KSPN Prambanan-Kalasan, KSPN Pantai Selatan DIY, dan KSPN Karst Gunungkidul. Sedangkan KSPN Yogyakarta Kota mengalami surplus air baku hingga 2034 karena masih tingginya *idle capacity* SPAM Regional Kartamantul. Hingga tahun 2034 diharapkan *idle capacity* tersebut dapat terserap 100% di Kota Yogyakarta (750 liter/detik).

Layanan persampahan di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 60,83%. Kawasan pariwisata prioritas dilayani oleh dua TPA yaitu TPA Regional Piyungan dan TPA Wukirsari. TPA Regional Piyungan sudah berstatus *overcapacity* dan akan ditutup total sesuai arahan Gubernur DIY. Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman diarahkan untuk dilaksanakan secara mandiri melalui TPST kabupaten/kota dan TPS3R.

Pengolahan sampah Kabupaten Gunungkidul dilakukan di TPA Wukirsari, dimana saat ini belum memerlukan peningkatan kapasitas. Namun, pengelolaan sampah di Gunungkidul belum maksimal karena kekurangan truk sampah dan alat berat di TPA. Selain itu, peningkatan layanan persampahan di wilayah pesisir DIY (Bantul dan Gunungkidul) perlu ditingkatkan mengingat lokasi yang jauh dari TPA eksisting. Diperlukan adanya TPS3R atau TPST di kawasan pariwisata Bantul dan Gunungkidul untuk mengelola sampah yang timbul karena kegiatan pariwisata pantai.

Pelayanan sanitasi aman di Provinsi D.I. Yogyakarta baru mencapai 14,47% dengan pelayanan tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 29,5%. Terdapat tiga IPLT dan 1 IPAL yaitu IPLT Wukirsari yang melayani Kabupaten Gunungkidul, IPLT Madurejo yang melayani KSPN Prambanan, serta IPLT Sewon dan IPAL Regional Sewon yang melayani Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Pelayanan sanitasi yang perlu ditingkatkan berada di KSPN Yogyakarta Kota dsk, KSPN Prambanan-Kalasan dsk, dan KSPN Pansela DIY dsk. Mengingat lokasi KSPN Karst Gunungkidul dan KSPN Pansela DIY terletak jauh dari IPLT Wukirsari, maka diperlukan instalasi pengolahan limbah setempat untuk menangani timbunan tinja karena aktivitas pariwisata.



Gambar 7.2 Sebaran Infrastruktur Permukiman di KSPN Prioritas DIY
Sumber: Hasil Analisis, 2022

A. Perhitungan Kebutuhan Air Minum

Perhitungan kebutuhan air minum mempertimbangkan capaian akses air minum perpipaan eksisting sesuai standar RPJMN dan proyeksi jumlah penduduk dan wisatawan di KSPN Prioritas. Gap kebutuhan dihitung berdasarkan proyeksi total kebutuhan air minum dengan kapasitas produksi SPAM eksisting dan rencana hingga tahun 2034.

Air bersih di KSPN prioritas disuplai dari IPA PDAM dan SPAM Regional Kartamantul, dimana SPAM Kartamantul menyuplai air bersih bagi KSPN Yogyakarta Kota dsk dan KSPN Prambanan dsk dengan kapasitas terpasang 700 liter/detik. KSPN Karst Gunungkidul disuplai dari tangki air dan IPA PDAM Tirta Handayani yang berkapasitas 185,7 liter/detik. Selanjutnya KSPN Pansela DIY dsk disuplai dari PDAM Tirta Projo Tamansari dengan kapasitas 30 liter/detik.

Dari kapasitas terpasang SPAM Regional Kartamantul sebesar 700 liter/detik, masih terdapat *idle capacity* sebesar 688 liter/detik atau baru terserap 28%. Untuk itulah, dilakukan optimalisasi pelayanan air minum memanfaatkan *idle capacity* mulai 2023 hingga 2034, khususnya di Kota Yogyakarta yang mempunyai *idle capacity* terbesar. Untuk meningkatkan pelayanan air bersih di selatan Gunungkidul, terdapat direktif Menteri PUPR tahun 2023 berupa peningkatan kapasitas IPA Seropan menjadi 100 liter/detik. Kebutuhan air minum KSPN Provinsi DIY adalah sebagai berikut.

1) Air Minum KSPN Yogyakarta Kota dsk

Layanan akses air perpipaan (2020) Kota Yogyakarta sebesar 36%, artinya layanan akses perpipaan sudah melampaui target RPJMN 2020-2024 (30%). Kapasitas terpasang PDAM Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 880 liter/detik dengan *idle capacity* sebesar 330 liter/detik. Hal ini disebabkan kapasitas SPAM Kartamantul I belum terserap optimal.

Meskipun SPAM Kartamantul I belum optimal, pada tahun 2020-2022 sudah dibangun SPAM Kartamantul II dengan kapasitas 200 liter/detik untuk Kota Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa terdapat 530 liter/detik air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk dan wisatawan.

Berdasarkan perhitungan, hingga tahun 2034, suplai air minum Kota Yogyakarta masih dapat dipenuhi dari kapasitas terpasang PDAM dan SPAM Kartamantul. Secara detail perhitungan proyeksi kebutuhan air minum KSPN Yogyakarta Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.18 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KSPN Yogyakarta

Pelayanan Air Kota Yogyakarta		Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/detik)						
Deskripsi	Satuan	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Capaian Akses Air Perpipaan	%	35,7	38,7	39,7	40,7	41,7	42,7	47,7
Baseline Kebutuhan Air	L/org/hari	150	150	150	150	150	150	150
Kebutuhan Air Domestik	L/detik	200,72	167,50	172,58	117,73	182,93	188,19	215,48
Kebutuhan Air Nondomestik	L/detik	30,11	25,12	25,89	26,66	27,44	28,23	32,32
Kebutuhan Air Wisatawan	L/detik	4,91	5,05	5,14	5,24	5,35	5,46	6,27
Total Kebutuhan Air	L/detik	235,75	262,39	271,66	281,18	290,88	300,80	353,98
Persentase Kehilangan Air	%	27	27	27	27	27	27	27
Faktor Jam Puncak	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Kebutuhan Suplai Air (+Kehilangan Air)	L/detik	299,40	333,24	345,04	357,10	369,42	382,02	449,55
Produksi Air	L/detik	349,63	476,77	476,77	476,77	476,77	476,77	686,55
Surplus Air KSPN Yogyakarta Kota	L/detik	50,23	143,54	131,73	119,68	107,35	94,75	237,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) Air Minum KSPN Prambanan-Kalasan dsk

Layanan akses air perpipaan (2020) Kabupaten Sleman sebesar 29,74% dan Kabupaten Klaten sebesar 18,34% (target: 30%). Kapasitas terpasang PDAM Sleman saat ini sebesar 597 liter/detik dengan *idle capacity* sebesar 237 liter/detik. Meski terdapat *idle capacity* tersebut, namun layanan untuk Kecamatan Berbah mendukung suplai air KSPN Prambanan-Kalasan masih defisit. Untuk itu, pada tahun 2023-2024 dibangun SPAM Berbah berkapasitas 30 liter/detik untuk melayani KSPN Prambanan-Kalasan.

Berdasarkan analisis, proyeksi wisatawan di kawasan ini sangat tinggi mencapai 3,7 juta pengunjung pada 2034. Kapasitas SPAM Berbah 30

liter/detik hanya dapat mencukupi suplai hingga tahun 2024. Selain itu juga terdapat rencana pembangunan SPAM Banyusoco dengan suplai air sebesar 20 liter/detik untuk KSPN Prambanan pada tahun 2028.

Meskipun dengan pembangunan SPAM Berbah dan SPAM Banyusoco, suplai air minum KSPN Prambanan-Kalasan akan defisit mulai tahun 2025, dan terus meningkat hingga defisit sebesar 66,22 liter/detik pada 2029 dan 88,47 liter/detik pada 2034. Secara detail perhitungan proyeksi kebutuhan air minum KSPN Prambanan-Kalasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.19 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KSPN Prambanan-Kalasan

	Proyeksi Kebutuhan							
Deskripsi	Satuan	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Pelayanan Air Prambanan Sleman								
Jumlah Penduduk	Jiwa	53.951	54.227	54.319	54.412	54.504	54.597	55.063
Capaian Akses Air Perpipaan	%	29,63%	38,94%	42,05%	45,15%	48,26%	51,36%	75,00%
Baseline Kebutuhan Air	L/org/hari	150	150	150	150	150	150	150
Kebutuhan Air Domestik	L/detik	27,81	36,95	40,04	43,15	46,28	49,44	54,18
Kebutuhan Air Nondomestik	L/detik	4,17	5,54	6,01	6,47	6,94	7,42	8,13
Jumlah Wisatawan Domestik	Jiwa/tahun	1.535.036	1.701.921	1.761.489	1.823.141	1.886.951	1.952.994	2.021.349
Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jiwa/tahun	22.460	24.902	30.616	37.640	46.276	56.894	69.947
Kebutuhan Air Wisatawan	L/detik	10,58	11,73	12,19	12,67	13,19	13,73	14,32
Total Kebutuhan Air	L/detik	42,56	54,22	58,23	62,29	66,41	70,58	76,63
Persentase Kehilangan Air	%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	127%
Faktor Jam Puncak	-	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Kebutuhan Suplai Air (+Kehilangan Air)	L/detik	54,05	68,86	73,95	79,11	84,34	89,64	97,32
Produksi Air	L/detik	16,73	66,73	66,73	66,73	86,73	86,73	86,73
Gap air Kec Prambanan, Kab Sleman	L/detik	-37,32	-2,13	-7,22	-12,38	2,39	-2,91	-10,59
Pelayanan Air Prambanan Klaten								
Deskripsi	Satuan	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Jumlah Penduduk	Jiwa	53.648	55.271	55.823	56.380	56.943	57.512	60.441
Capaian Akses Air Perpipaan	%	18,09%	32,35%	37,10%	41,85%	46,61%	51,36%	75,00%
Baseline Kebutuhan Air	L/org/hari	150	150	150	150	150	150	150
Kebutuhan Air Domestik	L/detik	16,84	31,37	36,47	41,71	47,09	52,61	58,25
Kebutuhan Air Nondomestik	L/detik	2,53	4,71	5,47	6,26	7,06	7,89	8,74
Jumlah Wisatawan Domestik	Jiwa/tahun	225.864	828.879	857.890	887.916	918.993	951.158	1.129.677
Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jiwa/tahun	20.733	22.987	28.261	34.745	42.717	52.518	147.516
Total Kebutuhan Air Wisatawan	L/detik	1,6	5,1	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5
Total Kebutuhan Air	L/detik	20,96	41,18	47,29	53,58	60,06	66,73	73,58
Persentase Kehilangan Air	%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	127%

Deskripsi	Satuan	Proyeksi Kebutuhan						
		2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Faktor Jam Puncak	-	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Kebutuhan Suplai Air (+Kehilangan Air)	L/detik	26,62	52,29	60,06	68,05	76,28	84,75	93,44
Produksi Air	L/detik	17,32	21,45	21,45	21,45	21,45	21,45	15,56
Defisit air Kec Prambanan, Kab Klaten	L/detik	-9,30	-30,85	-38,61	-46,60	-54,83	-63,30	-77,88
Defisit air KSPN Prambanan	L/detik	-46,63	-32,98	-45,83	-58,98	-52,44	-66,22	-88,47

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Air Minum KSPN Pantai Selatan DIY dsk

Layanan air perpipaan aman Kabupaten Bantul sebesar 16,82% dan air minum layak 97,65%. Suplai air bersih KSPN Pansela DIY dsk berasal dari Sungai Progo dan Sungai Opak, embung dan air tanah. Air bersih perpipaan berasal dari sistem IKK Pundong (20 liter/detik) dan IKK Srandakan (10 liter/detik). Layanan air perpipaan di Kabupaten Bantul pada 2022 masih di bawah target nasional 30%, sehingga memerlukan peningkatan layanan oleh PDAM Tirta Dharma Bantul.

PDAM Bantul memiliki kapasitas terpasang sebesar 60 liter/detik, namun kapasitas produksi baru mencapai 30 liter/detik. Untuk Kecamatan Bantul sebagai pusat pelayanan KSPN Pansela DIY, suplai air dapat memanfaatkan kapasitas eksisting PDAM Bantul sebesar 30 liter/detik hingga tahun 2023. Untuk tahun 2024 dapat memanfaatkan kapasitas *idle* 30 liter/detik dan kapasitas SPAM Kartamantul II sebesar 50 liter/detik. Dengan demikian, suplai air minum Kecamatan Bantul masih dapat terpenuhi hingga tahun 2033. Jika tidak ada penanganan lebih lanjut, maka pada tahun 2034 terdapat defisit suplai air minum Kecamatan Bantul sebesar 8,71 liter/detik.

Sedangkan untuk KTA KSPN Pansela DIY disuplai oleh SPAM IKK Pundong (20 liter/detik) dan SPAM IKK Srandakan (10 liter/detik). Dengan suplai kedua SPAM IKK tersebut, kebutuhan air di KTA masih defisit pada tahun 2022 hingga 2029. Terdapat rencana pembangunan SPAM Kamijoro Bantul berkapasitas 200 liter/detik pada tahun 2028-2029 dan akan mulai fungsional untuk suplai air pada tahun 2030. SPAM Kamijoro akan meningkatkan suplai air di KTA sehingga surplus hingga tahun 2034.

Tabel 7.20 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Air Minum KSPN Pansela DIY Dsk

Pelayanan Air Perpipaan	Proyeksi Kebutuhan							
Deskripsi	Satuan	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Capaian Akses Air Perpipaan	%	35,63%	42,37%	44,62%	46,87%	49,11%	51,36%	75,00%
Baseline Kebutuhan Air	L/org/hari	120	120	120	120	120	120	120
Kebutuhan Air Domestik	L/detik	79,32	98,30	104,95	111,77	118,76	125,91	197,00

Pelayanan Air Perpipaan		Proyeksi Kebutuhan						
Deskripsi	Satuan	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Srandakan		15,56	19,28	20,59	21,92	23,29	24,70	38,64
Sanden		15,68	19,44	20,75	22,10	23,48	24,90	38,95
Kretek		15,35	19,03	20,31	21,63	22,98	24,37	38,13
Bantul		32,72	40,56	43,30	46,11	49,00	51,95	81,28
Kebutuhan Air Nondomestik	L/detik	11,90	14,75	15,74	16,77	17,81	18,89	29,55
Srandakan		2,33	2,89	3,09	3,29	3,49	3,70	5,80
Sanden		2,35	2,92	3,11	3,32	3,52	3,73	5,84
Kretek		2,30	2,85	3,05	3,24	3,45	3,66	5,72
Bantul		4,91	6,08	6,50	6,92	7,35	7,79	12,19
Kebutuhan Air Wisatawan	L/detik	10,96	12,15	13,27	14,48	15,80	17,25	26,71
Srandakan		9,20	10,20	11,13	12,15	13,26	14,47	22,41
Sanden		1,21	1,34	1,46	1,59	1,74	1,90	2,94
Kretek		0,56	0,62	0,67	0,73	0,80	0,87	1,35
Total Kebutuhan Air	L/detik	102,18	125,20	133,96	143,01	152,37	162,05	253,26
Srandakan		27,09	32,37	34,81	37,36	40,05	42,87	66,85
Sanden		19,24	23,69	25,33	27,01	28,74	30,53	47,74
Kretek		18,21	22,50	24,03	25,61	27,23	28,90	45,20
Bantul		37,63	46,64	49,80	53,03	56,35	59,74	93,47
Persentase Kehilangan Air	%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	527%
Faktor Jam Puncak	-	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Kebutuhan Suplai Air (+Kehilangan Air)	L/detik	129,76	159,01	170,13	181,63	193,51	205,80	321,64
Srandakan		34,40	41,11	44,20	47,45	50,86	54,45	84,90
Sanden		24,44	30,09	32,16	34,30	36,51	38,77	60,63
Kretek		23,13	28,57	30,52	32,53	34,59	36,70	57,41
Bantul		47,79	59,24	63,24	67,35	71,56	75,87	118,71
Produksi Air	L/detik	60,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-19,01
Srandakan		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-31,11
Sanden		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-20,09
Kretek		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-18,57
Bantul		30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	50,76
Gap Air Pansela DIY	L/detik	-69,76	-19,01	-30,13	-41,63	-53,51	-65,80	18,36
KTA		-51,97	-69,77	-76,89	-84,28	-91,95	-99,93	27,07
Bantul		-17,79	50,76	46,76	42,65	38,44	34,13	-8,71

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4) Air Minum KSPN Karst Gunungkidul dsk

Layanan air perpipaan Kabupaten Gunungkidul cukup tinggi yakni sebesar 38,65%. Saat ini KSPN Karst Gunungkidul mendapat suplai air bersih dari PDAM Gunungkidul, Pamsimas, dan tangki air di bagian pantai selatan Gunungkidul. Terdapat isu kekeruhan air yang memerlukan penanganan peningkatan kualitas air bersih.

Untuk menyuplai kebutuhan air minum Kabupaten Gunungkidul, dilakukan peningkatan kapasitas IPA Seropan menjadi 200 liter/detik pada tahun 2023, serta terdapat rencana pembangunan SPAM IKK Tanjungsari pada tahun 2025 (100 liter/detik) dan SPAM Banyusoco pada tahun 2027 (30 liter/detik). Dengan kapasitas terpasang tersebut, layanan air perpipaan di Gunungkidul sudah mencukupi hingga tahun 2030 dengan surplus sebesar 39,78 liter/detik. Namun, mulai tahun 2031-

2034, layanan air minum di Gunungkidul defisit dan membutuhkan pasokan tambahan.

Tabel 7.21 Proyeksi Kebutuhan Air Minum KSPN Karst Gunungkidul Dsk

Pelayanan Air Perpipaan di Gunungkidul		Proyeksi Kebutuhan						
Deskripsi	Satuan	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Capaian Akses Air Perpipaan	%	37,82%	47,12%	50,21%	53,31%	56,41%	59,51%	75,01%
Baseline Kebutuhan Air	L/org/hari	120	120	120	120	120	120	120
Kebutuhan Air Domestik	L/detik	193,76	257,68	280,67	304,55	329,34	355,07	498,97
Kebutuhan Air Nondomestik	L/detik	29,06	38,65	42,10	45,68	49,40	53,26	74,85
Kebutuhan Air Wisatawan	L/detik	12,77	14,15	15,10	16,11	17,19	18,34	25,36
Total Kebutuhan Air	L/detik	274,41	362,25	394,27	427,55	462,14	498,07	699,52
Persentase Kehilangan Air	%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	527%
Faktor Jam Puncak	-	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Kebutuhan Suplai Air (+Kehilangan Air)	L/detik	299,20	394,31	429,09	465,25	502,83	541,88	760,95
Produksi Air	L/detik	356,31	592,23	592,23	622,23	622,23	622,23	622,23
Gap Air Gunungkidul	L/detik	57,12	197,92	163,14	156,98	119,40	80,35	-138,72

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Perhitungan Kebutuhan Penanganan Persampahan

Untuk melayani persampahan di KSPN prioritas terdapat dua TPA yaitu TPA Regional Piyungan dan TPA Wukirsari. TPA Regional Piyungan di Kabupaten Bantul melayani KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Prambanan-Kalasan dan KSPN Pansela DIY. TPA Wukirsari di Kabupaten Gunungkidul yang melayani KSPN Karst Gunungkidul. Saat ini kedua TPA tersebut berstatus *overload*.

TPA Regional Piyungan secara resmi ditutup oleh Pemerintah Provinsi DIY pada Maret 2024, sehingga KSPN KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Prambanan-Kalasan dan KSPN Pansela DIY tidak memiliki TPA. Sementara itu, TPA Wukirsari direncanakan akan diperluas dan saat ini sedang dalam penyusunan *readiness criteria*.

Penghitungan kebutuhan dan gap infrastruktur persampahan memperhatikan kemampuan daerah untuk melakukan pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah, serta membandingkannya dengan target pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Perhitungan kebutuhan penanganan persampahan pada tiap-tiap kawasan prioritas dijelaskan sebagai berikut:

1) Penanganan Sampah KSPN Yogyakarta Kota

Timbulan sampah KSPN Yogyakarta Kota dsk terus mengalami peningkatan seiring peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan. Pada tahun 2034 timbulan sampah sudah mencapai 197,68 ton/hari. Capaian pelayanan persampahan di KSPN Yogyakarta Kota dsk di tahun 2022 sebesar 98,38%.

KSPN Yogyakarta Kota dsk awalnya dilayani oleh TPA Regional Piyungan, namun pada tahun 2024 TPA tersebut ditutup dan tidak dapat digunakan lagi. Hal tersebut menyebabkan defisit pengolahan sampah sebesar 364.752,77 m³ pada tahun 2025. Terdapat rencana pembangunan TPST Modalan Bantul dengan kapasitas 520.000 m³ seluas 4,5 ha, sehingga meningkatkan layanan pengelolaan pada tahun 2026. Jika tidak ada penanganan lebih lanjut, maka mulai tahun 2027, layanan pengelolaan persampahan KSPN Yogyakarta Kota dsk mengalami defisit hingga tahun 2034. Berikut rincian perhitungan kebutuhan dan gap persampahan KSPN Yogyakarta Kota dsk.

Tabel 7.22 Proyeksi Kebutuhan Persampahan KSPN Yogyakarta Kota dsk

Deskripsi	Proyeksi Kebutuhan							
	Satuan	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Target Penanganan Sampah	%	70,82	72,51	72,53	72,55	72,57	72,60	72,73
Target Pengurangan Sampah	%	27,56	27,49	27,47	27,45	27,43	27,40	27,27
Target Pengelolaan Sampah	%	98,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Timbunan Sampah Domestik	ton/hari	191,53	191,98	192,13	192,30	192,46	192,63	193,53
Timbunan Sampah Wisatawan	ton/hari	3,43	3,52	3,57	3,63	3,68	3,75	4,15
Sampah Masuk TPA (penduduk)	m ³ /tahun	140.780,5 ₉	144.478,94	144.642,67	144.810,16	144.981,42	145.156,44	146.088,25
	ton/hari	135,63	139,19	139,35	139,51	139,68	139,85	140,74
Sampah Masuk TPA (penduduk+ Wisatawan)	m ³ /tahun	289.089,71	289.888,74	290.196,51	290.515,05	290.845,0 ₉	291.187,44	293.121,79
	ton/hari	194,96	195,50	195,71	195,92	196,14	196,38	197,68
Persentase Sampah Masuk Landfill	%	70	70	70	70	70	70	70
Sampah di Landfill Penduduk	m ³ /tahun	63.351,27	65.015,52	65.089,20	65.164,57	65.241,64	65.320,40	65.739,71
Sampah di Landfill (penduduk+ Wisatawan)	m ³ /tahun	91.063,26	91.314,95	91.411,90	91.512,24	91.616,20	91.724,05	92.333,37
Kapasitas Sisa TPST	m ³	-63.351,27	-256.850,30	198.060,50	132.895,93	67.654,29	2.333,89	-325.509,01
Kapasitas Sisa TPST (penduduk+ Wisatawan)	m ³	-91.063,26	-364.752,77	63.835,33	-27.676,90	-119.293,11	-211.017,15	-671.413,98

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) Penanganan Sampah KSPN Prambanan – Kalasan dsk

Timbunan sampah KSPN Prambanan-Kalasan terus mengalami peningkatan seiring peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan. Pada tahun 2034 timbunan sampah sudah mencapai 2.316 ton/hari. Capaian pelayanan persampahan di KSPN Prambanan-Kalasan di tahun 2022 sebesar 25,56% (Kab. Sleman) dan 24,81% (Kab. Klaten). Namun karena TPA Regional Piyungan sudah ditutup, maka presentase layanan

persampahan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten menjadi defisit mulai tahun 2024-2034. Sejak penutupan TPA Regional Piyungan, pengelolaan sampah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Secara detail perhitungan proyeksi kebutuhan persampahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.23 Proyeksi Kebutuhan Persampahan KSPN Prambanan - Kalasan dsk

KSPN Prambanan - Kalasan		Proyeksi Kebutuhan Penanganan Sampah						
Deskripsi	Satuan	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Timbulan Sampah Penduduk	Ton/Hari	61,89	62,88	63,22	63,56	63,90	64,24	66,01
Timbulan Sampah Wisatawan	Ton/Hari	1.135,67	1.548,37	1.607,94	1.670,84	1.737,45	1.808,26	2.250,17
Timbulan Sampah Penduduk + Wisatawan	Ton/Hari	1.197,56	1.611,25	1.671,16	1.734,40	1.801,35	1.872,51	2.316,19
Timbulan Sampah Penduduk + Wisatawan	m3/tahun	1.775.760	2.389.183	2.478.019	2.571.783	2.671.066	2.776.579	3.434.470
Capaian Pelayanan Sampah								
Sleman	%	25,56	-35,82	-39,23	-42,65	-46,07	-49,49	-70,00
Klaten	%	24,81	-35,24	-38,71	-42,19	-45,67	-49,14	-70,00
Capaian Pengurangan Sampah		29,2	36,3	38,68	41,05	43,42	45,78	60
Sleman	%	5,20	10,92	12,83	14,74	16,65	18,55	30,00
Klaten	%	24,00	25,38	25,85	26,31	26,77	27,23	30,00
Capaian Pengelolaan Sampah								
Sleman	%	30,76	0	0	0	0	0	0
Klaten	%	48,81	0	0	0	0	0	0
Sampah Wajib Ditangani								
KSPN Prambanan-Kalasan	Ton/hari	847,87	1.026,37	1.024,76	1.022,43	1.019,20	1.015,27	926,48

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Penanganan Sampah KSPN Pansela DIY dsk

Timbulan sampah KSPN Pansela DIY terus mengalami peningkatan seiring peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan. Pada tahun 2034 timbulan sampah sudah mencapai 158,38 ton/hari. Capaian pelayanan persampahan di Kabupaten Bantul di tahun 2022 sebesar 13,08%. Namun karena TPA Regional Piyungan sudah ditutup, maka presentase layanan persampahan di Kabupaten Bantul menjadi defisit mulai tahun 2024-2034. Sejak penutupan TPA Regional Piyungan, pengelolaan sampah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Secara detail perhitungan proyeksi kebutuhan persampahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.24 Proyeksi Persampahan KSPN Pansela DIY dsk

KSPN Pansela DIY		Proyeksi Kebutuhan Penanganan Sampah						
Deskripsi	Satuan	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Timbulan Sampah Penduduk	Ton/hari	127,89	132,32	133,83	135,37	136,92	138,50	146,69
Timbulan Sampah Wisatawan	Ton/hari	5,88	6,52	6,96	7,42	7,92	8,45	11,68
Timbulan Sampah Penduduk + Wisatawan	Ton/hari	133,77	138,84	140,79	142,79	144,84	146,95	158,38
Timbulan Sampah Penduduk + Wisatawan	m ³ /hari	543,45	564,04	571,97	580,09	588,43	596,99	643,41
Capaian Pelayanan Sampah	%	13,08	-21,44	-23,52	-25,60	-27,67	-29,74	-40,06
Capaian Pengurangan Sampah	%	28,60	27,65	27,33	27,02	26,72	26,41	24,94
Capaian Pengelolaan Sampah	%	43,78	0	0	0	0	0	0
Sampah Wajib di Tangani	ton/hari	95,51	100,45	102,31	104,21	106,14	108,14	118,88

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4) Penanganan Sampah TPA Wukirsari Gunungkidul

Timbulan sampah KSPN Karst Gunungkidul terus mengalami peningkatan seiring peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan. Pada tahun 2034 timbulan sampah sudah mencapai 816 ton/hari. Capaian pelayanan persampahan di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2022 sebesar 15,47%. Kabupaten Gunungkidul dilayani oleh TPA Wukirsari yang berkapasitas 18.250 m³ dan TPA ini sudah *overload* sejak tahun 2021. Terdapat rencana perluasan TPA seluas 4,5 ha sehingga menambah kapasitas sebesar 608.500 m³ pada tahun 2026. Dengan perluasan TPA, maka pelayanan pengelolaan persampahan di KSPN Karst Gunungkidul masih dapat ditangani hingga tahun 2030. Jika tidak ada penanganan lebih lanjut, maka pelayanan pengelolaan persampahan KSPN Karst Gunungkidul akan defisit mulai tahun 2031 hingga 2034. Berikut rincian perhitungan kebutuhan dan gap persampahan KSPN Karst Gunungkidul.

Tabel 7.24 Proyeksi Kebutuhan dan Gap Persampahan KSPN Karst Gunungkidul

Deskripsi	Satuan	Proyeksi Kebutuhan						
		2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Capaian Penanganan Sampah	%	15,47	22,57	24,91	27,23	29,55	31,85	43,20
Capaian Pengurangan Sampah	%	28,31	26,52	25,94	25,39	24,84	24,30	21,80

RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2025-2034

Deskripsi	Satuan	Proyeksi Kebutuhan						
		2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Capaian Pengelolaan Sampah	%	43,78	49,08	50,85	52,62	54,39	56,16	65,00
Timbulan Sampah Domestik	ton/tahun	619,91	661,77	676,34	691,23	706,45	722,01	805,08
Timbulan Sampah Wisatawan	ton/hari	5,88	6,52	6,96	7,42	7,92	8,45	11,68
Sampah Masuk TPA	ton/hari	95,91	149,35	168,46	188,26	208,76	229,99	347,83
	m ³ /tahun	142.217,76	221.451,53	249.793,09	279.149,27	309.551,01	341.030,12	515.763,69
Sampah Masuk TPA (+Wis)	ton/hari	101,79	155,87	175,42	195,68	216,68	238,44	359,51
	m ³ /tahun	150.938,95	231.120,87	260.109,73	290.156,54	321.295,15	353.560,47	533.088,80
Persentase Sampah Masuk Landfill	%	93,18%	93,18%	70%	70%	70%	70%	70%
Sampah di Landfill	m ³ /tahun	59.634,49	92.858,65	78.684,82	87.932,02	97.508,57	107.424,49	162.465,56
Sampah di Landfill (+Wis)	m ³ /tahun	63.291,44	96.913,18	81.934,56	91.399,31	101.207,97	111.371,55	167.922,97
Kapasitas Sisa TPA Wukirsari	m ³	-59.634,49	-304.197,11	529.815,18	441.883,16	344.374,59	236.950,10	-461.526,81
Kapasitas Sisa TPA Wukirsari (+Wis)	m ³	-63.291,44	-319.610,96	526.565,44	435.166,13	333.958,16	222.586,61	-499.961,23
Kapasitas Sisa TPA Wukirsari Tanpa Perluasan	m ³	-63.291,44	-319.610,96	-428.679,70	-550.347,61	-685.072,51	-833.326,84	-1.795.160,01

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Perhitungan Kebutuhan Penanganan Sanitasi

Saat ini KSPN prioritas di DIY dilayani oleh tiga IPLT dan 1 IPAL yaitu IPLT Wukirsari yang melayani Kabupaten Gunungkidul, IPLT Madurejo yang melayani KSPN Prambanan, serta IPLT Sewon dan IPAL Regional Sewon yang melayani Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Analisa terhadap infrastruktur sanitasi dijelaskan sebagai berikut:

1) Sanitasi KSPN Yogyakarta Kota dsk.

Timbulan lumpur tinja KSPN Yogyakarta Kota dsk terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan. Pada tahun 2034, timbulan lumpur tinja KSPN Yogyakarta Kota dsk mencapai 93 m³/hari. KSPN Yogyakarta Kota dsk dilayani oleh IPLT Sewon yang saat ini telah *overload*, namun masih digunakan hingga saat ini. Dengan demikian, gap pelayanan lumpur tinja di KSPN Yogyakarta Kota dsk sudah defisit sejak tahun 2022 hingga 2034. Berikut rincian perhitungan kebutuhan dan gap pengolahan lumpur tinja KSPN Yogyakarta Kota dsk.

Tabel 7.25 Timbulan Lumpur Tinja KSPN Yogyakarta Kota Dsk

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk		Timbulan Lumpur Tinja (m ³ /hari)			Gap 2020-2029	Gap 2020-2034
	2020		Jiwa/km ²	Jiwa/Ha	2020	2029	2034		
Mantrijeron	33.340	3	12.774	127,7	10,0	13,1	13,2	3,1	3,2
Kraton	17.943	1	12.816	128,2	5,4	7,0	7,0	1,6	1,6
Mergangsan	28.739	2	12.441	124,4	8,6	11,3	11,3	2,6	2,7
Gondokusuman	36.921	4	9.300	93,0	11	14,6	14,7	3,5	3,7
Danurejan	18.670	1	16.973	169,7	5,6	7,3	7,2	1,7	1,7
Pakualaman	9.148	1	14.521	145,2	2,7	3,6	3,6	0,9	0,9
Gondomanan	12.793	1	11.422	114,2	3,8	5	5	1,1	1,1
Ngampilan	15.358	1	18.729	187,3	4,6	6	6	1,4	1,4
Wirobrajan	24.739	2	14.056	140,6	7,4	9,7	9,7	2,3	2,3
Gedongtengen	16.484	1	17.171	171,7	4,9	6,3	6,3	1,4	1,3
Jetis	23.385	2	13.596	136,0	7,0	9,1	9	2,1	2
KSPN Yogyakarta	1.511.825			139,8	71,3	92,9	93	21,7	21,8

*Sumber: Hasil Analisis, 2023***Tabel 7.26 Gap Sanitasi KSPN Yogyakarta Kota Dsk**

Kecamatan	Proyeksi Timbulan Tinja (m ³ /hari)						
	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Mantrijeron	13,05	13,09	13,10	13,11	13,13	13,14	13,20
Kraton	7,01	7,00	6,99	6,99	6,99	6,98	6,96
Mergangsan	11,23	11,24	11,25	11,25	11,26	11,26	11,28
Gondokusuman	14,44	14,52	14,54	14,57	14,60	14,62	14,75
Danurejan	7,29	7,29	7,29	7,28	7,28	7,28	7,27
Pakualaman	3,58	3,58	3,59	5,59	3,59	3,60	3,61
Gondomanan	4,99	4,99	4,98	4,98	4,98	4,97	4,96
Ngampilan	6,00	5,99	5,98	5,98	5,98	5,98	5,96
Wirobrajan	9,67	9,68	9,69	9,69	9,69	9,70	9,72
Gedongtengen	6,42	6,38	6,37	6,36	6,35	6,33	6,27
Jetis	9,12	9,10	9,09	9,08	9,07	9,07	9,03
Timbulan Lumpur Tinja KSPN Yogyakarta	92,80	92,86	92,87	92,89	92,91	92,93	93,03
Kapasitas Sisa IPLT Sewon	0	0	0	0	0	0	0
Gap pelayanan lumpur tinja	-92,80	-92,86	-92,87	-92,89	-92,91	-92,93	-93,03

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Untuk mengelola air limbah di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, terdapat IPAL Regional Sewon yang sudah ditingkatkan pada tahun 2021 dengan kapasitas pengolahan mencapai 52.000 m³/hari. Kapasitas tersebut dapat melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta hingga tahun 2045 dengan penambahan SR sebesar 3.000 SR/tahun.

2) Sanitasi KSPN Prambanan-Kalasan dsk.

Timbulan lumpur tinja KSPN Prambanan-Kalasan dsk terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan. Pada tahun 2034, timbulan lumpur tinja KSPN Prambanan-Kalasan dsk mencapai 29,07

m³/hari. KSPN Prambanan-Kalasan dsk dilayani oleh IPLT Madurejo yang berkapasitas 25 m³/hari dan *overload* sejak tahun 2022 hingga 2024. Terdapat peningkatan kapasitas menjadi 100 m³/hari pada 2023-2024 sehingga masih dapat melayani hingga tahun 2034. Berikut rincian perhitungan kebutuhan dan gap pengolahan lumpur tinja KSPN Prambanan-Kalasan dsk.

Tabel 7.27 Timbulan Lumpur Tinja KSPN Prambanan-Kalasan Dsk

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk		Timbulan Lumpur Tinja (m ³ /hari)	
		2020	Jiwa/km ²	Jiwa/Ha	2029	2034
Prambanan Sleman	53.113	41,4	1284,5	12,8	7,97	14,61
Prambanan Klaten	52.592	24,4	2152,8	21,5	7,89	14,46
KSPN Prambanan	105.705	65,8	3437,2	34,4	15,86	29,07

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.28 Gap Sanitasi KSPN Prambanan - Kalasan Dsk

Kecamatan	Proyeksi Timbulan Tinja (m ³ /hari)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Prambanan Sleman	3,34	4,00	4,66	5,32	5,98	6,64	7,31	7,97	14,61
Prambanan Klaten	0,31	1,39	2,47	3,56	4,64	5,72	6,81	7,89	14,46
Timbulan Tinja	3,64	5,39	7,13	8,88	10,62	12,37	14,11	15,86	29,07
Kapasitas IPLT Madurejo	25	25	100	100	100	100	100	100	100
Gap	-43,63	-52,05	-53,79	82,25	78,76	75,27	71,78	68,29	41,86

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Sanitasi KSPN Pantai Selatan Yogya dsk.

Timbulan lumpur tinja KSPN Pansela DIY dsk terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan. Pada tahun 2034, timbulan lumpur tinja KSPN Pansela DIY dsk mencapai 19,37 m³/hari. KSPN Pansela DIY dsk dilayani oleh IPLT Sewon yang telah *overload*, namun masih digunakan hingga saat ini. Dengan demikian, gap pelayanan lumpur tinja di KSPN Pansela DIY dsk sudah defisit sejak tahun 2022 hingga 2034. Berikut rincian perhitungan kebutuhan dan gap pengolahan lumpur tinja KSPN Pansela DIY dsk.

Tabel 7.29 Timbulan Lumpur Tinja KSPN Pansela DIY dsk

Kecamatan	Penduduk 2021 (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk		Timbulan Lumpur Tinja (m ³ /hari)	
			Jiwa/km ²	Jiwa/Ha	2029	2034
Srandakan	31.003	22,63	1.370,14	13,70	4,65	8,53
Sanden	31.254	22,03	1.418,75	14,19	2,67	2,67
Kretek	30.593	25,27	1.210,84	12,11	2,61	2,61
Bantul	65.215	20,93	3.115,21	31,15	5,57	5,57
KSPN Pansela DIY	158.065	91	7.115	71	15,50	19,37

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.30 Gap Sanitasi KSPN Pansela DIY dsk

Kecamatan	Proyeksi Timbulan Tinja (m ³ /hari)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Srandakan	2,65	2,93	3,22	3,51	3,79	4,08	4,36	4,65	8,53
Sanden	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Kretek	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
Bantul	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Timbulan Tinja	13,49	13,78	14,06	14,35	14,64	14,92	15,21	15,50	19,37
Kapasitas Sisa IPLT Sewon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gap pelayanan lumpur tinja	-13,49	-13,78	-14,06	-14,35	-14,64	-14,92	-15,21	-15,50	-19,37

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4) Sanitasi KSPN Karst Gunungkidul dsk.

Timbulan lumpur tinja KSPN Karst Gunungkidul dsk terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan. Pada tahun 2034, timbulan lumpur tinja KSPN Karst Gunungkidul dsk mencapai 143,3 m³/hari. KSPN Karst Gunungkidul dsk dilayani oleh IPLT Wukirsari dengan kapasitas 20 m³/hari yang hingga saat ini masih terdapat *idle capacity* sebesar 16 m³/hari. Kapasitas *idle* ini disebabkan oleh jumlah lumpur tinja yang masuk ke IPLT Wukirsari baru sebesar 4 m³/hari dari total timbulan lumpur tinja tahun 2022 (106,7 m³/hari). Jumlah ini sangat kecil disebabkan oleh keterbatasan alat angkut layanan lumpur tinja.

Meskipun IPLT Wukirsari dapat beroperasi optimal, masih terdapat defisit pengolahan lumpur tinja sebesar 90,63 m³/hari pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga defisit 123,32 m³/hari pada tahun 2034. Berikut rincian perhitungan kebutuhan dan gap pengolahan lumpur tinja KSPN Karst Gunungkidul dsk.

Tabel 7.31 Timbulan Lumpur Tinja KSPN Karst Gunungkidul dsk.

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk		Timbulan Lumpur Tinja (m ³ /hari)	
		2020	Jiwa/km ²	Jiwa/Ha	2020	2034
Purwosari	20.655	72	287,8	2,9	6,2	7,2
Panggang	28.951	100	290,1	2,9	8,7	11,1
Saptosari	38.323	88	436,3	4,4	11,5	16,4
Tepus	35.251	105	335,9	3,4	10,6	15,1
Tanjungsari	28.178	72	393,4	3,9	8,5	11,7
Girisubo	24.490	95	259,0	2,6	7,3	10,8
Patuk	34.156	72	474,1	4,7	10,2	13,8
Semanu	58.155	108	536,5	5,4	17,4	24,2
Wonosari	87.454	76	1.158,2	11,6	26,2	33
KSPN Karst Gunungkidul	355.613	786	577,9	5,8	106,7	143,3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.32 Gap Sanitasi KSPN Karst Gunungkidul Dsk

Kecamatan	Proyeksi Timbulan Tinja (m ³ /hari)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Purwosari	6,34	6,41	6,48	6,55	6,62	6,69	6,77	6,84	7,23

Kecamatan	Proyeksi Timbulan Tinja (m ³ /hari)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Panggang	8,96	9,12	9,29	9,45	9,62	9,80	9,97	10,15	11,10
Saptosari	11,99	12,30	12,62	12,95	13,29	13,64	14,00	14,37	16,36
Tepus	11,02	11,32	11,62	11,93	12,25	12,58	12,92	13,27	15,16
Tanjungsari	8,78	8,99	9,21	9,43	9,66	9,90	10,14	10,39	11,71
Girisubo	7,67	7,89	8,12	8,35	8,60	8,84	9,10	9,36	10,80
Patuk	10,64	10,87	11,11	11,35	11,59	11,85	12,10	12,36	13,76
Semanu	18,16	18,60	19,06	19,52	20,00	20,48	20,98	21,49	24,24
Wonosari	27,07	27,52	27,98	28,44	28,91	29,39	29,88	30,37	32,97
Timbulan Tinja	110,63	113,03	115,48	117,99	120,56	123,18	125,87	128,62	143,32
Kapasitas IPLT Wukirsari	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Gap	-90,63	-93,03	-95,48	-97,99	-100,56	-103,18	-105,87	-108,62	-123,32

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari kapasitas pengolahan 20 m³/hari, terdapat gap sebesar -123,32 m³/hari pada 2034 jika tidak dilakukan penambahan kapasitas IPLT Wukirsari. Mengingat lokasi KSPN Karst Gunungkidul yang terletak jauh dari IPLT Wukirsari, maka diperlukan instalasi pengolahan limbah setempat untuk menangani timbulan tinja karena aktivitas pariwisata.

7.2 Analisis Keterpaduan Infrastruktur

Analisis keterpaduan infrastruktur merumuskan keterpaduan infrastruktur dalam satu kawasan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pada Bab 5 dengan memperhatikan kaidah urutan fungsi infrastruktur sebagai suatu sistem.

Pada kawasan prioritas KSPN Yogyakarta Kota dsk, keterpaduan infrastruktur wilayah dapat dilihat pada peningkatan pelayanan pariwisata dengan melalui peningkatan layanan dasar melalui optimalisasi SPAM Kartamantul dan IPAL Sewon. Selain itu, juga dilakukan peningkatan pengelolaan sanitasi melalui peningkatan kapasitas IPLT Sewon dan TPA Regional Piyungan. Keterpaduan aksesibilitas kawasan pariwisata dengan Joglosemar diwujudkan melalui pembangunan jalan tol Yogyakarta – Bawen dengan jalan tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo. Konektivitas jalan tol dan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (YIA) memerlukan integrasi penataan simpang exit tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo oleh Kementerian Perhubungan sejalan dengan target penyelesaian tol pada tahun 2025.

Pada kawasan Prambanan, keterpaduan infrastruktur wilayah dapat dilihat pada penyediaan air baku KSPN Prambanan melalui penyediaan air baku Berbah Taman Kalasan sebagai pendukung KSPN Borobudur yang diikuti dengan pembangunan SPAM Berbah dan peningkatan IPLT Madurejo yang ditargetkan selesai pada tahun 2023. IPLT Madurejo

merupakan salah satu penerima manfaat adanya SPAM Berbah untuk meningkatkan fungsi penggelontoran lumpur tinja.

Pada kawasan Pantai Selatan DIY, keterpaduan infrastruktur wilayah dapat dilihat pada peningkatan akses dari Kota Yogyakarta menuju Pantai Selatan melalui ruas jalan Yogya – Bts. Bantul dan pembangunan *ground sill* Sungai Progo untuk memperkuat Jembatan Srandakan II pada 2026-2027, dimana saat ini dasar Sungai Progo mulai mengalami *scouring*.

Pada kawasan Karst Gunungkidul, keterpaduan infrastruktur wilayah dapat dilihat pada upaya penyediaan air bersih melalui Pembangunan SPAM Seropan pada 2023 untuk mengatasi kekeruhan air bersih PDAM. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan ketersediaan air bersih pada 2025-2026 melalui rehabilitasi jaringan air baku Sungai Bawah Tanah Bribin yang mengalami kerusakan pada 2017.

Tabel 7.33 Analisis Keterpaduan Infrastruktur

Kawasan	Tematik	Fungsi	Infrastruktur PUPR					Padu antar-PUPR	Padu Non PUPR
			SDA	BM	CK	PnP			
KSPN Yogyakarta Kota dsk.	Pariwisata	Peningkatan aksesibilitas kawasan	Penerbitan rekomendasi teknis untuk struktur yang melintasi Selokan Mataram	Pembangunan jalan tol Jogja-Bawen	2022-2024			Koordinasi BUJT - BBWS Serayu Opak untuk izin teknis struktur <i>elevated</i> di atas Selokan Mataram	Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan DIY untuk relokasi cagar budaya
			Penerbitan rekomendasi teknis untuk struktur yang melintasi Selokan Mataram	Pembangunan jalan tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	2022-2025			Koordinasi BBWS Serayu Opak - BUJT untuk memastikan tidak ada banjir dan sistem irigasi yang terdampak pembangunan	Koordinasi dengan Balai Konservasi Borobudur dan Dinas Kebudayaan DIY untuk trase wilayah dan cagar budaya DIY
				Peningkatan kapasitas jalan Karangnongko (Bts. Jateng) - Toyan	2024-2025	Pembangunan Gerbang Klangan	2020	DJCK membangun gerbang masuk ikonik menuju DPP Borobudur	Pengelolaan dan pemanfaatan gerbang oleh Pemda Kulon Progo
	Penyediaan air bersih	Pembangunan intake dan jaringan transmisi	2014		SPAM Regional Kartamantul	2014-2022		Pembangunan jaringan distribusi dan rencana penyerapan air bersih oleh PDAM	
					Optimalisasi SPAM Kartamantul I dan II	2025-2034			
	Peningkatan layanan sanitasi aman				Peningkatan kapasitas IPLT Sewon	2025-2026	BSPS	2025-2034	Peningkatan layanan sanitasi melalui APBD/DAK sanitasi
				Optimalisasi IPAL Regional Sewon	2025-2029			Perluasan jaringan sanitasi perpipaan di perkotaan oleh Pemda	
				Peningkatan Kapasitas TPA	2025-2026		Penyediaan TPS3R untuk	Penyediaan lahan dan RC lain oleh	

RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2025-2034

Kawasan	Tematik	Fungsi	Infrastruktur PUPR						PnP	Padu antar-PUPR	Padu Non PUPR
			SDA		BM		CK				
KSPN Prambanan	Pariwisata	Ketahanan bencana					Regional Piyungan <i>green technology</i>			mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA	Pemda, penyediaan truk pengangkut sampah
			Pembangunan Sabodam	2027-2029	Pembangunan jalur mitigasi bencana	2025-2034		Rehabilitasi dan Rekonstruksi i Perumahan dan Infrastruktur Terdampak Bencana	2025-2034	Mitigasi bencana dengan infrastruktur pengendali daya rusak air dan pemulihan bencana berkolaborasi dengan DJP bagi korban terdampak bencana	Penyediaan <i>early warning system</i> untuk mencegah kerugian material dan non-material; pemberian bantuan bagi pemulihan bagi korban bencana
		Peningkatan penyediaan air bersih KSPN Prambanan	Penyediaan Air Baku Berbah Taman Kalasan Pendukung KSPN Borobudur di Prambanan (<i>intake</i> air baku)	2023		Pembangunan SPAM Berbah Peningkatan IPLT Madurejo	2023-2024		Penyediaan air baku Berbah di KSPN Prambanan yang diikuti dengan pembangunan SPAM Berbah dan IPLT Madurejo sebagai salah satu penerima manfaat	Perluasan jaringan SPAM oleh PDAM Kab. Sleman	
		Peningkatan aksesibilitas kawasan	Penerbitan rekomendasi teknis untuk struktur yang melintasi Selokan Mataram	2022	Pembangunan jalan tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	2022-2025			Koordinasi BBWS Serayu Opak - BUJT untuk memastikan tidak ada banjir dan sistem irigasi yang terdampak pembangunan	Koordinasi dengan Balai Konservasi Borobudur dan Dinas Kebudayaan DIY untuk trase yang melewati wilayah dan cagar budaya DIY	
			Penerbitan rekomendasi teknis untuk struktur yang melintasi Selokan Mataram	2022	Pembangunan jalan tol Jogja-Bawen	2022-2024			Koordinasi BUJT - BBWS Serayu Opak untuk izin teknis struktur <i>elevated</i> di atas Selokan Mataram	Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan DIY untuk relokasi cagar budaya	

Kawasan	Tematik	Fungsi	Infrastruktur PUPR						PnP	Padu antar-PUPR	Padu Non PUPR
			SDA		BM		CK				
				Pembangunan jalan Prambanan – Gayamharjo	2023-2025					Sharing pendanaan oleh Pemda menggunakan Danais	Koordinasi peraturan tata ruang mengenai trase jalan yang memerlukan pemerlukan pengeprasan bukit
	Ketahanan Bencana	Pembangunan sabodam Kali Opak	2025 - 2029	Pembangunan jalur evakuasi bencana	2025-2029	Pembangunan infrastruktur permukiman tahan gempa	Rehabilitasi dan Rekonstruks i Perumahan dan Infrastruktur Terdampak Bencana	2025-2034	Mitigasi bencana dengan infrastruktur pengendali daya rusak air dan pemulihan bencana berkolaborasi dengan DJP bagi korban terdampak bencana	Penyediaan <i>early warning system</i> untuk mencegah kerugian material dan non-material; pemberian bantuan bagi pemulihan bagi korban bencana	
	Peningkatan aksesibilitas Jawa bagian selatan	Pembangunan Groundsill Sungai Progo Jembatan Srandakan II	2025 - 2026	Pembangunan Jembatan Srandakan 3 (Jembatan Pandansimo Baru)	2024	2025-2026			Penanganan <i>groundsill</i> Jembatan Srandakan II untuk mempertahankan fungsi Jembatan Srandakan II (akses Yogya-Pansela).		
KSPN Pansela DIY	Pariwisata	Ketahanan bencana	Penanganan banjir muara Sungai Opak	2025 - 2029	Pembangunan JJLS DIY sebagai jalur evakuasi	2014-2024		Rehabilitasi dan Rekonstruks i Perumahan dan Infrastruktur Terdampak Bencana	2025-2034	Pembangunan infrastruktur berketahanan bencana	Penyediaan <i>early warning system</i> untuk mencegah kerugian material dan non-material; pemberian bantuan bagi pemulihan bagi korban bencana
			Pembangunan Pengaman Muara Sungai Progo	2027-2029							
		Penyediaan air bersih	Bendung Kamijoro (<i>intake</i> air baku dan irigasi)	2016-2018			SPAM Regional Kamijoro (IPA Kulon Progo)	2024	Pembangunan intake air bersih oleh DJSDA dan SPAM oleh DJCK	Pembangunan jaringan distribusi dan rencana penyerapan air bersih oleh PDAM	

Kawasan	Tematik	Fungsi	Infrastruktur PUPR					Padu antar-PUPR	Padu Non PUPR		
			SDA		BM		CK			PnP	
KSPN Gunungkidul	Pariwisata	Penyediaan air baku KSPN Gunungkidul					SPAM Regional Kamijoro (IPA Bantul)				
			Rehabilitasi Jaringan Air Baku dari Pemanfaatan Sungai Bawah Tanah (SBT) Bribin	2025 - 2026			Pembangunan IPA Seropan	2023		Penanggungan permasalahan kekeruhan air di SPAM Seropan	Perluasan jaringan SR oleh Pemda
			Rekomendasi desain Jembatan Kretek II yang melintang di atas Sesar Opak Sungai Progo	2020	Pembangunan Jalan Baru Kretek - Girijati	2024			Koordinasi desain dan konstruksi Jembatan melintang di atas Sesar Opak Sungai Progo	Pemanfaatan jembatan sebagai rest area dan ruang terbuka oleh Pemda	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.34 Matriks Keterpaduan Infrastruktur Prioritas Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
1	Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA	Akses 3 bandara utama Yogyakarta a-Solo-Semarang	Penerbitan rekomendasi teknis untuk struktur yang melintasi Selokan Mataram	2022	Pembangunan tol Pembangunan jalan baru Gayamharjo - Prambanan	2022-2025 2023-2025					Koordinasi BBWS Serayu Opak - BUJT untuk menastik an tidak ada banjir dan sistem irigasi yang terdampak banjir	Koordinasi dengan Balai Konservasi Borobudur dan Dinas Kebudayaan DIY untuk trase yang melewati wilayah cagar budaya DIY	
2	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Menyingkat waktu tempuh a-Semarang dari 3 jam menjadi 1,5 jam	Penerbitan rekomendasi teknis untuk struktur <i>elevated</i> yang melintasi Selokan Mataram	2022	Pembangunan tol	2022-2024					Koordinasi BBWS Serayu Opak untuk izin teknis struktur <i>elevated</i> di atas Selokan Mataram	Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan DIY untuk relokasi cagar budaya	
3	SPAM Regional Kamijoro	Penyediaan Air Bersih untuk Aerotropolis YIA	Bendung Kamijoro (<i>Intake</i> air baku dan irigasi)	2016-2018			SPAM Regional Kamijoro (IPA Kulon Progo) SPAM Regional Kamijoro	2024 2027-2028			Pembangunan intake air bersih oleh DJSDA dan SPAM		Pembangunan jaringan distribusi dan rencana penyerapan air bersih

RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2025-2034

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintah
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
4	SPAM Regional Kartamantul	Penyediaan air bersih untuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Pembangunan intake jaringan transmisi	2014			SPAM Regional Kartamantul	2014-2022				oleh DJCK	oleh PDAM
5	Pengembangan KSPN Borobudur Gerbang Klangan	Penanda masuk ikonik KSPN Borobudur					Pembangunan Gerbang Klangan	2020				Pembangunan intake air bersih oleh DJSDA dan SPAM oleh DJCK	Pembangunan jaringan distribusi dan rencana penyerapan air bersih oleh PDAM

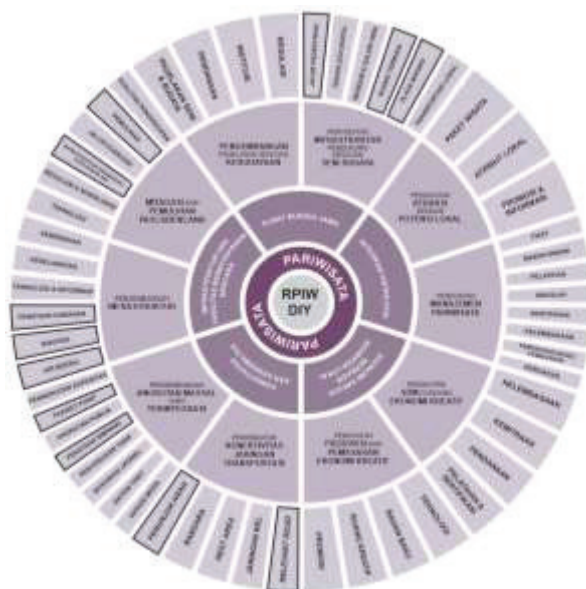
Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 8 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR

Rencana aksi pembangunan infrastruktur merupakan turunan dari *grand strategy* yang dijabarkan ke dalam program pembangunan infrastruktur. Rencana aksi tersebut merupakan pendetailan dari program yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai *stakeholder*, serta dilaksanakan dalam kurun waktu hingga 2034. Rencana aksi pembangunan infrastruktur terpadu lintas sektor akan diuraikan pada sub bab 8.1. Kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi dan pendetailan secara khusus untuk infrastruktur PUPR pada subbab 8.2.

Dalam rencana aksi yang telah dirumuskan, terdapat 1 fokus pengembangan yaitu pariwisata, yang dijabarkan dalam 5 *grand strategy*. Dari 5 *grand strategy* tersebut dirinci menjadi 10 program dan 177 rencana aksi (28 sektor PUPR dan 149 non PUPR yang terdiri dari 89 K/L, serta 60 Pemda dan Swasta).

Rencana aksi keterpaduan infrastruktur PUPR dan Non PUPR menunjukkan bahwa dalam pengembangan wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta (pariwisata) diperlukan keterlibatan dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga lain yaitu sebanyak 15 K/L termasuk Pemda dan dan pihak swasta di wilayah Provinsi DIY. Secara lengkap, ringkasan rencana aksi keterpaduan infrastruktur dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8.1 Rangkuman Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur
Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR

Matriks rencana aksi pembangunan infrastruktur dibawah ini telah mencakup seluruh UNOR lingkup PUPR, yaitu SDA, Jalan dan Jembatan, serta Perumahan dalam masing-masing kawasan prioritas berdasarkan fokus perencanaan

8.1.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rencana aksi pembangunan infrastruktur sumber daya air ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor pariwisata. Matriks rencana aksi infrastruktur sumber daya air dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.1 Rencana Aksi Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambah Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaa n	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	06 - DJSDA	Pembangunan sabodam	KSPN Yogyakarta Kota	Kali Boyong, Kali Opak, Kali Kuning	- Antisipasi pengendalian banjir lahar dingin Merapi ke Kawasan Perkotaan Yogyakarta di aliran Kali Boyong ke kawasan Pogung (Yogyakarta), aliran Kali Kuning ke Purwomartani (Sleman) dan Banguntapan (Bantul). - Berdasarkan hasil reviu Masterplan Merapi 2017, BBW/SSO: - Kali Boyong: baru tersedia 3 sabodam eksisting dan masih	Agar Dipersiapkan		4 unit	60 M	APBN	2025	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaa n	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					dibutuhkan 59 sabodam. - Kali Opak: baru terdapat 6 sabodam dan masih dibutuhkan 19 sabodam. - Kali Kuning: terdapat 19 sabodam dan masih dibutuhkan 2 sabodam.							
					- Antisipasi pengendalian banjir lahar dingin Merapi ke Kawasan Perkotaan Yogyakarta, mengalir ke Purwomartani (Sleman) dan Banguntapan (Bantul).							
2	06 - DJSDA	Pembangunan sabodam Kali Opak	KSPN Prambanan	Kali Opak, Kali Kuning	- Berdasarkan hasil reviu masterplan Merapi 2017 BBWSSO: - Kali Opak: baru terdapat 6 sabodam dan masih dibutuhkan 19 sabodam - Kali Kuning: terdapat 19 sabodam dan masih dibutuhkan 2 sabodam.	Agar Dipersiapkan		5 unit	75 M	APBN	2025	2029
3	06 - DJSDA	Penanganan Banjir di Muara Kali Opak	KSPN Pansela DIY	Kabupaten Bantul	- Terjadi abrasi di muara/hilir Kali Opak berupa	Agar Dipersiapkan		1 km	436 M	APBN	2028	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaa n	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					akumulasi sedimen hulu Merapi dan bagian tengah, sehingga menyebabkan terjadinya banjir di muara sungai. - Terjadi abrasi di muara sungai karena aktivitas penambangan yang merusak mangrove yang meningkatkan kerusakan di sepanjang pantai selatan.							
4	06 - DJSDA	Pembangunan Groundsill Kali Progo (Jembatan Srandakan II)	KSPN Pansela DIY	Kabupaten Bantul	- Berada di Jembatan Srandakan 2 yang menjadi jalur penghubung utama kawasan pariwisata Pantai Selatan DIY dari arah Yogyakarta. - Juga jalur logistik utama Kab. Bantul- Kab. Kulon Progo, dengan jenis kendaraan berat. - Isu: terjadi scouring (gerusan di dasar jembatan), sehingga dikhawatirkan terjadinya kerusakan pada dasar Sungai Progo yang mengakibatkan	DED dalam penyesuaian TA 2023		2 unit	60 M	APBN	2025	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaa n	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					rubuhnya Jembatan Srandakan 2. - Kerusakan pondasi jembatan karena scouring telah terjadi pada Jembatan Srandakan 1 (lokasi bersebelahan), sehingga tidak dapat lagi dilalui kendaraan.							
5	06 - DJSDA	Rehabilitasi Jaringan Air Baku dari Pemanfaatan Sungai Bawah Tanah (SBT) Bribin	KSPN Gunungkidul	Kabupaten Gunungkidul	- Bendung Bribin sebagai sumber air baku Gunungkidul rusak karena Badai Cempaka 2017 dan berakibat pada berkurangnya potensi air baku sebesar 750 Lps untuk PDAM Gunungkidul yang menjadi sumber air baku terbesar. - Kegiatan berupa rehab <i>intake</i>	Desain disusun TA 2020		1 paket kegiatan	50,96 M	APBN	2025	2028
6	06 - DJSDA	Pembangunan Bendungan Tinalah	Non-Kawasan	Kabupaten Kulon Progo	- Menyediakan air baku irigasi melayani 40 persen lahan di Desa Purwoharjo dan 15 persen lahan di Desa Gerbosari - Menyediakan air bersih bagi Desa Wisata Tinalah di Kabupaten Kulon Progo	2025: FS, biaya 2 Miliar 2026: DED Tahap I 6 Miliar 2027: Amdal, LARAP 5,5 Miliar		1 unit	500 M	APBN	2029	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						2028: Sertifikasi 1 Milyar 2029: Konstruksi 500 Milyar						

Sumber: Hasil Analisis dan Diskusi Antar Unor, 2023

8.1.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor pariwisata. Matriks rencana aksi infrastruktur jalan dan jembatan dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.2 Rencana Aksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	04 - DJBM	Peningkatan Kapasitas ruas Jl. Bts. Kota - Pelem Gurih (Gamping)	KSPN Yogyakarta	Kota Yogyakarta	- Jl. Bts. Kota - Pelem Gurih (Gamping) merupakan jalur utama perkotaan Yogyakarta yang saat ini kondisinya mengalami kemacetan (VCR 0,95). - Terdapat rencana pembangunan flyover untuk menangani ruas tersebut, namun dengan alasan kearifan	Agar Dipersiapkan		1, 6 km	18,3 M	APBN	2027	2028

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahkan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volu me	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					lokal, Gubernur DIY mengusulkan agar penanganan dilakukan di ruas jalan kabupaten (Jl. Gamping Tengah) berupa jalan lingkar. - Berdasarkan perhitungan Google Maps, waktu tempuh pada ruas ini adalah 3 jam/100 km (target nasional: 2,2 jam/100 km pada 2029)							
2	04 - DJBM	Peningkatan kapasitas jalan ruas Yogya-Bts. Bantul	KSPN Pansela DIY	Kabupaten Bantul	- Ruas ini merupakan jalur regional yang menghubungkan Perkotaan Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul - Berada di Gapura Bts. Kota Bantul – Pertigaan Cepit Pendowoharjo Sewon - VCR saat ini 0,80 dan akan jenuh (=1) 2029. - Direncanakan dalam rencum jalan berupa penambahan lajur	Agar Dipersiapkan		5,72 km	106,4 M	APBN	2025	2025
3	04 – DJBM	Pembangunan tol Solo-Yogya- Kulon Progo	Provinsi DIY	Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo	- Memperlancar koneksi dan memangkas waktu tempuh menuju YIA - Akan mengurangi beban bangkitan lalu lintas regional di kawasan perkotaan Yogyakarta. - Merupakan PSN - Pembangunan seksi 1 Klaten-Purwomartani	Seksi 1 sedang dalam tahap konstruksi; masih dilakukan proses pembebasan lahan tambahan untuk Seksi 2 dan Seksi 3		96,57 km	27,48 Triliun	KPBU	2023	2026

RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2025-2034

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahkan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volu me	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					dimulai awal 2022. Progres pekerjaan per Agustus 2023 untuk seksi 1 sebesar 53,6%							
					- Jalan tol ini akan mengoneksikan secara langsung Semarang – Yogyakarta - Ruas jalan arteri saat ini sudah sangat padat (VCR >1) karena melintasi pusat perkotaan dan industri. - Merupakan PSN - Akan mendukung pengembangan pariwisata Joglosemar - Pembangunan seksi 1 dimulai awal 2022. - Pembebasan lahan Rp7,36 T dan konstruksi Rp14,26 T	Seksi 1 sudah memasuki tahap konstruksi; terdapat penambahan pembebasan lahan sesuai rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya DIY	76,3 km	21 T	KPBU	2022	2025	
4	04 – DJBM	Pembangunan tol Yogyakarta – Bawen	KSPN Kota Yogyakarta dsk	Kab. Sleman	- Akses menuju kawasan otorita BOB dan Borobudur <i>Highland</i> yang berjarak 12 km dari Candi Borobudur - Pekerjaan termasuk jalan pendekat sepanjang 227 meter	Pembebasan lahan 2023-2024		3,47 km	79,6 M	APBN	2024	2025
5	04 – DJBM	Peningkatan Ruas Jalan Pasar Plono - Kebun Teh Nglnggo	YIA – KSPN Borobudur	Kabupaten Kulon Progo	- Mendukung akses menuju kawasan otorita BOB dan Borobudur <i>Highland</i>	Pembebasan lahan 2023-2024		54 meter	41,9 M	APBN	2024	2025
6	04 – DJBM	Pembangunan Jembatan Bob (Borobudur Highland)	YIA – KSPN Borobudur	Kabupaten Kulon Progo	- Tersambung dengan <i>exit toll</i>/Solo-Yogyakarta Kulon Progo di Kawasan Bokoharjo, Prambanan dan ruas	Masuk dalam Inpres Jalan Daerah 2023 dan usulan Inpres JD 2024		9,08 km	52,28 M	APBN, Danais DIY	2023	2026
7	04 – DJBM	Pembangunan jalan baru Prambanan – Gayamharjo	KSPN Prambanan	Kabupaten Sleman								

RPIW Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2025–2034

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahhan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volu me	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					jalan Tawang-Ngalang Gunungkidul - Didanai dengan APBN sepanjang 1,75 km sesuai Inpres Jalan Daerah 2023 - Mengurangi kepadatan lalu lintas menuju Gunungkidul							

Sumber: Hasil Analisis dan Diskusi Antar Unor, 2023

8.1.3 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Rencana aksi pembangunan infrastruktur permukiman ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor pariwisata. Matriks rencana aksi infrastruktur permukiman dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas dan pemenuhan SPM di Provinsi D.I. Yogyakarta hingga tahun 2029.

Tabel 8.3 Rencana Aksi Infrastruktur Cipta Karya Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	05 - DJCK	Pembanguna n SPAM Kamijoro Kulon Progo	Non- Kawasan (Bandara YIA)	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul	- Menyediakan air bersih bagi Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Termasuk melayani YIA dan Pelabuhan Tanjung Adikarto (Kab. Kulon Progo), serta KI Sentolo dan KI Sedayu - Sudah terbangun bendung dan intake air bersih di Bendung Kamijoro, dengan	Reviu perencanaan SPAM (2023), direncanakan dibangun IPA 100 liter/detik pada 2024		100 liter/detik	270 M	APBN	2024	2025

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					sumber air baku dari Sungai Progo - Kapasitas yang direncanakan sebesar 500 liter/detik, diawali dengan pembangunan IPA sebesar 100 liter/detik untuk melayani Kab. Kulon Progo							
2	05 - DJCK	Pembangunan SPAM Kamijoro (IPA Bantul Selatan)	KSPN Pansela DIY	Kabupaten Bantul	- Melayani Kab. Bantul barat bagian selatan termasuk Pansela - Sudah terbangun bendung dan intake air bersih di Bendung Kamijoro, dengan sumber air baku dari Sungai Progo - Kapasitas yang direncanakan sebesar 200 liter/detik untuk melayani wilayah Bantul	2024 penyesuaian dokumen lingkungan, lahan dan desain belum siap		200 liter/detik	500 M	APBN	2028	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	05 - DJCK	Pembanguna n SPAM Regional Banyusoco	KSPN Gunungkidu I	Kabupaten Gunungkidul	- Direncanakan untuk menyediakan air bersih Gunungkidul sebesar 200 liter/detik - Terdapat dalam RTRW DIY. - Dengan dibangunnya SPAM Regional Banyusoco, air bersih surplus 0,18 liter/detik pada 2029.	Agar Dipersiapkan		200 liter/detik	200 M	APBN	2028	2029
4	05 - DJCK	Optimalisasi SPAM IKK Tanjungsari	KSPN Gunungkidu I	Kabupaten Gunungkidul	- Layanan air perpipaan Gunungkidul 38,65%, melayani kebutuhan air bersih kawasan wisata Pansela Gunungkidul dengan kapasitas produksi 100 lps. - Kawasan Pansela Gunungkidul dilayani PDAM namun saat	Lahan dan dokumen lingkungan siap, terkena refocusing TA 2020		100 liter/detik	60 M	APBN	2026	2026

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					pasokan air tidak lancar, pelaku wisata di sana menggunakan pasokan air tambahan (drop air).							
5	05 - DJCK	Peningkatan Jaringan Distribusi Tersier SPAM Regional Kartamantul	Non-kawasan	Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Sleman	Optimalisasi SPAM Kartamantul melalui ▪ Peningkatan jaringan distribusi ▪ Peningkatan sambungan rumah (SR) - Kapasitas pelayanan akses air minum perpipaan (2020) Kota Yogyakarta 36%, Kab. Bantul 16,82%, dan Kab. Sleman 29,74%. Masih terdapat gap pada Kab. Bantul dan Kab. Sleman untuk memenuhi target 45% pada 2029.	Agar Dipersiapkan		688 liter/detik	101,48 M	APBD	2024	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan an Tambahan n Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Dengan selesainya pembangunan SPAM Kartamantul Tahap II, maka idle capacity SPAM Kartamantul total sebesar 688 liter/detik. - Perlu dilakukan perencanaan jaringan pipa distribusi PDAM Yogyakarta dan penambahan jaringan distribusi PDAM Kab. Bantul dan Kab. Sleman. Serta penambahan sambungan rumah untuk meningkatkan penyerapan pemanfaatan air bersih dari SPAM Kartamantul dan mendukung peningkatan							

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan an Tambah n Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					target penyediaan air bersih 45%.							
					- Usulan Kabupaten Bantul yang masuk dalam AWP ITDP Bidang CK Tahun 2023 - Kapasitas 49 ton/hari melayani Kec. Banguntapan dan Kec. Sewon. - Dibangun di lahan kas desa, sudah mendapat izin dari Gubernur DIY. - Untuk mengantisipasi penutupan TPA Regional Piyungan yang membatasi timbulannya. Sehingga tidak ada yang masuk ke TPA Piyungan. - Berdasarkan perencanaan yang sudah disusun Kab.	Selesai lelang di November 2023, target selesai konstruksi di Agustus/September 2024	1 Kegiatan	7,23 M	Loan	2024	2025	
6	05 - DJCK	Pembangunan TPST Bantul	KSPN Yogyakarta	Kab. Bantul								

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Bantul: potensi timbulan sampah dari Perkotaan Bantul di angka 103 ton/hari. Dari angka ini mereka punya beberapa rencana pengurangan: sebagian masuk ke TPST Modalan Bantul (49 ton/hari) dan sisanya 53,5 ton/hari dikelola di TPS3R di Bantul. Untuk mengurangi timbulan sampah ke Piyungan. Sebelum ada TPST Modalan Bantul ini, 49 ton/hari tersebut langsung masuk ke TPA Piyungan							
7	05 - DJCK	Peningkatan kapasitas TPA Wukirsari	KSPN Gunungkidu l	Kabupaten Gunungkidul	- Pelayanan sampah Gunungkidul sebesar 42,01%	Penyiapan DED Perluasan		4,5 ha	4,05 M	APBN	2026	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Berdasarkan survey di TPA Wukirsari per Januari 2021, timbulan yang masuk 1500 ton/bulan, sehingga diprediksikan akan segera penuh dalam waktu 8 bulan. - Dibutuhkan perluasan TPA, lahan TPA sudah siap sebesar 4,5 Ha. - Hanya terdapat 1 alat berat yang berfungsi. Pada 2029 timbulan sampah penduduk & wisatawan diproyeksikan 416.215,6 m³/tahun. - Perlu didorong peningkatan kapasitas TPA menggunakan sistem 3R di							

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan an Tambah n Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					lokasi TPA untuk memaksimalkan pengurangan residu.							
					- Kondisi saat ini sudah overload dengan timbunan tinja per hari 150 m ³ /hari sedangkan kapasitas hariannya 100 m ³ /hari.							
8	05 - DICK	Peningkatan kapasitas SPALDT Sewon	KSPN Yogyakarta	Kabupaten Bantul	- Gap pengelolaan lumpur tinja di kawasan Perkotaan Yogyakarta sebesar 357,9 m ³ /hari, sehingga diperlukan penambahan kapasitas pengolahan.	Agar Dipersiapkan		1 unit	8 M	APBN	2024	2025
9	05 - DICK	OM Gerbang Klangon	DPP Borobudur	Kabupaten Kulonprogo	- Merupakan satu dari empat gerbang ikonik penanda pintu masuk KSPN Borobudur dari arah YIA	Sudah terlaksana		0,5 ha	7 M	APBD	2025	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan an Tambah n Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Dibangun sebagai perwujudan skenario dekonsentrasi (penyebaran wisatawan agar tidak terkonsentrasi di Candi Borobudur)							
					- Optimalisasi IPAL Regional Sewon - Terdapat gap sebesar -503 liter/detik di 3 kabupaten/kota							
10	05 - DJCK	Peningkatan IPAL Regional Sewon	Non-kawasan	Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Sleman	- Diperlukan kegiatan penambahan jaringan air limbah perpipaan di kawasan perkotaan di 3 kabupaten/kota tersebut	Agar Dipersiapkan		503 liter/detik	955.700	APBD	2025	2029
11	05 - DJCK	Penyelenggaraan Sanitasi Layak Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Non-kawasan	Kab. Kulon Progo	- Optimalisasi IPLT Kulon Progo yang masih mempunyai <i>idle capacity</i> sebesar 25 m ³ /hari melalui	Agar Dipersiapkan		2 unit	160.000	APBD	2025	2027

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan an Tambah an Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Terpusat Skala Kota (Optimalisasi IPLT Kulon Progo)			pengadaan angkutan pengangkut lumpur tinja untuk mendukung pengangkutan lumpur tinja dari rumah warga							
12	05 - DJCK	Penyelenggar aan Sanitasi Layak Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (Optimalisasi IPLT Gunungkidul)	Non- kawasan	Kab. Gunungkidul	Optimalisasi IPL T Gunungkidul yang masih mempunyai <i>idle capacity</i> sebesar 16 m3/hari melalui pengadaan angkutan pengangkut lumpur tinja untuk mendukung pengangkutan lumpur tinja dari rumah warga	Agar Dipersiapkan		2 unit	160.000	APBD	2025	2027
13	05 - DJCK	Penyelenggar aan Sanitasi Layak Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	Non- kawasan	Kab. Kulon Progo	Mendukung peningkatan layanan sanitasi aman di 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY menuju target RPJMN sanitasi aman 35% di 2029 sebesar 4.051 KK	Agar Dipersiapkan		4.051 unit	81,02 M	APBD	2025	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan an Tambah n Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	05 - DJCK	Penyelenggar aan Sanitasi Layak Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	Non- kawasan	Kab. Bantul	Mendukung peningkatan layanan sanitasi aman di 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY menuju target RPJMN sanitasi aman 35% di 2029 sebanyak 11.203 KK	Agar Dipersiapkan		11.203 unit	224,06 M	APBD	2025	2029
15	05 - DJCK	Penyelenggar aan Sanitasi Layak Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	Non- kawasan	Kab. Gunungkidul	Mendukung peningkatan layanan sanitasi aman di 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY menuju target RPJMN sanitasi aman 35% di 2029 sebanyak 9.732 KK	Agar Dipersiapkan		9.732 unit	194,64 M	APBD	2025	2029
16	05 - DJCK	Penyelenggar aan Sanitasi Layak Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	Non- kawasan	Kab. Sleman	Mendukung peningkatan layanan sanitasi aman di 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY menuju target RPJMN sanitasi aman 35% di 2029 sebanyak 16.342 KK	Agar Dipersiapkan		16.342 unit	326,84 M	APBD	2025	2029
17	05 - DJCK	Penyelenggar aan Sanitasi Layak Sistem	Non- kawasan	Kota Yogyakarta	Mendukung peningkatan layanan sanitasi aman di 5	Agar Dipersiapkan		2.490 unit	49,8 M	APBD	2025	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktora t SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu			kabupaten/kota di Provinsi DIY menuju target RPJMN sanitasi aman 35% di 2029 sebanyak 2.490 KK							

Sumber: Hasil Analisis dan Diskusi Antar Unor, 2023

8.1.4 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Rencana aksi pembangunan infrastruktur perumahan ditujukan memenuhi kebutuhan akan perumahan yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan, dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tabel 8.4 Rencana Aksi Infrastruktur Perumahan Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	07 - DJP	Penyediaan hunian layak dan terjangkau	Non-Kawasan	Kab. Kulon Progo	Mendukung penyediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk memenuhi target tahun 2029 sebesar 79% dengan gap sebanyak 13.150 unit kepemilikan rumah.	Agar Disiapkan		13.150	1,315 T	APBN, APBD, Swasta	2025	2029
2	07 - DJP	Penyediaan hunian layak dan terjangkau	Non-Kawasan	Kab. Gunungkidul	Mendukung penyediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk memenuhi target tahun 2029 sebesar 79% dengan gap sebanyak 31.555 unit kepemilikan rumah.	Agar Disiapkan		31.555	631,1 M	APBN, APBD, Swasta	2025	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	07 - DJP	Penyediaan rumah layak huni	Non-Kawasan	Kab. Bantul	Mendukung penyediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk memenuhi target tahun 2029 sebesar 79% dengan gap sebesar 51.595 unit rumah tidak layak huni	Agar Disiapkan		51.955	1,04 T	APBN, APBD	2025	2029
4	07 - DJP	Penyediaan rumah layak huni	Non-Kawasan	Kab. Gunungkidul	Mendukung penyediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk memenuhi target tahun 2029 sebesar 79% dengan gap sebesar 22.618 unit rumah tidak layak huni	Agar Disiapkan		22618	452,36 M	APBN, APBD	2025	2029
5	07 - DJP	Penyediaan rumah layak huni	Non-Kawasan	Kab. Sleman	Mendukung penyediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk memenuhi target tahun 2029 sebesar 79% dengan gap sebesar 73.124	Agar Disiapkan		73124	1,46 T	APBN, APBD	2025	2029

No	Unor	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					unit rumah tidak layak huni							
6	07 - DJP	Penyediaan rumah layak huni	Non-Kawasan	Kota Yogyakarta	Mendukung penyediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk memenuhi target tahun 2029 sebesar 79% dengan gap sebesar 28.741 unit rumah tidak layak huni	Agar Disiapkan		28741	574,82 M	APBN, APBD	2025	2029

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur

Rencana aksi keterpaduan infrastruktur menunjukkan bahwa dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan wilayah Provinsi DIY yaitu sector pariwisata, diperlukan sinkronisasi antarsektor. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan: (1) Penguatan Kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa; (2) Integrasi kegiatan kepariwisataan antar DTW melalui penguatan atraksi dan manajemen pariwisata; (3) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal untuk mendukung industri pariwisata; (4) Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar DTW untuk memperlancar lalu lintas pergerakan wisatawan; dan (5) Pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata yang berkelanjutan dan berketahanan bencana.

Tabel 8.5 Matriks Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
S1-T2-T5 Penguatan Kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa	Pengembangan pagelaran seni dan kebudayaan	Pagelaran Seni & Budaya	Kolaborasi pagelaran seni dan budaya dengan praktisi dan akademisi	Provinsi DIY	KEMENPAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X
			Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tahunan	Provinsi DIY	KEMENPAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X
	Pengembangan pagelaran seni dan kebudayaan	Pagelaran seni & kebudayaan	Perluasan alternatif pembiayaan (CSR, swasta)	Provinsi DIY	BU/SWASTA	TBD	X	X	X	X	X
			Pemberian kemudahan akses pembiayaan dan modal/pinjaman ke pelaku budaya	Provinsi DIY	BU/SWASTA	TBD	X	X	X	X	X
		Pendanaan	Optimalisasi Dana	Provinsi DIY	PEMPROV	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Keistimewaan DIY dalam pembiayaan seni, budaya dan tata ruang								
			Penguatan organisasi/komunitas seni dan budaya sebagai penggerak aktivitas perkotaan	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Penguatan museum dan galeri seni sebagai pusat kegiatan seni dan budaya	Provinsi DIY	SWASTA/KOMUNITAS	TBD	X	X	X	X	X
			Penyebaran informasi seni dan budaya secara masif dalam satu platform digital (sosialisasi/promosi)	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
		Institusi dan regulasi	Pengaturan tata ruang dan desain bangunan/kawasan di kawasan budaya	Provinsi DIY	PEMPROV	TBD	X	X	X	X	X
			Kebijakan perlindungan dan konservasi cagar budaya	Provinsi DIY	KEMENDIKBUDRIS TEK	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
	Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan seni dan kebudayaan		Pelestarian seni dan budaya sebagai identitas lokal dalam kurikulum pendidikan	Provinsi DIY	KEMENDIKBUDRIS TEK	TBD	X	X	X	X	X
			Penyediaan jalur pedestrian di sepanjang koridor budaya untuk fungsi interaksi	KSPN Yogyakarta, KSPN Prambanan	PEMPROV	TBD	X	X	X	X	X
		Jalur Pedestrian	Penataan jalan di koridor budaya dengan material ramah lingkungan	KSPN Yogyakarta, KSPN Prambanan	PEMPROV	TBD	X	X	X	X	X
			Penyeragaman <i>street furniture</i> di koridor budaya	KSPN Yogyakarta, KSPN Prambanan	PEMPROV	TBD	X	X	X	X	X
		Infrastruktur Pendukung	Peningkatan teknologi untuk memantau kondisi dan keamanan cagar budaya (CCTV, drone)	KSPN Yogyakarta, KSPN Prambanan	DISKOMINFO	TBD	X	X	X	X	X
			Pembuatan sarana pelaporan kerusakan situs	KSPN Yogyakarta, KSPN Prambanan, KSPN Karst Gunungkidul	KEMENDIKBUDRIS TEK	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I						
							2025	2026	2027	2028	2029		
			Penyediaan <i>virtual tours</i>	KSPN Yogyakarta, KSPN Prambanan, KSPN Pansela, KSPN Karst Gunungkidul	KEMENPAREKRAF	<i>TBD</i>		X	X	X	X	X	
		Pembuatan perpustakaan digital (buku, manuskrip, dokumen terkait sejarah & budaya Jogja)	Provinsi DIY	ARSIP DAERAH	<i>TBD</i>			X	X	X	X	X	X
		Museum dan galeri seni sebagai kesatuan aktivitas perkotaan	Provinsi DIY	SENIMAN	<i>TBD</i>		X						
		Ruang Terbuka	Penyediaan ruang terbuka sebagai ruang budaya dan <i>landmark</i>	KSPN Yogyakarta, KSPN Prambanan, KSPN Pansela, KSPN Karst Gunungkidul	PEMDA	<i>TBD</i>		X	X	X	X	X	
		<i>Place Making</i>	Penguatan citra penanda ikonik di koridor budaya	KSPN Yogyakarta, KSPN Prambanan	PEMPROV	<i>TBD</i>	X						
			Penyediaan dan standarisasi	KSPN Yogyakarta,	PEMPROV	<i>TBD</i>	X						X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
S4-T3 Integrasi kegiatan kepariwisataan antar DTW	Penguatan Atraksi dengan Potensi Lokal	Pemasaran Produk		penanda arah ruang budaya							
				Penataan kawasan budaya (urban renewal)	PUPR	CIPTA KARYA				X	X
			Transportasi Lokal	Pemanfaatan andong & becak sebagai ikon transportasi lokal kota budaya	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Harmonisasi paket wisata antar destinasi	KEMENPAREKRA F	TBD	X				
			Paket wisata	Pengembangan paket wisata berbasis aktivitas lokal	Provinsi DIY	TBD	X				
				Sinkronisasi pelaksanaan event wisata dan MICE	Provinsi DIY	TBD	X				
				Pembuatan <i>calendar of event</i> dengan ciri khas setiap DTW	Provinsi DIY	TBD	X				
				Harmonisasi event tradisi dengan <i>event</i> tahunan perguruan tinggi	Provinsi DIY	TBD	X				
			Atribut Lokal	Penyeragaman atribut moda transportasi lokal	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X

Grand Strategi	Program	Kebutuhan Infrastruktur		Rencana Aksi	Lokasi Spesifik	K/L/Badan Usaha	Sektor	Tahap I				
								2025	2026	2027	2028	2029
			Penyeragaman atribut pramuwisata	KSPN Yogyakarta	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X	
		Promosi & Informasi	Pemasaran produk lokal di <i>market place</i>	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X	
	Penyediaan pusat pemasaran cinderamata dan produk wisata lainnya		Provinsi DIY	KEMENPAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X		
	Penyediaan pasar kuliner dan cinderamata		Provinsi DIY	KEMENPAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X		
	Penyediaan informasi pelayanan di DTW		Provinsi DIY	KEMENPAREKRAF	TBD			X				
			Penyediaan informasi kondisi perjalanan	Provinsi DIY	AGEN WISATA	TBD	X	X	X	X	X	
			Penyediaan informasi pelayanan akomodasi	Provinsi DIY	SWASTA	TBD	X	X	X	X	X	
Penguatan Manajemen Pengelolaan Pariwisata	Pengelolaan	Tiket	Penjualan tiket secara <i>online</i>	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X	
			Standardisasi harga tiket masuk DTW berbasis <i>online</i>	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X	
		Makan Minum	Standardisasi harga makan minum di DTW	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I									
							2025	2026	2027	2028	2029					
							Pelatihan	Pelatihan dan pendidikan bagi usaha kuliner dan makan minum	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
								Pelatihan pemandu wisata (bahasa dan narasi sejarah)	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
								Pelatihan bagi kelompok wisata	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
							Sekolah	Pendampingan penguatan SDM pelaku wisata bekerja sama dengan perguruan tinggi	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F, PERGURUAN TINGGI	TBD	X	X	X	X	X
Pembangunan sekolah kejuruan pariwisata	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X		X	X							
Sertifikasi	Sertifikasi laik hygiene sanitasi bagi usaha makan minum	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X		X	X	X						
	Percepatan Program Sertifikat CHSE Pariwisata	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X							
	Sertifikasi keselamatan kerja untuk pelaku wisata	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X							
			Sertifikasi daya tarik wisata	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X						

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
							X	X	X	X	X
							X	X	X	X	X
							X	X	X	X	X
		Dukungan Kebijakan	Kelembagaan	Sertifikasi jasa transportasi dan perjalanan wisata	KEMENPAR-AREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
				Sertifikasi jasa penyediaan akomodasi	KEMENPAR-AREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
				Sertifikasi jasa pramuwisata	KEMENPAR-AREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
				Pelibatan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pembentukan paguyuban pelaku wisata	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Fasilitasi dan inisiasi akses pelaku usaha ke sumber pendanaan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Koordinasi diversifikasi produk wisata di setiap DTW	KEMENPAR-AREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
				Koordinasi kelompok dan pelaku wisata di setiap DTW	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Branding atraksi dan produk wisata di level nasional	PEMPROV	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
							X	X	X	X	X
							X	X	X	X	X
							X	X	X	X	X
S3-T3-T5 Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal untuk mendukung industri pariwisata	Penguatan kapasitas SDM di Bidang Ekonomi Kreatif	Penguatan kelembagaan	Dukungan kebijakan dan insentif bagi pelaku wisata	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Manajemen bagi hasil pendapatan wisata	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Penguatan institusi/forum/komunitas seni & kreatif	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Peningkatan Keterlibatan Kelompok Wisata dalam Kalender Event Pariwisata	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Pembentukan Kelompok Wisata sebagai Lembaga Hukum untuk Meningkatkan Akses terhadap Program Pemerintah dan Investasi Swasta	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
		Kemitraan	Penguatan kerja sama institut pendidikan seni & kreatif dengan penyedia kerja (magang)	Provinsi DIY	SWASTA	TBD	X	X	X	X	X
			Penguatan kerja sama Pemerintah dengan forum/komunitas	Provinsi DIY	PEMDA, SENIMAN	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			seni dan pekerja kreatif								
			Penguatan jejaring kerja sama pengusaha dengan pemasok bahan baku	Provinsi DIY	SWASTA	TBD	X	X	X	X	X
			Pembentukan Jaringan Kerjasama antara pelaku usaha dengan brand internasional	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
			Penguatan jejaring dan kerja sama pekerja kreatif dengan penyelenggara event internasional	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
	Pendanaan		Pemberian kemudahan akses pembiayaan dan modal/pinjaman ke pekerja kreatif	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
			Sertifikasi Keahlian untuk Menciptakan Standar Produk Wisata yang Berkualitas	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
			Sertifikasi jasa/badan usaha wisata	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Sertifikasi penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
			Sertifikasi penyelenggaraan pertemuan, insentif, konferensi dan pameran	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
			Sertifikasi jasa konsultan pariwisata	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
Penguatan produksi dan pemasaran ekonomi kreatif	Sarana produksi	Teknologi	Penggunaan teknologi mendukung proses kreatif dan produksi	Provinsi DIY	KEMENPAREKRA F	TBD	X	X	X	X	X
			Penguatan kualitas internet	Provinsi DIY	KEMENKOMINFO	TBD	X	X	X	X	X
			Dukungan perangkat lunak berlisensi	Provinsi DIY	KEMENKOMINFO	TBD	X	X	X	X	X
			Penyediaan akses material/bahan baku kerajinan berkualitas & berstandar ekspor	Provinsi DIY	SWASTA	TBD	X	X	X	X	X
			Pemberian Insentif Penyediaan Barang Modal Berbasis Teknologi	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Peningkatan kualitas bahan baku sesuai standar ekspor	Provinsi DIY	KEMENDAG	TBD	X	X	X	X	X
				Pemanfaatan ruang publik sebagai lokasi pameran/pertunjukan	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Ruang kreatif	Pemanfaatan museum dan galeri seni sebagai ruang kreatif	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
		Sarana Pemasaran		Penciptaan Branding Wisata dan Produk Ekonomi Kreatif	Provinsi DIY	KEMENPAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X
				Sharing konten media sosial yang relevan dengan Brand	Provinsi DIY	KEMENPAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X
			Promosi	Build Up Brand Filter Pemasaran Atraksi Wisata	Provinsi DIY	KEMENPAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Sistem Aplikasi dalam Mendukung Proses Transaksi Pemesanan Produk Industri Kreatif	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
S2-S4-T4 Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar DTW untuk memperlancar lalu lintas pergerakan wisatawan	Peningkatan Konektivitas Jaringan Transportasi	Jaringan Transportasi	Relevant Road	Pembangunan jalan tol Solo-Jogja-Bawen	KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Prambanan	PUPR	BINA MARGA				
				Rehabilitasi Jalan Karangnongko-Toyan	KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Pansela DIY	PUPR	BINA MARGA				
				Pembangunan jalan Prambanan - Gayamharjo - Ngalang - Tawang - Gading	KSPN Prambanan	PUPR	BINA MARGA	X			
				Peningkatan kapasitas jalan Pakem-Prambanan	KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Prambanan	PUPR	BINA MARGA			X	X
				Pembangunan JJLS ruas Kretek - Girijati	KSPN Pansela DIY, KSPN Karst Gunungkidul	PUPR	BINA MARGA	X	X		
				Pembangunan Jembatan Srandakan 3	KSPN Pansela DIY	PUPR	BINA MARGA			X	X
				Pembangunan jalan tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Pansela DIY	PUPR	BUJUT	X			
				Pembangunan jalan tol Yogyakarta - Bawen	KSPN Yogyakarta Kota	PUPR	BUJUT				

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Peningkatan Ruas Jalan Pasar Plono - Kebun Teh Nglinggo	YIA - KSPN Borobudur	PUPR	BINA MARGA					
			Peningkatan kapasitas jalan Sentolo-Milir-Bts. Wates	KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Pansela DIY	PUPR	BINA MARGA					
			Peningkatan kapasitas jalan Jl. Chudori (Wates)	KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Pansela DIY	PUPR	BINA MARGA				X	
			Peningkatan kapasitas jalan Karangnongko (Bts. Jateng) - Toyan	KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Pansela DIY	PUPR	BINA MARGA	X				
			Pembangunan Groundsill Jembatan Srandakan II	KSPN Pansela DIY	PUPR	SDA	X				
			Pengembangan jaringan dan layanan KA Regional Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang)	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X				
			Pengembangan jaringan dan layanan KA Perkotaan Yogyakarta	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X				
			Pengembangan jaringan dan	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD					

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			layanan KA Bandara								
			Peningkatan kapasitas KA melalui elektrifikasi lintas elektrifikasi lintas Kutoarjo-Yogyakarta-Solo	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD					
			Penyediaan tourism transit point di terminal penumpang utama	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD		X	X		
Rest Area			Pembangunan rest area berdekatan dengan exit tol	KSPN Prambanan	PEMDA	TBD	X				
			Pengembangan rest area untuk pemasaran produk lokal	KSPN Prambanan	PEMDA	TBD	X				
			Penyediaan stasiun pengisian energi di rest area	KSPN Prambanan	SWASTA	TBD	X				
			Pembangunan Fasilitas Alih Moda pendukung pariwisata	KSPN Prambanan, KSPN Yogyakarta Kota	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Integrasi simpang YIA dengan exit tol Solo-Yogyakarta Kulon Progo	KSPN Pansela DIY	KEMENHUB, PUPR	TBD	X	X			
		Bandara									

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
								X	X	X	X	X
								X	X	X	X	X
								X	X	X	X	X
				Penambahan variasi moda transportasi umum menuju YIA	KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Prambanan, KSPN Pansela DIY	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Penyediaan angkutan bandara menuju DTW	KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Prambanan, KSPN Pansela DIY, KSPN Gunungkidul	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Standardisasi tarif angkutan bandara menuju DTW	KSPN Yogyakarta Kota, KSPN Prambanan, KSPN Pansela DIY, KSPN Gunungkidul	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Penyediaan Fasilitas Informasi & Perlengkapan Jalan	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Penyediaan Signane Destinasi Tetap dan/atau Temporer	Provinsi DIY	PEMPROV	TBD	X	X	X	X	X
		Way Finding	Penunjuk Arah	Penyediaan peta jalur wisata	Provinsi DIY	PEMPROV	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
	Pengembangan angkutan massal yang terintegrasi	Manajemen Layanan	Variasi Moda	Update rute pariwisata <i>real-time</i>	Provinsi DIY	KEMENKOMINFO	TBD	X	X		
				Optimalisasi fungsi BRT sebagai angkutan wisata	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X
				Pemanfaatan moda transportasi lokal sebagai kendaraan wisata	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X
				Penyediaan sistem ticketing terpadu	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X	X		
				Standardisasi tarif moda transportasi lokal	Provinsi DIY	PEMDA	TBD				
				Penerapan Satu Kartu untuk Semua	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X			
				Transportasi (Sistem Pembayaran Terintegrasi)	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X			
				Pengaturan jadwal keberangkatan transportasi umum berbasis teknologi realtime	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X			
		Jadwal		Integrasi Jadwal Layanan Angkutan Darat	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X			
					Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X			

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
							X				
							X				
			dengan Jadwal Kereta Api dan Pesawat								
			Penentuan Jadwal Angkutan Umum dari Hub Menuju DTW	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X				
			Pemisahan Rute Lalu Lintas Wisata dari Logistik pada saat jam sibuk	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X				
			Penyesuaian tarif angkutan umum	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD					
			Tarif								
			Penataan lalu lintas ruas Bts. Kota – Sp. Jombor (Yogyakarta)	KSPN Yogyakarta	KEMENHUB	TBD	X				
			Penataan lalu lintas ruas Bts. Kota Yogyakarta – Janti (Yogyakarta)	KSPN Yogyakarta	KEMENHUB	TBD	X				
			Penataan lalu lintas ruas Yogyakarta – Bts. Kota Bantul	KSPN Yogyakarta	KEMENHUB	TBD	X				
			Penataan lalu lintas ruas Bts. Kota Sleman – Sp. Jombor	KSPN Yogyakarta	KEMENHUB	TBD	X				
			Pengembangan rute dan trayek BRT	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X				
		Moda Transportasi	Angkutan Publik								

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
S5-T5 Pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata yang berkelanjutan dan berketahanan bencana	Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur Permukiman	Pengembangan fasilitas halte BRT secara merata Penyediaan area parkir di fasilitas transit antarmoda Perluasan jangkauan dan kapasitas transportasi umum	Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X				
				Provinsi DIY	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
			Air Bersih	KSPN Prambanan	PUPR	SDA					
				KSPN Prambanan	PUPR	SDA					
				KSPN Prambanan	PUPR	SDA					
			Sanitasi	Rehabilitasi Jaringan Air Baku dari Pemanfaatan Sungai Bawah Tanah (SBT) Bribin	PUPR	SDA	X	X			
				Pembangunan IPA Seropan	PUPR	CIPTA KARYA					
				Optimalisasi idle capacity IPLT Wukirsari	PEMDA	DLH	X	X	X	X	X
				Pembangunan TPST Tanjungsari	PUPR	CIPTA KARYA		X			
			Peningkatan IPLT Madurejo	KSPN Prambanan	PUPR	CIPTA KARYA					
				KSPN Prambanan	PUPR	CIPTA KARYA					

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
		Penataan Kawasan	Peningkatan kapasitas TPA Wukirsari	KSPN Karst Gunungkidul	PUPR	CIPTA KARYA	X	X			
			Penataan parkir Kawasan Candi Plaosan	KSPN Prambanan	PUPR	CIPTA KARYA	X				
			Penataan kawasan Candi Ratu Boko	KSPN Prambanan	KEMENDIKBUDRIS TEK	TBD		X		X	
			Pemugaran Candi Plaosan	KSPN Prambanan	KEMENDIKBUDRIS TEK	TBD			X	X	X
			Penataan Kampung Wisata Pakualaman	KSPN Yogyakarta Kota	PUPR	CIPTA KARYA	X				
			Penataan Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Code dan Winongo	KSPN Yogyakarta Kota	PUPR	CIPTA KARYA	X				
			Pelestarian kawasan karst	KSPN Karst Gunungkidul	KLHK	TBD	X	X	X	X	X
			Penataan jalur pedestrian dan pengembangan jalur sepeda KTA Prambanan	KSPN Prambanan	PEMDA	TBD		X	X		
			Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo	KSPN Pansela DIY	PEMDA	TBD					X
			Penataan kawasan wisata sepanjang Pantai	KSPN Karst Gunungkidul	PEMPROV	TBD					X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Baron-Drini-Sundak-Wediombo								
			Penataan kawasan Desa Nglanggeran	KSPN Karst Gunungkidul	PEMDA	TBD				X	X
			Penyediaan informasi layanan, jadwal, dan tarif masuk berdasarkan data realtime yang terintegrasi	Provinsi DIY	KEMENKOMINFO	TBD		X	X		
Fasilitas Wisata	Teknologi dan Informasi		Peningkatan kualitas sinyal internet	Provinsi DIY	KEMENKOMINFO	TBD	X	X	X	X	X
			Penyediaan sarana promosi berbasis online	Provinsi DIY	KEMENPAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X
			Penyediaan sarana pembayaran cashless	Provinsi DIY	BUMN	TBD	X	X	X	X	X
			Penyediaan layanan aduan masyarakat online	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Penyediaan fasilitas keselamatan kerja	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
	Keselamatan		Penyediaan jalur evakuasi bencana	Provinsi DIY	BPBD	TBD	X	X	X	X	X
			Penyediaan fasilitas sanitasi	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
	Kebersihan										

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
Mitigasi dan Pemulihan Pascabencana	Pengembangan <i>Early Warning System</i>	Regulasi dan Sosialisasi	dan kebersihan lingkungan								
			Penyediaan toilet umum	Provinsi DIY	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Pengembangan sistem peringatan dini	Provinsi DIY	BNPB	TBD	X	X	X	X	
			Pengembangan teknologi untuk meningkatkan akurasi prediksi bencana	Provinsi DIY	BNPB	TBD	X	X	X	X	X
			Integrasi data dan informasi bencana antar lembaga	Provinsi DIY	BNPB	TBD	X	X	X	X	X
			Pembentukan kelompok dan pelatihan masyarakat sadar bencana	Provinsi DIY	BPBD	TBD	X	X	X	X	X
			Pengembangan riset dan penelitian terkait kebencanaan	Provinsi DIY	BNPB	TBD	X	X	X	X	X
			Penguatan aturan pola pemanfaatan ruang	Provinsi DIY	ATR/BPN	TBD	X	X	X	X	X
			Peningkatan kualitas perundangan dan NSPK dalam penanganan bencana	Provinsi DIY	BNPB	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
							2025	2026	2027	2028	2029
							X				
							X				
										X	X
Infrastruktur Kebencanaan		Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	Masterplan penangan banjir Sungai Opak	Kota Yogyakarta	PUPR	SDA					
			Prasarana pengendali banjir Sungai Opak dan anak sungainya	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman	PUPR	SDA	X				
			Pembangunan sabodam Kali Boyong	Kabupaten Sleman	PUPR	SDA				X	X
			Pembangunan sabodam Kali Kuning	Kabupaten Sleman	PUPR	SDA				X	X
			Pembangunan Pengaman Muara Sungai Progo	KSPN Pansela DIY	PUPR	SDA			X	X	
		Jalur evakuasi	Pembangunan jalur mitigasi bencana	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman	BPBD	TBD	X	X	X	X	X
			Pembangunan titik kumpul di kawasan rawan bencana	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman	BPBD	TBD	X	X	X	X	X
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Infrastruktur	Provinsi DIY	PUPR	PERUMAHAN	X	X	X	X	X
		Pemulihan									

GRAND STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L/BADAN USAHA	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Terdampak Bencana								
				Pendampingan Masyarakat Pemulihan Trauma Pasca Bencana	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman	KEMENSOS	TBD	X	X	X	X	X
		Bantuan Sosial & Ekonomi	Kualitas Penghidupan	Penyaluran Bantuan Pemulihan Lapangan Kerja Guna Meningkatkan Kualitas Penghidupan Masyarakat	Provinsi DIY	KEMENSOS	TBD	X	X	X	X	X

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW

Pada Bab 9 menjelaskan evaluasi pelaksanaan yaitu terkait kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. RPIW. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW digunakan sebagai klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW selanjutnya.

9.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kementerian PUPR dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggunakan pendekatan berdasarkan pengembangan wilayah dalam hal ini disebut dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur dalam hal ini dokumen RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (*living document*).

9.2 Tujuan

Kegiatan pemantauan bertujuan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sementara itu, evaluasi pelaksanaan merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW berdasarkan *output* (infrastruktur terbangun), *outcome* (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), *benefit* (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), *impact* (dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

9.3 Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Jenis pemantauan pelaksanaan RPIW berupa pemantauan tahunan dan lima (5) tahunan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR. Sementara itu, jenis kegiatan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi menjadi evaluasi tahunan (*output* dan *outcome*) dan evaluasi lima (5) tahunan (*benefit*, *impact*, dan keberlanjutan) untuk mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.



www.pu.go.id